BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahdalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor:1425);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

l. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarya Tahun 2013 Nomor 9);

m. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor15);

n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017;

o. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;

p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 tanggal 30 November 2011);

q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 58);

r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2014);

s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);

t. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2015);

u. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

v. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017;

w. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017;

x. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2017 tentang tentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 92);

y. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan.

1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Secara geografis, DIY terletak pada bagian tengah Pulau Jawa, dengan sisi selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan enam kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

1. Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut
2. Kabupaten Wonogiri di sebelah Timur dan Tenggara
3. Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
4. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut
5. Kabupaten Boyolali di sebelah Utara

DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/ kelurahan, dengan perincian:

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa;
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa;

3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/ desa;
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa;
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa.

Gambar 1.1 Peta Administrasi DIY
(Sumber: Bappeda DIY, 2013)

DIY posisinya terletak diantara 7°.33’ - 8°.12’ Lintang Selatan dan 110°.00’- 110°.50’ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²).

Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan wajib meliputi:
   a. Pendidikan
   b. Kesehatan
   c. Pekerjaan Umum
   d. Perumahan
   e. Penataan Ruang
   f. Perencanaan Pembangunan
   g. Perhubungan
   h. Lingkungan Hidup
   i. Pertanahan
   j. Kependudukan dan Catatan Sipil
   k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
   m. Sosial
   n. Ketenagakerjaan
   o. Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah
   p. Penanaman Modal

q. Kebudayaan
r. Kepemudaan dan Olahraga
s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
u. Ketahanan Pangan
v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
w. Komunikasi dan Informatika
x. Perpustakaan

2. Urusan pilihan meliputi:
   a. Pertanian
   b. Kehutanan
   c. Energi dan Sumber Daya Mineral
   d. Pariwisata
   e. Kelautan dan Perikanan

3. Urusan Keistimewaan meliputi:
   a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
   b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
   c. Kebudayaan;
   d. Pertanahan;
   e. Tata Ruang.

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY mengacu pada Perda Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemda DIY terdiri dari 35 OPD sebagai Entitas Akuntansi ditambah dengan PPKD sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Adapun OPD Pemda DIY adalah sebagai berikut:

1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Inspektorat
5.	Satuan Polisi Pamong Praja
	Dinas Daerah:
1.	Dinas Kebudayaan
2.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.	Dinas Kesehatan
5.	Dinas Sosial
6.	Dinas Perhubungan

7.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
8.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.	Dinas Pariwisata
11.	Dinas Pertanian
12.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Lembaga Teknis Daerah:
1.	Badan Kepegawaian Daerah
2.	Badan Pendidikan dan Pelatihan
3.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
4.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
5.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
6.	Badan Lingkungan Hidup
7.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Rumah Sakit Jiwa Grhasia
10.	Rumah Sakit Paru Respira
	Lembaga Lain
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Sekretariat Parampara Praja
3.	Kantor Perwakilan Daerah
4.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap OPD selaku entitas akuntasi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Entitas Pelaporan adalah Pemda DIY yang dilaksanakan oleh PPKD dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1. Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD
- 2.3. Rencana Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
- 3.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Kententuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1. Pendapatan-LRA
  - 5.1.2. Belanja
  - 5.1.3. Transfer
  - 5.1.4. Pembiayaan Netto
- 5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL
- 5.3. Rincian dan Penjelasan Neraca
  - 5.3.1. Aset
  - 5.3.2. Kewajiban
  - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional
  - 5.4.1. Pendapatan-LO
  - 5.4.2. Beban
- 5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas
  - 5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
  - 5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
  - 5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
  - 5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
- 5.7. Peristiwa Setelah Laporan Keuangan

Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Bab VII. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN EKONOMI/KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET EKONOMI APBD

2.1. Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat dicerminkan dengan kondisi perekonomian daerah. Kondisi perekonomian daerah dapat menggambarkan aktivitas-aktivitas yang menopang kehidupan masyarakat setempat. Kondisi tersebut akan mencerminkan sektor-sektor kelompok aktivitas masyarakat yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi. Sementara itu, peningkatan kesejahteraan dalam paradigm ekonomi dicerminkan dengan kenaikan produksi masyarakat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang lalu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Sektor Unggulan

Dalam laporan ini, sektor unggulan didasarkan pada nilai pangsa atau kontribusi sektor terhadap keseluruhan *output* yang dihasilkan dalam perekonomian. Suatu sektor adalah sektor unggulan apabila kontribusi sektor tersebut pada nilai PDRB DIY tergolong besar secara konsisten dari waktu ke waktu. Menurut pembentukan PDRB DIY selama 2013-2017, sektor yang menyumbang pangsa yang relatif besar secara konsisten adalah sektor industri pengolahan yang berkontribusi di atas 13%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (berkisar di atas 10 sampai lebih dari 11%), serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (berkisar antara 9% hingga lebih dari 10%).

Nilai PDRB nominal atau atas dasar harga berlaku di DIY tahun 2017 mencapai 119.172.906 juta rupiah. Nilai PDRB rill atau atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar 92.300.660 juta rupiah. Berdasarkan nilainya dan proporsi pangsa, tiga besar sektor yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di tahun 2017 adalah Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Tabel 2.1. Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016		2017	
		ADH Berlaku	ADH Konstan	ADH Berlaku	ADH Konstan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.456.173	7.779.801	11.933.401	7.930.647
2	Pertambangan dan Penggalian	593.156	473.299	615.943	489.349
3	Industri Pengolahan	14.547.753	11.234.804	15.636.603	11.879.550
4	Pengadaan Listrik dan Gas	141.794	145.910	173.689	151.681
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	114.765	87.268	121.272	90.289
6	Konstruksi	10.286.734	8.250.608	11.303.630	8.822.979
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.332.038	7.367.624	10.241.621	7.788.856
8	Transportasi & Pergudangan	6.251.304	4.750.834	6.783.681	4.976.167

No	Lapangan Usaha	2016		2017	
		ADH Berlaku	ADH Konstan	ADH Berlaku	ADH Konstan
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.255.100	8.274.501	12.304.099	8.788.711
10	Informasi & Komunikasi	8.957.494	9.630.639	9.789.586	10.222.383
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.334.288	3.213.222	4.640.943	3.303.212
12	Real Estat	7.808.289	6.395.209	8.382.668	6.711.295
13	Jasa Perusahaan	1.115.194	1.025.558	1.207.970	1.085.626
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.217.108	6.656.183	10.213.350	6.956.541
15	Jasa Pendidikan	9.013.442	7.672.850	9.711.308	8.099.104
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.759.865	2.310.356	3.004.112	2.445.389
17	Jasa lainnya	2.824.990	2.419.533	3.109.029	2.558.882
PDRB DIY		**110.009.487**	**87.688.200**	**119.172.906**	**92.300.660**

Sumber: BPS DIY, 2018

Tabel 2.2. Perkembangan Kontribusi Sektor terhadap Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku DIY Tahun 2012-2016 (%)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,13	10,52	10,64	10,41	10,01
2	Pertambangan dan Penggalian	0,58	0,58	0,56	0,54	0,52
3	Industri Pengolahan	13,62	13,59	13,11	13,21	13,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,12	0,13	0,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
6	Konstruksi	9,49	9,40	9,37	9,35	9,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,17	8,27	8,22	8,48	8,59
8	Transportasi dan Pergudangan	5,63	5,72	5,68	5,68	5,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,75	10,04	10,24	10,23	10.32
10	Informasi dan Komunikasi	8,92	8,51	8,13	8,14	8,21
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,73	3,88	3,97	3,94	3,89
12	Real Estat	6,85	7,00	7,02	7,10	7,03
13	Jasa Perusahaan	1,01	1,03	1,03	1,01	1.01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,89	8,07	8,26	8,38	8.57
15	Jasa Pendidikan	8,03	8,19	8,48	8,19	8,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,47	2,45	2,52	2,51	2,52
17	Jasa lainnya	2,53	2,53	2,55	2,57	2,61
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS DIY, 2018

a. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri di DIY ditopang oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pada tahun 2017, jumlah IKM di DIY tercatat sebanyak 91.214 unit usaha dan mengalami peningkatan 0.34% jika

dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebanyak 90.906 unit usaha. IKM DIY terdiri dari Industri Pangan, Sandang dan Kulit, Kimia dan Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika, serta Industri Kerajinan. Jika dilihat dari jumlah unit usahanya, Industri Pangan dan Industri Kerajinan merupakan IKM dengan jumlah terbanyak. Sektor industri di DIY mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 342.667 tenaga kerja pada tahun 2017, atau meningkat 2,60% dari tahun 2016 yang menyerap sebanyak 333.980 tenaga kerja. Di bawh ini adalah tabel yang menunjukkan perkembangan IKM di DIY selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.3. Perkembangan IKM di DIY Tahun 2013-2017

IKM	2013	2014	2015	2016	2017
Unit usaha (UU)	84.234	86.087	88.637	90.906	91.214
Tenaga kerja (orang)	310.173	318.858	326.669	333.980	342.667
Nilai investasi (RpJuta)	1.064.180	1.151.443	1.187.754	1.269.897	1.286.414
Nilai produksi (RpJuta)	3.294.485	3.399.909	3.489.769	3.643.222	3.878.575
Nilai bahan baku dan penolong (RpJuta)	1.449.435	1.524.806	1.550.832	1.593.631	1.724.032

Sumber: Disperindag DIY, 2018

IKM DIY mampu menghasilkan Nilai Tambah Produk sebesar Rp2.154.543 Juta pada tahun 2017. Nilai tambah produk tersebut merupakan selisih antara nilai produksi sebesar Rp3.878.575 Juta dengan nilai bahan baku dan bahan penolong sebesar Rp1.724.032 Juta. Nilai Tambah Produk IKM DIY pada tahun 2017 meningkat sekitar 4,87% dibandingkan dengan tahun 2016.

b. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pariwisata adalah salah satu sektor dalam perekonomian DIY yang patut menjadi perhatian karena besaran kontribusinya yang cukup signifikan. Dengan menggunakan pendekatan pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB, sektor ini menempati peringkat ketiga dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2017, yaitu sebesar 10,23%. Pada tahun 2017, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh paling tinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu mencapai 6,21%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan dan banyaknya kegiatan di DIY sepanjang tahun 2017, termasuk kegiatan *Meeting, Incentive, Conference, Exhibition* (MICE).

Perkembangan pariwisata suatu daerah akan berimbas pada percepatan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Hal ini dapat terjadi karena pariwisata menciptakan permintaan, baik permintaan konsumsi maupun permintaan investasi, yang pada akhirnya memunculkan berbagai *multiplier effect* atau efek pengganda dalam bentuk kegiatan produksi barang dan jasa, baik barang konsumsi maupun barang modal.

Tabel 2.4. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Wisman	Jumlah Wisnus	Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari) Wisman	Wisnus
2013	235.888	2.602.074	2.837.962	13.695	1,90	1,59
2014	254.213	3.091.967	3.346.180	12.829	1,95	1,58
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	12.547	2,00	1,95
2017	397.951	4.831.347	5.229.298	13.874	2,13	1,98

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2018, data diolah

Dari data di atas, jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 jumlah wisatawan mencapai 5.229.298 orang atau meningkat sebesar 14,94% dibanding tahun 2016 sebesar 4.549.574 orang, dengan rincian pada tahun 2017 wisatawan nusantara sebanyak 4.831.347 orang (naik 637.086 orang atau 15,18%) dibanding tahun 2016 yang sebanyak 4.194.261. Sementara jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2017 adalah sebesar 397.951 orang atau meningkat sebesar 12.01% dibanding tahun 2016 sebesar 355.313 orang.

c. Sektor Pertanian

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian tahun 2015-2019 akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak hanya untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan, dan lain sebagainya) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan *Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur*.

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian untuk meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan periode 2015-2019 untuk sub sektor tanaman pangan adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka peningkatan surplus beras agar kemandirian pangan nasional dapat terjaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal.

1) Tanaman Pangan

Pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas dari kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu ketahanan pangan dan

kedaulatan pangan. Sub sektor pertanian yang berperan sangat strategis adalah sub sektor tanaman pangan, yang meliputi tanaman padi dan palawija yang memiliki peranan penting dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2.5. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan DIY Tahun 2016-2017

No	Komoditas	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2016	2017*	2016	2017*	2016	2017*
1	Padi Sawah	116.133	114.385	61,33	59,28	712.282	678.081
2	Padi Ladang	41.952	44.433	40,62	45,59	170.417	202.576
	Padi	158.085	158.818	55,84	55,45	882.699	880.657
3	Jagung	65.632	62.521	47,27	49,87	310.257	311.764
4	Kedelai	12.990	6.533	12,85	13,25	16.677	8.656
5	Kacang Tanah	63.128	68.083	12,01	11,74	75.816	79.907
6	Kacang Hijau	461	519	6,27	5,80	289	301
7	Ubi Kayu	52.850	54.204	173,26	189,23	915.667	1.025.779
8	Ubi Jalar	244	313	133,44	169,14	3.256	5.289
9	Sorghum	178	96	3,15	3,15	56	31

*Keterangan: * Angka Sementara 2017*
Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Produksi padi total tahun 2017 turun sebesar 2.042 ton (-0,23%) dari tahun 2016. Penurunan ini disumbang oleh produksi padi sawah yang mengalami penurunan luas panen, produktivitas, dan hasil produksi di tahun 2017. Luas panen padi sawah mengalami penurunan sebesar 1.748 ha (-1,51%), produktivitas menurun sebesar 2,05 ku/ha (-3,34%), dan produksi menurun sebesar 34.201 ton (-4,80%) dikarenakan dua hal yaitu terjadinya banjir besar akibat badai Cempaka di bulan November 2017 yang menggenangi kawasan lahan pertanian padi di kawasan Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo sehingga menyebabkan lahan mengalami puso, intensitas hujan tinggi juga mengganggu penyerbukan dan pengisian bulir (banyak bulir hampa). Luas panen padi total mengalami peningkatan sebesar 733 ha (0,46%) dikarenakan peningkatan luas padi ladang sebesar 2.481 ha (5,91%). Padi ladang mengalami kenaikan produktivitas padi ladang sebesar 4,97 ku/ha (12,24%) dari tahun 2016. Kenaikan luas panen dan produktivitas ini menyebabkan peningkatan produksi padi ladang sebesar 32.159 ton (18,87%).

Luas panen jagung tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3.111 ton (-4,74%) dari tahun 2016 dan produktivitas naik sebesar 2,60 ku/ha (5,50%). Meskipun luas panen jagung mengalami penurunan namun peningkatan produktivitas menyebabkan terjadinya peningkatan produksi sebesar 1.507 ton (0,49%). Peningkatan produksi jagung juga didukung dengan penggunaan benih jagung hibrida oleh petani dan teknologi budidaya yang baik di semua kabupaten.

Produksi tanaman kedelai tahun 2017 mengalami penurunan produksi sebesar 8.021 ton (-48,10%) seiring menurunnya luas panen sebesar 6.457 ha (-49,71%) yang disebabkan antara lain rendahnya nilai ekonomis kedelai sehingga minat petani untuk menanam kedelai menurun dan sebagian besar petani beralih ke padi dan sebagian jagung.

Peningkatan ditunjukkan oleh produksi umbi-umbian, dimana ubi kayu mengalami peningkatan luas panen sebesar 1.354 ha (2,56%), produktivitas naik sebesar 15,97 ku/ha

(9,22%) sehingga produksi ubi kayu naik sebesar 110.112 ton (12,03%) menjadi 1.025.779 ton di tahun 2017. Ubi jalar mengalami peningkatan luas panen sebesar 69 ha (28,28%) dan produktivitas naik sebesar 35,70 ku/ha (26,75%) sehingga mengalami peningkatan produksi sebesar 2.033 ton (62,44%) menjadi 5.289 ton di tahun 2017.

2) Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan memiliki keunggulan komparatif, kooperatif, dan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam kiprah pembangunan daerah di masa depan. Potensi kelautan dan perikanan DIY meliputi wilayah pesisir, laut dan darat. Dengan panjang pantai dari Gunungkidul sampai dengan Kulon Progo kurang lebih 113 km dan potensi ikan di perairan selatan Jawa yang dapat dihasilkan secara lestari mencapai kurang lebih 320.600 ton per tahun. Potensi lestari untuk Samudra Hindia di WPPNRI 573 sebesar 929.330 ton per tahun (Permen KP Nomor 47/Kepmen-KP/2016).

Dilihat dari potensi yang ada tersebut seharusnya meletakan sektor kelautan dan perikanan manjadi salah satu sektor riil yang potensial di DIY. Keadaan ini tentu memerlukan pengelolaan yang baik sehingga dapat berkontribusi optimal dalam perekonomian daerah khsusnya di Wilayah Selatan DIY. Mengalihkan pusat pertumbuhan ekonomi dari Wilayah Pantura ke Pantai Selatan (Pansela) dengan mengembangkan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di perdesaan, serta industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), menjadi pilihan strategis yang harus diwujudkan.

Dengan menggunakan strategi budaya: membalik paradigma '*among tani*' menjadi '*dagang layar*', Daerah IstimewaYogyakarta dapat membangun peradaban barunya yang unggul melalui pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*). Konsekuensinya, Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang.

Produksi perikanan budidaya yang sebagian besar dihasilkan dari budidaya di kolam masih mendominasi Jumlah produksi perikanan di DIY. Produksi perikanan budidaya juga didukung oleh perikanan budidaya di tambak, sawah (mina padi dan UGADI), jaring apung, karamba dan telaga. Produksi perikanan budidaya terus meningkat, melalui intensifikasi dan ektensifikasi. Peningkatan tersebut juga didukung dengan adanya kemajuan teknologi perikanan budidaya serta minat masyarakat yang juga meningkat. Upaya untuk meningkatkan produksi dan menjamin keamanan pangan hasil perikanan budidaya telah dilakukan dengan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB). Komoditas unggulan perikanan budidaya di DIY yaitu ikan lele, nila, gurami, mas, udang galah, udang vaname, ikan hias. Upaya-upaya meningkatkan kualitas induk ikan nila, ikan mas dan ikan tawes telah dilakukan dengan dirilisnya ikan nila merah NILASA, ikan mas merah NAJAWA dan Ikan tawes JOIS.

Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut didukung dengan optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng. Di sisi lain, produksi perikanan tangkap juga didukung oleh komoditas perikanan tangkap yang berasal dari perairan umum daratan seperti: sungai, embung, waduk maupun genangan air lainnya. Dukungan sarpras untuk peningkatan produksi perikanan tangkap terlihat dengan adanya penambahan jumlah kapal.

Tabel 2.6. Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2016-2017 (Unit)

Ukuran Kapal	2016	2017
<10 GT	433	436
≥10 GT	52	54

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017

Peningkatan jumlah kapal di DIY diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap. Di sisi lain, operasionalisasi kapal masih mengalami sejumlah tantangan yaitu kesiapan SDM yang belum mampu mengoperasionalkan kapal secara mandiri. Upaya peningkatan kapasitas nelayan DIY adalah dengan melakukan pelatihan dan pemagangan, serta pendampingan oleh awak kapal dari luar daerah.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menunjukkan laju pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tahun 2012 hingga tahun 2017 yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan yaitu sebesar 11,37%.

3) Hortikultura

Komoditas unggulan DIY antara lain cabai, bawang merah, salak, pisang, biofarmaka, dan tanaman hias. Tidak hanya kuantitas, kualitas atau nilai tambah produk hortikultura mulai mendapat perhatian dari masyarakat. Hal ini terkait dengan upaya-upaya pemerintah dalam hal: 1) pelestarian lingkungan, 2) penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, 3) menarik investasi skala kecil dan menengah, 4) pengendalian ketersediaan dan pasokan untuk menjaga inflasi dan stabilisasi harga komoditas strategis (cabai merah dan bawang merah), serta 5) peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan produk Hortikultura (buah, sayur, dan tanaman obat). Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan bibit dan sarana penunjang.

Tabel 2.7. Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura di DIY Tahun 2016-2017

No	Komoditas	Luas Panen/Jumlah Tanaman yang Menghasilkan			Produksi		
		Satuan	2016	2017*	Satuan	2016	2017*
1	Cabai besar	ha	2.873	3.579	Ton	23.487	29.321
2	Cabai rawit	ha	900	1.355	Ton	3.276	8.172
3	Bawang merah	ha	1.031	1.422	Ton	8.898	9.028
4	Salak	rumpun	5.301.071	2.827.317	Ton	74.215	37.913
5	Pisang	rumpun	1.139.478	958.629	Ton	52.416	40.921
6	Jahe	m^2	2.492.500	2.554.362	Ton	4.985	8.542
7	Aglaonema	m^2	16.340	14.053	Pohon	35.889	108.706

*Keterangan * Angka Sementara 2017*
Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Komoditas seperti cabai besar, cabai rawit, bawang merah, pisang, dan jahe di DIY mengalami peningkatan luas panen. Cabai besar mengalami peningkatan sebanyak 706 ha atau 24,57%, cabai rawit sebesar 455 ha atau 50,55%, bawang merah sebanyak 391 ha atau 37,92%, dan jahe sebesar 61.682 m^2 atau 2,48%. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya bantuan pemerintah dalam bentuk pembiayaan dan pelatihan dalam rangka

pengembangan kawasan sentra produksi komoditas hortikultura unggulan. Peningkatan luas panen komoditas tersebut berbanding lurus dengan peningkatan nilai produksinya. Produksi cabai besar mengalami peningkatan sebesar 5.834 ton (24,84%), cabe rawit meningkat 4.896 (149,45%), bawang merah meningkat sebesar 130 ton (1,46%), dan jahe meningkat sebesar 3.557 ton (71,35%).

Tiga komoditas lainnya seperti pisang, salak dan aglaonema mengalami penurunan luas panen atau tanaman produktif. Pada komoditas pisang, jumlah tanaman yang menghasilkan mengalami penurunan sebesar 180.849 rumpun (-15,87%) dan pada komoditas salak mengalami penurunan sebesar 2.473.754 rumpun (-46,67%). Penurunan jumlah tanaman yang menghasilkan bagi dua komoditas ini yaitu pisang dan salak berbanding lurus dengan penurunan hasil produksi. Produksi pisang menurun 36.302 ton (-48,91%) dan salak menurun 11.495 (-21,93%). Penurunan angka tanaman yang menghasilkan dan produksi ini dikarenakan curah hujan tinggi dan badai Cempaka di bulan November-Desember 2017 sehingga sebagian besar tanaman pisang terendam air dan menjadikan batang pohon pisang menjadi busuk. Penurunan jumlah tanaman yang menghasilkan dan produksi salak diakibatkan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2016 sehingga menyebabkan lonjakan produksi di tahun 2016 yang sangat signifikan dibanding tahun 2017, untuk angka produksi salak di tahun 2017 ini sebenarnya merupakan angka produksi standar. Berbeda dengan jahe yang mengalami peningkatan produksi sebesar 3.557 ton atau 71,35% akibat adanya pengembangan TOGA (tanaman obat keluarga) di lahan pekarangan dan pemanfaatan kembali sisa bantuan tahun 2015. Komoditas tanaman hias yang mengalami peningkatan produksi adalah *aglaonema*, sebesar 72.817 pohon atau 202,90%. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan produktivitas sebesar 251,82%, perawatan komoditas ini termasuk mudah, bibit yang digunakan berkualitas baik, biaya produksi dan operasional mudah dan murah, serta terjadinya peningkatan *trend* pasar akan permintaan *aglaonema*.

4) Perkebunan

Sub sektor perkebunan di DIY dikembangkan dengan pendekatan komoditas dan *cluster*/ kawasan. Komoditas yang menjadi unggulan di DIY adalah kelapa, kakao, kopi, jambu mete, dan tebu, sedangkan komoditas non unggulan diantaranya adalah mendong, tembakau rakyat, nilam, dan cengkeh.

Luas lahan perkebunan di DIY tahun 2017 mencapai 67.290,704 ha. Luasan tersebut tersebar di 4 Kabupaten di DIY dengan Kabupaten Kulon Progo menjadi sentra produksi komoditas kelapa, kopi, kakao dan nilam. Kabupaten Gunungkidul sebagai sentra jambu mete, kelapa dan kakao. Sedangkan komoditas tembakau, mendong dan tebu banyak terdapat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Tabel 2.8. Produksi 5 Komoditas Uggulan Perkebunan DIY Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Produksi (ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kelapa	55.752,71	53.775,40	58.725,92	54.606,52	47,318.93
2.	Kopi	1.073,09	865,23	766,00	584,67	2.933,75
3.	Jambu mete	260,63	452,36	567,90	421,29	277,78
4.	Kakao	1.124,10	1.597,67	2.540,79	1.608,96	1.896,12
5.	Tebu	15.960,80	14.896,78	11.251,80	10.206,37	7.988,90
	Jumlah	**74.171,33**	**71.587,44**	**73.852,41**	**67.427,81**	**60.415,48**

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2018 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan produksi sebesar 7.012,33 ton. Hal ini disebabkan antara lain karena cuaca yang cukup ekstrem, salah satunya terjadinya badai Cempaka di akhir tahun 2017. Kegiatan perkebunan di DIY juga turut mendukung sektor pariwisata. Salah satunya adalah perkebunan teh di Kabupaten Kulon Progo. Selain menghasilkan daun teh untuk bahan olahan teh hitam maupun teh hijau oleh PT. Pagilaran dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Menoreh Jaya, lokasi ini juga dijadikan sebagai obyek wisata dengan menjual atraksi/jasa lingkungan.

5) Peternakan

Subsektor peternakan di DIY tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota. Komoditas unggulan DIY pada subsektor peternakan yakni Sapi potong, Sapi perah, Kambing dan Itik. Gabungan dari ketiga jenis tersebut menyumbang hingga 99% populasi peternakan di DIY. Capaian populasi komoditas unggulan subsektor peternakan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Populasi Ternak di DIY Tahun 2016-2017

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2016	2017*
1.	Sapi Potong	304.450	309.960
2.	Sapi Perah	4.045	4.003
3.	Kambing	395.895	401.219
4.	Itik	509.246	496.196

*Keterangan: * Angka Sementara 2017*
Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Sapi potong merupakan komoditas strategis peternakan. Hal tersebut dikarenakan sapi potong memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Terjaminnya pasar untuk sapi potong baik untuk diternakkan, untuk konsumsi atau ritual keagamaan membuat komoditas sapi potong senantiasa menjadi pilihan peternak untuk dibudidayakan.

Kawasan sapi potong di DIY berada di Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengembangan kawasan tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.43/Kpts/PD.410/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional. Kabupaten Gunungkidul selain sebagai kawasan sapi potong juga menjadi wilayah sumber bibit ternak terutama jenis Sapi Peranakan Ongole (PO). Penetapan tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.48/Kpts/SR.120/1/2015

tentang Wilayah Sumber Bibit Sapi Peranakan Ongole (PO) di kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Populasi sapi potong di DIY pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016. Kenaikan populasi sapi potong tahun 2017 adalah sebesar 5.510 ekor atau meningkat 1,81%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya program upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) tahun 2017 dan sosialisasi larangan pemotongan betina produktif. Program tersebut berdampak pada peningkatan angka kelahiran sapi. Program tersebut turut didukung dengan adanya penanganan gangguan reproduksi yang membantu peternak agar ternak segera bisa untuk dilakukan Inseminasi Buatan (IB). Faktor lain yang turut andil yakni harga riil sapi potong dan sapi bibit cukup tinggi. Hal tersebut meningkatkan gairah peternak untuk mengembangkan budidaya sapi potong.

Populasi sapi perah tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 42 ekor (-1,04%) dibandingkan tahun 2016. Populasi peternakan yang bersentra di Kabupaten Sleman menurun dikarenakan geliat pengembangan sapi perah yang juga cenderung menurun. Hal itu didorong faktor kebutuhan modal usaha yang lebih besar dibandingkan dengan usaha sapi potong maupun ternak lain. Selain itu, masuknya produk susu dari luar daerah berimbas pada pelaku usaha yang menggeluti bidang lain.

Populasi kambing meningkat 5.324 ekor dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pada tahun 2017 sebesar 1,35% dibandingkan tahun 2016 pada komoditas yang bersentra di Kabupaten Kulon Progo (terutama kambing PE) dan Kabupaten Gunungkidul. Dari segi ekonomi, pasar daging kambing yang meningkat tersebut berpengaruh pada berkembangnya usaha kuliner berbahan dasar kambing. Hal tersebut turut mendorong animo peternak untuk berpacu dalam peningkatan budidaya kambing. Faktor yang lain yakni daging kambing sebagai alternatif pengganti daging ruminansia besar namun dengan harga yang relatif lebih murah.

Populasi itik pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 13.050 ekor dibandingkan tahun 2016. Komoditas peternakan yang berpusat di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman tersebut mengalami penurunan 2,56%. Penyebab penurunan jumlah tersebut adalah harga ongkos produksi (pakan) yang tinggi serta persaingan harga dari luar daerah sehingga sebagian peternak itik beralih ke usaha yang lain. Selain itu, terjadi kasus *Newcastle Disease* (ND) atau penyakit tetelo yang sempat terjadi pada bulan Oktober dan tertinggi pada bulan Desember ditambah perubahan cuaca yang mengakibatkan kematian unggas.

6) Kehutanan

Sektor kehutanan di DIY cukup memberikan sumbangan positif bagi pertumbuhan ekonomi DIY. Beberapa kegiatan sektor kehutanan yang menjadi kewenangan Pemda DIY diantaranya adalah produksi minyak kayu putih, produksi kayu, dan wisata alam.

Produksi minyak kayu putih selama tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 13.050 liter dibandingkan tahun 2016. Jumlah produksi ini sudah sesuai dengan taksasi yang dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) dan tidak ada kendala berarti di lapangan sehingga produksi minyak kayu putih dapat optimal.

Tabel 2.10. Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2013-2017

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2013	47.633	44.669	7.330.657.000
2014	47.633	47.641	9.973.126.000
2015	43.785	43.825	8.374.957.500
2016	43.785	31.247	5.311.990.000
2017	44.285	44.297	8.420.859.700

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2018

Produksi kayu di DIY mengalami penurunan sebesar 56,81 m^3 dari 177,81 m^3 di tahun 2016 menjadi 121,46 m^3 di tahun 2017. Jumlah produksi ini berasal dari tebangan terencana sebanyak 97,27 m^3, kayu hasil sitaan barang bukti serta kayu roboh akibat bencana alam sebesar 24,19 m^3.

Wisata alam di kawasan hutan DIY turut memberikan sumbangan positif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Blok hutan lindung yang telah dimanfaatkan adalah pemanfaatan Usaha Jasa Lingkungan wisata alam di Resor Pemangku Hutan (RPH) Mangunan, Bagian Daerah Hutan (BDH) Kulon Progo-Bantul, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta. Pemanfaatan hutan lindung ini dilakukan melalui kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Koperasi Noto Wono yang dituangkan dalam Perjanjian kerjasama. Tujuan perjanjian ini adalah optimalisasi usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam untuk memperoleh manfaat ekologi, ekonomi dan sosial bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Luas areal objek kerja sama usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam adalah seluas 29,4 ha. Pendapatan yang selanjutnya disetorkan sebagai PAD dari sektor ini mencapai Rp1.962.831.125,-yang terdiri dari karcis masuk, parkir, dan kegiatan lainnya. Jumlah pendapatan tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp38.400.000,-.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DIY tumbuh dengan baik meskipun pertumbuhannya fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,49%, dan setelah itu mengalami penurunan sampai tahun 2015 menjadi 4,94%. Pertumbuhan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 5,26%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang tumbuh sebesar 5,05 persen. Berikut ini adalah gambar pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir.

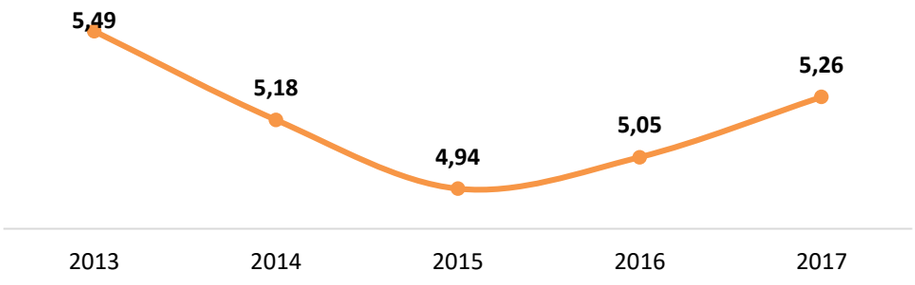

Gambar 2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2013-2017 (%)
Sumber: BPS DIY 2018

Semua kategori usaha tumbuh positif, dan pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi, yaitu sebesar 6,94 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,21 persen, dan informasi dan komunikasi sebesar 6,14 persen.

Kinerja pertumbuhan beberapa sektor pembentuk PDRB tahun 2016 mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2016 meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Dari keseluruhan sektor, beberapa tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Transportasi dan Perdagangan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Informasi dan Komunikasi.

Tabel 2.11. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (%)

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,26	-2,10	2,60	1,46	1,94
2	Pertambangan dan Penggalian	3,92	2,11	0,12	0,42	3,39
3	Industri Pengolahan	6,87	3,82	1,75	5,07	5,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,22	3,53	(1,32)	14,26	3,96
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,95	3,91	2,90	2,36	3,46
6	Konstruksi	4,94	5,65	4,24	5,42	6,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,26	5,69	6,19	6,09	5,72
8	Transportasi dan Pergudangan	6,10	3,80	3,73	4,61	4,74
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7,13	6,79	5,77	5,51	6,21
10	Informasi dan Komunikasi	6,22	6,13	5,11	8,32	6,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,90	7,89	8,27	4,98	2,80
12	Real Estat	4,01	7,77	6,45	5,14	4,94
13	Jasa Perusahaan	3,27	7,61	7,31	3,43	5,86
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,94	5,90	5,18	5,57	4,51
15	Jasa Pendidikan	4,58	7,91	7,28	3,07	5,56
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,00	7,65	7,15	4,52	5,84
17	Jasa lainnya	4,86	5,29	8,00	5,70	5,76
	DIY	**5,49**	**5,18**	**4,94**	**5,05**	**5,26**

Sumber: BPS DIY, 2018

Pada 2016 dan 2017, kontributor terbesar adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 adalah 81.688.214 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau 55.533.017 juta rupiah atas dasar harga tahun 2010. Pada tahun 2017, pengeluaran konsumsi tumbuh sebesar 5,55%. Kontributor terendah adalah pembentukan Perubahan Inventori dengan nilai sebesar 1.368.184juta rupiah atas dasar harga berlaku atau 1.066.314 juta rupiah atas dasar harga konstan tahun 2010.

Tabel 2.12. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2017

No	Komponen Pengeluaran	2016		2017		
		ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	Laju Pertum-buhan (%)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	74.429.796	52.614.164	81.688.214	55.533.017	5,55
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.220.070	2.362.344	3.756.395	2.589.250	9,61
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18.441.761	12.987.746	20.063.072	13.384.559	3,06
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	33.428.978	23.616.948	37.147.936	24.791.862	4,97
5	Perubahan Inventori	1.295.788	1.045.164	1.368.184	1.066.314	2,02
6	Ekspor Luar Negeri	6.495.282	4.400.889	7.436.959	4.808.527	9,26
7	Impor Luar Negeri	5.922.732	4.492.511	6.540.719	4.905.222	9,19
8	Net Ekspor Antar-Daerah	(21.384.456)	(4.851.544)	(25.747.135)	(4.967.647)	2,39
	PDRB DIY	**110.009.487**	**87.688.200**	**119.172.906**	**92.300.660**	**5,26**

Sumber: BPS DIY 2018

Menurut kewilayahan, terjadi variasi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta adalah dua wilayah yang mencapai pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2013 – 2016. Pada tahun 2016, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mencapai pertumbuhan masing-masing 5,25% dan 5,11%. Pada tahun tersebut, wilayah yang mencapai pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 4,76%.

Tabel 2.13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2013-2016

Kab/Kota	Tahun			
	2013	2014	2015*	2016**
Kulonprogo	4.87	4.57	4.62	4.76
Bantul	5.46	5.04	4.97	5.86
Gunungkidul	4.97	4.54	4.82	4.89
Sleman	5.89	5.3	5.18	5.25
Yogyakarta	5.47	5.28	5.09	5.11

*Keterangan: * angka sementara*
*** angka sangat sementara*
Sumber: BPS DIY 2017

Nilai PDRB ADHB per kapita di DIY selama tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilainya mencapai 31,68 juta rupiah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang besarnya 29,59 juta rupiah.

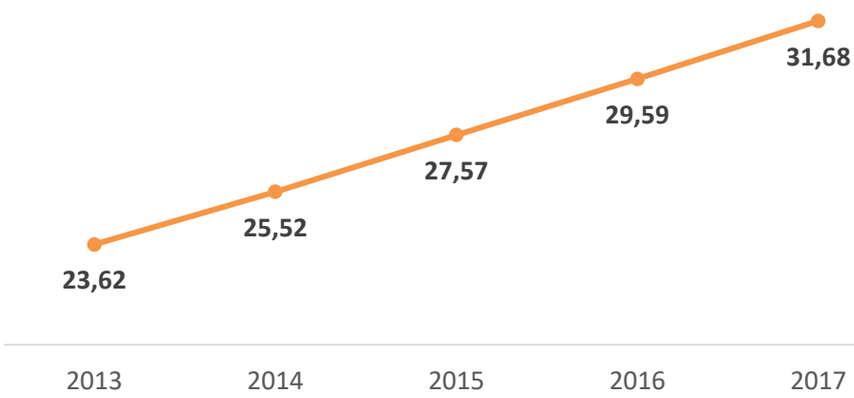

Gambar 2.2. Nilai PDRB Per Kapita DIY Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)
Sumber: BPS DIY 2018 dan diolah sendiri

Pada tahun 2017, laju inflasi di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan setelah ada kecenderungan menurun pada tahun 2013 sampai 2016. Di bawah ini menunjukkan laju inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2013 sampai dengan 2017.

Tabel 2.14. Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Umum	7,32	6,59	3,09	2,29	4,20
1	Bahan Makanan	12,31	7,7	4,64	4,77	2,71
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	8,15	2,95	5,04	3,84	2,79
3	Perumahan, Air,Listrik, Gas dan Bahan Bakar	5,18	8,92	4,41	1,64	5,63
4	Sandang	0	3,61	5,87	3,04	3,84
5	Kesehatan	3,08	5,49	4,21	4,17	2,76
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	3,17	2,37	1,36	2,40	2,81
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	10,45	9,36	-2,51	-2,06	6,72

Sumber: BPS DIY, 2018

Pada tahun 2017 inflasi sebesar 4,20% lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2016, yaitu 2,29%. Penyumbang terbesar laju inflasi 2017 berasal dari kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yaitu sebesar 6,72%.

2.2. Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

2.2.1. Visi dan Misi Jangka Panjang

2.2.1.1. Visi Jangka Panjang

Cita-cita untuk *Mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera* merupakan visi pembangunan DIY pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (RPJPD DIY 2005-2025) yang akan dicapai tujuh tahun mendatang. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka, pada tahun 2025 diharapkan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan

berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama dan didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu.

Adapun sebagai pusat budaya terkemuka, DIY dirancang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Hal tersebut mendapat penguatan dengan implementasi kewenangan Urusan Kebudayaan sesuai UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai daerah tujuan wisata terkemuka, DIY dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata yang diminati dari berbagai penjuru baik nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai moralitas.

Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Tingkat kemandirian masyarakat dipengaruhi pula oleh kemajuan masyarakat. Kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

Upaya mewujudkan visi dengan mengarusutamakan pendekatan pembangunan yang memiliki fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup warga DIY (*people-centered development*) melalui pembangunan di semua sektor secara sinergis dan bertahap hingga terwujud masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

2.2.1.2. Misi Jangka Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta menempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
4. Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

2.2.2. Filosofi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

2.2.2.1. Dasar Filosofi

Pembangunan DIY dilandasi oleh filosofi *adiluhung* yang menjadi panutan kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berakar pada nilai budaya yang berkelanjutan. Esensi nilai budaya Jawa –berupa keseluruhan *cipta, karsa dan rasa*– diyakini masyarakat DIY sebagai tatanan dan acuan hidup bermasyarakat untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang ***gumregah*** dengan kondisi ***gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, urip-urup, kerta raharja***. Tatanan masyarakat DIY tersebut bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh kerja keras, penuh kedamaian, inklusif, saling menghargai, dan penuh daya kreativitas-inovatif.

Filosofi dalam pembangunan daerah DIY dalam konteks keistimewaan Yogyakarta mendudukkan pada enam nilai dasar budaya. Enam nilai dasar budaya tersebut anta lain *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal* dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara. Enam nilai dasar tersebut menjadi rujukan deskriptif dan preskriptif yang dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.

Hamemayu Hayuning Bawana bermakna keseimbangan relasi antara manusia dan alam semesta. Istilah Bawana dipahami sebagai sesuatu yang secara fisik dapat ditangkap oleh panca indra (*tangible)* dan sesuatu yang tidak nampak serta subtil (*intangible*). Bawana memiliki dimensi badan/fisik/*wadag* manusiawi (*bawana alit)* dan alam semesta (*bawana ageng*). Sehingga dalam pemahamannya, konsep ini memiliki kapasitas luas sebagai pedoman hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang lebih luas (negara). Konsep luhur ini mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sangkan Paraning Dumadi dimulai dari keyakinan bahwa Tuhan merupakan asal-muasal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia berasal dan kelak akan kembali kepada Tuhan *(mulih mula mulanira)*. Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya *(jagad gedhé; makro kosmos)*, termasuk manusia *(jagad cilik; mikro kosmos)*, dengan keagungan cinta kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun *(tan kena kinaya apa)*. Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan bersifat sementara *(owah gingsir ing kanyatan, mobah mosiking kahanan)*, bahkan manusia hidup di dunia hanyalah sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk meneguk air *(urip iku bebasan mung mampir ngombé)*, sedangkan Tuhan merupakan Kenyataan Sejati *(Kasunyatan Jati)* yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal maupun tiada berakhir.

Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan berjenjang derajatnya. Namun demikian, semua tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni). Kekacauan pada satu satuan kenyataan (unit realitas) akan mengguncangkan seluruh tatanan alam semesta (kosmos). Manunggaling Tuhan dengan Manusia akan mengakibatkan ketenteraman.

Konsep ini menjadi inspirasi *Manunggaling Kawula lan Gusti* yang berdimensi vertikal dan horizontal. *Manunggaling Kawula Gusti* dapat dimaknai dari sisi kepemimpinan yang merakyat dan disisi lain dapat dimaknai sebagai *piwulang* simbol ketataruangan. *Manunggaling Kawula Gusti* memberikan pengertian bahwa manusia secara sadar harus mengedepankan niat baik secara tulus ikhlas dalam kehidupannya. Dalam hal kepemimpinan, makna *Manunggaling Kawula Gusti* adalah mampu memahami dan sadar kapan kita memimpin dan kapan kita dipimpin. Ketika memimpin harus mementingkan kepentingan yang dipimpin, sedang pada saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin.

Tekad Sri Sultan HB IX, “Tahta Untuk Rakyat” dari segi maknanya tidak dapat dipisahkan dari konsep *Manunggaling Kawula Gusti*, karena keduanya menyandang semangat yang sama, yakni keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat, antara Kraton dan Rakyat. Sri Sultan HB

X sebagai raja dan penerus Kasultanan Yogyakarta meneguhkan kembali tekad Tahta Bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat, wujud komitmen Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan selalu membela kepentingan rakyat, dengan berusaha untuk bersama rakyat, dan memihak rakyat. Tahta Untuk Rakyat harus dipahami dalam konteks keberpihakan Kraton terhadap rakyat dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Oleh karena itu, Tahta Untuk Rakyat juga harus dipahami sebagai penyikapan Kraton yang diungkapkan dengan bahasa sederhana *Hamangku, Hamengku, Hamengkoni*. Dengan demikian, Tahta Untuk Rakyat menegaskan hubungan dan keberpihakan Kraton terhadap Rakyat, sebagaimana tertuang dalam konsep filosofis *Manunggaling Kawula Gusti*. Keberadaan Kraton senantiasa ada karena adanya rakyat, sementara rakyat memerlukan dukungan Kraton agar terhindar dari eksploitasi yang bersumber dari ketidakadilan dan keterpurukan. Kraton tidak akan ragu memperlihatkan keberpihakan terhadap Rakyat, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa-masa dulu.

Falsafah *Golong Gilig* merupakan konsep pemikiran yang awalnya berperan untuk memberikan spirit perjuangan melawan penindasan. Konsep ini melambangkan menyatunya cipta, rasa dan karsa yang dengan tulus ikhlas untuk memohon hidayah kepada Tuhan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu juga melambangkan persatuan dan kesatuan antara pemimpin dengan yang dipimpin atau *Manunggaling Kawula-Gusti*.

Sawiji, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan konsentrasi harus diarahkan ke tujuan atau visi itu. *Greget*, bermakna dinamik dan semangat yang harus disalurkan melalui jalan Allah SWT dan diarahkan ke tujuan melalui saluran yang wajar. *Sengguh*, bermakna kebanggaan dan kepercayaan penuh pada pribadinya untuk mencapai tujuan namun tidak disertai kesombongan. *Ora Mingkuh*, bermakna bertanggung jawab menghadapi halangan dan kesulitan yang timbul dalam perjalanan menuju ke tujuan (cita-cita). Konsep di atas menyandang makna mengenai kesatupaduan antara komunitas, etos kerja, keteguhan hati, dan tanggungjawab sosial untuk membangun bangsa dan negara dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Catur Gatra Tunggal merupakan filosofi dan juga konsep dasar pembentukan inti kota. *Catur Gatra Tunggal* yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas kraton, masjid, alun-alun, dan pasar merupakan elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dengan perkataan lain, apabila elemen-elemen inti kota tersebut diabaikan, maka inti keistimewaan Yogyakarta secara tata ruang fisik akan terabaikan juga. Konsep ini tidak lepas dari keberadaan sumbu imajiner Gunung Merapi-Laut Selatan. Yogyakarta adalah kota yang mengambil rujukan tema *perennial* (abadi) berupa alam (gunung-laut) dan kemudian membangun filosofi *humanism metaphoric* di atasnya.

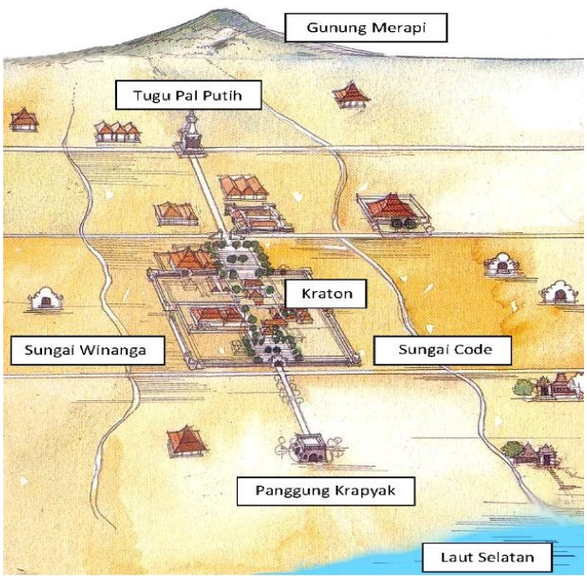

Gambar 2.3. Sumbu Imajiner dan Sumbu Filosofi Yogyakarta

Keberadaan sumbu imajiner dari Gunung Merapi-Laut Selatan dan sumbu filosofis antara Tugu-Kraton-Panggung Krapyak telah menghamparkan *cultural landscape* (pusaka saujana). Ilustrasi sumbu imajiner dan sumbu filosofis dapat dideskripsikan sebagai mana gambar di atas.

Pathok Negara, adalah salah satu konsep penting yang memberikan nilai keistimewaan tata ruang DIY, yang tidak hanya sekedar ditandai dengan dibangunnya empat sosok masjid bersejarah (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan, dan Dongkelan), melainkan juga memberikan tuntunan teritori spasial yang di dalamnya secara implisit menyandang nilai pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan agama Islam, dan tentu saja pengembangan pengaruh politik kasultanan. Secara spasial, *Pathok Negara* telah membangkitkan satuan-satuan permukiman baru yang terus berkembang sampai saat ini.

Masjid *Pathok Negara* yang tersebar di empat penjuru pinggiran Kota Yogyakarta, berfungsi sebagai benteng pertahanan secara sosial kemasyarakatan. Hal ini dimungkinkan karena kawasan masjid-masjid *Pathok Negara* tersebut berfungsi sebagai kawasan keagamaan sekaligus kawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Para ulama yang berada di Masjid *Pathok Negara* adalah para ahli di bidang agama dan perekonomian. Pengaruh sosial yang buruk dari luar dapat ditangkal oleh kawasan-kawasan tersebut, selaku garda depan terhadap anasir-anasir asing.

Secara ringkas, *Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga), maupun dalam skala lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Secara filosofis, konsepsual dan substansial *Hamemayu Hayuning Bawana* sejalan dengan konsep *sustainable development, sustainable human development,* dan *empowerment*. Demikian juga halnya dengan konsep Takhta Untuk Rakyat dan *Manunggaling Kawulo Gusti* sejalan dengan konsep-konsep demokrasi dan partisipatori. Konsep *Pathok Nagara* sejalan dengan konsep *green belt* dalam pembangunan kota modern. Konsep *Catur Gatra Tunggal* dan Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota Teokrasi di Eropa yang dibangun pada abad pertengahan yang menyimbolkan *centrum* dan identitas dan sampai saat ini masih dirawat dengan sangat baik sehingga menjadi bagian penting bagi kegiatan pariwisata. Konsep *Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh*, sejalan dengan spirit atau semangat *Bushido* (menekankan kesederhanaan, kesetiaan, kekuatan, dan kehormatan) telah menjadi acuan mental manusia Jepang moderen dalam membangun negara dan bangsanya.

2.2.2.2. Visi

Berangkat dari pemahaman filosofis, berpijak Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY, dan memperhatikan dan perkembangan lingkungan strategis untuk mewujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang *adiluhung* maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 dapat dipaparkan sebagai berikut:

"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih ***berkarakter***, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya

berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang ***berbudaya*** dimaknai bahwa budaya lokal memiliki ketahanan dalam menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal *(local wisdom)* dan keunggulan lokal *(local genius)*. Berbudaya juga dimaknai sebagai proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesis budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang ***maju*** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi terjadinya peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar-penduduk dan menurunnya ketimpangan antar-wilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang ***mandiri*** adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya *(self-help)*, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. Masyarakat sipil yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuk wilayah masyarakat secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara.

Lebih lanjut, Daerah Istimewa Yogyakarta yang ***sejahtera*** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan, sedangkan ***Menyongsong Peradaban Baru*** dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta *adiluhung*.

2.2.2.3. Misi

Misi dicanangkan sebagai implementasi mengenai upaya mewujudkan visi. Misi memberikan pedoman, arah, sekaligus batasan dalam proses pencapaian tujuan. Untuk itu, untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Misi membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dipandang sebagai misi yang utama dalam mewujudkan *jalma manungsa kang utama* atau pembangunan yang berpusat kepada manusia dan kemanusiaan. Untuk itu, misi ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai budaya. Misi diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai budaya untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, misi ini dipijak untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

Misi menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatan daya saing pariwisata dan sektor riil yang mendorong produktivitas, guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar rakyat lebih diperankan sebagai subyek pembangunan yang produktif, inovatif, berdaya saing, dan kreatif, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mampu menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan pembangunan dan menurunkan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif pada era persaingan global.

Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimaknai sebagai misi yang difokuskan untuk mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Perwujudan itu ke arah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi memantapkan prasarana dan sarana daerah, diartikan sebagai misi yang diemban dalam upaya meningkatkan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhannnya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui prasarana dan sarana daerah yang memadai dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Untuk itu, penyediaan layanan publik yang berkualitas menjadi *urgent* untuk menemukenali ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

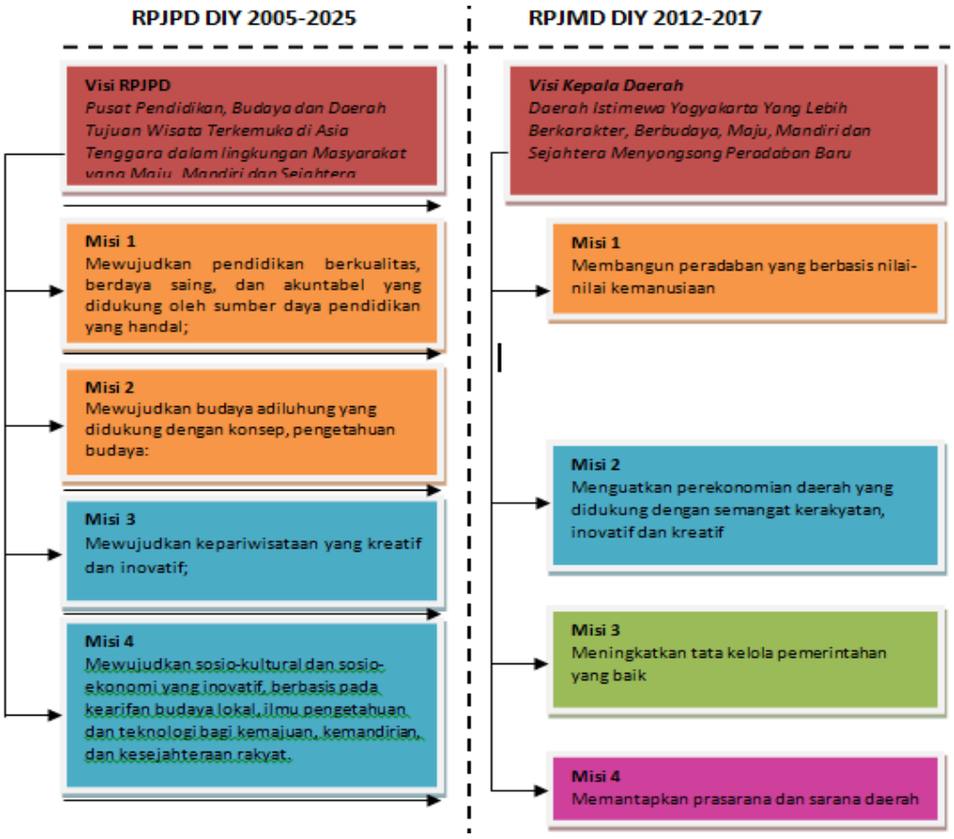

Gambar 2.4. Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD
Sumber: RPJMD DIY 2012-2017 Review Kedua

2.2.2.4. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi pembangunan jangka menengah untuk periode 2012-2017, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15. Tujuan yang hendak dicapai

Misi 1: **Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan**	Tujuan: a. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya; b. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter; c. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup.
Misi 2: **Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif**	Tujuan: a. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. b. Mewujudkan peningatan daya saing pariwisata.
Misi 3: **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik**	Tujuan: Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif
Misi 4: **Memantapkan prasarana dan sarana daerah**	Tujuan: a. Mewujudkan pelayanan publik. b. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

2.2.2.5. Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah 2012-2017 tersebut, maka sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut,berikut indikator kinerja pembangunan di DIY:

Tabel 2.16. Indikator Kinerja Pembangunan di DIY

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan	Mewujudkan peningkatan Pengetahuan budaya, pelestarian dan pengem-bangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.	Peran serta & apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.
	Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter.	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.
		Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.
		Daya saing pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.
	Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka Harapan Hidup.
Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan per kapita per tahun
		Ketimpangan antar-wilayah menurun	Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah.
		Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan.
	Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.	Kunjungan wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara meningkat	Jumlah wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara
		Lama tinggal wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara meningkat	Lama tinggal wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini pemeriksaan BPK.
Memantapkan prasarana dan sarana daerah	Mewujudkan peningkatkan pelayanan publik.	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di perdesaan	Load factor angkutan perkotaan meningkat.
	Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Persentase peningkatankualitas lingkungan.
		Pemanfaatan Ruang terkendali	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/ Kota dan RTRW Provinsi meningkat.

2.2.3. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2012-2017

2.2.3.1. Strategi

Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi dapat dideskripsikan pertautan antara misi RPJMD DIY 2012-2017 dan strategi untuk mencapai misi sebagai berikut,

Tabel 2.17. Misi dan Strategi RPJMD DIY 2012-2017

Misi	Strategi
Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan	Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan;
	Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat;
	Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin’
	Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur;
	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.
Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan;
	Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif;
	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata;
	Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat;
	Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar-pelaku wisata;
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel;
	Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Memantapkan prasarana dan sarana daerah	Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar-wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
	Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan;
	Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.2.3.2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasionalkan sebagai penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 2.18. Visi, Misi dan Arah Kebijakan Daerah

Misi	Strategi	Arah Kebijakan Daerah
Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan	Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan	Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya;
	Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat;	Meningkatkan Angka Melek Huruf
	Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin’	Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah, dan peningkatan Daya Saing Pendidikan;
	Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur;	Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya;
	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.	Meningkatkan Angka Harapan Hidup.
Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan;	Meningkatkan pendapatan per kapita per tahun;
	Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif;	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah;
	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata;	Mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita mayarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan;
	Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat;	Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuhkembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan jumlah wisatawan mancanegara;
	Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar-pelaku wisata;	Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan lama tinggal wisatawan mancanegara
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel;	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

Misi	Strategi	Arah Kebijakan Daerah
	Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.	Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Memantapkan prasarana dan sarana daerah	Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar-wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;	Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai load factor angkutan perkotaan dan peningkatan akses di perdesaan;
	Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan;	Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan;
	Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi.

2.2. Kebijakan Umum dan Strategi serta Prioritas APBD

2.2.1. Tema Pembangunan Daerah

Di dalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini tema pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 (RKPD DIY Tahun 2017) disusun dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal tersebut, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Selain kedua dokumen tersebut, perumusan tema pembangunan daerah dalam RKPD DIY Tahun 2017 mempertimbangkan tematik pembangunan sebagai dasar perumusan. Berikut penjabaran dari perumusan tema pembangunan RKPD DIY Tahun 2017:

1. **Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2017**

   Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017merupakan bagian dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan ke-5 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Hal itu dapat digambarkan dalam ilustrasi di bawah ini.

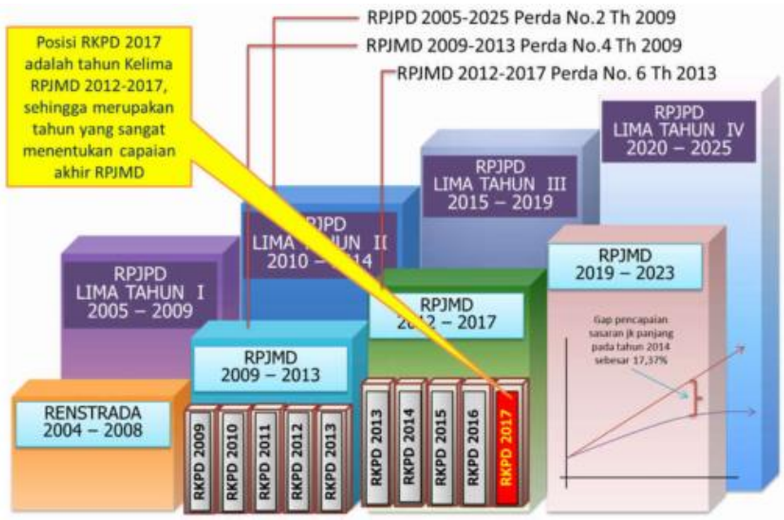

Gambar 2.5. Posisi Dokumen RKPD Tahun 2017 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 masuk dalam tahapan pembangunan ke-5 yang sudah memuat indikasi tema pembangunan yang dapat menjadi bagian integral perencanaan pada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

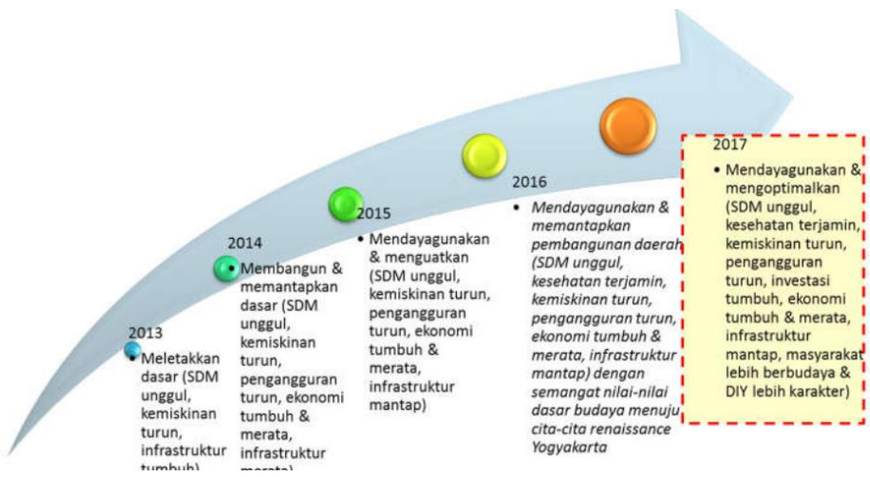

Gambar 2.6. Posisi Dokumen RKPD Tahun 2017 Terhadap Indikasi Tema RPJMD Tahun 2012-2017

2. Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2017 dengan Tema RKPD Tahun 2017

Tematik pembangunan dibangun berdasarkan pendekatan *Snowballing* melalui *focus group discussion* pada penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pemda DIY. Tematik yang disusun dalam kerangka perencanaan Tahun 2017 adalah:

a. Tematik Pembangunan Aspek Perekonomian

Tematik pembangunan pada aspek perekonomian dibangun dengan memperhatikan kondisi pariwisata daerah termasuk dalam hal ini perkembangan kunjungan wisata daerah. Lebih lanjut

potensi wilayah DIY memberikan dampak pada peningkatan arus investasi baik dari pemodalan asing maupun luar negeri yang menjadi salah satu bagian penting untuk diperhatikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi DIY. Pertanian menjadi bagian penting sebagai salah satu sektor basis atau sektor unggulan yang saat ini mengalami berbagai macam degradasi akibat konversi lahan. Berkaitan dengan hal tersebut pertanian perlu diperhatikan khususnya berkaitan dengan Nilai Tukar Petani yang diharapkan dapat lebih stabil seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja pembangunan pada sektor pertanian. Arus kunjungan wisata dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perdagangan dan jasa, serta hotel dan restoran memberikan implikasi positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan pendapatan masyarakat sebagai implikasi dari meningkatnya distribusi tidak langsung sektor pariwisata terahadap pertumbuhans ektor perdagangan, jasa, industri, maupun sektor lainnya. Peran MEA atau AEC menjadikan DIY sebagai salah satu wilayah yang cukup penting khususnya dalam pengembangan lokasi destinasi pariwisata.

Aspek-aspek tersebut mempengaruhi munculnya isu strategis pembangunan pada aspek perekonomian. Isu-isu strategis pembangunan, seperti: Peningkatan Kualitas *Local Economic Development*, Upaya Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Pangan, Penyelesaian Masalah Pelabuhan, Pengembangan Pariwisata Daerah, Pengembangan Kawasan Industri. Adapun berdasarkan hasil pemetaan isu strategis tersebut dapat dirumuskan tematik pembangunan pada aspek perekonomian, sebagai berikut :

1) Peningkatan Daya Saing Daerah yang ke depan dapat difokuskan pada upaya-upaya optimalisasi diversifikasi produk local berkualitas ekonomi kreatif, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal;
2) Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan yang ke depan dapat difokuskan pada upaya peningkatan produksi pangan strategis, serta implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
3) Peningkatan dan Pemerataan Investasi yang ke depan dapat difokuskan pada upaya mendukung pemerataan investasi, penyelesaian pelabuhan perikanan, pengembangan destinasi pariwisata, mendukung percepatan kawasan industry, serta perhatian terhadap aspek lingkungan khususnya pada kawasan-kawasan lindung untuk mendukung fungsi ekologi.

b. Tematik Pembangunan Aspek Sarana Prasarana

Tematik pembangunan sarana dan prasarana disusun dengan memperhatikan kebutuhan ke depan yang dalam hal ini adalah :

1) Mendukung Pengurangan Disparitas Wilayah

Pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pengurangan disparitas wilayah dilakukan dengan penguatan konektivitas wilayah melalui pembangunan sistem jaringan jalan, sistem jaringan rel, dan sistem logistik. Dalam hal ini dilakukan untuk mendukung akses distribusi barang dan manusia sebagai bagian upaya mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas tentunya menjadi bagian penting mendukung pembangunan wilayah di DIY, khususnya

memberikan akses antar kabupaten/kota, khususnya akses pada wilayah-wilayah yang lambat berkembang dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh.

Pengurangan disparitas antar-wilayah dapat didukung pula dengan peningkatan kesesuaian tata ruang melalui perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang agar lebih selaras antara kebutuhan perencanaan dengan kondisi eksisting. Tata ruang menjadi bagian penting dalam mengatur scenario pembangunan, khususnya pembangunan spasial yang mengatur fungsi lahan sebagai ruang aktivitas masyarakat, serta memberikan kebijakan berkaitan dengan pengembangan sarana dan prasarana, aspek lingkungan hidup, social, budaya, perekonomian, serta pengembangan aktivitas ekonomi strategis di DIY.

2) Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Aspek sarana prasarana menjadi komponen penting meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang sejalan dengan upaya pengurangan ketimpangan wilayah. Pada Tahun 2017 tematik pembangunan tersebut lebih fokus pada dukungan infrastruktur dalam pembangunan kawasan industri, serta penataan kawasan.

3) Menyediakan Layanan Dasar

Penyediaan layanan dasar menjadi kewajiban pemerintah dalam upaya memberikan akses pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan sarana prasarana penyediaan layanan dasar pada Tahun 2017 lebih difokuskan:

(a) Pada dukungan pembangunan akses air minum melalui Pengembangan SPAM Desa/IKKA dan SPAM Regional;
(b) Pengembangan Energi melalui pemenuhan target rasio elektrifikasi dan penggunaan EBT;
(c) Pembangunan Rumah Layak Huni melalui peningkatan kualitas rumah yang tidak layak huni;
(d) Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengendalian emisi udara dan pengendalian pencemaran air.

4) Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Meningkatkan kualitas layanan publik sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan sarana prasana yang difokuskan pada:

(a) Peningkatan angkutan umum perkotaan melalui *buy the service*, pengembangan *feeder* AKDP dan Angkudes, serta pembangunan *transfer point,* dan *park and ride*;
(b) Pembangunan Sanitasi melalui pengembangan TPA Regional dan pengembangan system air limbah terpusat;
(c) Pengembangan Ruang Publik melalui penambahan RTH, serta Penataan Kawasan.

c. Tematik Pembangunan Aspek Sosial Budaya

Tematik pembangunan ini diarahkan pada "Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Rangka Pengurangan Kemiskinan". Tematik pembangunan ini memberikan upaya untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga dengan fungsinya :

1) Fungsi keagamaan;
2) Fungsi sosial budaya;
3) Fungsi melindungi;
4) Fungsi reproduksi;
5) Fungsi sosialisasi dan pendidikan;
6) Fungsi ekonomi; dan
7) Fungsi pembinaan lingkungan.

Tematik pembangunan aspek sosial budaya tersebut dimaksudkan pula untuk memberikan kepastian bahwa:

1) Pemberdayaan keluarga dalam rangka keterlindungan dan ketercukupan dapat berjalan secara optimal yang dalam hal ini prioritas dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap:
   (a) Peningkatan kualitas hidup dalam upaya mengakses berbagai sarana kesehatan, pendidikan, dan berbagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup;
   (b) Aktualisasi diri dan eksistensi komunitas dengan maksud bahwa keluarga yang mandiri dan kemampuan akan lebih mempunyai keinginan untuk bisa membantu keluarga lainnya sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri penuh kemandirian;
   (c) Membangun Kemandirian Masyarakat dengan maksud bahwa keluarga yang mandiri dan kemampuan akan lebih mempunyai keinginan untuk bisa membantu keluarga lainnya sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri penuh kemandirian;
   (d) Ketahanan Masyarakat untuk mewujudkan kebanggaan menjadi/memiliki keluarga yang berkualitas yang dapat menjadi teladan bagi keluarga lain
2) Aspek peningkatan kapasitas SDM berjalan secara holistik dan integratif bagi setiap anggota keluarga dengan semangat :
   (a) Bahwa kegiatan peningkatan kapasitas harus bersifat tuntas;
   (b) Bahwa desain kegiatan terkoordinasikan dengan aktivitas dari kegiatan lain dan atau sektor lain;
   (c) Bahwa aktivitas kegiatan peningkatan kapasitas tidak hanya memperhatikan kebutuhan aspek sektoral namun melihat aspek kewilayahan.

d. Tematik Pembangunan Aspek Pemerintahan

Tematik pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan pada aspek pemerintahan.

1) Kualitas Pelayanan Publik dan Perijinan
2) Perubahan Sosial dan Potensi Konflik
3) Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat
4) Administrasi Kependudukan

Selain internalisasi dokumen RPJPD DIY 2005-2025, RPJMD DIY 2012-2017 dan pendekatan 4 tematik tersebut internalisasi Renaisans Yogyakarta dan Keistimewaan DIY serta pendekatan pembangunan wilayah perlu dikemukakan sebagai dasar perumusan yakni sebagai berikut:

1) Internalisasi Renaisans Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2017

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 pada prinsipnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu mewujudkan: Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru. RKPD Tahun 2017 dilandasi oleh filosofi *Hamemayu Hayuning Bawono* yang mengandung makna kewajiban melindungi, memelihara, dan membina keselamatan dunia. Filosofi tersebut secara prinsip diinternalisasi pula di dalam visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejalan dengan dasar filosofi tersebut, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 juga dimaknai pula oleh Renaisans Yogyakarta yang mengacu pada konsep *aworing kawulagusti* dan *golong-gilig*, serta diekspresikan oleh sikap *satria: sawiji, greget, sengguh ora-mingkuh*, memberikan vitalitas dan roh baru, arah baru, nilai baru, kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke timur, seraya meluruskan kembali rasa ketuhanan kita.*Renaisans* Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 9 strategi (pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan) memberikan perpektif paradigma pembangunan baru untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun peradaban baru yang unggul dengan strategi budaya: membalik paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’, dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*).

2) Internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2017
Keistimewaan DIY ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memuat 6 nilai dasar budaya, meliputi *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal* dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara. Nilai-nilai budaya dasar tersebut tidak lepas dari renaissance sebagai bagian dari upaya mewujudkan perubahan DIY. Dalam konteks keistimewaan Yogyakarta enam nilai dasar budaya tersebut telah didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif (penjelas bagi entitas budaya yang telah terjadi kemarin dan saat ini) dan sekaligus sebagai nilai rujukan preskriptif (menjadi dasar perbuatan karya budaya ke depan sekaligus sebagai nilai yang akan dituju dalam pengembangan budaya DIY di masa depan). Tentunya semangat keistimewaan dalam kerangka pembangunan di DIY juga harus dapat menjadi roh sekaligus menjiwai paradigma pembangunan masa kini khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Tahun 2017.

3) Internalisasi Pembangunan Kewilayahan dengan Tema RKPD Tahun 2017
Internalisasi pembangunan kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan beberapa dimensi, yaitu pembangunan yang bersifat spasial (regional and urban planning), serta dimensi administratif yang lebih cenderung melihat dimensi pembangunan pada wilayah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendekatan kewilayahan yang bersifat multidimensi dalam mengelola pembangunan berbasis kewilayahan berkaitan dengan peningkatan kerjasama dalam pembangunan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:

a) Pendekatan sektor strategis untuk ditangani dengan beberapa prioritas sektor, meliputi:

   (1) Prioritas 1: Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan;

   (2) Prioritas 2: Jasa-jasa;

   (3) Prioritas 3: Konstruksi;

   (4) Prioritas 4: Perdagangan Hotel dan restoran;

   (5) Prioritas 5: Pengangkutan dan Komunikasi.

   (6) Prioritas 6: Listrik, Gas, dan Air Bersih;

   (7) Prioritas 7: Pertanian.

b) Pendekatan *backward and forward linkage* sebagai bagian dari kerangka pembangunan lintas sector yang dalam arti membangun sektor strategis dan unggul dan strategis yang memberikan implikasi (multiplier effect) pada pembangunan sektor lain. Pendekatan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten/kota sebagai mitra provinsi yang lebih fokus pada beberapa aspek, meliputi:

   (1) Penanggulangan Kemiskinan;

   (2) Pengembangan Investasi Infrastruktur;

   (3) Pengendalian Konversi Lahan Terbangun;

   (4) Reformasi Birokrasi;

   (5) Pengembangan Industri Kreatif.

c) Pendekatan prioritas kewilayahan yang lebih fokus pada memberikan skala prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota melalui pertimbangan variabel tertentu, meliputi:

   (1) Nilai Inflasi;

   (2) Angka Kemiskinan;

   (3) Nilai ICOR;

   (4) Ketimpangan Regional.

Dalam konteks perencanaan pembangunan yang telah disusun, aspek kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan fokus tematik yang telah dibangun dalam skema perencanaan pembangunan Tahun 2017, sehingga aspek tersebut sinergis. Sehingga di dalam perumusan tema pembangunan aspek tema indikatif yang dirumuskan di dalam RPJMD Tahun 2012-2017 menjadi salah satu pertimbangan rumusan dengan memperhatikan pula fokus tematik, dasar filosofi keistimewaan, renaissans Yogyakarta, fokus prioritas kewilayahan sehingga dapat membangun sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2017 di DIY.

Sebagai kata kunci dari tema pembangunan Tahun 2017 setidaknya memuat 4 fokus tematik yang telah dibangun di dalam proses perencanaan yang telah dilakukan pada

Tahun 2016, sehingga tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah, sebagai berikut:

"Aktualisasi Jogja Gumregah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Guna Menurunkan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah"

Tema di atas mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1) Jogja Gumregah

Jogja gumregah sebagai ikon DIY menuju ke arah perubahan dinamika pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keistimewaan DIY dan semangat renaisans Yogyakarta. Dalam hal ini Jogja Gumregah merupakan perwujudan upaya dalam meningkatkan aktualisasi pembangunan melalui perubahan *mindset* pembangunan yang mengedepankan prinsip *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai dasar filosofi membangun peradaban baru menuju kemajuan dan kemakmuran DIY.

2) Mewujudkan Kesejahteraan

Mewujudkan kesejahteraan sebagai bagian penting prinsip sebuah pembangunan yang dalam hal ini memberikan makna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Prinsip mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan berkeadilan yang artinya memberikan distribusi pembangunan secara merata dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam aspek pembangunan wilayah DIY, dimana kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari upaya-upaya menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat menuju perbaikan khususnya perbaikan karakter dan mentalitas masyarakat untuk lebih berbudaya, beretika, berbudi pekerti luhur dalam usaha mewujudkan pembangunan DIY. Lebih lanjut kesejahteraan juga dimaknai dengan usaha-usaha untuk melakukan penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan usaha ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur dalam upaya mendukung peningkatan distribusi barang dan komoditas, serta membuka aksesibilitas antar-wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan kewilayahan di DIY. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat juga akan berkorelasi dengan upaya mengurangi penyakit masyarakat, serta permasalahan-permasalahan sosial lainnya.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan

Pertumbuhan ekonomi ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian melalui pengembangan sektor-sektor unggul khususnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung pembangunan pariwisata sebagai sektor strategis yang memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di DIY juga dibangun melalui pengembangan sektor jasa sebagai salah satu sektor basis yang dapat menopang sektor non basis lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting

menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pengembangan minat kunjungan atau destinasi wisata di DIY.

Prinsip Berkeadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkeadilan yang dalam hal ini dimaknai dengan pembangunan yang mengarah pada upaya mewujudkan pemerataan pembangunan baik peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan aksesibilitas, peningkatan pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi local wilayah yang bertujuan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, penurunan inflasi, dan ketimpangan pendapatan.

4. Penurunan Angka Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan ini dimaknai dengan upaya mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha. Penurunan angka kemiskinan dapat dilakukan tidak hanya memberikan bantuan, namun memberikan modal kerja, serta kesempatan berusaha sebagai pemantik peningkatan pendapatan masyarakat.

5. Penurunan Ketimpangan Wilayah

Penurunan ketimpangan wilayah ini dimaknai dengan penurunan ketimpangan terhadap penyediaan layanan dasar, penyediaan lapangan kerja/usaha, pendayagunaan potensi strategis wilayah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuan ekonomi maupun sistem distribusi barang dan komoditas, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peningkatan pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Angka Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan Wilayah sangat erat kaitannya dengan masalah pengembangan SDM yang memiliki kualitas serta mampu bersaing dalam dinamika global. Pengembangan SDM dimaksud adalah pengembangan dengan pendidikan, kualifikasi, serta kapasitas yang memadai, mampu bersaing dalam era globalisasi, serta menghadapi tantangan global. Mendayagunakan dan memantapkan Sumber Daya Manusia unggul dalam hal ini memberikan makna pula pada usaha dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat DIY, serta upaya membangun kemampuan akademik maupun teknis sumber daya yang siap dalam menghadapi tantangan persaingan global.

Lebih lanjut, tema tersebut tentunya tidak dapat lepas dari aspek pendekatan budaya yang merupakan cikal bakal dari upaya mewujudkan semangat renaissans DIY dan prinsip-prinsip pembangunan Keistimewaan DIY. Budaya dan renaissance menjadi landasan penting pembangunan DIY sebagai bagian dari semangat keistimewaan DIY seperti yang diamanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2012. Renaisans DIY dibangun dengan 9 strategi, meliputi pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan dengan perpektif paradigma pembangunan baru membalik paradigma '*among tani*' menjadi '*dagang layar*', dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*).

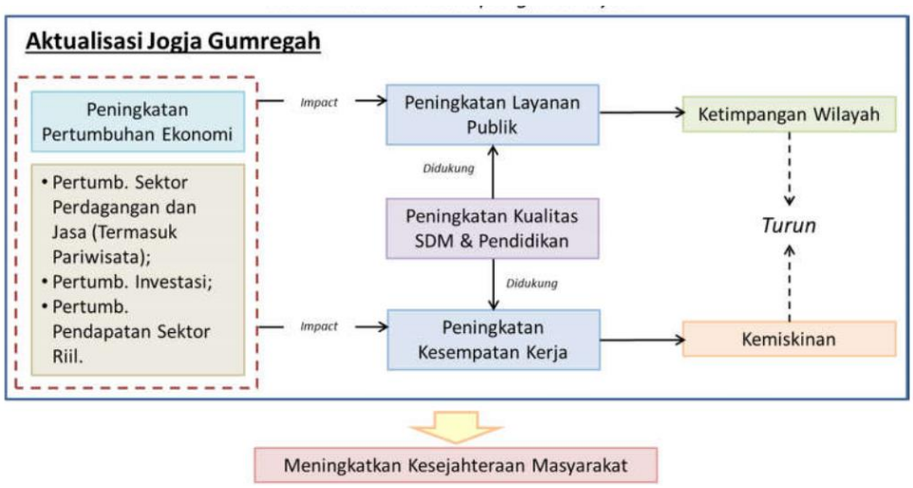

Gambar 2.7. Dasar Pemikiran Tema RKPD Tahun 2017

2.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan DIY Tahun 2017 adalah:

1. ***Sosial Budaya***

   Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budaya lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. ***Kesehatan***

   Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan

   a) Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;

   b) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;

   c) Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

   d) Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.

3. **Pendidikan**

   Diarahkan ke upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui:

   a) Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar sembilan tahun, serta pendidikan menengah;
   b) Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal.

4. **Pertumbuhan Ekonomi**

   Kebijakannya diarahkan membuat skema pada peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi

strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.

5. **Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**

   Pengembangan wilayah perlu mendapatkan penekanan kebijakan pada pengembangan kawasan-kawasan perdesaan dengan menciptakan potensi ekonomi lokal wilayah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar-wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekwensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di DIY.

6. **Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang**

   Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung pula oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota.

7. **Kinerja Aparatur dan Birokrasi**

   Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Lebih lanjut, pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di DIY, sebagai berikut:

   a. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
   b. Harapan hidup masyarakat meningkat;
   c. Melek huruf masyarakat meningkat;
   d. Aksesibilitas pendidikan meningkat;
   e. Daya Saing Pendidikan meningkat;
   f. Pendapatan masyarakat meningkat;
   g. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat;
   h. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat;
   i. Ketimpangan Antar-Wilayah menurun;
   j. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di perdesaan;
   k. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun;
   l. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
   m. Pemanfaatan ruang terkendali;
   n. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat;
   o. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

2.3. Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator

2.3.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan dengan dukungan strategi dan kebijakan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan sejumlah program pembangunan menurut urusan, yaitu:

1. Program untuk mendukung pencapaian Misi Pertama: *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, adalah sebagai berikut:
   a) Urusan Pendidikan
      1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
      2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
      3) Program Pendidikan Menengah
      4) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
      5) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
      6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
      7) Program Pendidikan Tinggi
      8) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
      9) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD
      10) Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya
      11) Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan
      12) Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan
   b) Urusan Pemuda dan Olah Raga
      1) Program Peningkatan Prestasi Olah Raga
      2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
      3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga
      4) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
      5) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
   c) Urusan Perpustakaan
      1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
      2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
      3) Program Pengembangan Budaya Baca
   d) Urusan Kearsipan
      1) Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip
      2) Program peningkatan kualitas layanan informasi
   e) Urusan Kesehatan
      1) Program Pembinaan Kesehatan Ibu
      2) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan
      3) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Bapelkes
      4) Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
      5) Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja
      6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
      7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
      8) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
      9) Program Pembinaan Kesehatan Lansia
      10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

11) Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita
12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapel Jamkesos
13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia
14) Program Pembiayaan kesehatan
15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSKP Respira
16) Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata

f) Urusan Keluarga Berencana
1) Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
4) Program Pengembangan Bina Keluarga
5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR
6) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS.

g) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak
3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
4) Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan
5) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
6) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan
7) Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan

h) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
2) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
3) Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa
4) Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
5) Program peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa
6) Program peningkatan Prasarana/ Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa

i) Urusan Tenaga Kerja
1) Program pelayanan, pengawasan lembaga ketenagakerjaan

j) Urusan Kebudayaan
1) Program Pengembangan Nilai Budaya
2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

2. Program untuk mendukung pencapaian Misi Kedua: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, adalah sebagai berikut:

a. Urusan Pemuda dan Olah Raga
1) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

b. Urusan Pekerjaan Umum
1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

4) Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur
5) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
6) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
7) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

c. Urusan Perumahan
   1) Program Pengembangan Perumahan
   2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

d. Urusan Tenaga Kerja
   1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
   2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
   3) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan
   4) Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

e. Urusan Energi, Sumber Daya, Mineral
   1) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenaga-listrikan
   2) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar
   3) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi
   4) Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

f. Urusan Pariwisata
   1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
   2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
   3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
   4) Program Pengembangan Desa Wisata

g. Urusan Penanaman Modal
   1) Program Peningkatan Promosi, Kerjasama & Pemerataan Investasi
   2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
   3) Program Peningkatan kerjasama antar-pemerintah daerah

h. Urusan Ketahanan Pangan
   1) Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
   2) Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
   3) Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
   4) Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan
   5) Program Pemberdayaan Penyuluhan

i. Urusan Pertanian
   1) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
   2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
   3) Program PeningkatanProduksi Pertanian TanamanPangan
   4) Program PeningkatanProduksi Hortikultura
   5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

j. Urusan Kehutanan
   1) Program Peningkatan Produksi Perkebunan
   2) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
   3) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
   4) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

k. Urusan Kelautan dan Perikanan
   1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
   2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
   3) Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar
   4) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
   5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
   6) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan

l. Urusan Perindustrian
   1) Program Pengembangan IKM
   2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
   3) Program Pengembangan Industri Kreatif

m. Urusan Transmigrasi
   1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

3. Program untuk mendukung pencapaian Misi Ketiga: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, adalah sebagai berikut:

a) Urusan Umum
   1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

b) Urusan Pekerjaan Umum
   1) Program Pelayanan Jasa Pengujian
   2) Program Pembinaan Jasa Konstruksi
   3) Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum

c) Urusan Perencanaan Pembangunan
   1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
   2) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
   3) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
   4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
   5) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
   6) Program Pengendalian Pembangunan Daerah

d) Urusan Statistik
   1) Program Pengembangan Statistik Daerah

e) Urusan Komunikasi dan Informatika
   1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
   2) Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi
   3) Program Pembinaan dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, dan Frekuensi

f) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
   1) Program Pendidikan Politik Masyarakat
   2) Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat
   3) Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
   4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

5) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
6) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7) Program Penegakan Perda dan Perkada
8) Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada

g) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1) Program Peningkatan Pelayanan Publik
2) Program Kerjasama Informasi Dengan *Mass Media*
3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4) Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
5) Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan
6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
7) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
8) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
9) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
10) Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
11) Program pencegahan dini bencana
12) Program penanggulangan korban bencana
13) Program Pemulihan Pasca-bencana
14) Program Peningkatan Pendapatan Daerah
15) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
16) Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah
17) Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro
18) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
19) Program Pendidikan Kedinasan
20) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
21) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
22) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
23) Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum
24) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
25) Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar-daerah
26) Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
27) Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan
28) Program Penelitian dan Pengembangan
29) Program Pengembangan Kehidupan Beragama
30) Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
31) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

h) Urusan Kearsipan
1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

4. Program untuk mendukung pencapaian Misi Keempat: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, adalah sebagai berikut:
a) Urusan Perhubungan
1) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
2) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

3) Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal
4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
6) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
7) Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi
8) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

b) Urusan Tata Ruang
1) Program Pemanfaatan Ruang
2) Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY
3) Program Perencanaan Tata Ruang
4) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
5) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan

c) Urusan Energi dan Sumber daya Mineral
1) Program pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, pendayagunaan air tanah
2) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
3) Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan

d) Urusan Kehutanan
1) Program Penataan Kawasan Hutan
2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

e) Urusan Kelautan dan Perikanan
1) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan SDA
2) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiran iklim laut

f) Urusan Lingkungan Hidup
1) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
3) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

g) Urusan Pekerjaan Umum
1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
2) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur
3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
4) Program PenyediaandanPengelolaan Air Baku
5) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
6) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
7) Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
8) Program PengelolaanPersampahan
9) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan

10) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
11) Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan
12) Program Pengendalian Banjir
13) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi

h) Urusan Perumahan
1) Program Pengembangan Perumahan
2) Program Pengurangan Kawasan Kumuh

2.3.2. Indikator

Indikator kinerja daerah ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada dimensi: kesejahteraan, pemerataan, produktivitas, layanan, dan daya saing. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan. Indikator Kinerja Utama Gubernur dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.19. Indikator Kinerja Utama Gubernur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	%	70
2	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka melek huruf	%	95
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	12
4	Daya saing pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	%	40
5	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,18
6	Pendapatan masyarakat meningkat.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK)	Juta	8,5
7	Ketimpangan antar-wilayah menurun.	Indeks Ketimpangan Antar-wilayah	Indeks Williamson	0,4445
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	Indeks Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	0,2878
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang (Wisatawan Nusantara)	4.561.646
		Jumlah Wisatawan mancanegara	Orang (Wisatawan Mancanegara)	386.964
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	2,6
		Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	2,69
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)	Nilai (Kementerian PAN)	A (2)
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini Pemeriksaan BPK (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)	Opini Pemeriksaan BPK	WTP (1)
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di perdesaan.	Load factor angkutan perkotaan meningkat	%	42,57
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	%	15,72
15	Pemanfaatan Ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat	%	64,75

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2017 sebesar Rp5.080.252.165.566,33 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.780.967.277.884,33 Pendapatan Transfer sebesar Rp3.284.457.694.835,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp14.827.192.847,00. Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 adalah sebesar Rp5.085.241.219.288,27 yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.851.973.396.065,27 Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp3.218.782.586.692,00 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp14.485.236.531,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2017 sebesar Rp5.257.141.873.025,92 yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp3.380.370.920.254,04, Belanja Modal sebesar Rp1.097.680.905.731,83, Belanja Tak Terduga sebesar Rp53.314.826.296,35 dan Transfer sebesar Rp725.775.220.743,70.

Sedangkan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp4.920.626.776.618,68 terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp3.140.664.073.385,38, Belanja Modal sebesar Rp1.046.730.141.538,60, Belanja Tak Terduga sebesar Rp7.655.049.640,00 dan Transfer sebesar Rp725.577.512.054,70.

Dengan demikian terjadi Surplus sebesar Rp164.614.442.669,59 sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penerimaan sebesar Rp194.371.993.468,59 dan pengeluaran sebesar Rp14.920.000.000,00 sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp179.451.993.468,59. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp344.066.436.138,18 secara rinci realisasi APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang		
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
URUSAN KONKUREN WAJIB PENDIDIKAN					
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					
PENDAPATAN DISDIKPORA	**2.860.485.000,00**	**3.102.289.584,00**	**241.804.584,00**	**108,45**	%
Pendapatan Asli Daerah	**2.860.485.000,00**	**3.102.289.584,00**	**241.804.584,00**	**108,45**	%
Pendapatan Retribusi Daerah	914.750.000,00	1.159.063.000,00	244.313.000,00	126,71	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.945.735.000,00	1.943.226.584,00	(2.508.416,00)	99,87	%
BELANJA DISDIKPORA	**1.325.611.569.624,36**	**1.228.081.180.520,00**	**(97.530.389.104,36)**	**92,64**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**794.482.405.010,36**	**755.116.513.970,00**	**(39.365.891.040,36)**	**95,05**	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
Belanja Pegawai	794.482.405.010,36	755.116.513.970,00	(39.365.891.040,36)	95,05	%
BELANJA LANGSUNG	**531.129.164.614,00**	**472.964.666.550,00**	**(58.164.498.064,00)**	**89,05**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.633.550.480,00	7.313.460.661,00	(1.320.089.819,00)	84,71	%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	4.385.878.540,00	4.084.354.179,00	(301.524.361,00)	93,13	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.236.451.200,00	1.167.341.510,00	(69.109.690,00)	94,41	%
Program Pendidikan Anak Usia Dini	300.000.000,00	298.786.500,00	(1.213.500,00)	99,60	%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	366.528.000,00	364.411.699,00	(2.116.301,00)	99,42	%
Program Pendidikan Menengah	305.279.508.000,00	267.989.502.491,00	(37.290.005.509,00)	87,78	%
Program Pendidikan Non Formal dan Informal	3.132.947.000,00	2.848.906.010,00	(284.040.990,00)	90,93	%
Program Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus	17.740.854.200	15.844.229.390,00	(1.896.624.810,00)	89,31	%
Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	46.090.326.500,00	40.550.524.550,00	(5.539.801.950,00)	87,98	%
Program Pendidikan Tinggi	4.884.269.500,00	4.756.192.442,00	(128.077.058,00)	97,38	%
Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka	7.040.000.000,00	6.905.037.666,00	(134.962.334,00)	98,08	%
Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD	12.013.194.494,00	9.588.127.809,00	(2.425.066.685,00)	79,81	%
Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan	49.457.846.600,00	42.704.016.003,00	(6.753.830.597,00)	86,34	%
Program Sinergitas Pendidikan Terhadap Pembangunan	250.000.000,00	230.580.287,00	(19.419.713,00)	92,23	%
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	923.730.000,00	893.430.000,00	(30.300.000,00)	96,72	%
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	2.311.525.000,00	2.017.427.625,00	(294.097.375,00)	87,28	%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	397.176.000,00	310.599.600,00	(86.576.400,00)	78,20	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	49.287.799.100,00	49.160.618.852,00	(127.180.248,00)	99,74	%
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	5.442.870.000,00	5.014.624.826,00	(428.245.174,00)	92,13	%
Program Peningkatan Prestasi Olahraga	11.954.710.000,00	10.922.494.450,00	(1.032.215.550,00)	91,37	%
URUSAN WAJIB KESEHATAN					
DINAS KESEHATAN					
PENDAPATAN DINAS KESEHATAN	**7.354.265.500,00**	**8.469.289.915,00**	**1.115.024.415,00**	**115,16**	%
Pendapatan Asli Daerah	**7.354.265.500,00**	**8.469.289.915,00**	**1.115.024.415,00**	**115,16**	%
Pendapatan Retribusi Daerah	3.718.265.500,00	3.843.389.800,00	125.124.300,00	103,37	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.636.000.000,00	4.625.900.115,00	989.900.115,00	127,22	%
BELANJA DINAS KESEHATAN	**109.918.613.345,54**	**102.324.424.366,00**	**(7.594.188.979,54)**	**93,09**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**16.342.727.543,60**	**15.977.233.077,00**	**(365.494.466,60)**	**97,76**	%
Belanja Pegawai	16.342.727.543,60	15.977.233.077,00	(365.494.466,60)	97,76	%
BELANJA LANGSUNG	**93.575.885.801,94**	**86.347.191.289,00**	**(7.228.694.512,94)**	**92,28**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.172.893.417,00	3.702.449.712,00	(470.443.705,00)	88,73	%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	2.677.163.750,00	2.422.452.366,00	(254.711.384,00)	90,49	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	82.255.950,00	80.526.450,00	(1.729.500,00)	97,90	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	436.841.200,00	429.558.800,00	(7.282.400,00)	98,33	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.557.307.500,00	1.411.234.000,00	(146.073.500,00)	90,62	%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	337.054.000,00	330.920.500,00	(6.133.500,00)	98,18	%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	591.000.000,00	541.135.150,00	(49.864.850,00)	91,56	%
Program Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan	1.537.082.500,00	1.363.967.475,00	(173.115.025,00)	88,74	%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD BAPELJAMKESOS	61.691.227.406,94	58.101.442.398,00	(3.589.785.008,94)	94,18	%
Program Pembiayaan Kesehatan	189.462.500,00	185.620.000,00	(3.842.500,00)	97,97	%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD BAPELKES	7.943.775.378,00	6.504.014.617,00	(1.439.760.761,00)	81,88	%
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/RS Mata	7.433.003.000,00	6.927.268.735,00	(505.734.265,00)	93,20	%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	3.334.290.000,00	2.942.069.640,00	(392.220.360,00)	88,24	%
Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan	1.059.170.000,00	1.018.998.946,00	(40.171.054,00)	96,21	%
Program Pembinaan Kesehatan Keluarga	533.359.200,00	385.532.500,00	(147.826.700,00)	72,28	%
URUSAN WAJIB KESEHATAN					
RUMAH SAKIT GRHASIA					
PENDAPATAN R.S. GRHASIA	**17.500.000.000,00**	**20.803.911.902,56**	**3.303.911.902,56**	**118,88**	%
Pendapatan Asli Daerah	**17.500.000.000,00**	**20.803.911.902,56**	**3.303.911.902,56**	**118,88**	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17.500.000.000,00	20.803.911.902,56	3.303.911.902,56	118,88	%
BELANJA R.S. GRHASIA	**48.894.651.493,83**	**41.062.356.932,00**	**(7.832.294.561,83)**	**83,98**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**16.979.226.905,18**	**16.793.283.587,00**	**(185.943.318,18)**	**98,90**	%
Belanja Pegawai	16.979.226.905,18	16.793.283.587,00	(185.943.318,18)	98,90	%
BELANJA LANGSUNG	**31.915.424.588,65**	**24.269.073.345,00**	**(7.646.351.243,65)**	**76,04**	%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSJ GRHASIA	31.915.424.588,65	24.269.073.345,00	(7.646.351.243,65)	76,04	%
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA					
PENDAPATAN R.S.P. RESPIRA	**4.500.000.000,00**	**7.535.731.692,00**	**3.035.731.692,00**	**167,46**	%
Pendapatan Asli Daerah	**4.500.000.000,00**	**7.535.731.692,00**	**3.035.731.692,00**	**167,46**	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.500.000.000,00	7.535.731.692,00	3.035.731.692,00	167,46	%
BELANJA R.S.P. RESPIRA	**30.637.683.419,40**	**24.343.810.788,00**	**(6.293.872.631,40)**	**79,46**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**9.090.729.433,40**	**8.917.897.451,00**	**(172.831.982,40)**	**98,10**	%
Belanja Pegawai	9.090.729.433,40	8.917.897.451,00	(172.831.982,40)	98,10	%
BELANJA LANGSUNG	**21.546.953.986,00**	**15.425.913.337,00**	**(6.121.040.649,00)**	**71,59**	%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RS RESPIRA	21.546.953.986,00	15.425.913.337,00	(6.121.040.649,00)	71,59	%
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM					
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL					
PENDAPATAN DINAS PUP-ESDM	**6.288.760.850,00**	**5.346.711.641,53**	**(942.049.208,47)**	**85,02**	**%**
Pendapatan Asli Daerah	**6.288.760.850,00**	**5.346.711.641,53**	**(942.049.208,47)**	**85,02**	**%**
Hasil Retribusi Daerah	4.668.760.850,00	5.265.105.041,53	596.344.191,53	112,77	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.620.000.000,00	81.606.600,00	(1.538.393.400,00)	5,04	%
BELANJA DINAS PUP-ESDM	**338.951.366.672,86**	**312.234.297.532,86**	**(26.717.069.140,00)**	**92,12**	**%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**21.077.712.503,53**	**20.570.560.485,00**	**(507.152.018,53)**	**97,59**	**%**
Belanja Pegawai	21.077.712.503,53	20.570.560.485,00	(507.152.018,53)	97,59	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
BELANJA LANGSUNG	**317.873.654.169,33**	**291.663.737.047,86**	**(26.209.917.121,47)**	**91,75**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.869.147.640,00	6.887.150.702,00	(1.981.996.938,00)	77,65	%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	7.113.854.000,00	6.612.204.721,00	(501.649.279,00)	92,95	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	628.535.300,00	606.133.275,00	(22.402.025,00)	96,44	%
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	718.487.500,00	699.978.200,00	(18.509.300,00)	97,42	%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainya	39.450.384.500,00	35.981.788.586,86	(3.468.595.913,14)	91,21	%
Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	7.266.870.000,00	6.910.692.400,00	(356.177.600,00)	95,10	%
Program Pelayanan Jasa Pengujian	3.956.391.140,00	3.790.969.389,00	(165.421.751,00)	95,82	%
Program Pengelolaan Persampahan	13.779.289.299,33	13.260.509.907,00	(518.779.392,33)	96,24	%
Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	2.604.944.000,00	2.551.053.975,00	(53.890.025,00)	97,93	%
Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	100.000.000,00	94.572.000,00	(5.428.000,00)	94,57	%
Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	47.335.351.060,00	45.989.854.989,00	(1.345.496.071,00)	97,16	%
Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	8.649.824.000,00	7.763.218.210,00	(886.605.790,00)	89,75	%
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1.270.346.750,00	1.237.008.951,00	(33.337.799,00)	97,38	%
Program Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	125.596.306.000,00	119.809.203.303,00	(5.787.102.697,00)	95,39	%
Program Pengembangan Perumahan	2.232.542.000,00	2.060.557.250,00	(171.984.750,00)	92,30	%
Program Pengurangan Kawasan Kumuh	7.700.000.000,00	6.036.298.500,00	(1.663.701.500,00)	78,39	%
Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	16.675.944.000,00	14.371.840.027,00	(2.304.103.973,00)	86,18	%
Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	10.026.986.880,00	4.289.227.500,00	(5.737.759.380,00)	42,78	%
Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan, Pendayagunaan Air Tanah	9.698.405.000,00	8.834.897.965,00	(863.507.035,00)	91,10	%
Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan	4.200.045.100,00	3.876.577.197,00	(323.467.903,00)	92,30	%
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG					
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG					
BELANJA	**348.298.158.642,51**	**343.786.839.433,00**	**(35.073.605.049,00)**	**98,70**	**%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**2.709.481.042,51**	**2.601.899.725,00**	**(17.614.951.568,00)**	**96,03**	**%**
Belanja Pegawai	2.709.481.042,51	2.601.899.725,00	(8.807.475.784,00)	96,03	%
BELANJA LANGSUNG	**345.588.677.600,00**	**341.184.939.708,00**	**(4.403.737.892,00)**	**98,73**	**%**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.078.630.000,00	852.258.016,00	(226.371.984,00)	79,01	%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1.346.000.000,00	1.233.964.901,00	(112.035.099,00)	91,68	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	154.572.600,00	133.248.925,00	(21.323.675,00)	86,20	%
Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	13.834.954.000,00	12.147.871.338,00	(1.687.082.662,00)	87,81	%
Program Penataan Pemanfaatan Tanah	3.362.346.000,00	3.214.874.762,00	(147.471.238,00)	95,61	%
Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY	4.474.198.465,00	4.023.914.093,00	(450.284.372,00)	89,94	%
Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan	310.311.225.166,00	308.708.354.391,00	(1.602.870.775,00)	99,48	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan	11.026.751.369,00	10.870.453.282,00	(156.298.087,00)	98,58	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
BELANJA	**9.074.221.342,20**	**8.783.107.370,00**	**(291.113.972,20)**	**96,79**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**3.783.244.904,20**	**3.690.354.939,00**	**(92.889.965,20)**	**97,54**	%
Belanja Pegawai	3.783.244.904,20	3.690.354.939,00	(92.889.965,20)	97,54	%
BELANJA LANGSUNG	**5.290.976.438,00**	**5.092.752.431,00**	**(198.224.007,00)**	**96,25**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.110.167.000,00	1.024.370.447,00	(85.796.553,00)	92,27	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	835.000.000,00	811.565.154,00	(23.434.846,00)	97,19	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000,00	72.850.000,00	(2.150.000,00)	97,13	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	360.006.200,00	342.181.700,00	(17.824.500,00)	95,05	%
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.315.426.700,00	1.270.625.400,00	(44.801.300,00)	96,59	%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	201.263.138,00	200.662.750,00	(600.388,00)	99,70	%
Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	1.394.113.400,00	1.370.496.980,00	(23.616.420,00)	98,31	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
BELANJA	**17.844.046.947,13**	**17.045.934.359,00**	**(798.112.588,13)**	**95,53**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**7.896.502.685,13**	**7.652.480.382,00**	**(244.022.303,13)**	**96,91**	%
Belanja Pegawai	7.896.502.685,13	7.652.480.382,00	(244.022.303,13)	96,91	%
BELANJA LANGSUNG	**9.947.544.262,00**	**9.393.453.977,00**	**(554.090.285,00)**	**94,43**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.333.763.900,00	1.249.486.843,00	(84.277.057,00)	93,68	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.762.460.260,00	1.581.378.163,00	(181.082.097,00)	89,73	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	497.753.552,00	489.462.205,00	(8.291.347,00)	98,33	%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.473.986.000,00	3.456.910.781,00	(17.075.219,00)	99,51	%
Program Penegakan Perda dan Perkada	785.343.700,00	732.949.800,00	(52.393.900,00)	93,33	%
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pencegahan Tindak Kriminal	2.094.236.850,00	1.883.266.185,00	(210.970.665,00)	89,93	%
URUSAN WAJIB KONKUREN WAJIB					
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
BELANJA	**20.224.803.812,53**	**18.783.075.076,00**	**(1.441.728.736,53)**	**92,87**	**%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**3.125.982.637,53**	3.024.727.914,00	**(101.254.723,53)**	**96,76**	**%**
Belanja Pegawai	3.125.982.637,53	3.024.727.914,00	(101.254.723,53)	96,76	%
BELANJA LANGSUNG	**17.098.821.175,00**	**15.758.347.162,00**	**(1.340.474.013,00)**	**92,16**	**%**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.810.966.700,00	1.613.819.174,00	(197.147.526,00)	89,11	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.650.948.000,00	1.225.364.144,00	(425.583.856,00)	74,22	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	203.655.550,00	185.604.000,00	(18.051.550,00)	91,14	%
Program Pencegahan Dini Bencana	6.742.950.425,00	6.310.474.498,00	(432.475.927,00)	93,59	%
Program Penanggulangan Korban Bencana	4.476.613.900,00	4.281.175.145,00	(195.438.755,00)	95,63	%
Program Pemulihan Pasca Bencana	2.213.686.600	2.141.910.201	(71.776.399,00)	96,76	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
SOSIAL					
DINAS SOSIAL					
PENDAPATAN DINAS SOSIAL	**420.000.000,00**	**420.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	%
Pendapatan Asli Daerah	**420.000.000,00**	**420.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	%
Retribusi Daerah	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	%
BELANJA DINAS SOSIAL	**63.325.092.938,80**	**57.840.770.834,00**	**(5.484.322.104,80)**	**91,34**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**17.067.805.203,80**	**16.770.977.171,00**	**(296.828.032,80)**	**98,26**	%
Belanja Pegawai	17.067.805.203,80	16.770.977.171,00	(296.828.032,80)	98,26	%
BELANJA LANGSUNG	**46.257.287.735,00**	**41.069.793.663,00**	**(5.187.494.072,00)**	**88,79**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.831.108.880,00	12.764.387.226,00	(2.066.721.654,00)	86,06	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.435.884.130,00	6.631.223.654,00	(1.804.660.476,00)	78,61	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.067.000,00	15.282.000,00	(785.000,00)	95,11	%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	124.907.350,00	119.553.350,00	(5.354.000,00)	95,71	%
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	9.061.938.600,00	8.502.743.525,00	(559.195.075,00)	93,83	%
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	2.941.145.200,00	2.657.776.950,00	(283.368.250,00)	90,37	%
Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	779.109.500,00	768.032.790,00	(11.076.710,00)	98,58	%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	24.999.850,00	24.999.850,00	0,00	100,00	%
Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma	968.219.400,00	938.655.000,00	(29.564.400,00)	96,95	%
Program Pelayanan Dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial	1.664.164.200,00	1.547.314.900,00	(116.849.300,00)	92,98	%
Program Pelayanan Dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	1.088.100.000,00	1.061.546.800,00	(26.553.200,00)	97,56	%
Program Penanganan Dan Penanggulangan Bencana	727.664.200,00	671.310.750,00	(56.353.450,00)	92,26	%
Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1.989.047.450,00	1.956.160.243,00	(32.887.207,00)	98,35	%
Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial	3.428.540.000,00	3.406.639.650,00	(21.900.350,00)	99,36	%
Program Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis dan Korban Tracficking	176.391.975,00	4.166.975,00	(172.225.000,00)	2,36	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
TENAGA KERJA					
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
PENDAPATAN	**870.675.000,00**	**1.124.150.000,00**	**253.475.000,00**	**129,11**	%
Pendapatan Asli Daerah	**870.675.000,00**	**1.124.150.000,00**	**253.475.000,00**	**129,11**	**%**
Retribusi Daerah	772.675.000,00	1.049.700.000,00	277.025.000,00	135,85	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	98.000.000,00	74.450.000,00	(23.550.000,00)	75,97	%
BELANJA DISNAKERTRANS	**44.921.783.920,60**	**42.421.058.952,00**	**(2.500.724.968,60)**	**94,43**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**15.382.371.870,60**	**14.966.993.357,00**	**(415.378.513,60)**	**97,30**	%
Belanja Pegawai	15.382.371.870,60	**14.966.993.357,00**	**(415.378.513,60)**	**97,30**	%
BELANJA LANGSUNG	**29.539.412.050,00**	**27.454.065.595,00**	**(2.085.346.455,00)**	**92,94**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.296.295.300,00	3.051.519.571,00	(244.775.729,00)	92,57	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.662.214.750,00	4.427.765.863,00	(234.448.887,00)	94,97	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	213.508.000,00	210.385.000,00	(3.123.000,00)	98,54	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	888.660.000,00	775.410.200,00	(113.249.800,00)	87,26	%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.831.036.000,00	10.192.698.490,00	(638.337.510,00)	94,11	%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	5.781.317.000,00	5.032.805.085,00	(748.511.915,00)	87,05	%
Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan	1.422.532.000,00	1.382.002.350,00	(40.529.650,00)	97,15	%
Program Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial	952.138.000,00	949.116.075,00	(3.021.925,00)	99,68	%
Program Penempatan Transmigran	1.491.711.000,00	1.432.362.961,00	(59.348.039,00)	96,02	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT					
BELANJA BPPM	**34.619.029.568,44**	**31.853.577.676,00**	**(2.765.451.892,44)**	**92,01**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**4.215.273.553,44**	**4.070.830.106,00**	**(144.443.447,44)**	**96,57**	%
Belanja Pegawai	4.215.273.553,44	4.070.830.106,00	(144.443.447,44)	96,57	%
BELANJA LANGSUNG	**30.403.756.015,00**	**27.782.747.570,00**	**(2.621.008.445,00)**	**91,38**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.191.678.255,00	1.094.987.254,00	(96.691.001,00)	91,89	%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	21.613.245.000,00	19.888.582.150,00	(1.724.662.850,00)	92,02	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	200.480.510,00	182.927.135,00	(17.553.375,00)	91,24	%
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.141.434.900,00	1.118.944.200,00	(22.490.700,00)	98,03	%
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	1.765.486.700,00	1.563.845.106,00	(201.641.594,00)	88,58	%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.266.135.150,00	1.036.250.331,00	(229.884.819,00)	81,84	%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	59.705.000,00	59.400.000,00	(305.000,00)	99,49	%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun	529.511.000,00	362.271.789,00	(167.239.211,00)	68,42	%
Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa	905.299.500,00	768.031.005,00	(137.268.495,00)	84,84	%
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1.134.200.000,00	1.122.332.300,00	(11.867.700,00)	98,95	%
Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	172.970.000,00	171.275.200,00	(1.694.800,00)	99,02	%
Program Pengembangan Bina Keluarga	423.610.000,00	413.901.100,00	(9.708.900,00)	97,71	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PANGAN					
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN					

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
BELANJA	**12.939.485.450,40**	**12.026.586.990,00**	**(912.898.460,40)**	**92,94**	**%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**4.516.616.196,40**	**4.451.729.602,00**	**(64.886.594,40)**	**98,56**	**%**
Belanja Pegawai	4.516.616.196,40	4.451.729.602,00	(64.886.594,40)	98,56	%
BELANJA LANGSUNG	**8.422.869.254,00**	**7.574.857.388,00**	**(848.011.866,00)**	**89,93**	**%**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	926.651.844,00	805.236.501,00	(121.415.343,00)	86,90	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	643.582.500,00	615.446.847,00	(28.135.653,00)	95,63	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26.075.000,00	23.459.125,00	(2.615.875,00)	89,97	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	236.183.000,00	228.807.574,00	(7.375.426,00)	96,88	%
Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	1.003.123.125,00	979.629.756,00	(23.493.369,00)	97,66	%
Program Peningkatan Ketersediaan Dan Cadangan Pangan	691.122.750,00	673.585.072,00	(17.537.678,00)	97,46	%
Program Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan	2.176.095.575,00	2.047.168.913,00	(128.926.662,00)	94,08	%
Program Peningkatan Distribusi Dan Akses Pangan	211.292.500,00	211.221.000,00	(71.500,00)	99,97	%
Program Pemberdayaan Penyuluhan	2.508.742.960,00	1.990.302.600,00	(518.440.360,00)	79,33	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
LINGKUNGAN HIDUP					
BADAN LINGKUNGAN HIDUP					
PENDAPATAN	**19.891.000,00**	**38.725.000,00**	**18.834.000,00**	**194,69**	%
Pendapatan Asli Daerah	**19.891.000,00**	**38.725.000,00**	**18.834.000,00**	**194,69**	**%**
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	19.891.000,00	38.725.000,00	18.834.000,00	194,69	%
BELANJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP	**25.778.663.798,80**	**24.140.245.474,00**	**(1.638.418.324,80)**	**93,64**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**3.123.692.273,80**	**3.071.087.553,00**	**(52.604.720,80)**	**98,32**	%
Belanja Pegawai	3.123.692.273,80	3.071.087.553,00	(52.604.720,80)	98,32	%
BELANJA LANGSUNG	**22.654.971.525,00**	**21.069.157.921,00**	**(1.585.813.604,00)**	**93,00**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.305.653.300,00	1.253.184.353,00	(52.468.947,00)	95,98	%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1.144.620.000,00	1.052.746.098,00	(91.873.902,00)	91,97	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	170.400.000,00	168.923.000,00	(1.477.000,00)	99,13	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	155.978.700,00	153.478.302,00	(2.500.398,00)	98,40	%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	796.930.000,00	767.613.878,00	(29.316.122,00)	96,32	%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.820.459.200,00	3.456.974.750,00	(363.484.450,00)	90,49	%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	13.514.747.725,00	12.619.390.570,00	(895.357.155,00)	93,37	%
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & LH	1.249.875.600,00	1.196.830.024,00	(53.045.576,00)	95,76	%
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	496.307.000,00	400.016.946,00	(96.290.054,00)	80,60	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PERHUBUNGAN					
DINAS PERHUBUNGAN					
PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN	**22.879.472.140,00**	**20.663.898.078,81**	**(2.215.574.061,19)**	**90,32**	**%**
Pendapatan Asli Daerah	**22.879.472.140,00**	**20.663.898.078,81**	**(2.215.574.061,19)**	**90,32**	**%**
Hasil Retribusi Daerah	1.263.147.640,00	1.263.147.640,00	0,00	100,00	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	21.616.324.500,00	19.400.750.438,81	(2.215.574.061,19)	**89,75**	%
BELANJA	**120.098.990.726,24**	**112.271.596.765,00**	**(7.827.393.961,24)**	**93,48**	**%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**9.736.893.687,24**	**9.350.168.840,00**	**(386.724.847,24)**	**96,03**	**%**
Belanja Pegawai	9.736.893.687,24	9.350.168.840,00	(386.724.847,24)	96,03	%
BELANJA LANGSUNG	**110.362.097.039,00**	**102.921.427.925,00**	**(7.440.669.114,00)**	**93,26**	**%**
Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	3.938.588.630,00	3.205.017.848,00	(733.570.782,00)	81,37	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.378.067.600,00	1.332.405.150,00	(45.662.450,00)	96,69	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	411.735.900,00	346.489.533,00	(65.246.367,00)	84,15	%
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	11.935.100,00	11.710.000,00	(225.100,00)	98,11	%
Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.694.511.925,00	1.645.424.925,00	(49.087.000,00)	97,10	%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service	88.108.492.368,00	82.042.907.271,00	(6.065.585.097,00)	93,12	
Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	7.958.807.191,00	7.620.244.548,00	(338.562.643,00)	95,75	%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	1.820.640.375,00	1.779.476.875,00	(41.163.500,00)	97,74	%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	4.179.078.450,00	4.102.807.625,00	(76.270.825,00)	98,17	%
Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas	860.239.500,00	834.944.150,00	(25.295.350,00)	97,06	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
BELANJA	**21.588.328.939,80**	**20.825.533.611,00**	**(762.795.328,80)**	**96,47**	**%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**4.488.647.314,80**	**4.331.659.032,00**	**(156.988.282,80)**	**96,50**	**%**
Belanja Pegawai	4.488.647.314,80	4.331.659.032,00	(156.988.282,80)	96,50	%
BELANJA LANGSUNG	**17.099.681.625,00**	**16.493.874.579,00**	**(605.807.046,00)**	**96,46**	**%**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.457.674.700,00	1.319.949.034,00	(137.725.666,00)	90,55	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.202.778.850,00	937.287.530,00	(265.491.320,00)	77,93	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	351.791.950,00	329.103.230,00	(22.688.720,00)	93,55	%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.629.327.125,00	3.504.699.028,00	(124.628.097,00)	96,57	%
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	1.825.470.000,00	1.817.684.845,00	(7.785.155,00)	99,57	%
Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi	8.262.772.600,00	8.223.315.512,00	(39.457.088,00)	99,52	%
Program Pembinaan dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi	369.866.400,00	361.835.400,00	(8.031.000,00)	97,83	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH					
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH					
BELANJA	**11.017.206.621,27**	**10.560.950.960,00**	**(456.255.661,27)**	**95,86**	**%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**3.019.490.813,27**	**2.824.497.632,00**	**(194.993.181,27)**	**93,54**	**%**
Belanja Pegawai	3.019.490.813,27	2.824.497.632,00	(194.993.181,27)	93,54	%
BELANJA LANGSUNG	**7.997.715.808,00**	**7.736.453.328,00**	**(261.262.480,00)**	**96,73**	**%**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	929.494.100,00	799.915.439,00	(129.578.661,00)	86,06	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	574.925.000,00	552.125.049,00	(22.799.951,00)	96,03	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	223.802.500,00	209.318.350,00	(14.484.150,00)	93,53	%
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	3.039.234.708,00	3.004.297.028,00	(34.937.680,00)	98,85	%
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2.663.939.500,00	2.625.028.462,00	(38.911.038,00)	98,54	%
Program Penguatan Permodalan dan Manajemen Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil	566.320.000,00	545.769.000,00	(20.551.000,00)	96,37	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PENANAMAN MODAL					
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL					
BELANJA	**8.591.741.253,60**	**7.952.977.189,00**	**(638.764.064,60)**	**92,57**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**2.580.672.353,60**	**2.480.810.352,00**	**(99.862.001,60)**	**96,13**	%
Belanja Pegawai	2.580.672.353,60	2.480.810.352,00	(99.862.001,60)	96,13	%
BELANJA LANGSUNG	**6.011.068.900,00**	**5.472.166.837,00**	**(538.902.063,00)**	**91,03**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	950.289.600,00	700.637.290,00	(249.652.310,00)	73,73	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.192.752.000,00	1.141.894.875,00	(50.857.125,00)	95,74	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	256.558.800,00	247.026.572,00	(9.532.228,00)	96,28	%
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi	2.207.567.500,00	2.138.616.056,00	(68.951.444,00)	96,88	%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	387.917.000,00	359.364.925,00	(28.552.075,00)	92,64	%
Program Kerjasama antar Pemerintah Daerah	1.015.984.000,00	884.627.119,00	(131.356.881,00)	87,07	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PENANAMAN MODAL					
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP)					
PENDAPATAN	**1.090.760.000,00**	**667.797.400,00**	**(422.962.600,00)**	**61,22**	**%**
Pendapatan Asli Daerah	**1.090.760.000,00**	**667.797.400,00**	**(422.962.600,00)**	**61,22**	**%**
Hasil Retribusi Daerah	1.090.760.000,00	667.797.400,00	(422.962.600,00)	61,22	%
BELANJA	**4.426.812.161,00**	**4.163.051.553,00**	**(263.760.608,00)**	**94,04**	**%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.117.794.073,00**	**1.068.473.621,00**	**(49.320.452,00)**	**95,59**	**%**
Belanja Pegawai	1.117.794.073,00	1.068.473.621,00	(49.320.452,00)	95,59	%
BELANJA LANGSUNG	**3.309.018.088,00**	**3.094.577.932,00**	**(214.440.156,00)**	**93,52**	**%**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	743.099.150,00	677.274.315,00	(65.824.835,00)	91,14	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.029.282.000,00	930.265.917,00	(99.016.083,00)	90,38	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.985.450,00	43.615.450,00	(2.370.000,00)	94,85	%
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	1.490.651.488,00	1.443.422.250,00	(47.229.238,00)	96,83	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KEBUDAYAAN					
DINAS KEBUDAYAAN					

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
PENDAPATAN DINAS KEBUDAYAAN	**336.714.000,00**	**430.051.000,00**	**93.337.000,00**	**127,72**	%
Pendapatan Asli Daerah	**336.714.000,00**	**430.051.000,00**	**93.337.000,00**	**127,72**	%
Hasil Retribusi Daerah	336.714.000,00	430.051.000,00	93.337.000,00	127,72	%
BELANJA DINAS KEBUDAYAAN	**1.538.171.286.805,78**	**1.443.102.820.786,00**	**(95.068.466.019,78)**	**93,82**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**9.720.414.147,20**	**9.509.892.179,00**	**(210.521.968,20)**	**97,83**	%
Belanja Pegawai	9.720.414.147,20	9.509.892.179,00	(210.521.968,20)	97,83	%
BELANJA LANGSUNG	**1.528.450.872.658,58**	**1.433.592.928.607,00**	**(94.857.944.051,58)**	**93,79**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.650.558.109,00	3.979.739.737,00	(670.818.372,00)	85,58	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	983.447.900,00	854.944.572,00	(128.503.328,00)	86,93	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	397.589.925,00	246.716.790,00	(150.873.135,00)	62,05	%
Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan)	14.610.679.280,00	13.979.995.623,00	(630.683.657,00)	95,68	%
Program Pengembangan IKM (Dana Keistimewaan)	7.518.827.500,00	6.913.267.500,00	(605.560.000,00)	91,95	%
Program Pengembangan Kemitraan (Dana Keistimewaan)	12.700.474.200,00	11.988.587.300,00	(711.886.900,00)	94,39	%
Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Dana Keistimewaan)	3.624.811.500,00	2.901.998.332,00	(722.813.168,00)	80,06	%
Program Peningkatan Informasi Kearsipan dan Kepustakaan (Dana Keistimewaan)	1.218.511.100,00	1.151.527.360,00	(66.983.740,00)	94,50	%
Program Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah (Dana Keistimewaan)	180.468.690.577,00	176.653.838.604,00	(3.814.851.973,00)	97,89	%
Program Promosi dan Kemitraan Budaya DIY di Dalam dan Luar Negeri (Dana Keistimewaan)	35.501.879.395,00	30.670.737.268,00	(4.831.142.127,00)	86,39	%
Program Pengembangan Nilai dan Sejarah (Dana Keistimewaan)	18.834.889.900,00	17.180.926.850,00	(1.653.963.050,00)	91,22	%
Program Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya (Dana Keistimewaan)	68.390.732.488,00	64.888.898.139,00	(3.501.834.349,00)	94,88	%
Program Pembinaan dan Pengembangan Museum (Dana Keistimewaan)	26.360.579.124,00	25.108.880.693,00	(1.251.698.431,00)	95,25	%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (Dana Keistimewaan)	9.852.498.586,00	9.254.830.195,00	(597.668.391,00)	93,93	
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Keistimewaan)	711.196.000,00	377.266.000,00	(333.930.000,00)	53,05	%
Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan (Dana Keistimewaan)	247.000.000,00	239.846.450,00	(7.153.550,00)	97,10	%
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan dan Kelautan (Dana Keistimewaan)	200.000.000,00	195.625.000,00	(4.375.000,00)	97,81	%
Program Pengelolaan Kearifan Lokal Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan)	1.723.991.350,00	1.717.371.412,00	(6.619.938,00)	99,62	%
Program Peningkatan Ketahanan Budaya Masyarakat (Dana Keistimewaan)	4.936.987.000,00	4.811.265.700,00	(125.721.300,00)	97,45	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PERPUSTAKAAN					
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH					
PENDAPATAN	**212.023.200,00**	**271.750.500,00**	**59.727.300,00**	**128,17**	%
Pendapatan Asli Daerah	**212.023.200,00**	**271.750.500,00**	**59.727.300,00**	**128,17**	%
Hasil Retribusi Daerah	158.000.000,00	152.194.000,00	(5.806.000,00)	96,33	%
Lain-Lain PAD Yang Sah	54.023.200,00	119.556.500,00	65.533.300,00	221,31	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
BELANJA	**63.153.520.357,00**	**61.259.799.417,00**	**(1.893.720.940,00)**	**97,00**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**7.384.621.337,00**	**7.244.429.218,00**	**(140.192.119,00)**	**98,10**	%
Gaji pegawai	7.384.621.337,00	7.244.429.218,00	(140.192.119,00)	98,10	%
BELANJA LANGSUNG	**55.768.899.020,00**	**54.015.370.199,00**	**(1.753.528.821,00)**	**96,86**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.791.359.760,00	5.248.845.772,00	(542.513.988,00)	90,63	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.848.896.260,00	3.435.893.750,00	(413.002.510,00)	89,27	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	174.395.000,00	167.339.375,00	(7.055.625,00)	95,95	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	1.504.216.000,00	1.374.601.975,00	(129.614.025,00)	91,38	%
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Kearsipan	36.357.570.000,00	36.208.380.100,00	(149.189.900,00)	99,59	%
Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	268.207.000,00	256.774.300,00	(11.432.700,00)	95,74	%
Program Pengembangan Budaya Baca	6.898.492.000,00	6.418.886.286,00	(479.605.714,00)	93,05	%
Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	145.550.000,00	142.092.400,00	(3.457.600,00)	97,62	%
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	419.063.000,00	410.012.580,00	(9.050.420,00)	97,84	%
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	361.150.000,00	352.543.661,00	(8.606.339,00)	97,62	%
URUSAN KONKUREN PILIHAN					
KELAUTAN DAN PERIKANAN					
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
PENDAPATAN	**1.450.030.325,00**	**1.469.194.500,00**	**19.164.175,00**	**101,32**	%
Pendapatan Asli Daerah	**1.450.030.325,00**	**1.469.194.500,00**	**19.164.175,00**	**101,32**	%
Hasil Retribusi Daerah	1.450.030.325,00	1.458.506.000,00	8.475.675,00	100,58	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.050.000,00	10.688.500,00	2.638.500,00	132,78	%
BELANJA	**46.286.942.685,75**	**42.550.293.957,00**	**(3.736.648.728,75)**	**91,93**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**8.484.235.112,75**	**8.092.830.188,00**	**(391.404.924,75)**	**95,39**	%
Belanja Pegawai	8.484.235.112,75	8.092.830.188,00	(391.404.924,75)	95,39	%
BELANJA LANGSUNG	**37.802.707.573,00**	**34.457.463.769,00**	**(3.345.243.804,00)**	**91,15**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.750.644.798,00	3.446.288.961,00	(304.355.837,00)	91,89	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.270.980.400,00	7.011.383.029,00	(259.597.371,00)	96,43	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	531.365.700,00	527.917.925,00	(3.447.775,00)	99,35	%
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim	315.420.000,00	309.901.000,00	(5.519.000,00)	98,25	%
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	11.381.574.300,00	10.386.086.900,00	(995.487.400,00)	91,25	%
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	7.230.868.350,00	6.254.193.800,00	(976.674.550,00)	86,49	%
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	4.652.659.875,00	4.336.072.908,00	(316.586.967,00)	93,20	%
Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam	1.375.887.000,00	998.059.500,00	(377.827.500,00)	72,54	%
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	1.028.170.000,00	938.855.096,00	(89.314.904,00)	91,31	%
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	265.137.150,00	248.704.650,00	(16.432.500,00)	93,80	%
URUSAN KONKUREN PILIHAN					
PARIWISATA					

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
DINAS PARIWISATA					
PENDAPATAN DINAS PARIWISATA	**119.500.000,00**	**132.323.220,00**	**12.823.220,00**	**110,73**	%
Pendapatan Asli Daerah	**119.500.000,00**	**132.323.220,00**	**12.823.220,00**	**110,73**	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	119.500.000,00	132.323.220,00	12.823.220,00	110,73	%
BELANJA DINAS PARIWISATA	**32.723.658.993,60**	**31.634.067.408,00**	**(1.089.591.585,60)**	**96,67**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**3.843.158.093,60**	**3.750.033.405,00**	**(93.124.688,60)**	**97,58**	%
Belanja Pegawai	3.843.158.093,60	3.750.033.405,00	(93.124.688,60)	97,58	%
BELANJA LANGSUNG	**28.880.500.900,00**	**27.884.034.003,00**	**(996.466.897,00)**	**96,55**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.153.032.200,00	1.090.520.965,00	(62.511.235,00)	94,58	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	950.616.500,00	916.595.430,00	(34.021.070,00)	96,42	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	266.960.500,00	238.640.802,00	(28.319.698,00)	89,39	%
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	7.013.589.300,00	6.447.075.196,00	(566.514.104,00)	91,92	%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	17.349.842.400,00	17.155.460.210,00	(194.382.190,00)	98,88	%
Program Pengembangan Kemitraan	2.146.460.000,00	2.035.741.400,00	(110.718.600,00)	94,84	%
URUSAN KONKUREN PILIHAN					
PERTANIAN					
DINAS PERTANIAN					
PENDAPATAN	**1.352.430.000,00**	**1.558.160.977,00**	**205.730.977,00**	**115,21**	%
Pendapatan Asli Daerah	**1.352.430.000,00**	**1.558.160.977,00**	**205.730.977,00**	**115,21**	%
Hasil Retribusi Daerah	1.352.430.000,00	1.428.939.727,00	76.509.727,00	105,66	%
Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	129.221.250,00	129.221.250,00	-	%
BELANJA	**54.191.975.087,40**	**47.809.903.142,00**	**(6.382.071.945,40)**	**88,22**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**21.129.589.079,40**	**20.452.730.031,00**	**(676.859.048,40)**	**96,80**	%
Belanja Pegawai	21.129.589.079,40	20.452.730.031,00	(676.859.048,40)	96,80	%
BELANJA LANGSUNG	**33.062.386.008,00**	**27.357.173.111,00**	**(5.705.212.897,00)**	**82,74**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.929.037.500,00	2.586.769.144,00	(342.268.356,00)	88,31	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.929.933.327,00	6.545.685.049,00	(384.248.278,00)	94,46	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	38.408.100,00	35.616.500,00	(2.791.600,00)	92,73	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	366.186.120,00	330.968.665,00	(35.217.455,00)	90,38	%
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	10.020.862.401,00	8.040.207.835,00	(1.980.654.566,00)	80,23	%
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	7.215.138.365,00	4.735.154.250,00	(2.479.984.115,00)	65,63	%
Program Peningkatan Produksi Hortikultura	3.977.753.195,00	3.578.915.168,00	(398.838.027,00)	89,97	%
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	1.585.067.000,00	1.503.856.500,00	(81.210.500,00)	94,88	%
URUSAN KONKUREN PILIHAN					
PERTANIAN DAN KEHUTANAN					
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN					
PENDAPATAN DISHUTBUN	**10.482.304.000,00**	**11.156.790.201,00**	**674.486.201,00**	**106,43**	%
Pendapatan Asli Daerah	**10.482.304.000,00**	**11.156.790.201,00**	**674.486.201,00**	**106,43**	%
Hasil Retribusi Daerah	9.443.116.500,00	9.176.121.576,00	(266.994.924,00)	97,17	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.039.187.500,00	1.980.668.625,00	941.481.125,00	190,60	%
BELANJA DISHUTBUN	**44.125.036.360,20**	**41.691.414.066,00**	**(2.433.622.294,20)**	**94,48**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**23.254.039.234,20**	**22.532.777.748,00**	**(721.261.486,20)**	**96,90**	%
Belanja Pegawai	23.254.039.234,20	22.532.777.748,00	(721.261.486,20)	96,90	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
BELANJA LANGSUNG	**20.870.997.126,00**	**19.158.636.318,00**	**(1.712.360.808,00)**	**91,80**	%
Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	2.166.362.526,00	2.046.721.298,00	(119.641.228,00)	94,48	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.860.514.400,00	2.447.819.077,00	(412.695.323,00)	85,57	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.721.198.200,00	4.272.721.649,00	(448.476.551,00)	90,50	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47.726.000,00	47.590.000,00	(136.000,00)	99,72	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	337.041.500,00	333.737.626,00	(3.303.874,00)	99,02	%
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.020.065.700,00	992.801.600,00	(27.264.100,00)	97,33	%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	3.045.222.200,00	2.928.031.075,00	(117.191.125,00)	96,15	%
Program Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	6.672.866.600,00	6.089.213.993,00	(583.652.607,00)	91,25	%
URUSAN KONKUREN PILIHAN					
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
PENDAPATAN	**150.000.000,00**	**188.332.791,00**	**38.332.791,00**	**125,56**	**%**
Pendapatan Asli Daerah	**150.000.000,00**	**188.332.791,00**	**38.332.791,00**	**125,56**	**%**
Hasil Retribusi Daerah	150.000.000,00	169.832.791,00	19.832.791,00	113,22	%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-	%
BELANJA	**26.425.067.723,20**	**25.615.469.174,00**	**(809.598.549,20)**	**96,94**	**%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**8.760.384.823,20**	**8.549.804.367,00**	**(210.580.456,20)**	**97,60**	**%**
Belanja Pegawai	8.760.384.823,20	8.549.804.367,00	(210.580.456,20)	97,60	%
BELANJA LANGSUNG	**17.664.682.900,00**	**17.065.664.807,00**	**(599.018.093,00)**	**96,61**	**%**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.979.679.200,00	1.823.105.134,00	(156.574.066,00)	92,09	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.097.093.750,00	1.079.655.200,00	(17.438.550,00)	98,41	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	287.729.600,00	259.758.628,00	(27.970.972,00)	90,28	%
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	3.244.456.000,00	3.205.665.600,00	(38.790.400,00)	98,80	%
Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	1.987.563.600,00	1.942.456.556,00	(45.107.044,00)	97,73	%
Program Perlindungan Pasar Domestik	527.643.000,00	500.424.995,00	(27.218.005,00)	94,84	%
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	4.372.097.750,00	4.176.683.504,00	(195.414.246,00)	95,53	%
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1.350.000.000,00	1.304.700.690,00	(45.299.310,00)	96,64	%
Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif	2.818.420.000,00	2.773.214.500,00	(45.205.500,00)	98,40	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					
BELANJA GUBERNUR DAN WAGUB	**2.685.732.312,40**	**2.681.403.984,00**	**(4.328.328,40)**	**99,84**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**2.685.732.312,40**	**2.681.403.984,00**	**(4.328.328,40)**	**99,84**	%
Belanja Pegawai	2.685.732.312,40	2.681.403.984,00	(4.328.328,40)	99,84	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
SEKRETARIAT DAERAH					
PENDAPATAN	**41.500.000,00**	**41.500.000,00**	0,00	100,00	%
Pendapatan Asli Daerah	**41.500.000,00**	**41.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**%**
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	100,00	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
BELANJA SETDA	**93.782.914.527,31**	**84.274.001.549,00**	**(9.508.912.978,31)**	**89,86**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**24.204.423.302,31**	**23.450.546.679,00**	**(753.876.623,31)**	**96,89**	%
Belanja Pegawai	24.204.423.302,31	23.450.546.679,00	(753.876.623,31)	96,89	%
BELANJA LANGSUNG	**69.578.491.225,00**	**60.823.454.870,00**	**(8.755.036.355,00)**	**87,42**	%
Program Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	2.120.856.000,00	2.066.615.269,00	(54.240.731,00)	97,44	%
Program Peningkatan Layanan Informasi dan Persandian	625.216.200,00	593.253.696,00	(31.962.504,00)	94,89	%
Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	2.832.737.000,00	2.512.257.981,00	(320.479.019,00)	88,69	%
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	3.045.618.000,00	2.676.003.982,00	(369.614.018,00)	87,86	%
Program Pengembangan Regulasi Urusan Keistimewaan	217.724.000,00	177.859.889,00	(39.864.111,00)	81,69	%
Program Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerag	1.399.091.500,00	1.348.521.950,00	(50.569.550,00)	96,39	%
Program Peningkatan Kebijakan Penataan SDM Aparatur	1.682.405.000,00	1.605.127.806,00	(77.277.194,00)	95,41	%
Program Peningkatan Pelayanan Publik	621.090.000,00	486.234.500,00	(134.855.500,00)	78,29	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan	1.370.125.000,00	560.308.176,00	(809.816.824,00)	40,89	%
Program Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah	1.859.747.500,00	1.701.626.975,00	(158.120.525,00)	91,50	%
Program Penyusunan Rumusan Kebijakan Urusan Kebudayaan	519.200.000,00	507.344.710,00	(11.855.290,00)	97,72	%
Program Penyusunan Rumusan Kebijakan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	456.000.000,00	431.063.150,00	(24.936.850,00)	94,53	%
Program Penyusunan Rumusan Kebijakan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	417.900.000,00	406.549.850,00	(11.350.150,00)	97,28	%
Program Pengembangan Regulasi Keistimewaan	2.667.139.000,00	1.136.595.820,00	(1.530.543.180,00)	42,61	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.770.027.625,00	8.154.277.574,00	(1.615.750.051,00)	83,46	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.673.986.450,00	7.596.589.104,00	(1.077.397.346,00)	87,58	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	784.628.925,00	706.283.875,00	(78.345.050,00)	90,02	%
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.699.265.675,00	1.678.889.138,00	(20.376.537,00)	98,80	%
Program Optimalisasai Penyelenggaraan Pemerintahan	2.218.447.600,00	2.027.751.795,00	(190.695.805,00)	91,40	%
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Derah	60.000.000,00	50.987.125,00	(9.012.875,00)	84,98	%
Program Penelitian dan Pengembangan	1.145.600.000,00	1.017.275.385,00	(128.324.615,00)	88,80	%
Program Bantuan Pelayanan Hukum	2.357.161.300,00	2.300.933.244,00	(56.228.056,00)	97,61	%
Program Pengembangan Kehidupan Beragama	6.726.903.000,00	5.894.749.900,00	(832.153.100,00)	87,63	%
Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan	4.939.427.250,00	4.575.608.211,00	(363.819.039,00)	92,63	%
Program Pengadaan Barang dan Jasa	3.040.249.000,00	2.921.941.170,00	(118.307.830,00)	96,11	%
Program Pelayanan Kerumah Tanggaan	5.003.564.600,00	4.751.955.425,00	(251.609.175,00)	94,97	%
Program Pengawasan Produk Hukum	472.784.600,00	472.571.450,00	(213.150,00)	99,95	%
Program Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	2.851.596.000,00	2.464.277.720,00	(387.318.280,00)	86,42	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT PARAMPARAPRAJA					
BELANJA	**1.320.524.003,00**	**1.157.816.808,00**	**(52.249.238,00)**	**87,68**	**%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**869.527.077,00**	**817.277.839,00**	**(52.249.238,00)**	**93,99**	**%**
Belanja Pegawai	869.527.077,00	817.277.839,00	(52.249.238,00)	93,99	%
BELANJA LANGSUNG	**450.996.926,00**	**340.538.969,00**	**(110.457.957,00)**	**75,51**	**%**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	184.447.176,00	179.176.000,00	(5.271.176,00)	97,14	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	237.550.000,00	134.729.269,00	(102.820.731,00)	56,72	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28.999.750,00	26.633.700,00	(2.366.050,00)	91,84	%
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN					
KANTOR PERWAKILAN DAERAH					
PENDAPATAN BANDIKLAT	**450.000.000,00**	**516.155.000,00**	**66.155.000,00**	**114,70**	**%**
Pendapatan Asli Daerah	**450.000.000,00**	**516.155.000,00**	**66.155.000,00**	**114,70**	**%**
Hasil Retribusi Daerah	450.000.000,00	516.155.000,00	66.155.000,00	114,70	%
BELANJA					
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.100.597.929,00**	**1.087.876.872,00**	**(12.721.057,00)**	**98,84**	**%**
Belanja Pegawai	1.100.597.929,00	1.087.876.872,00	(12.721.057,00)	98,84	%
BELANJA LANGSUNG	**4.422.317.250,00**	**4.214.378.790,00**	**(207.938.460,00)**	**95,30**	**%**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.995.490.500,00	1.889.053.966,00	(106.436.534,00)	94,67	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	948.733.000,00	882.159.466,00	(66.573.534,00)	92,98	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	127.262.000,00	115.470.108,00	(11.791.892,00)	90,73	%
Program Peningkatan Fasilitas Layanan Kantor Perwakilan Daerah	515.831.750,00	495.100.250,00	(20.731.500,00)	95,98	%
Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah dan Seni Budaya Daerah	835.000.000,00	832.595.000,00	(2.405.000,00)	99,71	%
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN					
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
BELANJA DPRD	**28.204.055.000,00**	**26.406.022.097,00**	**(1.798.032.903,00)**	**93,62**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**28.204.055.000,00**	**26.406.022.097,00**	**(1.798.032.903,00)**	**93,62**	%
Belanja Pegawai	28.204.055.000,00	26.406.022.097,00	(1.798.032.903,00)	93,62	%
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DPRD					
BELANJA SEKRETARIAT DPRD	**87.449.764.372,40**	**69.608.450.933,60**	**(17.841.313.438,80)**	**79,60**	**%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**5.109.593.142,40**	**4.852.304.024,00**	**(257.289.118,40)**	**94,96**	**%**
Belanja Pegawai	5.109.593.142,40	4.852.304.024,00	(257.289.118,40)	94,96	%
BELANJA LANGSUNG	**82.340.171.230,00**	**64.756.146.909,60**	**(17.584.024.320,40)**	**78,64**	**%**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.437.700.100,00	3.319.172.212,00	(1.118.527.888,00)	74,79	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.203.466.350,00	5.469.097.079,60	(1.734.369.270,40)	75,92	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	243.776.520,00	228.895.498,00	(14.881.022,00)	93,90	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	58.038.775.760,00	45.836.234.541,00	(12.202.541.219,00)	78,98	%
Program Kerjasama Informasi DPRD Dengan Mass Media	4.487.702.500,00	3.895.303.955,00	(592.398.545,00)	86,80	%
Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan DPRD	7.928.750.000,00	6.007.443.624,00	(1.921.306.376,00)	75,77	%
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT					
BELANJA INSPEKTORAT	**12.480.634.141,38**	**12.266.323.448,00**	**(214.310.693,38)**	**98,28**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**5.027.610.141,38**	**4.963.701.012,00**	**(63.909.129,38)**	**98,73**	%
Belanja Pegawai	5.027.610.141,38	4.963.701.012,00	(63.909.129,38)	98,73	%
BELANJA LANGSUNG	**7.453.024.000,00**	**7.302.622.436,00**	**(150.401.564,00)**	**97,98**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.359.386.550,00	1.313.149.661,00	(46.236.889,00)	96,60	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	578.884.550,00	562.130.965,00	(16.753.585,00)	97,11	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	211.247.500,00	207.121.503,00	(4.125.997,00)	98,05	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.639.000,00	39.488.700,00	(150.300,00)	99,62	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	5.263.866.400,00	5.180.731.607,00	(83.134.793,00)	98,42	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
BELANJA	**23.772.650.102,40**	**21.596.979.061,00**	**(2.175.671.041,40)**	**90,85**	**%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**6.791.803.657,40**	**6.644.746.376,00**	**(147.057.281,40)**	**97,83**	**%**
Belanja Pegawai	6.791.803.657,40	6.644.746.376,00	(147.057.281,40)	97,83	%
BELANJA LANGSUNG	**16.980.846.445,00**	**14.952.232.685,00**	**(2.028.613.760,00)**	**88,05**	**%**
Program Pengembangan Statistik Daerah	2.803.403.300,00	2.314.336.020,00	(489.067.280,00)	82,55	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.039.112.070,00	1.568.544.846,00	(470.567.224,00)	76,92	%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1.689.038.600,00	1.359.741.962,00	(329.296.638,00)	80,50	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	174.280.000,00	150.479.300,00	(23.800.700,00)	86,34	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	413.307.725,00	384.674.255,00	(28.633.470,00)	93,07	%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.129.069.000,00	2.868.655.384,00	(260.413.616,00)	91,68	%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	742.087.000,00	718.117.151,00	(23.969.849,00)	96,77	%
Program Perencanaan Sosial Budaya	1.066.157.000,00	976.726.815,00	(89.430.185,00)	91,61	%
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	1.915.521.850,00	1.728.655.772,00	(186.866.078,00)	90,24	%
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	686.256.000,00	606.776.665,00	(79.479.335,00)	88,42	%
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	2.322.613.900	2.275.524.515	(47.089.385,00)	97,97	%
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN					

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET					
PENDAPATAN DPPKA	**1.694.327.263.469,33**	**1.759.570.794.262,37**	**65.243.530.793,04**	**103,85**	%
Pajak Daerah	1.547.079.846.841,00	1.583.875.063.883,00	36.795.217.042,00	**102,38**	%
Hasil Retribusi Daerah	6.237.646.550,00	6.757.952.350,00	520.305.800,00	**108,34**	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	70.940.478.183,14	71.411.759.885,57	471.281.702,43	100,66	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yanh Sah	70.069.291.895,19	97.526.018.143,80	27.456.726.248,61	139,19	%
BELANJA DPPKA	**181.720.877.478,52**	**171.155.515.391,52**	**(10.565.362.087,00)**	**94,19**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**81.756.871.408,52**	**76.130.779.762,00**	**(5.626.091.646,52)**	**93,12**	%
Belanja Pegawai	81.756.871.408,52	76.130.779.762,00	(5.626.091.646,52)	93,12	%
BELANJA LANGSUNG	**99.964.006.070,00**	**95.024.735.629,52**	**(4.939.270.440,48)**	**95,06**	%
Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.248.121.250,00	6.978.469.363,00	(1.269.651.887,00)	84,61	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	67.463.233.900,00	65.620.833.442,00	(1.842.400.458,00)	97,27	%
Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	383.882.000,00	358.338.289,00	(25.543.711,00)	93,35	%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.813.393.500,00	6.117.421.624,00	(695.971.876,00)	89,79	%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	486.846.000,00	466.436.200,00	(20.409.800,00)	95,81	%
Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro	674.031.000,00	590.397.000,00	(83.634.000,00)	87,59	%
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	12.680.009.170,00	11.880.322.679,00	(799.686.491,00)	93,69	%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah	3.214.489.250,00	3.012.517.032,52	(201.972.217,48)	93,72	%
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN					
PPKD/BUD					
PENDAPATAN	**3.299.284.887.682,00**	**3.233.267.823.223,00**	**(66.017.064.459,00)**	**98,00**	%
Dana Perimbangan	2.445.571.241.958,00	2.379.856.461.840,00	(65.714.780.118,00)	97,31	%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	853.713.645.724,00	853.411.361.383,00	(302.284.341,00)	99,96	%
BELANJA	**1.385.376.881.040,05**	**1.308.683.610.694,70**	**(76.693.270.345,35)**	**94,46**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.385.376.881.040,05**	**1.308.683.610.694,70**	**(76.693.270.345,35)**	**94,46**	%
Belanja Hibah	604.195.834.000,00	574.360.049.000,00	(29.835.785.000,00)	95,06	%
Belanja Bantuan Sosial	2.091.000.000,00	1.091.000.000,00	(1.000.000.000,00)	52,18	%
Belanja Bagi Hsl kpd Prov /kab/kota/ dan Pemdes	647.149.357.812,70	647.149.357.812,70	0,00	100,00	%
Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/kab/kota dan Pem Des	78.625.862.931,00	78.428.154.242,00	(197.708.689,00)	99,75	%
Belanja Tak Terduga	53.314.826.296,35	7.655.049.640,00	(45.659.776.656,35)	14,36	%
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN					
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
PENDAPATAN	**1.348.150.000,00**	**1.317.885.000,00**	**(30.265.000,00)**	**97,76**	%
Hasil Retribusi Daerah	1.348.150.000,00	1.317.885.000,00	**(30.265.000,00)**	**97,76**	%
BELANJA	**147.796.783.985,00**	**144.622.748.893,00**	**(3.174.035.092,00)**	**97,85**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**128.788.535.445,00**	**128.563.542.557,00**	**(224.992.888,00)**	**99,83**	%
Belanja Pegawai	128.788.535.445,00	128.563.542.557,00	(224.992.888,00)	99,83	%
BELANJA LANGSUNG	**19.008.248.540,00**	**16.059.206.336,00**	**(2.949.042.204,00)**	**84,49**	%

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang (Rp)	(%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.954.805.100,00	1.840.273.841,00	(114.531.259,00)	94,14	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.039.678.140,00	1.018.695.300,00	(20.982.840,00)	97,98	%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	623.644.900,00	418.324.900,00	(205.320.000,00)	67,07	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	181.730.000,00	176.656.300,00	(5.073.700,00)	97,21	%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	9.800.611.900,00	7.951.980.444,00	(1.848.631.456,00)	81,14	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PEMDA	5.407.778.500,00	4.653.275.551,00	(754.502.949,00)	86,05	
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN					
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
PENDAPATAN BANDIKLAT	**6.113.503.400,00**	**6.356.453.400,00**	**242.950.000,00**	**103,97**	%
Pendapatan Asli Daerah	**6.113.503.400,00**	**6.356.453.400,00**	**242.950.000,00**	**103,97**	%
Hasil Retribusi Daerah	6.113.503.400,00	6.356.453.400,00	242.950.000,00	103,97	%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	791.500.000,00	791.500.000,00	0,00	100,00	%
BELANJA	**20.705.930.916,80**	**19.339.590.400,00**	**(1.366.340.516,80)**	**93,40**	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**4.839.530.883,80**	**4.687.320.885,00**	**(152.209.998,80)**	**96,85**	%
Belanja Pegawai	4.839.530.883,80	4.687.320.885,00	(152.209.998,80)	96,85	%
BELANJA LANGSUNG	**15.866.400.033,00**	**14.652.269.515,00**	**(1.214.130.518,00)**	**92,35**	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.752.708.050,00	1.677.248.508,00	(75.459.542,00)	95,69	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.109.961.800,00	1.944.038.729,00	(165.923.071,00)	92,14	%
Program Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur	163.752.000,00	160.778.720,00	(2.973.280,00)	98,18	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	268.374.100,00	258.376.250,00	(9.997.850,00)	96,27	%
Program Pendidikan Kedinasan	10.314.942.083,00	9.399.614.893,00	(915.327.190,00)	91,13	%
Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah	261.210.000,00	258.386.455,00	(2.823.545,00)	98,92	%
Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan	995.452.000,00	953.825.960,00	(41.626.040,00)	95,82	%

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah DIY atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Daerah DIY terdapat 30 SKPD yang merupakan entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan pada basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau entitas pemerintah daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat:
   a) Diterima oleh BUD di rekening Kas Daerah
   b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD
   c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD.
   d) Pengakuan Pendapatan Pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran mendasarkan pada SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD pada periode berjalan.
3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belanja

1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2) Belanja diakui pada saat:
   a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi baik di SKPD maupun PPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi.
   b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
   c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
3) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
4) Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

c. Transfer

1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2) Transfer masuk diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
3) Transfer Masuk diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan penerimaan kas di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah.
4) Transfer disajikan berdasarkan jenis Transfer masuk dan jenis Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Pembiayaan

1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran
2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak Ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk pemberian pinjaman kepada Pihak Ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah dan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
5) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
6) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Pendapatan-LO

1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
3) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4) Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam Laporan Opersional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Beban

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2) Beban diakui pada saat:
   a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
   b) Terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
   c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Kas dan Setara Kas

1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus

Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan Laporan Arus Kas. Kas tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD.

2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /Rekening Kas Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Daerah.
4) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Piutang

1) Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan olehpemerintah daerah.
2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:
   a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang sah.
   b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.
   c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan Daerah, Piutang Lainnya dan Biaya Dibayar Dimuka.
4) Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah dan Piutang Pendapatan Lainnya.
5) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.
6) Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7) Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggalpelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD/SK Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan atau disajikan

sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan (Biaya Dibayar Dimuka).

8) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizablevalue*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
9) Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:

    a) Kualitas Piutang Pajak:

Lancar	a. Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Wajib pajak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak likuid, dan/atau e. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
Kurang Lancar	a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
Diragukan	a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
Macet	a. Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau e. Wajib pajak mengalami musibah (force majeur).

b) Kualitas Piutang Retribusi:

Lancar	a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	a. Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	a. Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	a. Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

c) Kualitas Piutang Lainnya:

Lancar	Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

11) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang
1.	Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
2.	Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
3.	Diragukan	50% (lima puluh persen)
4.	Macet	100% (seratus persen)

12) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

i. Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan dicatat pada saat direalisasikan obyek belanja sebagai berikut:
   a) Belanja Bahan Pakai Habis
   b) Belanja Bahan/Material
   c) Belanja Cetak dan Penggandaan
   d) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
   e) Belanja Pakaian Kerja
   f) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
   g) Belanja Barang Dana BOS
   h) Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
   i) Belanja Barang Dan Jasa BLUD
   j) Belanja Hibah Barang/Jasa
   k) Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa
3) Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat Berita Acara Opname Persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan. Selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan usang, daluwarsa atau rusak diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan yang sudah rusak dan daluwarsa dapat dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang.
4) Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.
5) Persediaan dicatat secara *perpetual*, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (*First In First Out*).
6) Persediaan diukur sebagai berikut:
   a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
   b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
   c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
   d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangbiakkan
   e) Harga Jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang penetapan Tarif Harga Jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat.
7) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.

8) Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti Persediaan Untuk Tujuan Strategis yang meliputi Persediaan Cadangan Energi, Cadangan Pangan dan Cadangan Lainnya dinilai berdasarkan Berita Acara Penitipan Persediaan dan didukung dengan Berita Acara Opname Persediaan akhir periode pelaporan. perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terdapat selisih kurang antara Berita Acara Penitipan Persediaan dengan Berita Acara Opname Persediaan maka dicatat sebagai Piutang Lain-lain.

j. Investasi

1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Investasi diklasifikasikan menjadi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.
3) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanyadigunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintahdaerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhanakan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.
5) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi non permanen lainnya.
6) Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutanatau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali antara lain Penyertaan Modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7) Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
8) Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.
9) Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal

dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

10) Pengukuran Investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
11) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metoda yaitu Metoda Biaya, Metoda Ekuitas dan Metoda nilai bersih yang direalisasikan.
    a) Penilaian Investasi menggunakan metode biaya apabila kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20% dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
    b) Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metoda ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
    c) Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metoda nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
12) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
13) Mekanisme Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dikelola sendiri/langsung, *executing agency* dan *chanelling agency* dengan penjelasan sebagai berikut:
    a) Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir.
    b) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.
    c) Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank,

koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.

14) Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.

15) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Keterangan
Lancar	a. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir kooperatif.
Kurang Lancar	a. Umur dana bergulir 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
Diragukan	a. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
Macet	a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan/atau e. Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeur).

16) Dana Bergulir Diragukan Tertagih ditetapkan sesuai dengan kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

Kualitas Dana Bergulir	Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
Diragukan	50% (lima puluh persen)
Macet	100% (seratus persen)

17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.

18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan

amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan.

19) Pengakuan hasil investasi ditentukan sebagai berikut:
    a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
    b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional.
    c) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:
        - Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan (berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit.
        - Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi di sisi kredit.
        - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas daerah.
20) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
21) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar,sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dariInvestasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam InvestasiNonpermanen dan Investasi Permanen.

k. Aset Tetap

1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/ nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.
3) Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:
   a) Berwujud.
   b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
   c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
   d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.
   e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD.
   f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
   g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

Jenis Aset Tetap	Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah	Tidak ada
Peralatan dan Mesin	Rp500.000,00 / unit
Gedung dan Bangunan	Rp10.000.000,00 / unit
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tidak ada
Aset Tetap Lainnya	Tidak ada

6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.
7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tersebut, maka tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut:
   a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukkannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.
   b) Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir tahun anggaran baru terealisasi dokumen perencanaannya saja.
8) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
9) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
10) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan

semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

11) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

    Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

    a) Biaya persiapan tempat.
    b) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
    c) Biaya pemasangan.
    d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
    e) Biaya konstruksi.

12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
13) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
14) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah
15) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
16) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.
19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
20) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.

22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
    a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
    b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
    c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
    d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

I. Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
2) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi kriteria:
    a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
    b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
    c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
5) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
    b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
    c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai

Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset, dalam hal ini Pengguna Anggaran membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f) Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan**.**
g) Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan.
h) Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang) gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan dan disajikan dalam Laporan Operasional.
i) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
j) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

m. Dana Cadangan

1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
   a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d) Sumber dana cadangan; dan
e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.
3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.

n. Aset Lainnya

1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai asset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2) Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.
3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
   a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai.
   b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
   c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
   d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai diakui saat disetujuinya permohonan pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai dan diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan aset tetap menjadi Aset Lainnya-Pinjam Pakai.
   e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya

penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

g) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

h) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali.

i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah.

4) Pengukuran Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:

a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan.

d) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan diukur sebesar nilai perolehan aset yang dikerjasamakan.

e) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Pinjam Pakai diukur sebesar nilai perolehan aset yang dipinjampakaikan.

f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.

g) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

o. Aset Tak Berwujud

1) Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
2) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).
3) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB. ATB dengan umur manfaat terbatas tesebut meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten.
4) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaitu ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. ATB yang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas meliputi software dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang.
5) Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi Goodwill, Lisensi dan frenchise, Hak Cipta, Paten, Aset Tidak Berwujud Lainnya antara lain meliputi sotware, DED dan lain-lain serta Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.
6) Pengakuan ATB ditetapkan sebagai berikut:
   a) ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
   b) ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka:
      - Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
      - Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB diakui apabila memenuhi kriteria:
        - Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
        - Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;

- Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;
- Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut;
- Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

- Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
  - Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
  - Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
  - Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
  - Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

c) ATB yang dibiayai oleh instansi lain di luar pemerintah daerah maka ATB diakui sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan pengembangan.

d) *Software* diakui sebagai ATB adalah software yang dibangun sendiri dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga.

e) *Software* program yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak terkait dengan *hardware* tertentu harus dikapitalisasi sebagai ATB, namun apabila *software* yang dibeli tersebut merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.

f) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

g) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan tanggal pelaporan ATB belum selesai sebesar pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

7) Pengukuran Aset Tak Berwujud

a) ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang

membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

b) ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

c) ATB yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

d) ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.

e) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

f) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets)* tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

8) Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* computer harus memenuhi salah satu kriteria yaitu meningkatkan fungsi *software* dan meningkatkan efisiensi *software*.

9) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang

semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

a) **Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas**
   Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten) selama masa manfaat. Umur masa manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB yang bersangkutan. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil.

b) **Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas**
   ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill, software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

10) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.
11) ATB dapat mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12) Penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki

manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

p. Kewajiban

1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan:
   a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
   b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.
3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.
b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.
d) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
e) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
f) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
h) Utang Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
j) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman
k) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
l) Utang Dalam Negeri Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
m) Utang Jangka Panjang Lainnya seperti Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca

adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

d) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
e) Utang Belanja diukur sebesar sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.
f) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.
g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
h) Utang Dalam Negeri Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diukur sebesar nilai nominal/pari, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi.
j) Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
k) Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
l) Utang Dalam Negeri Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
m) Utang Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.

5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.
6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaiakan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
   b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

q. Koreksi Kesalahan

1) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Koreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang.
2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
3) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
4) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya maka perlakuan akuntansi ditetapkan sebagai berikut:
   a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan
   Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

- Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain Lain-LRA dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun asset yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah mauun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

5) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan nilai piutang yang dicatat. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

r. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap

periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yan berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

s. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

t. Operasi Tidak Dilanjutkan

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

u. Laporan Keuangan Konsolidasian

1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
4) Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB).
6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara mencara menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kas Daerah (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D Pengesahan/Nihil yang ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah

a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
2) Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi.
3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi.

4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:
   a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi:
      - Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan.
      - Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
   b) Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki.
      - Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
   c) Pengeluaran yang digunakan untuk:
      - Pengadaan tanah
      - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
      - Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya
5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:
   a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
   b) Pembuatan peralatan, mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
   c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
   d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
   e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
   f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
   g) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

h) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan dan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

j) Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

k) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

l) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

m) Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

n) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

o) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan belanja yang terkait dengan pembuatan/pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

6) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.

b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.

c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

7) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut:
   a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.
   b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
8) Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
   a) Pengadaan/pembelian tanah
   b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
   c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.

b. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah

1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
2) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain.
4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

c. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

1) Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola dan Pengguna. Penyusutan ditetapkan atas ase tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, alat musik/band dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikans sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
   b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat.

3) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai sisa.
4) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
6) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
8) Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
9) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5. 1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

	2017	2016 (Audited)
5. 1. 1. Pendapatan-LRA	**Rp5.085.241.219.288,27**	**Rp3.899.192.985.313,51**

Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp5.080.252.165.566,33 realisasi sebesar Rp5.085.241.219.288,27 atau 100,10%. Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp1.186.048.233.974,76 atau 30,42% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp3.899.192.985.313,51 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	**Rp 1.851.973.396.065,27**	**Rp1.673.749.196.521,51**

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 sebesar Rp1.780.967.277.884,33 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diakui secara kas sebesar Rp1.851.973.396.065,27 atau 103,99%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp178.224.199.543,76 atau 10,65% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.673.749.196.521,51. dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah	**Rp1.583.875.063.883,00**	**Rp1.440.571.518.513,00**

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp1.547.079.846.841,00 dan realisasi sebesar Rp 1.583.875.063.883,00 atau 102,38%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp143.303.545.370,00 atau 9,95% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.440.571.518.513,00. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Pajak Daerah**				
a.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	655.859.786.065,00	676.181.543.500,00	103,10	600.788.516.400,00
b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	446.250.000.000,00	460.314.185.500,00	103,15	428.608.770.000,00
c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	237.424.827.424,00	239.782.907.643,00	100,99	221.294.917.149,00
d.	Pajak Air Permukaan	354.000.000,00	405.193.888,00	114,46	246.879.900,00
e.	Pajak Rokok	207.191.233.352,00	207.191.233.352,00	100,00	189.632.435.064,00
	Jumlah	**1.547.079.846.841,00**	**1.583.875.063.883,00**	**102,38**	**1.440.571.518.513,00**

b. Retribusi Daerah	**Rp41.432.293.725,53**	**Rp36.603.883.321,00**

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp39.887.949.765,00 dan realisasi sebesar Rp41.432.293.725,53 atau 103,87%. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp4.828.410.404,53 atau 13,19% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp36.603.883.321,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	**Hasil Retribusi Daerah**				
a.	Retribusi Jasa Umum	14.383.948.400,00	14.596.927.391,53	101,48	13.753.464.152,00
b.	Retribusi Jasa Usaha	24.413.241.365,00	26.167.568.934,00	107,19	22.096.387.169,00
c.	Retribusi Perijinan Tertentu	1.090.760.000,00	667.797.400,00	61,22	754.032.000,00
	Jumlah	**39.887.949.765,00**	**41.432.293.725,53**	**103,87**	**36.603.883.321,00**

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp14.383.948.400,00 dan realisasi sebesar Rp14.596.927.391,53 atau 101,48% terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan dan Pelayanan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.629.789.000,00	3.749.312.800,00	103,29	3.291.802.000,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan	3.950.046.000,00	4.044.326.191,53	102,39	3.561.110.052,00
2	Retribusi Pelayanan Tera Ulang/Tera	-	-	-	231.337.100,00
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan	6.804.113.400,00	6.803.288.400,00	99,99	6.669.215.000,00
	Jumlah	**14.383.948.400,00**	**14.596.927.391,53**	**101,48**	**13.753.464.152,00**

Penjelasan:

Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp3.629.789.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.749.312.800,00 atau 103,29% merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan yaitu pada KPA Balai Laboratorium Kesehatan. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp457.510.800,00 atau 13,90% dibandingkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp3.291.802.000,00.

Retribusi Pelayanan Persampahan dianggarkan sebesar Rp3.950.046.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.044.326.191,53 atau 102,39% merupakan pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (KPA Balai PISAM). Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp483.216.139,53 atau 13,57% dibandingkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp3.561.110.052,00.

Retribusi Pelayanan Tera Ulang/Tera pada Tahun 2017 sudah bukan menjadi kewenangan Pemda DIY tetapi kewenangan Pemerintah Pusat.

Retribusi Pelayanan Pendidikan dianggarkan sebesar Rp6.804.113.400,00 dan realisasi sebesar Rp6.803.288.400,00 atau 99,99%. Realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp134.073.400,00 atau 2,01% dibandingkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp6.669.215.000,00. Retribusi Pelayanan Pendidikan direalisasikan pada:

1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KPA Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja) sebesar Rp295.500.000,00 atau 100% dari anggaran.
2) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp5.189.903.400,00 atau 100,57% dari anggaran sebesar Rp5.160.463.400,00.

3) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp1.317.885.000,00 atau 97,75% dari anggaran sebesar Rp1.348.150.000,00. Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Kepegawaian Daerah tidak mencapai target karena adanya pembatalan kerjasama pengukuran kompetensi Assessment Center dari Pemerintah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp24.413.241.365,00 dan realisasi sebesar Rp26.167.568.934,00 atau 107,19% terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Khusus Parkir, Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Pelayanan Kepelabuhan, Tempat Rekreasi dan Olah Raga serta Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.175.725.540,00	13.043.091.897,00	116,71	11.540.506.824,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	79.600.000,00	79.600.000,00	100,00	76.800.000,00
3	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	669.650.000,00	698.115.000,00	104,25	732.375.000,00
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	27.275.000,00	34.913.500,00	128,01	27.143.200,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	179.214.000,00	242.551.000,00	135,34	211.283.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.281.776.825,00	12.069.297.537,00	98,27	9.508.279.145,00
	Jumlah	**24.413.241.365,00**	**26.167.568.934,00**	107,19	**22.096.387.169,00**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp11.175.725.540,00 dan realisasi sebesar Rp13.043.091.897,00 atau 116,71% merupakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada:

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.159.063.000,00 atau 126,71% dari anggaran sebesar Rp914.750.000,00.
2) Dinas Kesehatan sebesar Rp94.077.000,00 atau 106,33% dari anggaran sebesar Rp88.476.500,00.
3) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp1.163.084.850,00 atau 172,83% dari anggaran sebesar Rp672.964.850,00.
4) Dinas Sosial sebesar Rp420.000.000,00 atau 100% dari anggaran.
5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp485.415.000,00 atau 205,84% dari anggaran sebesar Rp235.825.000,00.
6) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.263.147.640,00 atau 100% dari anggaran.
7) Dinas Kebudayaan sebesar Rp187.500.000,00 atau 119,05% dari anggaran sebesar Rp157.500.000,00.
8) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp152.194.000,00 atau 96,33% dari anggaran sebesar Rp158.000.000,00.
9) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp18.734.000,00 atau 109,65% dari anggaran sebesar Rp17.085.000,00.
10) Dinas Pertanian sebesar Rp51.198.227,00 atau 240,25% dari anggaran sebesar Rp21.310.000,00.
11) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp66.775.830,00 atau 118,02% dari anggaran sebesar Rp56.580.000,00.

12) Kantor Perwakilan Daerah sebesar Rp137.000.000,00 atau 232,20% dari anggaran sebesar Rp59.000.000,00.
13) DPPKA sebesar Rp6.678.352.350,00 atau 108,45% dari anggaran sebesar Rp6.158.046.550,00.
14) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp1.166.550.000,00 atau 122,40% dari anggaran sebesar Rp953.040.000,00.

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemda DIY. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan sebesar Rp79.600.000,00 dan realisasi sebesar 100% pada DPPKA merupakan penerimaan retribusi dari tempat penitipan kendaraan bermotor pada UPT KPPD Kota Yogyakarta sebesar Rp17.600.000,00, UPT KPPD Kabupaten Bantul sebesar Rp18.700.000,00, UPT KPPD Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp15.120.000,00, UPT KPPD Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp12.100.000,00 dan UPT KPPD Kabupaten Sleman sebesar Rp16.080.000,00.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dianggarkan sebesar Rp669.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp698.115.000,00 atau 104,25% merupakan Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa pada:
1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp47.875.000,00 atau 131,89% dari anggaran sebesar Rp36.300.000,00.
2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp268.785.000,00 atau 111,37% dari anggaran sebesar Rp241.350.000,00.
3) Kantor Perwakilan Daerah sebesar Rp379.155.000,00 atau 96,97% dari anggaran sebesar Rp391.000.000,00.
4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp2.300.000,00 atau 230% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dianggarkan sebesar Rp27.275.000,00 dan realisasi sebesar Rp34.913.500,00 atau 128,01% merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan KPA Pelabuhan Perikanan Pantai.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp179.214.000,00 dan realisasi sebesar Rp242.551.000,00 atau 135,34% merupakan Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan KPA Museum Sonobudoyo.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp 12.281.776.825,00 dan realisasi sebesar Rp 12.069.297.537,00 atau 98,27% pada:
1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp9.819.000,00 atau 103,90% dari anggaran sebesar Rp9.450.000,00.
2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp169.832.791,00 atau 113,22% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00.
3) Dinas Pertanian sebesar Rp1.377.741.500,00 atau 103,50% dari anggaran sebesar Rp1.331.120.000,00.
4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp9.107.045.746,00 atau 97,03% dari anggaran sebesar Rp9.385.536.500,00. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2017

berupa minyak kayu putih pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak mencapai target karena adanya dampak cuaca ekstrem yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.404.858.500,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp1.405.670.325,00. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2017 pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mencapai target karena terjadinya cuaca ekstrem di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Perijinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp1.090.760.000,00 dan realisasi sebesar Rp667.797.400,00 atau 61,22% terdiri dari Retribusi Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan dan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Izin Trayek	124.864.500,00	63.484.600,00	50,84	80.771.600,00
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	11.345.600,00	-	-	6.700.000,00
3	Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing)	954.549.900,00	604.312.800,00	63,31	666.560.400,00
	Jumlah	**1.090.760.000,00**	**667.797.400,00**	**61,22**	**754.032.000,00**

Retribusi Perijinan Tertentu mulai Tahun Anggaran 2017 dikelola oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP). Adapun rincian penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1) Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp124.864.500,00 dan realisasi sebesar Rp63.484.600,00 atau 50,84%. Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek Tahun 2017 tidak mencapai target karena:
   a) Sejumlah lima (5) unit kendaraan angkutan umum (plat kuning) mengubah menjadi plat hitam (angkutan pribadi).
   b) Sebanyak 114 kendaraan angkutan umum tidak memperpanjang masa berlaku kartu pengawasan.
   c) Angkutan sewa umum berdasarkan Permenhub 108 Tahun 2017 yang semula perijinannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat.
   d) Perubahan ketentuan penerbitan izin insidentil bagi angkutan umum dalam trayek yang semula boleh dilakukan oleh perorangan menjadi wajib berbadan hukum (PT atau Koperasi).
2) Retribusi Izin Usaha Perikanan dianggarkan sebesar Rp11.345.600,00 dan realisasi sebesar Rp0,00. Realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan Tahun 2017 sebesar Rp0,00 karena tidak ada yang mengajukan permohonan ijin.
3) Retribusi Perpanjangan IMTA dianggarkan sebesar Rp954.549.900,00 dan realisasi sebesar Rp604.312.800,00 atau 63,31%. Realisasi Perpanjangan IMTA Tahun 2017 tidak mencapai target karena:
   a) Sebanyak sembilan (9) tenaga kerja asing tidak mengajukan perpanjangan IMTA karena perusahaan sudah mampu melakukan alih keahlian dan keterampilan kepada tenaga kerja Indonesia.

b) Siklus perpanjangan IMTA selama 5 tahun sekali yang diharuskan keluar dari Indonesia untuk kemudian memperbarui IMTA awal di Kementerian Ketenagakerjaan.

c) IMTA awal yang merupakan terbitan Kementerian Ketenagakerjaan lebih banyak bersifat nonlintas kab/kota sehingga perpanjangan IMTA menjadi kewenangan kabupaten/kota.

d) Perpanjangan IMTA untuk pemegang KITAP dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan **Rp71.411.759.885,57** **Rp57.333.770.984,56**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp70.940.478.183,14 dan realisasi sebesar Rp71.411.759.885,57 atau 100,66% meliputi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank. Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp14.077.988.901,01 atau 24,55% dari realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp57.333.770.984,56. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**				
a.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	67.268.526.446,70	67.834.036.446,70	100,84	53.660.921.299,98
b.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	231.768.123,00	231.768.123,00	100,00	221.396.254,00
c.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank	3.440.183.613,44	3.345.955.315,87	97,26	3.451.453.430,58
	Jumlah	**70.940.478.183,14**	**71.411.759.885,57**	**100,66**	**57.333.770.984,56**

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp67.268.526.446,70 dan realisasi sebesar Rp67.834.036.446,70 atau 100,84% meliputi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Tarumartani, PT. Bank BPD DIY dan PT. Anindya Mitra Internasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7
Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)	450.000.000,00	1.015.510.000,00	225,67	760.000.000,00
2	Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)	66.132.661.551,70	66.132.661.551,70	100,00	52.300.921.299,98
3	Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)	685.864.895,00	685.864.895,00	100,00	600.000.000,00
	Jumlah	**67.268.526.446,70**	**67.834.036.446,70**	**100,84**	**53.660.921.299,98**

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Tarumartani dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.015.510.000,00 atau 225,67%. Pelampauan

target tersebut disebabkan adanya peningkatan kinerja PT. Tarumartani sehingga mampu menciptakan laba lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp231.768.123,00 dan realisasi sebesar 100% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA).

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp3.440.183.613,44 dan realisasi sebesar Rp3.345.955.315,87 atau 97,26% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 75 BUKP yang ada di setiap kecamatan. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.345.955.315,87 mengalami penurunan sebesar Rp105.498.114,71 atau 3,06% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp3.451.453.430,58. Penurunan tersebut disebabkan adanya persaingan ketat pada segmen mikro pada Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan di wilayah kerja BUKP, terutama di wilayah kerja BUKP Kota Yogyakarta.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah **Rp155.254.278.571,17** **Rp139.240.023.702,95**

Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp123.059.003.095,19 dan realisasi sebesar Rp155.254.278.571,17 atau 126,16%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp16.014.254.868,22 atau 11,50% dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2016 sebesar Rp139.240.023.702,95. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**				
a.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahka	992.650.000,00	1.518.374.426,00	152,96	1.775.223.800,00
b.	Penerimaan Jasa Giro	6.250.000.000,00	10.655.890.362,00	170,49	8.352.209.518,10
c.	Pendapatan Bunga Deposito	21.000.000.000,00	28.033.825.300,27	133,49	24.512.740.288,45
d.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	-	76.250.000,00	-	50.750.000,00
e.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	279.294.322,10	-	463.929.057,00
f.	Pendapatan Denda Pajak	41.443.203.350,00	53.150.113.250,00	128,25	45.894.547.450,00
g.	Pendapatan Denda Retribusi	54.940.400,00	123.410.800,00	224,63	74.971.192,00
i.	Pendapatan dari Pengembalian	-	427.488.788,00	-	1.974.993.566,00
j.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	153.561.614,00	-	177.235.000,00
k.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	27.581.735.000,00	34.719.419.571,56	125,88	29.889.986.698,38
l.	Pendapatan dari Pengelolaan BUKP	326.273.345,19	304.879.469,01	93,44	320.505.994,73
h.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.138.512.000,00	2.793.700.867,00	89,01	104.953.780,00
m.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	791.500.000,00	791.500.000,00	-	-
n.	Pendapatan Denda Lain-lain	1.000.000,00	43.000.000,00	4.300,00	2.598.085.357,00
o.	Tindak Lanjut Hasil Temuan	21.700.000,00	2.853.885.723,42	13.151,55	1.108.457.968,40
p.	Pendapatan Lain-lain	21.457.489.000,00	19.329.684.077,81	90,08	21.941.434.032,89
	Jumlah	**123.059.003.095,19**	**155.254.278.571,17**	**126,16**	**139.240.023.702,95**

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp992.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.518.374.426,00 atau 152,96% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2017		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	70.000.000,00	138.000.000,00	197,14
2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	62.500.000,00	61.354.690,00	98,17
3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	350.000.000,00	387.522.986,00	110,72
4	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	510.150.000,00	664.210.000,00	130,20
5	Penjualan Hasil Pertanian	-	103.818.750,00	-
6	Penjualan Hasil Perkebunan	-	1.200.000,00	-
7	Penjualan Hasil Peternakan	-	143.768.000,00	-
8	Penjualan Alat Tepat Guna	-	18.500.000,00	-
	Jumlah	**992.650.000,00**	**1.518.374.426,00**	**152,96**

Penjelasan:

Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp138.000.000,00 atau 197,14 dari target, merupakan hasil lelang peralatan/perlengkapan kantor semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat atau usang. Lelang tersebut dilakukan oleh DPPKA.

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua dianggarkan sebesar Rp62.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp61.354.690,00 atau 98,17% dari target, merupakan hasil lelang kendaraan dinas roda dua semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat. Lelang tersebut dilakukan oleh DPPKA.

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp387.522.986,00 atau 110,72% dari target, merupakan hasil lelang kendaraan dinas roda empat semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat. Lelang tersebut dilakukan oleh DPPKA.

Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan dianggarkan sebesar Rp510.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp664.210.000,00 atau 130,20% merupakan hasil lelang bekas bongkaran bangunan semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat. Lelang tersebut dilakukan oleh DPPKA.

Penjualan Hasil Pertanian direalisasikan sebesar Rp103.818.750,00 merupakan penjualan hasil pertanian pada Dinas Pertanian.

Penjualan Hasil Perkebunan direalisasikan sebesar Rp1.200.000,00 merupakan hasil lelang kayu yang sudah tidak dapat digunakan. Lelang tersebut dilakukan oleh DPPKA.

Penjualan Hasil Peternakan direalisasikan sebesar Rp143.768.000,00 merupakan penjualan ternak afkir pada DPPKA. Ternak afkir adalah hewan ternak yang sudah produktif lagi, dan apabila terus dipelihara maka biaya pemeliharaannya akan lebih besar daripada hasil yang diperoleh.

Penjualan Alat Tepat Guna direalisasikan sebesar Rp18.500.000,00 merupakan penjualan alat tepat guna yang belum masuk pada Perda Retribusi Daerah. Penjualan Alat Tepat Guna tersebut merupakan pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan dari Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp6.250.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp10.655.890.362,00 atau 170,49% meliputi penerimaan jasa giro Rekening Kas Daerah pada Bank BPD DIY sebesar Rp10.352.342.162,00 dan jasa giro Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang sudah dilimpahkan ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp303.548.200,00.

Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp21.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp28.033.825.300,27 atau 133,49% meliputi bunga deposito pada:

1) Bank BPD sebesar Rp23.231.250.000,00.
2) Bank BTN sebesar Rp2.112.027.400,27.
3) Bank BRI sebesar Rp1.200.136.954,00.
4) Bank BNI sebesar Rp1.490.410.946,00.

Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Tuntutan Ganti Rugi Daerah Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp76.250.000,00 merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Pembebanan kepada Pengawai Negeri Sipil kelalaian yang dilakukan.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp279.294.322,10. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direalisasikan pada DPPKA dan merupakan penerimaan dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada semua SKPD baik berupa pekerjaan fisik maupun non fisik. Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp184.634.734,90 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp463.929.057,00. Hal ini menunjukkan pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan fisik ataupun non fisik semakin meningkat.

Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp41.443.203.350,00 dan realisasi sebesar Rp53.150.113.250,00 atau 128,25%. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pendapatan Denda Pajak Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp7.255.565.800,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp45.894.547.450,00.

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp54.940.400,00 dan realisasi sebesar Rp123.410.800,00 atau 224,63%. Pendapatan Denda Retribusi direalisasikan pada DPPKA sebesar Rp8.577.300,00 serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp114.833.500,00 Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp48.439.608,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp74.971.192,00.

Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian merupakan penerimaan pengembalian belanja periode tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan pendapatan.

Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp427.488.788,00 Pendapatan dari Pengembalian meliputi:

1) Pengembalian kelebihan gaji dan tunjangan sebesar Rp25.049.144,00.
2) Pengembalian Dana Penyesuaian sebesar Rp312.025.366,00.
3) Pengembalian dari BOK Trans Jogja sebesar Rp85.164.997,00.
4) Pengembalian Dana Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp3.324.281,00.
5) Pengembalian kelebihan honorarium sebesar Rp1.925.000,00.

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direalisasikan sebesar Rp153.561.614,00. Pendapatan tersebut berasal dari Kontribusi/bunga dari Pengelolaan Dana Bergulir yang dikelola oleh SKPD Teknis. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir disajikan oleh DPPKA.

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD dianggarkan sebesar Rp27.581.735.000,00 dan realisasi sebesar Rp34.719.419.571,56 atau 125,88%. Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp4.829.432.873,18 atau 16,16% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD Tahun 2016 yaitu sebesar Rp29.889.986.698,38. Adapun penerimaan Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

No	Uraian	Tahun 2017		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	RS. Grhasia	17.500.000.000,00	20.803.911.902,56	118,88
2	RS Paru Respira	4.500.000.000,00	7.535.731.692,00	167,46
3	Balai Latihan Pendidikan dan Teknik	1.945.735.000,00	1.753.875.862,00	90,14
4.	Bapel Jamkesos	36.000.000,00	40.317.341,00	111,99
5	Balai Pelatihan Kesehatan	3.600.000.000,00	4.585.582.774,00	127,38
	Jumlah	**27.581.735.000,00**	**34.719.419.571,56**	**125,88**

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD pada BLPT dianggarkan sebesar Rp1.945.735.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.753.875.862,00 atau sebesar 90,14% dari anggaran, tidak mencapai target karena:

a) Beberapa sarana dan prasarana sedang dalam kondisi renovasi sehingga pemanfaatan tidak bisa dilakukan maksimal.
b) Rally sejak tahun 2017 sudah tidak beroprasi karena habis kontrak.
c) Jumlah personel pada UPJ Mesin berkurang dari 25 orang menjadi 10 orang tapi target pendapatan tidak ada perubahan sehingga pendapatan tidak dapat mencapai target.
d) Persaingan usaha di bidang yang sama (ubut,Fraiz, CNC dan rekayasa) semakin ketat.

Pendapatan dari Pengelolaan BUKP

Pendapatan dari pengelolaan BUKP dianggarkan sebesar Rp326.273.345,19 dan direalisasikan sebesar Rp304.879.469,01 atau 93,44%, tidak mencapai target karena turunnya laba BUKP sebagai dampak adanya persaingan ketat pada segmen mikro pada Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan di wilayah kerja BUKP, terutama di wilayah kerja BUKP Kota Yogyakarta. Pendapatan dari pengelolaan BUKP meliputi pendapatan dari Dana Pembinaan yang direalisasikan sebesar Rp170.593.640,65 dan Jasa Produksi direalisasikan sebesar Rp134.285.828,36.

Pendapatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pendapatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp3.138.512.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.793.700.867,00 atau 89,01%. Realisasi Pendapatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2017 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.688.747.087,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp104.953.780,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Uraian	Tahun 2017		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sewa Tanah dan Bangunan	36.137.500,00	225.488.222,00	623,97
2	Sewa Lahan	100.000.000,00	112.823.220,00	112,82
3	Pengelolaan Terminal	315.324.500,00	365.606.700,00	115,95
4	Penggunaan Asrama	3.000.000,00	3.845.000,00	128,17
5	Pengelolaan Hutan Lindung Mangunan	1.022.550.000,00	1.962.831.125,00	191,95
6	Penjualan Air Curah	1.620.000.000,00	81.606.600,00	5,04
7	Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan di Kompleks Kepatihan Danurejan	41.500.000,00	41.500.000,00	100,00
	Jumlah	**3.138.512.000,00**	**2.793.700.867,00**	**89,01**

Penjelasan:

Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp36.137.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp225.488.222,00 atau 623,97% merupakan pendapatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp16.637.500,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp19.500.000,00 serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp189.350.722,00.

Sewa Lahan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp112.823.220,00 atau 112,82% merupakan penerimaan sewa lahan pada Dinas Pariwisata.

Pendapatan Pengelolaan Terminal dianggarkan sebesar Rp315.324.500,00 dan realisasi sebesar Rp365.606.700,00 atau 115,95% merupakan pendapatan pada Dinas Perhubungan.

Pendapatan Penggunaan Asrama dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.845.000,00 atau 128,17% merupakan pendapatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan (Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya).

Pendapatan Pengelolaan Hutan Lindung Mangunan dianggarkan sebesar Rp1.022.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.962.831.125,00 atau 191,95% merupakan pendapatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pendapatan Penjualan Air Curah dianggarkan sebesar Rp1.620.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp81.606.600,00 atau 5,04% merupakan pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman, Energi dan Sumber Daya Mineral (Balai PISAM) yang berasal dari penjualan air produksi kepada PDAM Kabupaten Bantul dan PDAM Kabupaten Sleman. Pendapatan Penjualan Air Curah hanya mencapai target sebesar 5,04% karena produksi air tidak sesuai dengan target yang ditetapkan terkait dengan kendala sarana prasarana dan personalia.

Pendapatan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan di Komplek Kepatihan Danurejan dianggarkan sebesar Rp41.500.000,00 merupakan pendapatan pada Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Protokol).

Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp791.500.000,00 dan realisasi 100% merupakan penerimaan dari Diklat Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pendapatan Denda Lain-lain

Pendapatan Denda Lain-lain dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp43.000.000,00 atau 4.300% merupakan penerimaan dari Denda Pelanggaran SPM pada Dinas Perhubungan (UPT Trans Jogja) sebesar Rp35.500.000,00 dan Denda dari Dana Bergulir sebesar Rp7.500.000,00.

Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pendapatan Tindak Lanjut Hasil Temuan dianggarkan sebesar Rp21.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.853.885.723,42 atau 13.151,55%. Realisasi tersebut meliputi:

1) Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Daerah/Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.106.854.669,00.
2) Tindak Lanjut Temuan BPK RI/BPKP sebesar Rp1.713.791.054,42.
3) Tindak Lanjut Hasil Temuan TPTGR sebesar Rp33.240.000,00.

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

Pendapatan Lain-lain dianggarkan sebesar Rp21.457.489.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp19.329.684.077,81 atau 90,08% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain

No	Uraian	Tahun 2017		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Lain-lain	-	139.702.339,00	-
2	Surat Keterangan Asal Ikan	5.000.000,00	6.793.500,00	135,87
3	Pengujian Lab/HI/AITest	50.000,00	50.000,00	100,00
4	Padi Konsumsi Non Benih	-	23.402.500,00	
5	Pembuatan STNK Baru	32.548.000,00	40.194.000,00	123,49
6	Pengujian Lingkungan	98.000.000,00	74.450.000,00	75,97
7	Sapi Potong Paksa	-	2.000.000,00	-
8	PendapatanTiket Trans Jogja	21.300.000.000,00	18.999.643.738,81	89,20
9	Pengujian Air dan Air Limbah di Laboratorium	18.211.000,00	34.030.000,00	186,87
10	Penggantian Fotocopy Arsip	2.000.000,00	4.723.000,00	236,15
11	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor di Laboratorium	1.680.000,00	4.695.000,00	279,46
	Jumlah	**21.457.489.000,00**	**19.329.684.077,81**	**90,08**

Penjelasan:

Pendapatan Lain-lain direalisasikan sebesar Rp139.702.339,00 merupakan penerimaan yang tidak dapat dikelompokkan dalam kode rekening rincian obyek pendapatan yang ada pada DPPKA antara lain penutupan rekening tabungan.

Surat Keterangan Asal Ikan dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.793.500,00 merupakan pendapatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pengujian Lab/HI/AI Test dianggarkan sebesar Rp50.000,00 dan realisasi 100% merupakan Pendapatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan.

Padi Konsumsi (npn benih) dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp23.402.500,00 merupakan Pendapatan pada Dinas Pertanian.

Pembuatan STNK Baru dianggarkan sebesar Rp32.548.000,00 dan realisasi sebesar Rp40.194.000,00 atau 123,49% merupakan penerimaan dari pembuatan duplikat STNK yang hilang pada DPPKA.

Pengujian Lingkungan dianggarkan sebesar Rp98.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp74.450.000,00 atau 75,97% merupakan penerimaan dari hasil pengujian lingkungan kerja seperti kebisingan, debu, getaran dan iklim kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sapi Potong Paksa direalisasikan sebesar Rp2.000.000,00 merupakan penerimaan atas penjualan sapi perah yang mengalami sakit bloat/tympani pada Dinas Pertanian.

Pendapatan Tiket Trans Jogja dianggarkan sebesar Rp21.300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.999.643.738,81 atau 89,20% merupakan penerimaan dari hasil penjualan tiket Trans Jogja yang dikelola oleh PT. Anindya Mitra Internasional dan disajikan sebagai pendapatan Dinas Perhubungan. Realisasi Pendapatan Tiket Trans Jogja Tahun 2017 sebesar Rp18.999.643.738,81 mengalami penurunan sebesar Rp2.398.127.049,11 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tiket Trans Jogja Tahun 2016 sebesar Rp21.397.770.787,92. Penurunan penerimaan pendapatan tiket Trans Jogja tersebut disebabkan adanya penurunan jumlah penumpang sebagai dampak semakin banyaknya transportasi online.

Pendapatan Pengujian Air dan Air Limbah di Laboratorium dianggarkan sebesar Rp18.211.000,00 dan realisasi sebesar Rp34.030.000,00 atau 186,87% merupakan penerimaan pendapatan pada Badan Lingkungan Hidup.

Penggantian Foto Copy Arsip dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.723.000,00 atau 236,15% merupakan penerimaan penggantian biaya foto copy arsip pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor di Laboratorium dianggarkan sebesar Rp1.680.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.695.000,00 atau 279,46% merupakan penerimaan pendapatan pada Badan Lingkungan Hidup.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer Rp3.218.782.586.692,00 Rp2.215.906.007.176,00

Anggaran Pendapatan Transfer Tahun 2017 sebesar Rp3.284.457.694.835,00 dan realisasi yang diterima secara kas sebesar Rp3.218.782.586.692,00 atau (98%), sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp65.675.109.143,00. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2017 sebesar Rp3.218.782.586.692,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.002.876.579.516,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2016 sebesar Rp2.215.906.007.176,00. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5.13
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**				
a.	Bagi Hasil Pajak	130.852.450.047,00	98.447.376.907,00	75,24	113.024.692.993,00
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya A	29.443.411,00	36.078.889,00	122,54	40.735.531,00
c.	Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000,00	1.314.372.147.000,00	100,00	940.835.434.000,00
d.	Dana Alokasi Khusus	1.000.317.201.500,00	967.000.859.044,00	96,67	643.207.672.956,00
	Jumlah	**2.445.571.241.958,00**	**2.379.856.461.840,00**	97,31	**1.697.108.535.480,00**
2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**				
	Dana Otonomi Khusus	-	-		-
	Dana Keistimewaan	784.223.253.877,00	784.272.397.752,00	100,01	477.494.515.166,00
	Dana Penyesuaian	53.998.349.000,00	53.998.349.000,00	100,00	40.710.549.000,00
	Jumlah	**838.221.602.877,00**	**838.270.746.752,00**	**100,01**	**518.205.064.166,00**
3	**Transfer Pemerintah Provinsi atau Pemda Lainnya**				
	Bantuan Keuangan	664.850.000,00	655.378.100,00	98,58	592.407.530,00
	Jumlah	**664.850.000,00**	**655.378.100,00**	**98,58**	**592.407.530,00**
	Jumlah Pendapatan Transfer	**3.284.457.694.835,00**	**3.218.782.586.692,00**	**98,00**	**2.215.906.007.176,00**

Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp130.852.450.047,00 dan realisasi sebesar Rp98.447.376.907,00 atau 75,24%. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp14.577.316.086,00 atau 12,90% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2016 yaitu sebesar Rp113.024.692.993,00. Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.995.973.205,00	3.810.550.000,00	76,27	7.219.788.919,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	119.970.752.242,00	88.686.819.187,00	73,92	99.625.885.657,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	5.885.724.600,00	5.950.007.720,00	101,09	6.179.018.417,00
	Jumlah	**130.852.450.047,00**	**98.447.376.907,00**	**75,24**	**113.024.692.993,00**

Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target anggaran dan telah dicatat sesuai dengan transfer dari pusat.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp29.443.411,00 dan realisasi sebesar Rp36.078.889,00 atau 122,54% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi SDH	6.498.411,00	19.361.624,00	297,94	7.201.587,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)	22.945.000,00	16.717.265,00	72,86	33.533.944,00
	Jumlah	**29.443.411,00**	**36.078.889,00**	122,54	**40.735.531,00**

Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi SDH dianggarkan sebesar Rp6.498.411,00 dan realisasi sebesar Rp19.361.624,00 atau 297,94%. Realisasi penerimaan tersebut sesuai dengan transfer dari pusat.

Pendapatan dari Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land Rent*) dianggarkan sebesar Rp22.945.000,00 dan realisasi sebesar Rp16.717.265,00 atau sebesar 72,86% dari anggaran, realisasi telah sesuai transfer dari pusat.

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.314.372.147.000,00, dan realisasi 100%.

Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp1.000.317.201.500,00 dan realisasi Rp967.000.859.044,00 atau 96,67% tidak mencapai target sebesar Rp33.316.342.456,00 dengan rincian:

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
A.	**DAK Fisik**				
1	DAK Pendidikan	67.506.628.000,00	57.083.381.160,00	84,56	0
2	DAK Kesehatan	1.343.232.000,00	1.154.198.580,00	85,93	28.380.624.000,00
3	DAK Infrastruktur Jalan	27.589.116.000,00	27.585.554.000,00	99,99	5.537.640.000,00
4	DAK Infrastruktur Irigasi	6.185.302.000,00	5.828.257.400,00	94,23	4.125.620.000,00
5	DAK Kelautan dan Perikanan	5.047.831.000,00	4.312.218.500,00	85,43	3.731.608.000,00
6	DAK Pertanian	3.271.004.000,00	3.099.739.000,00	94,76	13.742.175.000,00
7	DAK Kehutanan	-	-	-	735.290.000,00
8	DAK Keselamatan Transportasi Darat	-	-	-	1.380.560.000,00
9	Dana Alokasi Khusus Energi Skala Kecil	647.639.500,00	647.639.500,00	100,00	21.736.245.000,00
10	DAK Pariwisata	709.973.600,00	709.973.600,00	100,00	-
11	Penyelesaian Atas Kekurangan Penyaluran DAK	14.917.069.000,00	14.917.069.000,00	100,00	-
	Jumlah	**127.217.795.100,00**	**115.338.030.740,00**	**90,66**	**79.369.762.000,00**
B.	**DAK Non Fisik**				
1	Bantuan Operasional Sekolah	576.956.200.000,00	565.206.926.000,00	97,96	556.934.668.165,00
2	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	2.333.757.400,00	2.333.757.400,00	100,00	2.500.000.000,00
3	Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan	-	-	-	4.403.242.791,00
4	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.136.156.000,00	1.136.156.000,00	100,00	-
5	Dana Tunjangan Profesi Guru	288.716.293.000,00	280.809.638.904,00	97,26	-
6	Dana Tambahan Penghasilan Guru	3.957.000.000,00	2.176.350.000,00	55,00	-
	Jumlah	**873.099.406.400,00**	**851.662.828.304,00**	97,54	**563.837.910.956,00**
	Jumlah Total	**1.000.317.201.500,00**	**967.000.859.044,00**	96,67	**643.207.672.956,00**

Dana Keistimewaan Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp784.223.253.877,00 berasal dari alokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 Lampiran V sebesar Rp800.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2016 sebesar Rp15.776.746.123,00 sehingga menjadi sebesar Rp784.223.253.877,00. Adapun realisasi penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2017 adalah sebesar Rp784.272.397.752,00 atau sebesar 100,01% dari anggaran. Kelebihan penerimaan Dana Keistimewaan sebesar Rp49.143.875,00 telah dikembalikan ke rekening Kas Negara pada tanggal 26 Oktober 2017.

Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp53.998.349.000,00 dan realisasi sebesar Rp53.998.349.000,00 atau 100% merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID).

Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp664.850.000,00 dan realisasi Rp655.378.100,00 atau 98,58%. Bantuan Keuangan tersebut Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan peruntukkan sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 5/PERJ/GUB/IV/2015 atau 16.1/PK/Bt/2015 atau 17.1/PK.KDH/A/2015 atau 39/Perj.YK/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat beserta addendumnya. Rincian Berita Acara Hasil Perhitungan Kontribusi (sharing) Biaya Pengelolaan IPAL Terpusat TA 2017 tanggal 12 September 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17
Rincian Kontribusi (sharing) Biaya Pengelolaan IPAL Terpusat TA 2017

No	Pemerintah Daerah	Cost Sharing (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Kota Yogyakarta	505.691.000,00	505.691.000,00	100,00
2.	Kabupaten Sleman	87.960.700,00	80.000.000,00	90,95
3.	Kabupaten Bantul	69.687.100,00	69.687.100,00	100,00
	Jumlah	**663.338.700,00**	**655.378.100,00**	**98,80**

Berdasarkan data di atas, Pemerintah Kabupaten Sleman baru merealisasikan sebesar Rp80.000.000,00 atau 90,95% sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp7.960.700,00 dan kekurangan tersebut akan dibayarkan pada Tahun 2018. Dengan demikian, Pemda DIY memiliki Piutang Bantuan Keuangan per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.960.700,00 kepada Pemda Kabupaten Sleman.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah — Rp14.485.236.531,00 — Rp9.537.781.616,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 merupakan Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditetapkan sebesar Rp14.827.192.847,00 dan realisasi sebesar Rp14.485.236.531,00 atau 97,69%. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp4.947.454.915,00 atau 51,87% dibandingakan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp9.537.781.616,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri:**				
a.	Dealer Otomotif	5.145.500.000,00	4.574.898.000,00	88,91	4.438.730.000,00
b.	Main Daeler	-	32.100.000,00	-	30.900.000,00
c.	PT. Jasa Raharja	3.369.600.000,00	3.537.000.000,00	104,97	3.369.600.000,00
	Jumlah	**8.515.100.000,00**	**8.143.998.000,00**	**95,64**	**7.839.230.000,00**
2	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah**				
a.	Pendapatan Hibah dari Rupiah Murni	-	4.237.446.012,00	-	140.000.000,00
b.	Pendapatan Hibah dari Multilateral	6.312.092.847,00	2.103.792.519,00	33,33	1.558.551.616,00
	Jumlah	**6.312.092.847,00**	**6.341.238.531,00**	**100,46**	**1.698.551.616,00**
	Jumlah Pendapatan Hibah	**14.827.192.847,00**	**14.485.236.531,00**	**97,69**	**9.537.781.616,00**

5.1.2 Belanja Rp4.920.626.776.618,68 Rp3.847.962.965.846,72

Anggaran Belanja Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp5.257.141.873.025,92 termasuk di dalamnya anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp800.000.000.000,00. Sampai dengan akhir Tahun 2017, anggaran belanja tersebut telah terserap sebesar Rp4.920.626.776.618,68 atau 93,60% dari anggaran dengan rincian realisasi Belanja Non Dana Keistimewaan sebesar Rp4.147.233.373.089,68 dan realisasi Belaja Dana Keistimewaan sebesar Rp773.393.403.529,00. Rincian realisasi belanja dan transfer terdiri dari:

5.1.2.1 Belanja Operasi Rp3.140.664.073.385,38 Rp2.312.451.570.808,70

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp3.380.370.920.254,04 dan realisasi sebesar Rp3.140.664.073.385,38 atau 92,91%. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 sebesar Rp3.140.664.073.385,38 mengalami kenaikan sebesar Rp828.212.502.576,68 atau 35,82% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp2.312.451.570.808,70. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai Rp1.428.694.957.043,00 Rp707.929.899.606,50

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp1.495.973.381.376,95 terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.312.691.992.131,95 dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp183.281.389.245,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 sebesar Rp1.428.694.957.043,00 terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.258.150.198.019,00 dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp170.544.759.024,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp720.765.057.436,50 atau 101,81% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 yaitu sebesar Rp707.929.899.606,50. Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.258.150.198.019,00 atau 95,85% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung
Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	**Gaji dan Tunjangan**				
a.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	652.423.974.743,28	637.282.995.900,00	(15.140.978.843,28)	97,68
b.	Tunjangan Keluarga	56.650.058.720,72	55.011.455.351,00	(1.638.603.369,72)	97,11
c.	Tunjangan Jabatan	12.487.650.336,00	12.215.230.000,00	(272.420.336,00)	97,82
d.	Tunjangan Fungsional	37.421.056.400,00	36.481.175.000,00	(939.881.400,00)	97,49
e.	Tunjangan Fungsional Umum	10.732.697.875,00	10.322.315.700,00	(410.382.175,00)	96,18
f.	Tunjangan Beras	30.767.077.056,40	29.958.743.936,00	(808.333.120,40)	97,37
g.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	1.740.755.335,80	1.410.086.915,00	(330.668.420,80)	81,00
h.	Pembulatan Gaji	11.139.815,80	7.577.893,00	(3.561.922,80)	68,03
j.	Uang Paket	149.940.000,00	149.040.000,00	(900.000,00)	99,40
k.	Tunjangan Badan Musyawarah	47.763.000,00	47.110.500,00	(652.500,00)	98,63
l.	Tunjangan Komisi	95.526.000,00	94.917.000,00	(609.000,00)	99,36
m.	Tunjangan Badan Anggaran	50.503.500,00	50.503.500,00	-	100,00
n.	Tunjangan Badan Kehormatan	11.223.000,00	11.223.000,00	-	100,00
o.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	82.541.250,00	66.446.250,00	(16.095.000,00)	80,50
p.	Tunjangan Perumahan	11.275.200.000,00	10.687.200.000,00	(588.000.000,00)	94,79

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
r.	Uang Jasa Pengabdian	36.000.000,00	4.500.000,00	(31.500.000,00)	12,50
s.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	494.400.000,00	494.400.000,00	-	100,00
t.	Tunjangan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais	27.535.500,00	27.274.500,00	(261.000,00)	99,05
u.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Kematian	4.629.600.218,00	2.945.503.015,00	(1.684.097.203,00)	63,62
v.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	21.401.798.458,00	17.925.300.987,00	(3.476.497.471,00)	83,76
w.	Tunjangan Bahaya Radiasi	207.400.000,00	196.260.000,00	(11.140.000,00)	94,63
x.	Tunjangan Reses	1.650.000.000,00	825.000.000,00	(825.000.000,00)	50,00
y.	Tunjangan Transportasi	2.862.120.000,00	2.848.090.000,00	(14.030.000,00)	99,51
	Jumlah	**845.255.961.209,00**	**819.062.349.447,00**	**(26.193.611.762,00)**	**96,90**
2	**Tambahan Penghasilan PNS**				
a.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.427.517.000,00	1.158.187.500,00	(3.269.329.500,00)	26,16
b.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	288.767.893.000,00	264.145.336.519,00	(24.622.556.481,00)	91,47
c.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	122.586.245.700,00	122.511.049.562,00	(75.196.138,00)	99,94
d.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Biaya Hidup	552.000.000,00	489.600.000,00	(62.400.000,00)	88,70
	Jumlah	**416.333.655.700,00**	**388.304.173.581,00**	**(28.029.482.119,00)**	**93,27**
3	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH**				
a.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.260.000.000,00	7.218.000.000,00	(42.000.000,00)	99,42
b.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	2.460.728.750,00	2.460.728.750,00	-	100,00
	Jumlah	**9.720.728.750,00**	**9.678.728.750,00**	**(42.000.000,00)**	**99,57**
4	**Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah**				
a.	Biaya Insentif Pajak Daerah	40.196.658.404,45	40.174.399.758,00	(22.258.646,45)	99,94
	Jumlah	**40.196.658.404,45**	**40.174.399.758,00**	**(22.258.646,45)**	**99,94**
5	**Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**				
a.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	639.163.349,00	426.738.270,00	(212.425.079,00)	66,77
b.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	513.101.919,50	503.808.213,00	(9.293.706,50)	98,19
c.	Insentif Pemungutan Retribusi Perijinan Tertentu	32.722.800,00	-	(32.722.800,00)	0,00
	Jumlah	**1.184.988.068,50**	**930.546.483,00**	**(254.441.585,50)**	**78,53**
	Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung	**1.312.691.992.131,95**	**1.258.150.198.019,00**	**(54.541.794.112,95)**	**95,85**

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp687.210.753.464,50 atau 120,36% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2016 yaitu sebesar Rp570.939.444.554,50.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2017 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Per SKPD

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	794.482.405.010,36	755.116.513.970,00	(39.365.891.040,36)	95,05
2	Dinas Kesehatan	16.342.727.543,60	15.977.233.077,00	(365.494.466,60)	97,76
3	RS Grhasia	16.979.226.905,18	16.793.283.587,00	(185.943.318,18)	98,90
4	RS. Respira	9.090.729.433,40	8.917.897.451,00	(172.831.982,40)	98,10
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	21.077.712.503,53	20.570.560.485,00	(507.152.018,53)	97,59
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.709.481.042,51	2.601.899.725,00	(107.581.317,51)	96,03
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.783.244.904,20	3.690.354.939,00	(92.889.965,20)	97,54
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7.896.502.685,13	7.652.480.382,00	(244.022.303,13)	96,91
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.125.982.637,53	3.024.727.914,00	(101.254.723,53)	96,76
10	Dinas Sosial	17.067.805.203,80	16.770.977.171,00	(296.828.032,80)	98,26
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.382.371.870,60	14.966.993.357,00	(415.378.513,60)	97,30
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	4.215.273.553,44	4.070.830.106,00	(144.443.447,44)	96,57
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	4.516.616.196,40	4.451.729.602,00	(64.886.594,40)	98,56
14	Badan Lingkungan Hidup	3.123.692.273,80	3.071.087.553,00	(52.604.720,80)	98,32
15	Dinas Perhubungan	9.736.893.687,24	9.350.168.840,00	(386.724.847,24)	96,03
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.488.647.314,80	4.331.659.032,00	(156.988.282,80)	96,50
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3.019.490.813,27	2.824.497.632,00	(194.993.181,27)	93,54
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Moda	2.580.672.353,60	2.480.810.352,00	(99.862.001,60)	96,13
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.117.794.073,00	1.068.473.621,00	(49.320.452,00)	95,59
20	Dinas Kebudayaan	9.720.414.147,20	9.509.892.179,00	(210.521.968,20)	97,83
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.384.621.337,00	7.244.429.218,00	(140.192.119,00)	98,10
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.484.235.112,75	8.092.830.188,00	(391.404.924,75)	95,39
23	Dinas Pariwisata	3.843.158.093,60	3.750.033.405,00	(93.124.688,60)	97,58
24	Dinas Pertanian	21.129.589.079,40	20.452.730.031,00	(676.859.048,40)	96,80
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	23.254.039.234,20	22.532.777.748,00	(721.261.486,20)	96,90
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.760.384.823,20	8.549.804.367,00	(210.580.456,20)	97,60
27	Gubernur dan Wakil Gubernur	2.685.732.312,40	2.681.403.984,00	(4.328.328,40)	99,84
28	Sekretariat Daerah	24.204.423.302,31	23.450.546.679,00	(753.876.623,31)	96,89
29	Sekretariat Paramparapraja	869.527.077,00	817.277.839,00	(52.249.238,00)	93,99
30	Kantor Perwakilan Daerah	1.100.597.929,00	1.087.876.872,00	(12.721.057,00)	98,84
31	DPRD	28.204.055.000,00	26.406.022.097,00	(1.798.032.903,00)	93,62
32	Sekretariat DPRD	5.109.593.142,40	4.852.304.024,00	(257.289.118,40)	94,96
33	Inspektorat	5.027.610.141,38	4.963.701.012,00	(63.909.129,38)	98,73
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.791.803.657,40	6.644.746.376,00	(147.057.281,40)	97,83
35	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	81.756.871.408,52	76.130.779.762,00	(5.626.091.646,52)	93,12
36	Badan Kepegawaian Daerah	128.788.535.445,00	128.563.542.557,00	(224.992.888,00)	99,83
37	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.839.530.883,80	4.687.320.885,00	(152.209.998,80)	96,85
	Jumlah	**1.312.691.992.131,95**	**1.258.150.198.019,00**	**(54.541.794.112,95)**	**95,85**

Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp33.554.303.972,00 atau 24,49% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2016 yaitu sebesar Rp136.990.455.052,00.

Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp170.544.759.024,00 atau 93,05% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Sesuai Obyek Belanja

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Selisih Lebih (Kurang Rp	%
1	Honorarium PNS	46.577.339.572,00	43.246.810.750,00	(3.330.528.822,00)	92,85
2	Honorarium Non PNS	121.565.984.494,00	113.051.866.025,00	(8.514.118.469,00)	93,00
3	Uang Lembur	1.291.863.000,00	1.176.250.500,00	(115.612.500,00)	91,05
4	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	0,00
5	Belanja Pegawai BLUD	13.579.256.179,00	13.017.456.749,00	(561.799.430,00)	95,86
6	Belanja Pegawai BOS	263.946.000,00	52.375.000,00	(211.571.000,00)	19,84
	Jumlah	**183.281.389.245,00**	**170.544.759.024,00**	**(12.736.630.221,00)**	**93,05**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2017 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Per SKPD

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Selisih Lebih (Kurang Rp	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	45.705.290.320,00	39.969.817.580,00	(5.735.472.740,00)	87,45
2	Dinas Kesehatan	4.090.323.447,00	3.980.902.375,00	(109.421.072,00)	97,32
3	RS Grhasia	8.741.118.000,00	8.348.383.376,00	(392.734.624,00)	95,51
4	RS. Respira	2.136.590.500,00	2.114.877.698,00	(21.712.802,00)	98,98
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	20.355.473.500,00	19.494.476.300,00	(860.997.200,00)	95,77
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	6.452.393.800,00	5.758.840.000,00	(693.553.800,00)	89,25
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.136.532.600,00	1.121.623.100,00	(14.909.500,00)	98,69
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.247.685.452,00	3.169.167.600,00	(78.517.852,00)	97,58
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.002.220.000,00	3.814.770.000,00	(187.450.000,00)	95,32
10	Dinas Sosial	7.258.478.405,00	7.166.792.405,00	(91.686.000,00)	98,74
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.981.897.015,00	3.931.536.033,00	(50.360.982,00)	98,74
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	1.732.403.000,00	1.716.473.000,00	(15.930.000,00)	99,08
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	1.320.522.600,00	1.306.368.550,00	(14.154.050,00)	98,93
14	Badan Lingkungan Hidup	2.107.527.400,00	2.010.875.600,00	(96.651.800,00)	95,41
15	Dinas Perhubungan	2.530.357.530,00	2.494.894.065,00	(35.463.465,00)	98,60
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.011.704.800,00	983.553.400,00	(28.151.400,00)	97,22
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.406.758.600,00	1.388.418.600,00	(18.340.000,00)	98,70
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	347.269.200,00	318.563.200,00	(28.706.000,00)	91,73
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	289.849.200,00	280.144.200,00	(9.705.000,00)	96,65
20	Dinas Kebudayaan	10.672.495.100,00	9.966.538.100,00	(705.957.000,00)	93,39
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.102.882.800,00	982.298.300,00	(120.584.500,00)	89,07
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.029.300.000,00	2.953.496.600,00	(75.803.400,00)	97,50
23	Dinas Pariwisata	880.838.200,00	859.323.200,00	(21.515.000,00)	97,56
24	Dinas Pertanian	5.654.394.500,00	4.992.650.500,00	(661.744.000,00)	88,30
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	6.118.433.550,00	5.912.833.012,00	(205.600.538,00)	96,64
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.888.068.800,00	1.831.868.800,00	(56.200.000,00)	97,02
27	Sekretariat Daerah	11.441.843.400,00	10.874.673.700,00	(567.169.700,00)	95,04
28	Sekretariat Paramparapraja	39.703.026,00	38.813.200,00	(889.826,00)	97,76
29	Kantor Perwakilan Daerah	910.870.250,00	909.020.250,00	(1.850.000,00)	99,80
30	Sekretariat DPRD	2.621.723.170,00	2.130.095.500,00	(491.627.670,00)	81,25
31	Inspektorat	3.428.863.000,00	3.419.253.000,00	(9.610.000,00)	99,72
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.502.588.000,00	3.289.855.500,00	(212.732.500,00)	93,93
33	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	8.499.665.480,00	8.192.792.680,00	(306.872.800,00)	96,39
34	Badan Kepegawaian Daerah	4.020.974.600,00	3.274.709.600,00	(746.265.000,00)	81,44
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.614.350.000,00	1.546.060.000,00	(68.290.000,00)	95,77
	Jumlah	**183.281.389.245,00**	**170.544.759.024,00**	**(12.736.630.221,00)**	**93,05**

b. Belanja Barang dan Jasa **Rp1.079.167.300.856,38** **Rp813.889.811.542,20**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.079.167.300.856,38 merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.136.518.067.342,38 dikurangi dengan realisasi Belanja HibahBarang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp50.461.684.116,00 dan Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp6.889.082.370,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.23
Konversi Belanja Hibah Barang Ke Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa	1.278.110.704.877,09	1.136.518.067.342,38	88,92	875.503.249.202,20
2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga:	(62.311.857.093,00)	(57.350.766.486,00)	92,04	(61.613.437.660,00)
a.	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak	(53.625.727.093,00)	(50.461.684.116,00)	94,10	(60.972.239.160,00)
b.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	(8.686.130.000,00)	(6.889.082.370,00)	79,31	(641.198.500,00)
	Jumlah	**1.215.798.847.784,09**	**1.079.167.300.856,38**	88,76	**813.889.811.542,20**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
Selanjutnya penyajian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar anggaran dan Belanja Barang dan Jasa sebelum konversi dikurangi dengan anggaran dan realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat dan anggaran serta realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2017 sebelum dikonversi dianggarkan sebesar Rp1.278.110.704.877,09 dan realisasi sebesar Rp1.136.518.067.342,38 atau 88,92%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp261.014.818.140,18 atau 29,81% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 yaitu sebesar Rp875.503.249.202,20. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Obyek Belanja

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	20.943.251.110,00	19.152.118.607,00	(1.791.132.503,00)	91,45
2	Belanja Bahan/Material	94.241.786.900,00	80.879.137.018,00	(13.362.649.882,00)	85,82
3	Belanja Jasa Kantor	257.666.760.911,00	229.374.881.021,00	(28.291.879.890,00)	89,02
4	Belanja Iuran BPJS	1.414.281.894,00	1.223.598.766,52	(190.683.127,48)	86,52
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.043.928.300,00	18.161.634.623,00	(2.882.293.677,00)	86,30
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.159.142.960,00	26.507.291.092,00	(3.651.851.868,00)	87,89
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.852.977.600,00	15.657.319.945,00	(2.195.657.655,00)	87,70
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.553.660.150,00	7.270.544.020,00	(1.283.116.130,00)	85,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	412.200.000,00	404.640.000,00	(7.560.000,00)	98,17
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.687.542.750,00	29.428.334.723,00	(3.259.208.027,00)	90,03
11	Belanja Makanan dan Minuman	83.188.065.250,00	74.125.065.588,00	(9.062.999.662,00)	89,11
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	714.750.000,00	676.484.250,00	(38.265.750,00)	94,65
13	Belanja Pakaian Kerja	4.804.314.100,00	4.635.313.200,00	(169.000.900,00)	96,48
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.467.826.400,00	4.284.790.050,00	(183.036.350,00)	95,90
15	Belanja Perjalanan Dinas	121.735.021.658,00	97.734.307.571,00	(24.000.714.087,00)	80,28
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.058.250.000,00	2.379.300.000,00	(678.950.000,00)	77,80
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknik PNS	2.061.248.500,00	2.037.540.301,00	(23.708.199,00)	98,85
18	Belanja Pemeliharaan	63.000.664.634,00	58.906.713.560,86	(4.093.951.073,14)	93,50
19	Belanja Jasa Konsultasi	59.518.213.367,00	55.637.704.166,00	(3.880.509.201,00)	93,48
20	Belanja Perawatan dan Pengobatan	1.161.918.700,00	395.957.545,00	(765.961.155,00)	34,08
21	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek Bagi Anggota DPRD	2.002.500.000,00	1.846.800.000,00	(155.700.000,00)	92,22
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek Bagi CPNS dan PTT	34.200.000,00	17.700.000,00	(16.500.000,00)	51,75
22	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	37.095.045.000,00	36.910.922.330,00	(184.122.670,00)	99,50
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	101.245.258.102,09	85.440.605.492,00	(15.804.652.610,09)	84,39
24	Belanja Hibah Barang/Jasa	53.625.727.093,00	50.461.684.116,00	(3.164.042.977,00)	94,10
25	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	8.686.130.000,00	6.889.082.370,00	(1.797.047.630,00)	79,31
26	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	135.422.679.200,00	125.327.588.000,00	(10.095.091.200,00)	92,55
27	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	25.226.960.700,00	23.899.015.000,00	(1.327.945.700,00)	94,74
28	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek Bagi Non PNS	316.100.000,00	306.050.000,00	(10.050.000,00)	96,82
29	Belanja Barang dan Jasa BOS	85.712.874.598,00	76.545.943.987,00	(9.166.930.611,00)	89,31
30	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	55.995.000,00	-	(55.995.000,00)	0,00
31	Dana Keistimewaan	1.430.000,00	-	(1.430.000,00)	0,00
	Jumlah	**1.278.110.704.877,09**	**1.136.518.067.342,38**	**(141.592.637.534,71)**	**88,92**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	288.435.910.421,00	259.346.854.551,00	(29.089.055.870,00)	89,91
2	Dinas Kesehatan	82.702.474.377,94	75.948.196.549,00	(6.754.277.828,94)	91,83
3	RS Grhasia	17.917.919.595,15	10.696.182.769,00	(7.221.736.826,15)	59,70
4	RS. Respira	12.334.320.778,00	8.928.356.356,00	(3.405.964.422,00)	72,39
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	101.437.973.070,00	86.132.515.418,86	(15.305.457.651,14)	84,91
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	30.356.326.265,00	27.366.816.697,00	(2.989.509.568,00)	90,15
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.735.923.838,00	3.572.272.625,00	(163.651.213,00)	95,62
8	Satuan Polisi Pamong Praja	5.436.862.550,00	4.980.418.252,00	(456.444.298,00)	91,60
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.136.858.175,00	11.342.610.037,00	(794.248.138,00)	93,46
10	Dinas Sosial	34.472.419.250,00	30.815.673.917,00	(3.656.745.333,00)	89,39
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.650.102.285,00	21.723.449.322,00	(1.926.652.963,00)	91,85
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	7.299.053.015,00	6.413.190.570,00	(885.862.445,00)	87,86
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	6.839.208.154,00	6.020.099.658,00	(819.108.496,00)	88,02
14	Badan Lingkungan Hidup	11.325.946.600,00	10.527.518.415,00	(798.428.185,00)	92,95
15	Dinas Perhubungan	93.406.298.368,00	86.420.484.222,00	(6.985.814.146,00)	92,52
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.999.106.725,00	10.531.464.679,00	(467.642.046,00)	95,75
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	6.264.457.208,00	6.044.623.728,00	(219.833.480,00)	96,49
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	4.647.837.700,00	4.187.990.137,00	(459.847.563,00)	90,11
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2.290.076.888,00	2.172.591.732,00	(117.485.156,00)	94,87
20	Dinas Kebudayaan	220.343.187.909,00	202.699.217.702,00	(17.643.970.207,00)	91,99
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	15.963.261.960,00	14.750.121.039,00	(1.213.140.921,00)	92,40
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.704.871.973,00	17.084.449.564,00	(1.620.422.409,00)	91,34
23	Dinas Pariwisata	20.359.934.600,00	19.489.602.663,00	(870.331.937,00)	95,73
24	Dinas Pertanian	19.103.395.471,00	15.904.946.195,00	(3.198.449.276,00)	83,26
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12.743.891.826,00	11.342.967.765,00	(1.400.924.061,00)	89,01
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.308.732.850,00	14.775.845.707,00	(532.887.143,00)	96,52
27	Sekretariat Daerah	52.337.630.275,00	44.881.904.868,00	(7.455.725.407,00)	85,75
28	Sekretariat Paramparapraja	352.512.000,00	254.037.569,00	(98.474.431,00)	72,06
29	Kantor Perwakilan Daerah	2.968.214.000,00	2.784.969.708,00	(183.244.292,00)	93,83
30	Sekretariat DPRD	75.745.851.710,00	58.750.124.559,00	(16.995.727.151,00)	77,56
31	Inspektorat	3.867.161.622,00	3.740.893.956,00	(126.267.666,00)	96,73
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.450.848.595,00	10.713.871.375,00	(1.736.977.220,00)	86,05
33	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	25.707.116.040,00	22.690.062.726,52	(3.017.053.313,48)	88,26
34	Badan Kepegawaian Daerah	13.729.900.300,00	11.748.988.596,00	(1.980.911.704,00)	85,57
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	12.735.118.483,00	11.734.753.715,00	(1.000.364.768,00)	92,14
	Jumlah	**1.278.110.704.877,09**	**1.136.518.067.342,38**	**(141.592.637.534,71)**	**88,92**

Realisasi belanja barang dan jasa senilai Rp1.136.518.067.342,38 termasuk realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD senilai Rp85.440.605.492,00 pada 5 BLUD yaitu RS Ghrasia sebesar Rp10.696.182.769,00, RS Paru Respira sebesar Rp8.928.356.356,00, BLPT sebesar Rp3.261.063.802,00, Bapel Jamkesos sebesar Rp57.184.280.598,00 dan Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp5.370.721.967,00 dengan rincian berikut:

Tabel 5.26

Rincian Realisasi Belanja BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A	**RS GHRASIA**	
1	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**667.005.950,00**
	Belanja Alat Tulis Kantor	97.730.050,00
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	55.550.000,00
	Belanja Perangko, Materai	6.723.800,00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	192.134.100,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	285.105.000,00
	Belanja Pengisian Pemadam Kebakaran	29.763.000,00
2	**Belanja Bahan dan Material**	**4.801.728.003,00**
	Belanja Bahan Obat-obatan	2.339.666.661,00
	Belanja bahan kimia	369.332.387,00
	Belanja Bahan Makanan Pasien	1.699.505.225,00
	Belanja bahan Percontohan	32.005.590,00
	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	354.609.490,00
	Belanja Barang Penghargaan	6.608.650,00
3	**Belanja Jasa Kantor**	**2.181.310.192,00**
	Belanja Telepon	15.843.102,00
	Belanja Air	56.467.745,00
	Belanja Listrik	455.066.460,00
	Belanja Surat Kabar	7.707.000,00
	Belanja Jasa Uji / Sertifikasi	17.603.061,00
	Belanja Transportasi & Akomodasi	8.197.750,00
	Belanja Dokumentasi	12.305.000,00
	Belanja Publikasi	19.843.441,00
	Belanja Analisa Laboratorium	3.012.500,00
	Belanja Test Psikologi	362.840.500,00
	Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian	43.500.000,00
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.131.327.204,00
	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	33.012.429,00
	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	14.584.000,00
4	**Belanja Premi Asuransi**	**65.853.020,00**
	Belanja Premi Asuransi	65.853.020,00
5	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**102.618.400,00**
	Belanja Jasa K I R	91.561.100,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.057.300,00
6	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**247.418.975,00**
	Belanja Cetak	247.418.975,00
7	**Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir**	**9.333.500,00**
	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit	8.233.500,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Belanja Sewa Lahan/ Tanah/ Hewan/ Tanaman	1.100.000,00
8	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**13.550.000,00**
	Blj Sewa meja kursi	1.650.000,00
	Blj Sewa tenda dan panggung	900.000,00
	Blj Sewa sound system	9.000.000,00
	Blj Sewa Peralatan Display	2.000.000,00
9	**Belanja Makanan dan Minuman**	**349.158.900,00**
	Belanja Makanan dan Minuman Harian	211.942.500,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	137.216.400,00
10	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**218.923.250,00**
	Belanja Pakaian Khusus	218.923.250,00
11	**Belanja Perjalanan Dinas**	**219.980.116,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.840.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	164.140.116,00
12	**Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek**	**98.145.200,00**
	Blj kursus-kursus singkat	61.310.000,00
	Belanja Seminar/Lokakarya	36.835.200,00
13	**Belanja Pemeliharaan**	**1.580.229.960,00**
	Belanja Pemeliharaan peralatan kantor	317.137.360,00
	Belanja Pemeliharaan alat-alat jaringan air	556.425.900,00
	Belanja Pemeliharaan bangunan	706.666.700,00
14	**Belanja Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber**	**40.628.500,00**
	Honor Tenaga Ahli Instruktur/Narasumber	40.628.500,00
15	**Belanja Perawatan Dan Pengobatan**	**2.580.000,00**
	Belanja Pemulasaraan Jenazah	2.580.000,00
16	**Belanja Kompensasi**	**10.500.000,00**
	Belanja Kompensasi.	10.500.000,00
17	**Belanja Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber**	**87.218.803,00**
	Honor Tenaga Ahli Instruktur/Narasumber	87.218.803,00
	Jumlah (Rp)	**10.696.182.769,00**
B	**RS RESPIRA**	
1	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**257.356.281,00**
	Belanja alat tulis kantor	64.491.100,00
	Belanja alat listrik dan elektronik	29.848.533,00
	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.710.850,00
	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	40.998.440,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	88.101.478,00
	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	3.005.880,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Belanja Perlengkapan Komputer	23.200.000,00
2	**Belanja Bahan/ Material**	**5.275.875.257,00**
	Belanja bahan/bibit tanaman	2.179.700,00
	Belanja bahan obat-obatan	3.356.955.166,00
	Belanja bahan kimia	1.744.681.391,00
	Belanja Makanan Pokok	168.059.000,00
	Belanja Penghargaan / Hadiah Lomba	4.000.000,00
3	**Belanja Jasa Kantor**	**1.438.782.699,00**
	Belanja jasa telepon	29.525.827,00
	Belanja Jasa air	23.212.445,00
	Belanja Jasa listrik	402.121.917,00
	Belanja Jasa surat kabar/majalah	4.260.000,00
	Belanja Jasa Sertifikasi	156.825.000,00
	Beban Transportasi Dan Akomodasi	20.325.000,00
	Belanja Publikasi	29.900.000,00
	Belanja Analisa Laboratorium	21.281.500,00
	Belanja Jasa Keamanan Kantor	357.743.831,00
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	336.235.923,00
	Belanja General Check Up	25.562.500,00
	Belanja Jasa Laundri	31.788.756,00
4	**Belanja Premi Asuransi**	**1.852.000,00**
	Iuran BPJS	1.852.000,00
5	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**45.491.936,00**
	Belanja Jasa Service	4.743.886,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.784.750,00
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.175.100,00
	Beban Pengecatan Kendaraan Bermotor	5.788.200,00
6	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**268.862.670,00**
	Belanja Persediaan Cetak	268.862.670,00
7	**Belanja Makanan dan Minuman**	**464.797.450,00**
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	427.741.750,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	37.055.700,00
8	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**3.603.496,00**
	Beban Persediaan Pakaian Khusus	3.603.496,00
9	**Belanja Perjalanan Dinas**	**100.805.300,00**
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.810.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.995.300,00
10	**Belanja Pemeliharaan**	**499.270.619,00**
	Belanja Peralatan dan Mesin	365.725.619,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	83.496.100,00
	Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	50.048.900,00
11	**Belanja Jasa Konsultasi**	**3.950.000,00**
	Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software	3.950.000,00
12	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**158.260.000,00**
	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	158.260.000,00
13	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**409.448.648,00**
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	409.448.648,00
	Jumlah (Rp)	**8.928.356.356,00**
C	**BLPT**	
1	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**373.764.321,00**
	Belanja alat tulis kantor	47.185.700,00
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	79.042.900,00
	Belanjan perangko, materai dan benda pos lainnya	3.464.000,00
	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	42.362.550,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.598.125,00
	Belanja Barang Dan Jasa B L U D	169.111.046,00
2	**Belanja Persediaan Bahan/ Material**	**321.626.834,00**
	Belanja bahan/bibit tanaman	1.349.909,00
	Belanja bahan obat-obatan	5.449.700,00
	Belanja Bahan Percontohan	13.997.000,00
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainya/Perlengkapan	298.576.225,00
	Belanja Persediaan bahan baku bangunan	930.000,00
	Pupuk	1.100.000,00
	Media Tanam	224.000,00
3	**Beban Jasa Kantor**	**672.722.230,00**
	Belanja Jasa telepon	14.580.879,00
	Belanja Jasa air	1.307.925,00
	Belanja Jasa listrik	163.551.616,00
	Belanja jasa surat kabar/majalah	5.886.000,00
	Belanja Jasa kawat/faksimili/internet	3.224.500,00
	Jasa Paket Pengiriman	1.140.410,00
	Jasa Sertifikasi	15.000.000,00
	Belanja Transaksi Keuangan	81.000,00
	Belanja Dekorasi	1.640.000,00
	Belanja Publikasi	26.198.600,00
	Belanja Jasa Keamanan Kantor	179.348.400,00
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	189.499.500,00
	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	21.420.000,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	49.594.900,00
	Belanja jasa Laundri	248.500,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
4	**Beban Perawatan Kendaraan Bermotor**	**13.290.700,00**
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.470.000,00
	Belanja jasa Service	7.820.700,00
5	**Beban Cetak dan Penggandaan**	**37.430.600,00**
	Belanja Persediaan Cetak	29.730.600,00
	Belanja Persediaan Penggandaan	7.700.000,00
6	**Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**24.300.000,00**
	Belanja Sewa Kamar/ Penginapan	24.300.000,00
7	**Sewa Perlengkapan dan perlatan Kantor**	**4.500.000,00**
	Beban Sewa Tenda	4.500.000,00
8	**Beban Makanan dan Minuman**	**360.991.500,00**
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23.113.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	29.976.000,00
	Belanja Makanan dan minuman tamu	29.100.000,00
	Belanja makanan dan minuman pelatihan	270.381.000,00
	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	8.421.500,00
9	**Belanja Pakaian Kerja**	**187.015.400,00**
	Belanja pakaian kerja lapangan	187.015.400,00
10	**Beban Perjalanan Dinas**	**60.036.168,00**
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.036.168,00
11	**Beban Pemeliharaan**	**708.393.049,00**
	Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin	340.506.049,00
	Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan	367.887.000,00
12	**Honorarium PNS**	**495.493.000,00**
	Beban Pegawai B L U D	495.493.000,00
13	**Belanja lain lain**	**1.500.000,00**
	Jumlah (Rp)	**3.261.063.802,00**
D	**BAPELJAMKESOS**	
1	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**93.894.746,00**
	Belanja Alat tulis kantor	65.169.100,00
	Belanja Alat listrik, elektronika	2.036.800,00
	Materai, Perangko, Benda Pos Lain	4.875.000,00
	Belanja Alat kebersihan, bahan pembersih	660.000,00
	Belanja Bahan bakar minyak/gas	21.153.846,00
2	**Belanja Jasa Kantor**	**1.031.621.757,00**
	Belanja Jasa Telepon	4.252.582,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Belanja Jasa Kawat/Faksimile/Internet	993.000,00
	Belanja Air	696.000,00
	Belanja Listrik	62.537.179,00
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.749.000,00
	Belanja Jasa Cleaning Service (Kebersihan)	966.000,00
	Belanja Jasa Petugas Keamanan	3.600.000,00
	Belanja Jasa Petugas Clearning servis	91.980.000,00
	Belanja Jasa Petugas Front Office	23.949.996,00
	Belanja Jasa Petugas Pengelola Arsip	45.625.000,00
	Belanja Jasa Angkut Sampah	1.098.000,00
	Belanja jasa tenaga ahli/Instruktur/narasumber	290.670.000,00
	Belanja Jasa Keamanan	167.952.000,00
	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	187.478.000,00
	Belanja Jasa Bintek	92.500.000,00
	Belanja Jasa Sertifikasi	14.575.000,00
	Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Sofware	39.000.000,00
3	**Belanja Premi Asuransi**	**55.174.855.192,00**
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	11.620.200,00
	Belanja pembayaran Klaim	55.163.234.992,00
4	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**195.908.100,00**
	Belanja Penggandaan /cetak dan Jilid	195.908.100,00
5	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**600.000,00**
	Belanja sewa Ruang Pertemuan	600.000,00
6	**Belanja Sewa Sarana mobilitas**	**20.300.000,00**
	Belanja Sewa Sarana mobilitas darat	20.300.000,00
7	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor**	**3.600.000,00**
	Belanja sewa meja kursi	600.000,00
	Belanja Sewa tenda dan Panggung	3.000.000,00
8	**Belanja Makanan dan Minuman**	**251.806.000,00**
	BelanjaMakanan dan Minuman Rapat/Pertemuan	251.806.000,00
9	**Belanja Perjalanan Dinas**	**63.023.937,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	56.617.100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah *)	6.406.837,00
10	**Belanja Pemeliharaan**	**348.670.866,00**
	Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor	46.162.200,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung	77.157.600,00
	Belanja Pemeliharaan Penataan Ruang	195.900.000,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer	10.790.255,00
	Belanja Pemeliharaan Pengisian Tabung pemadam Kebakaran	1.765.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.400.000,00
	Belanja Pemeliharaan (STNK)	2.814.300,00
	Belanja Perawatan Kendaraan dinas	8.310.014,00
	Belanja Perawatan kend.dinas penggantian suku cadang	3.371.497,00
	Jumlah (Rp)	**57.184.280.598,00**
E	**BAPELKES**	
1	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**234.871.674,00**
	Belanja Bahan Pakai Habis	5.064.575,00
	Belanja Persediaan alat tulis kantor	139.013.000,00
	Belanja Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	1.476.460,00
	Belanja Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	66.066.639,00
	Kit Peserta	23.251.000,00
2	**Belanja Persediaan Bahan/ Material**	**31.999.770,00**
	Belanja Persediaan Perabot RT	31.999.770,00
3	**Belanja Jasa Kantor**	**2.134.376.761,00**
	Belanja Jasa telepon	10.796.077,00
	Belanja Jasa air	1.495.200,00
	Belanja Jasa listrik	211.269.484,00
	Belanja Jasa surat kabar/majalah	3.591.500,00
	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	337.725.000,00
	Belanja Dokumentasi	9.442.000,00
	Belanja Dekorasi	19.463.000,00
	Belanja Jasa Keamanan Kantor	14.903.000,00
	Belanja Retribusi / Pajak	8.800.000,00
	Belanja Biaya Operasionaal Kendaraan (B O K)	2.335.000,00
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	631.862.000,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	870.000.000,00
	Jasa sarana	8.550.000,00
	Jasa Laundry	2.324.500,00
	Kenang-kenangan	1.820.000,00
4	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**135.899.001,00**
	Belanja Persediaan Cetak	135.899.001,00
5	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**14.250.000,00**
	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14.250.000,00
6	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**7.000.000,00**
	Belanja sewa proyektor	7.000.000,00
7	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.833.982.000,00**
	Belanja makan minum rapat (rutin)	27.610.900,00
	Belanja makan minum rapat pelatihan/kegiatan	35.160.700,00
	Belanja makan minum harian umum kegiatan/pelatihan	1.771.210.400,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
8	**Belanja Pengadaan**	**84.804.504,00**
	Belanja pengadaan (barang jasa: Website, DED,ISO, pengembangan media pemasaran, paket kran dan sower)	84.064.504,00
	Belanja pendukung pengadaan (honor pejabat pengadaan dan penerimaan, foto copy, makan minum rapat)	740.000,00
9	**Belanja Perjalanan Dinas**	**100.554.131,00**
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.554.131,00
10	**Belanja Pemeliharaan**	**79.365.684,00**
	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	34.853.900,00
	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	11.605.000,00
	Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.273.684,00
	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	15.633.100,00
11	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**89.219.127,00**
	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	89.219.127,00
12	**Belanja Honorarium Non Pegawai**	**326.482.200,00**
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	241.070.000,00
	Belanja honor peserta pelatihan/kegiatan	81.512.200,00
	Belanja jasa instruktur senam	3.900.000,00
13	**Honorarium PNS**	**232.215.000,00**
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	232.215.000,00
14	**Honorarium Non PNS**	**24.651.515,00**
	Belanja Honorarium tenaga BLUD	21.725.775,00
	Belanja iuran BPJS kesehatan	2.404.325,00
	Belanja iuran BPJS kesehatan pegawai BLUD	521.415,00
15	**Belanja Pemasaran**	**25.000.000,00**
	Belanja Pemasaran	25.000.000,00
16	**Pemeriksaan Lab**	**3.360.000,00**
	Pemeriksaan Lab	3.360.000,00
17	**Bantuan MMD**	**12.690.600,00**
	Bantuan MMD	12.690.600,00
	Jumlah (Rp)	**5.370.721.967,00**
	Total (Rp)	**85.440.605.492,00**

c. Belanja Bunga **Rp0,00** **Rp 0,00**

Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

d. Belanja Subsidi **Rp0,00** **Rp0,00**

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

e. Belanja Hibah **Rp624.821.733.116,00** **Rp788.071.661.160,00**

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2017 sebesar Rp624.821.733.116,00 terdiri dari Belanja Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp574.360.049.000,00 dan Belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa sebesar Rp50.461.684.116,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp163.249.928.044,00 atau 20,72% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp788.071.661.160,00.

Belanja Hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD dan Belanja Hibah dalam bentuk barang direalisasikan melalui Belanja Hibah Barang/Jasa obyek Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD.

Belanja Hibah dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD sebesar Rp604.195.834.000,00 dan realisasi sebesar Rp574.360.049.000,00 atau % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
a.	Hibah Urusan Pendidikan	522.033.860.000,00	502.149.825.000,00	(19.884.035.000,00)	96,19
b.	Hibah Urusan Kesehatan	1.007.974.000,00	1.007.974.000,00	-	100,00
d.	Hibah Urusan Sosial	164.000.000,00	164.000.000,00	-	100,00
e.	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	1.145.000.000,00	1.145.000.000,00	-	100,00
f.	Hibah Urusan Pangan	245.000.000,00	245.000.000,00	-	100,00
g.	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	6.350.000.000,00	5.990.000.000,00	(360.000.000,00)	94,33
h.	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	12.500.000.000,00	10.418.250.000,00	(2.081.750.000,00)	83,35
i.	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	7.750.000.000,00	240.000.000,00	(7.510.000.000,00)	3,10
j.	Hibah Urusan Keistimewaan	53.000.000.000,00	53.000.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	**604.195.834.000,00**	**574.360.049.000,00**	**(29.835.785.000,00)**	**95,06**

Penjelasan Belanja Hibah (uang) Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1) Hibah Urusan Pendidikan

Hibah Urusan Pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp522.033.860.000,00 dan realisasi sebesar Rp502.149.825.000,00 atau 96,19% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28
Rincian Hibah Urusan Pendidikan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / Madrasah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00
2	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang Dikdas	372.829.200.000,00	371.511.160.000,00	(1.318.040.000,00)	99,65
3	Penyediaan BOS/BOSDA SM	134.588.800.000,00	116.304.605.000,00	(18.284.195.000,00)	86,41
4	Bantuan Operasional Sekolah	5.129.860.000,00	4.933.060.000,00	(196.800.000,00)	96,16
5	Penyelenggaraan Ujian	136.000.000,00	136.000.000,00	-	100,00
6	Penguatan Kelembagaan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	9.100.000.000,00	9.015.000.000,00	(85.000.000,00)	99,07
	Jumlah	**522.033.860.000,00**	**502.149.825.000,00**	**(19.884.035.000,00)**	**96,19**

Penjelasan:

Hibah untuk Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/Madrasah dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah DIY.

Hibah untuk Penyediaan BOS/BOSDA Jenjang Dikdas dianggarkan sebesar Rp372.829.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp371.511.160.000,00 atau 99,65% diberikan kepada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sisa anggaran disebabkan karena data siswa yang digunakan pada saat perencanaan dan pencairan berbeda. Perbedaan data siswa disebabkan adanya perbedaan tahun ajaran sekolah dan tahun anggaran.

Hibah untul Penyediaan BOS/BOSDA SM dianggarkan sebesar Rp134.588.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp116.304.605.000,00 atau 86,41% diberikan kepada Sekolah Menengah yang diselenggarakan oleh swasta. Sisa anggaran disebabkan karena data siswa yang digunakan pada saat perencanaan dan pencairan berbeda. Perbedaan data siswa disebabkan adanya perbedaan tahun ajaran sekolah dan tahun anggaran.

Hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah dianggarkan sebesar Rp5.129.860.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.933.060.000,00 atau 96,16% diberikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh swasta. Sisa anggaran disebabkan karena data siswa yang digunakan pada saat perencanaan dan pencairan berbeda. Perbedaan data siswa disebabkan adanya perbedaan tahun ajaran sekolah dan tahun anggaran.

Hibah untuk Penyelenggaraan Ujian dianggarkan sebesar Rp136.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada UPT Pengelola Pendidikan pada Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogayakarta.

Hibah untuk Penguatan Kelembagaan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp9.100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.015.000.000,00 atau 99,07% diberikan kepada:

Tabel 5.29
Rincian Hibah Penguatan Kelembagaan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	PGRI DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
2	Dewan Pendidikan DIY	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00
3	Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) DIY	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	0,00
4	GOPTK DIY	65.000.000,00	-	(65.000.000,00)	0,00
5	Lembaga Orang Tua Asuh (LOTA) DIY	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
6	KNPI DIY	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
7	Kwarda DIY	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
8	KONI DIY	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	-	100,00
9	National Paralimpic Committee (NPC) DIY	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	**9.100.000.000,00**	**9.015.000.000,00**	**(85.000.000,00)**	**99,07**

2) Hibah Urusan Kesehatan

Hibah Urusan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis. Dari anggaran sebesar Rp1.007.974.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.007.974.000,00 atau 100% untuk dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30
Rincian Penerima Hibah Urusan Kesehatan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV AIDS	564.818.000,00	564.818.000,00	-	100,00
2	Upaya Kesehatan Rujukan	443.156.000,00	443.156.000,00	-	100,00
	Jumlah	**1.007.974.000,00**	**1.007.974.000,00**	**-**	**100,00**

Penjelasan:

Hibah untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV AIDS dianggarkan sebesar Rp564.818.000,00 dan realisasi sebesar 100% diberikan kepada Komisi Penanggulangan AIDS DIY.

Hibah untuk Upaya Kesehatan Rujukan dianggarkan sebesar Rp443.156.000,00 dan realisasi sebesar 100% diberikan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) DIY.

3) Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dikelola oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp1.145.000.000,00 dan realisasi 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31
Rincian Penerima Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Pengembangan Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)	370.000.000,00	370.000.000,00	-	100,00
2	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	775.000.000,00	775.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	**1.145.000.000,00**	**1.145.000.000,00**	**-**	**100,00**

Penjelasan:
Hibah untuk Pengembangan Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) dianggarkan sebesar Rp370.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% diberikan kepada 10 Kelompok masing-masing sebesar Rp37.000.000,00.

Hibah untuk Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa dianggarkan sebesar Rp775.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% diberikan kepada 10 Kelompok LPMK/LPMD.

4) Hibah Urusan Sosial

Hibah Urusan Sosial dikelola oleh Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp164.000.000,00 dan realisasi 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32
Rincian Hibah Urusan Sosial

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah Sosial	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00
2	Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar	98.000.000,00	98.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	**164.000.000,00**	**164.000.000,00**	**-**	**100,00**

Penjelasan:
Hibah untuk Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah Sosial dianggarkan sebesar Rp66.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% diberikan kepada LPA DIY sebesar Rp36.000.000,00 dan Yayasan Sayap Ibu sebesar Rp30.000.000,00.

Hibah untuk Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dianggarkan sebesar Rp98.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% diberikan kepada Komda Lanjut Usia DIY.

5) Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Hibah Urusan Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dikelola oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp6.350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.990.000.000,00 atau 94,33% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Bantuan Tempat Ibadah	4.500.000.000,00	4.140.000.000,00	360.000.000,00	92,00
2	Hibah kepada Lembaga Keagamaan	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	**6.350.000.000,00**	**5.990.000.000,00**	**360.000.000,00**	**94,33**

Penjelasan:
Hibah untuk Bantuan Tempat Ibadah dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.140.000.000,00 atau 92% diberikan kepada masjid, mushola dan gereja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hibah untuk Lembaga Keagamaan dianggarkan sebesar Rp1.850.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% diberikan kepada:

Tabel 5.34
Rincian Hibah Lembaga Keagamaan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	MUI DIY	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
2	PGI DIY	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
3	Kevikepan DIY	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
4	PHDI DIY	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
5	Walubi DIY	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
6	PW NU DIY	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
7	PW Muhammadiyah DIY	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
8	BAZNAS DIY	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	**1.850.000.000,00**	**1.850.000.000,00**	**-**	**100,00**

6) Hibah Urusan Ketahanan Pangan

Hibah Urusan Ketahanan Pangan dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan anggaran sebesar Rp245.000.000,00 dan realisasi 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35
Rincian Hibah Urusan Ketahanan Pangan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	**245.000.000,00**	**245.000.000,00**	**-**	**100,00**

Penjelasan:
Hibah untuk Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00 dan 100% diberikan kepada 3 Kelompok Tani di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Hibah untuk Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00 dan 100% diberikan kepada 3 Gapoktan di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Sleman.

7) Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur

Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.418.250.000,00 atau 83,35%. Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur direalisasikan sesuai dengan permohonan yang ada dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36
Rincian Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur

No	Uraian	Realisasi (Rp)
	Kabupaten Bantul	
1	Pemberdayaan masyarakat Mangunan, Dlingo, Bantul	750.000.000,00
2	Pemberdayaan masyarakat Segoroyoso, Pleret, Bantul	1.750.000.000,00
3	Pemberdayaan masyarakat Pleret, Pleret, Bantul	1.750.000.000,00
	Kabupaten Kulon Progo	
4	Pemberdayaan masyarakat Gorolangu, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo	1.000.000.000,00
5	Pemberdayaan masyarakat Ngaliyan, Ngargosari, Pengasih, Kulon Progo	
	Kabupaten Gunungkidul	
6	Pemberdayaan masyarakat Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul	618.250.000,00
7	Pemberdayaan masyarakat Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul	500.000.000,00
8	Pemberdayaan masyarakat Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul	300.000.000,00
	Kabupaten Sleman	
9	Pemberdayaan masyarakat Sambirejo, Prambanan, Sleman	750.000.000,00
10	Pemberdayaan masyarakat Pangukan, Tridadi, Sleman	500.000.000,00
11	Pemberdayaan masyarakat Sumberharjo, Prambanan, Sleman	500.000.000,00
12	Pemberdayaan masyarakat Trihanggo, Gamping, Sleman	500.000.000,00
13	Pemberdayaan masyarakat Bokoharjo, Prambanan, Sleman	500.000.000,00
14	Pemberdayaan masyarakat Widodomartani, Ngemplak, Sleman	500.000.000,00
15	Pemberdayaan masyarakat Plaosan, Tlogoadi, Mlati, Sleman	500.000.000,00
	Jumlah	**10.418.250.000,00**

8) Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi

Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi dianggarkan sebesar Rp7.750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp240.000.000,00 atau 3,10%. Alokasi anggaran hibah untuk penanganan pasca erupsi Merapi berasal dari sisa sumbangan masyarakat ketika terjadi erupsi merapi. Realisasi sebesar Rp240.000.000,00 digunakan untuk pengadaan satu (1) unit mobil ambulance diberikan kepada Universitas Islam Indonesia.

9) Hibah Urusan Keistimewaan

Hibah Urusan Keistimewaan dikelola oleh Dinas Kebudayaan sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp53.000.000.000,00 dan realisasi 100% untuk Fasilitasi Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya kepada Kraton Yogyakarta sebesar Rp38.000.000.000,00 dan Puro Pakualaman sebesar Rp15.000.000.000,00.

Realisasi Belanja Hibah dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan pada SKPD sebesar Rp53.625.727.093,00 dan direalisasikan sebesar Rp50.461.684.116,00 atau 94,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Belanja Hibah Barang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.023.085.600,00	1.998.316.130,00	(24.769.470,00)	98,78
2	Dinas Kesehatan	75.000.000,00	73.125.000,00	(1.875.000,00)	97,50
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	13.702.212.500,00	13.642.886.500,00	(59.326.000,00)	99,57
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.360.913.065,00	2.356.842.500,00	(4.070.565,00)	99,83
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.856.250.000,00	5.074.751.000,00	(781.499.000,00)	86,66
6	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluha	32.000.000,00	31.270.800,00	(729.200,00)	97,72
7	Dinas Kebudayaan	22.249.273.928,00	21.747.186.686,00	(502.087.242,00)	97,74
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.742.197.000,00	2.579.502.500,00	(162.694.500,00)	94,07
9	Dinas Pertanian	4.018.850.000,00	2.423.933.000,00	(1.594.917.000,00)	60,31
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	565.945.000,00	533.870.000,00	(32.075.000,00)	94,33
	Jumlah	**53.625.727.093,00**	**50.461.684.116,00**	**(3.164.042.977,00)**	**94,10**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Hibah dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Hibah.

Selanjutnya Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2016 digabung menjadi:

Tabel 5.38
Konversi Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah Uang	604.195.834.000,00	574.360.049.000,00	95,06	727.099.422.000,00
2	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	53.625.727.093,00	50.461.684.116,00	94,10	60.972.239.160,00
	Jumlah	**657.821.561.093,00**	**624.821.733.116,00**	**94,98**	**788.071.661.160,00**

f. Belanja Bantuan Sosial **Rp7.980.082.370,00** **Rp2.560.198.500,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2017 sebesar Rp7.980.082.370,00 merupakan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebesar Rp1.091.000.000,00 pada PPKD dan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa pada SKPD sebesar Rp6.889.082.370,00.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp2.091.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.091.000.000,00 atau 52,18% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan	1.091.000.000,00	1.091.000.000,00	-	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	-
	Jumlah	**2.091.000.000,00**	**1.091.000.000,00**	**(1.000.000.000,00)**	**52,18**
	Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan:				
1	Pemberian Jaminan Hidup pada Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00
2	Perlindungan Bagi Anak Cacat Berbasis Keluarga	137.000.000,00	137.000.000,00	-	100,00
3	Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar	900.000.000,00	900.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	**1.091.000.000,00**	**1.091.000.000,00**	-	100,00

Penjelasan:

Bantuan Sosial untuk Pemberian Jaminan Hidup pada Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) dianggarkan sebesar Rp54.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada Victory Plus.

Bantuan Sosial untuk Perlindungan Bagi Anak Cacat Berbasis Keluarga dianggarkan sebesar Rp137.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada LPA DIY.

Bantuan Sosial untuk Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan pada SKPD sebesar Rp8.686.130.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.889.082.370,00 atau 79,31% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pekerjaan Umum Perumaha dan Energi Sumber Daya Mineral	7.719.500.000,00	5.926.138.720,00	(1.793.361.280,00)	76,77
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	807.150.000,00	803.843.650,00	(3.306.350,00)	99,59
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	159.480.000,00	159.100.000,00	(380.000,00)	99,76
	Jumlah	**8.686.130.000,00**	**6.889.082.370,00**	**(1.797.047.630,00)**	**79,31**

Penjelasan:

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dianggarkan sebesar Rp7.719.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.926.138.720,00 atau 76,77% merupakan bantuan pemasangan instalasi dan sambungan listrik untuk rumah tangga miskin di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dianggarkan sebesar Rp807.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp803.843.650,00 atau 99,59% merupakan:

- Bantuan material dan upah tenaga kerja untuk rehabilitasi perumahan pasca bencana di daerah Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul sebesar Rp677.838.650,00.
- Bantuan peralatan pencetak batako untuk pemulihan sektor ekonomi pasca bencana di daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp126.005.000,00.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp159.480.000,00 dan realisasi sebesar Rp159.100.000,00 atau 99,76% merupakan bantuan alat-alat perbekalan kelompok transmigrasi.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2017 digabung menjadi:

Tabel 5.41
Konversi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang	2.091.000.000,00	1.091.000.000,00	52,18	1.919.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.686.130.000,00	6.889.082.370,00	79,31	641.198.500,00
	Jumlah	**10.777.130.000,00**	**7.980.082.370,00**	**74,05**	**2.560.198.500,00**

5.1.2.2 Belanja Modal Rp1.046.730.141.538,60 Rp836.873.712.179,35

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.046.730.141.538,60 atau 95,36% dari anggaran sebesar Rp1.097.680.905.731,83. Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp209.856.429.359,25 atau 25,08% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2016 yaitu sebesar Rp836.873.712.179,35. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah Rp247.052.455.730,00 Rp313.554.263.231,00

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp248.841.966.292,00 dan realisasi sebesar Rp247.052.455.730,00 atau 99,28% dengan rincian SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.42
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	6.645.351.000,00	5.556.844.100,00	(1.088.506.900,00)	83,62
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	147.360.156.360,00	147.244.193.614,00	(115.962.746,00)	99,92
3	Badan Lingkungan Hidup	1.658.714.925,00	1.539.258.456,00	(119.456.469,00)	92,80
4	Dinas Kebudayaan	93.146.944.007,00	92.702.444.800,00	(444.499.207,00)	99,52
5	DPPKA	30.800.000,00	9.714.760,00	(21.085.240,00)	31,54
	Jumlah	**248.841.966.292,00**	**247.052.455.730,00**	**(1.789.510.562,00)**	**99,28**

Penjelasan:

Belanja Modal Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM dianggarkan sebesar Rp6.645.351.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.556.844.100,00 atau 83,62% merupakan pengadaan tanah untuk pembangunan SPAM KAPET Kulon Progo.

Belanja Modal Tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dianggarkan sebesar Rp147.360.156.360,00 dan realisasi sebesar Rp147.244.193.614,00 atau 99,92% . Belanja Modal Tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dilaksanakan oleh KPA Dana Keistimewaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY dan Biro Umum dan Protokol dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah pada KPA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM dianggarkan sebesar Rp127.411.346.360,00 dan realisasi sebesar Rp127.301.433.279,00 atau 99,91%. Belanja Modal tersebut merupakan pembebasan tanah untuk pembangunan JJLS Segmen Jerukwudel - Baran -Duwet dan Segmen Parangtritis – Girijati.
2. Belanja Modal Tanah pada KPA Biro Umum dan Protokol dianggarkan sebesar Rp19.948.810.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.942.760.335,00 atau 99,96%. Belanja Modal Tanah tersebut merupakan Pembebasan tanah dan bangunan sebanya 536 m^2 di Jalan Suryatmajan.

Belanja Modal Tanah pada Badan Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp1.658.714.925,00 dan realisasi sebesar Rp1.539.258.456,00 atau 92,80% merupakan Belanja Modal Penataan dan Perbaikan Lahan dengan rincian:

1. Reklamasi lahan bekas huntara di Wukirsari, Sleman sebesar Rp198.910.000,00.
2. Reklamasi lahan kritis di Purwomartani, Sleman sebesar Rp206.298.000,00.
3. Pengembangan Wanadesa di Tirtoadi, Sleman sebesar Rp559.849.000,00
4. Pengembangan Wanadesa di Kaliagung, Kulon Progo sebesar Rp574.201.456,00.

Realisasi reklamasi lahan bekas huntara di Wukirsari, Sleman dan realisasi lahan kritis di Purwomartani, Sleman tidak dapat dikapitalisasi menjadi aset tanah karena merupakan Tanah Kas Desa dan diakui sebagai Beban Pemeliharaan Tanah.

Pengembangan Wanadesa di Tirtoadi, Sleman serta Pengembangan Wanadesa di Kaliagung, Kulon Progo diakui sesuai dengan output yang dihasilkan yaitu gazebo, tanaman dan Beban Pemeliharaan Tanah.

Belanja Modal Tanah pada Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp93.146.944.007,00 dan realisasi sebesar Rp92.702.444.800,00 atau 99,52%. Pengadaan tanah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (Induk), KPA Museum Negeri Sonobudoyo, KPA Taman Budaya Yogyakarta, dan KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah pada Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp16.119.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.961.570.000,00 atau 99,01%. Belanja Modal tersebut merupakan pembebasan tanah dan bangunan Rumah Ketandan serta tanah dan bangunan Dalem Panembahan.
2. Belanja Modal Tanah pada KPA Museum Negeri Sonobudoyo dianggarkan sebesar Rp3.524.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.514.940.000,00 atau 99,73%. Belanja Modal Tanah tersebut merupakan Pembebasan tanah dan bangunan untuk pengganti Radio Arma Sebelas.

3. Belanja Modal Tanah pada KPA Taman Budaya Yogyakarta dianggarkan sebesar Rp60.014.280.007,00 dan realisasi sebesar Rp59.973.233.500,00 atau 99,93%. Belanja Modal Tanah tersebut merupakan pembelian tanah Eks Stiker.
4. Belanja Modal Tanah pada KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul dianggarkan sebesar Rp13.488.464.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.252.701.300,00 atau 98,26%. Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut terdiri dari pembebasan tanah untuk pembangunan gedung Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp13.238.093.300,00 dan pembayaran jasa apraisal tanah di sekitar Situs Sokoliman sebesar Rp14.608.000,00 .

Belanja Modal Tanah pada DPPKA dianggarkan sebesar Rp30.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.714.760,00 atau 31,54% merupakan Belanja Modal Sertifikasi Tanah sebanyak 6 bidang tanah.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Rp142.207.808.761,60** **Rp109.315.739.432,35**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp171.808.998.499,50 dan realisasi sebesar Rp142.207.808.761,60 atau 82,77%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp32.892.069.329,25 atau 30,09% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2016 yaitu sebesar Rp109.315.739.432,35. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.43
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.718.700.000,00	1.713.615.525,00	99,70
2.	Pengadaan Alat-alat Bantu	4.482.987.650,00	4.330.253.420,00	96,59
3.	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	9.029.638.927,00	8.789.767.642,60	97,34
4.	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	34.200.000,00	25.753.000,00	75,30
5.	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	45.000.000,00	44.900.000,00	99,78
6.	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	419.588.800,00	396.100.906,00	94,40
7.	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	257.080.000,00	248.597.300,00	96,70
8.	Pengadaan Alat Ukur	1.033.843.000,00	993.810.000,00	96,13
9.	Pengadaan Alat Pengolahan	75.8295.100,00	720.958.100,00	95,08
10.	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	50.000.000,00	0,00	0,00
11.	Pengadaan Alat Kantor	30.960.791.722,50	25.066.091.160,00	80,96
12.	Pengadaan Alat Rumah Tangga	29.558.539.486,69	26.646.779.320,00	90,15
13.	Pengadaan Komputer	29.728.326.942,00	27.741.494.645,00	93,32
14.	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	749.194.712,50	661.178.850,00	88,25
15.	Pengadaan Alat Studio	3.949.383.965,81	3.783.089.890,00	95,79
16.	Pengadaan Alat Komunikasi	4.514.352.985,00	4.108.633.875,00	91,01
17.	Pengadaan Peralatan Pemancar	23.750.000,00	23.650.000,00	99,58
18.	Pengadaan Alat Kedokteran	37.080.500,00	31.480.500,00	84,90
19.	Pengadaan Alat Kesehatan	23.493.000,00	22.225.000,00	94,60
20.	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	37.274.204.125,00	20.673.707.045,00	55,46
21.	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.939.176.350,00	2.580.170.450,00	87,79
22.	Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	200.600.000,00	199.100.000,00	99,25
23.	Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	818.500.000,00	791.450.000,00	96,70

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
24.	Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	372.950.000,00	321.670.300,00	86,25
25.	Pengadaan Senjata Api	6.600.000,00	6.500.000,00	98,48
26.	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	77.000.000,00	76.248.000,00	99,02
27.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.745.721.233,00	12.210.583.833,00	95,80
	Jumlah	**171.808.998.499,50**	**142.207.808.761,60**	**82,77**

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.44
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	85.337.788.481,00	63.465.886.314,00	(21.871.902.167,00)	74,37
2	Dinas Kesehatan	5.567.021.477,00	5.209.715.965,00	(357.305.512,00)	93,58
3	RS Grhasia	5.256.386.993,50	5.224.507.200,00	(31.879.793,50)	99,39
4	RS. Respira	7.076.042.708,00	4.382.679.283,00	(2.693.363.425,00)	61,94
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	12.272.783.000,00	11.901.435.675,00	(371.347.325,00)	96,97
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.690.100.000,00	1.614.443.511,00	(75.656.489,00)	95,52
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	411.000.000,00	391.336.706,00	(19.663.294,00)	95,22
8	Satuan Polisi Pamong Praja	811.600.000,00	793.590.125,00	(18.009.875,00)	97,78
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	959.743.000,00	600.967.125,00	(358.775.875,00)	62,62
10	Dinas Sosial	1.911.295.300,00	1.876.720.841,00	(34.574.459,00)	98,19
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.705.786.750,00	1.634.054.240,00	(71.732.510,00)	95,79
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	30.300.000,00	30.300.000,00	-	100,00
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	159.412.000,00	148.660.000,00	(10.752.000,00)	93,26
14	Badan Lingkungan Hidup	511.457.600,00	493.551.450,00	(17.906.150,00)	96,50
15	Dinas Perhubungan	1.468.207.550,00	1.447.744.200,00	(20.463.350,00)	94,53
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.630.120.100,00	1.525.006.500,00	(105.113.600,00)	93,55
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	323.500.000,00	300.411.000,00	(23.089.000,00)	92,86
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	322.962.000,00	306.660.500,00	(16.301.500,00)	94,95
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	728.282.000,00	641.192.000,00	(87.090.000,00)	88,04
20	Dinas Kebudayaan	11.578.972.830,00	11.283.775.205,00	(295.197.625,00)	97,45
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.650.342.260,00	1.405.916.760,00	(244.425.500,00)	85,19
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.383.781.200,00	2.084.716.105,00	(299.065.095,00)	87,45
23	Dinas Pariwisata	406.976.500,00	376.586.980,00	(30.389.520,00)	92,53
24	Dinas Pertanian	2.591.147.010,00	2.315.838.894,00	(275.308.116,00)	89,38
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.072.887.750,00	1.027.987.868,00	(44.899.882,00)	95,82
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	284.481.250,00	276.066.700,00	(8.414.550,00)	97,04
27	Sekretariat Daerah	5.636.050.550,00	4.901.746.602,00	(734.303.948,00)	86,97
28	Sekretariat Paramparapraja	55.000.000,00	43.907.200,00	(11.092.800,00)	79,83
29	Kantor Perwakilan Daerah	543.233.000,00	520.388.832,00	(22.844.168,00)	95,79
30	Sekretariat DPRD	3.927.596.350,00	3.831.155.190,60	(96.441.159,40)	97,54
31	Inspektorat	155.917.250,00	141.455.000,00	(14.462.250,00)	90,72
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	859.330.600,00	792.424.000,00	(66.906.600,00)	92,21
33	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	9.941.396.550,00	9.035.533.400,00	(905.863.150,00)	90,89
34	Badan Kepegawaian Daerah	1.257.373.640,00	1.035.508.140,00	(221.865.500,00)	82,35
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.290.722.800,00	1.145.939.250,00	(144.783.550,00)	88,78
	Jumlah	**171.808.998.499,50**	**142.207.808.761,60**	**(29.601.189.737,90)**	**82,77**

Secara umum realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada setiap SKPD sudah sesuai dengan target fisik yang ditetapkan, sedangkan sisa anggaran merupakan sisa lelang. Realisasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2017 sebesar Rp142.207.808.761,60 termasuk di dalamnya merupakan Belanja Modal BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.45
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

No.	Uraian	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan
		(Rp	(Rp)
A	RS GHRASIA	93.880.000,00	5.130.627.200,00
B	RS RESPIRA	3.409.356.890,00	973.322.393,00
C	BLPT	3.468.422.107,00	1.400.915.000,00
D	BAPEL JAMKESOS	151.145.000,00	0,00
E	BAPELKES	450.829.075,00	352.011.600,00
	Jumlah	**7.573.633.072,00**	**7.856.876.193,00**

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan **Rp307.820.582.766,80** **Rp163.731.434.542,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp314.273.812.989,00 dan realisasi sebesar Rp307.820.582.766,80 atau 97,95%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp144.089.148.224,80 atau 88,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp163.731.434.542,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.46
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	284.390.808.280,00	278.232.760.433,80	97,83
2.	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	11.562.230.000,00	11.422.360.300,00	97,79
3.	Pengadaan Bangunan Bersejarah	16.125.559.718,00	16.066.447.085,00	99,63
4.	Pengadaan Tugu Peringatan	2.433.400,00	1.593.400,00	65,48
5.	Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	33.500.000,00	33.200.000,00	99,10
6.	Pengadaan Rambu-Rambu	2.159.281.591,00	2.064.221.548,00	95,60
	Jumlah	**314.273.812.989,00**	**307.820.582.766,80**	**97,95**

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.47
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	91.480.588.800,00	91.181.931.270,00	(298.657.530,00)	99,67
2	Dinas Kesehatan	1.212.750.500,00	1.206.204.400,00	(6.546.100,00)	99,46
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	180.335.200,00	179.023.800,00	(1.311.400,00)	99,27
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	24.808.372.820,00	24.566.712.114,80	(241.660.705,20)	99,03
5	Satuan Polisi Pamong Praja	449.996.260,00	448.878.000,00	(1.118.260,00)	99,75
6	Dinas Sosial	1.298.760.180,00	1.153.525.500,00	(145.234.680,00)	88,82
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	201.626.000,00	165.026.000,00	(36.600.000,00)	81,85
8	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	21.342.000.000,00	19.622.784.000,00	(1.719.216.000,00)	91,94
9	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	55.301.300,00	51.800.000,00	(3.501.300,00)	93,67
10	Badan Lingkungan Hidup	175.000.000,00	174.490.000,00	(510.000,00)	99,71
11	Dinas Perhubungan	2.112.905.591,00	2.019.475.548,00	(93.430.043,00)	95,58
12	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	693.000.000,00	658.953.000,00	(34.047.000,00)	95,09
13	Dinas Kebudayaan	56.615.174.088,00	55.822.668.825,00	(792.505.263,00)	98,60
14	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	36.357.570.000,00	36.208.380.100,00	(149.189.900,00)	99,59
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.876.404.400,00	8.178.424.500,00	(697.979.900,00)	92,14
16	Dinas Pariwisata	7.232.751.600,00	7.158.521.160,00	(74.230.440,00)	98,97
17	Dinas Pertanian	4.977.775.500,00	3.523.645.563,00	(1.454.129.937,00)	70,79
18	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	917.784.000,00	863.399.173,00	(54.384.827,00)	94,07
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	178.400.000,00	176.883.600,00	(1.516.400,00)	99,15
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	153.000.000,00	151.349.300,00	(1.650.700,00)	98,92
21	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	54.754.358.000,00	54.109.198.163,00	(645.159.837,00)	98,82
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	199.958.750,00	199.308.750,00	(650.000,00)	99,67
	Jumlah	**314.273.812.989,00**	**307.820.582.766,80**	**(6.453.230.222,20)**	**97,95**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp91.480.588.800,00 dan realisasi sebesar Rp91.181.931.270,00 atau 99,67% meliputi:

Tabel 5.48
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	SMA Negeri 1 Bantul	102.275.000,00	101.373.000,00	Pembuatan Parkir Siswa
2	SMA Negeri 1 Sewon	101.100.000,00	101.100.000,00	Pembuatan Jogging Track dan kamar mandi kelas khusus olahraga
3	SMA Negeri 2 Wates	198.000.000,00	195.270.000,00	Pembangunan gedung pendidikan
4	SMA Negeri 1 Godean	42.000.000,00	41.960.000,00	Pembuatan konsul galvalum dan taman
5	SMK Negeri 2 Pengasih	125.100.000,00	117.367.000,00	Pembangunan gedung pendidikan
6	SMK Negeri 1 Tanjungsari	92.900.000,00	92.611.000,00	Pembangunan pagar
7	SMK Negeri 1 Wonosari	97.900.000,00	96.377.000,00	Pembangunan pagar
8	SMK Negeri 2 Gedangsari	6.000.000,00	6.000.000,00	TPA sampah organik
9	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)	16.426.220.500,00	16.422.613.900,00	Pembangunan ruang kelas dan laboratorium
10	DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	23.204.866.900,00	23.194.054.500,00	Pembangunan gedung pendidikan
11	SLB Negeri 1 Yogyakarta	78.000.000,00	39.900.000,00	Pembangunan Gedung Pos Pengawasan
12	SLB Negeri Pembina	195.500.000,00	194.378.000,00	Pembangunan gedung pendidikan
13	SLB Negeri 1 Bantul	741.442.600,00	672.837.350,00	Pembangunan gedung lab kewirausahaan dan pos satpam
14	SLB Negeri 2 Bantul	747.098.000,00	688.979.000,00	Pembangunan gedung kantor
15	SLB Negeri 1 Gunungkidul	181.636.300,00	181.030.000,00	Pembangunan gedung pendidikan
16	SLB Negeri 2 Gunungkidul	40.000.000,00	39.700.000,00	Pembangunan pos satpam
17	SLB Negeri 1 Kulon Progo	865.670.400,00	862.038.000,00	Pengadaan Gedung Pertemuan/Hall

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
18	Balai Pemuda dan Olah Raga	48.059.879.100,00	47.959.510.520,00	Rehabilitasi Kompleks Graha Wana Bhaktiyasa, mushola GOR Among Rogo dan Stadion Mandala Krida
19	BTKP	175.000.000,00	174.832.000,00	Rehab Sedang/Berat Gedung kantor
	Jumlah	**91.480.588.800,00**	**91.181.931.270,00**	

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp1.212.750.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.206.204.400,00 atau 99,46% merupakan pembangunan gedung kantor sebesar Rp1.202.634.400,00 dan pengadaan rambu tidak bersuar sebesar Rp3.570.000,00 pada Balai Laboratorium Kesehatan.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dianggarkan sebesar Rp180.335.200,00 dan realisasi sebesar Rp179.023.800,00 atau 99,27% merupakan pembangunan gedung pos pengawasan sebesar Rp84.744.000,00 dan pembangunan pagar sebesar Rp94.279.800,00 pada Balai PSDA.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dianggarkan sebesar Rp24.808.372.820,00 dan realisasi sebesar Rp24.566.712.114,80 atau 99,03% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	456.370.000,00	419.412.117,00	Rehab Berat Gedung Kantor
2	Dinas PUP dan ESDM	150.000.000,00	148.747.500,00	Pembangunan tempat parkir Ngabean
		2.000.000.000,00	1.989.272.000,00	Pembangunan pagar Embung Langensari
		8.044.532.000,00	7.997.538.250,00	Pembangunan Rusun Gemawang
3	Biro Umum Setda DIY	2.033.916.000,00	2.033.916.000,00	Pembangunan pagar
		3.080.563.000,00	3.021.607.276,00	Pembangunan sarana perkantoran
		4.356.908.220,00	4.356.908.219,00	Pembangunan tempat parkir
4	Dinas Pariwisata DIY	2.433.400,00	1.593.400,00	Pembuatan tugu peringatan
		963.139.000,00	948.329.000,00	Pembangunan tempat parkir lereng Merapi dan Agro Wisata Teh Kulon Progo
		125.000.000,00	123.652.000,00	Pembangunan toilet di obyek wisata di lereng Merapi dan Agro Wisata Teh Kulon Progo
		2.527.871.200,00	2.505.099.800,00	Pembangunan lanskap
5	Dinas Tarung Bantul	574.000.000,00	544.436.552,00	Pembangunan tempat parkir Kawasan Pleret
6	Dinas Pariwisata Gunung Kidul	492.000.000,00	474.560.000,00	Penyempurnaan kios Pantai Krakal
7	Dinas Pertanian Kulon Progo	1.640.000,00	1.640.000,00	Pembuatan prasarana kawasan cagar budaya
	Jumlah	**24.808.372.820,00**	**24.566.712.114,00**	

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja dianggarkan sebesar Rp449.996.260,00 dan realisasi sebesar Rp448.878.000,00 atau 99,75% merupakan pembangunan gedung kantor.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp1.298.760.180,00 dan realisasi sebesar Rp1.153.525.500,00 atau 88,82% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Sosial

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Dinas Sosial Induk	5.346.000,00	5.329.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Gedung
2	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	200.736.880,00	199.013.000,00	Rehabilitasi Dapur dan Ruang Makan 210m2
3	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	1.057.677.300,00	914.499.500,00	Pembangunan ruang makan, dapur dan rehab gedung asrama
4	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak	35.000.000,00	34.684.000,00	Pengadaan Tralis untuk jendela
	Jumlah	**1.298.760.180,00**	**1.153.525.500,00**	

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp201.626.000,00 dan realisasi sebesar Rp165.026.000,00 atau 81,85% terdiri dari pengadaan rambu tidak bersuar sebesar Rp7.726.000,00 pada BLKPP dan pembangunan gedung kantor Balai Hiperkes sebesar Rp157.300.000,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp21.342.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.622.784.000,00 atau 91,94% merupakan pembangunan gedung kantor.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dianggarkan sebesar Rp55.301.300,00 dan realisasi sebesar Rp51.800.000,00 atau 93,67% merupakan Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Badan Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp174.490.000,00 atau 99,71% merupakan rehab bangunan gedung kantor.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp2.112.905.591,00 dan realisasi sebesar Rp2.019.475.548,00 atau 94,53% merupakan pengadaan rambu-rambu lalu lintas.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp693.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp658.953.000,00 atau 95,09% merupakan pembangunan gedung kantor.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp56.615.174.088,00 dan realisasi sebesar Rp55.822.668.825,00 atau 98,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kebudayaan

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Dinas Kebudayaan	6.905.121.950,00	6.478.741.500,00	Pembangunan Gedung Kantor
2	Museum Sonobudoyo	1.804.812.400,00	1.940.784.800,00	Rehab MSB Unit I (Revitalisasi Hall Eks Gedung KONI Menjadi Perpustakaan)
		163.369.000,00		Rehab MSB Unit 1 (Toilet Pengunjung)
3	Taman Budaya	2.432.191.650,00	2.430.308.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	7.251.011.800,00	7.240.705.500,00	Pembangunan Gedung A Akademi Komunitas (lanjutan)
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	212.652.000,00	198.084.000,00	Rehab Ruang Pelayanan PPID

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
6	Pariwisata DIY	100.000.000,00	98.950.000,00	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung (lighting) Panggung Sugriwa Subali, Kiskendo, Kulonprogo
7	Dinas PUP dan ESDM	10.183.537.718,00	10.182.919.025,00	Pembangunan Rehap Bangunan Proboyekso dan Bangsal Kencono
				Rehab Bangunan Makam Raja-Raja di Imogiri
				Belanja Penunjang
8	Dinas Kehutnan dan Perkebunan	549.629.500,00	247.204.000,00	Sarana dan Prasarana Mangunan
				Landscaping Arboretum
				Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran
9	Dinas PU Kulon Progo	27.012.848.070,00	27.004.972.000,00	Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo
	Jumlah	**56.615.174.088,00**	**55.822.668.825,00**	

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dianggarkan sebesar Rp36.357.570.000,00 dan realisasi sebesar Rp36.208.380.100,00 atau 99,59% merupakan Pembangunan Depo/Gedung Arsip.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp8.876.404.400,00 dan realisasi sebesar Rp8.178.424.500,00 atau 92,14% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Diskanla (Induk)	2.709.784.600,00	2.692.206.250,00	Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran
2	BPTP	978.133.800,00	871.165.000,00	Pembangunan Sumur besar BAP Samas (1 unit)
				Rehab Pagar BAT Cangkringan dan Pembangunan Tempat Wudlu/Toilet BPTPB
				Rehab Hatchery/Kantor, BAP Samas
		4.398.685.000,00	3.870.858.000,00	Rehab Bangsal Pemijahan ,Hatchery, Saluran Pembuangan Air dan Bak Karantina Ikan, BAT Cangkringan
				BejiharjoPembangunan Hatchery Lele, beserta kelengkapannya BAT
3	P3 Sadeng	106.924.000,00	106.409.000,00	Kamar mandi umum (5 unit)
		652.877.000,00	608.536.250,00	Penyempunaan rumah jaga
		30.000.000,00	29.250.000,00	Rambu Penunjuk Arah
	Jumlah	**8.876.404.400,00**	**8.178.424.500,00**	

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp7.232.751.600,00 dan realisasi sebesar Rp7.158.521.160,00 atau 98,97% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Pariwisata

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Dinas Pariwisata	5.840.382.000,00	5.782.938.060,00	Pembangunan Gedung Anjungan
		194.549.000,00	192.500.000,00	Pembangunan Pagar Keliling Gazebo dan Workshop Area Wisata Batik Wukirsari Imogiri
		487.847.000,00	473.569.000,00	Pembangunan Parkir Utara jalan 2000 m2 dan Toilet Wisata 16m2 di Lava Bantal
		709.973.600,00	709.514.100,00	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet
	Jumlah	**7.232.751.600,00**	**7.158.521.160,00**	

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pertanian dianggarkan sebesar Rp4.977.775.500,00 dan realisasi sebesar Rp3.523.645.563,00 atau 70,79% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Pertanian

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Dinas Pertanian (Induk)	3.078.190.300,00	2.955.311.700,00	Pembangunan Gedung Asarama 3 Lantai
				Pembangunan Pagar UPTD BPSDMP
				Rehabilitasi Gedung INDUK
				Rehabilitasi Lab Agen Hayati UPTD BPTP
				Rehabilitasi Pintu Jendela UPTD BPSDMP
2	BPPTPH	469.074.500,00	409.895.963,00	Pembangunan kontruksi/pembelian pagar kantor Unit Ngipiksari
				Pembangunan kontruksi/pembelian pagar dan pintu gerbang Unit Berbah
				Pembangunan kontruksi/pembelian pagar kantor Unit Gesikan
		435.517.500,00	-	Pengadaan Rehab Gedung (kantor, ruang pelatihan dan asrama)
		500.230.000,00	-	Pembangunan kontruksi/pembelian pagar kantor Unit Wijilan
		173.363.200,00	-	Pembangunan Saluran Air/Irigasi (pipa besi) sepanjang 300 m' di Unit Wijilan
3	BPTBTDK	321.400.000,00	158.437.900,00	Pengadaan pagar
	Jumlah	**4.977.775.500,00**	**3.523.645.563,00**	

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dianggarkan sebesar Rp917.784.000,00 dan realisasi sebesar Rp863.399.173,00 atau 94,07% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Induk)	459.606.000,00	440.450.200,00	Pembuatan talud gudang peralatan/jalan dan penataan lingkungan perkantoran
		98.000.000,00	97.245.000,00	Pembuatan Kandang Rusa
		329.178.000,00	295.095.973,00	Pembuatan Rumah Pohon dan Canopy Trail
				Pembuatan Landscaping camping ground
		31.000.000,00	30.608.000,00	Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran
	Jumlah	**917.784.000,00**	**863.399.173,00**	

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp178.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp176.883.600,00 atau 99,15% merupakan pembangunan gedung kantor pada BPTTG.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp153.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp151.349.300,00 atau 98,92% merupakan rehab gedung kantor.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dianggarkan sebesar Rp54.754.358.000,00 dan realisasi sebesar Rp54.109.198.163,00 atau 98,82% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	DPPKA (Induk)	3.378.000,00	3.378.000,00	Pembangunan Gudang Arsip Keuangan
		33.500.000,00	33.200.000,00	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tugu Titik Kontrol
2	KPPD Kota	176.040.000,00	173.369.000,00	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
		5.000.000,00	4.200.000,00	Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
3	KPPD Bantul	26.630.520.000,00	26.540.112.000,00	Pembangunan Gedung Tahap II
4	KPPD Gunung Kidul	198.000.000,00	197.851.000,00	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
5	KPPD Sleman	27.707.920.000,00	27.157.088.163,00	Pembangunan Gedung Tahap III
				Penyusunan dokumen DED rehabilitasi gedung kantor SAMSAT pembantu Maguwoharjo
	Jumlah	**54.754.358.000,00**	**54.109.198.163,00**	

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp199.958.750,00 dan realisasi sebesar Rp199.308.750,00 atau 99,67% merupakan pembangunan Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp324.810.707.765,20** **Rp246.059.747.569,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp336.624.415.881,33 dan realisasi sebesar Rp324.810.707.765,20 atau 96,49%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp78.750.960.196,20 atau 32% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp246.059.747.569,00. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.56
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan Jalan	229.349.471.332,33	225.608.664.146,00	98,37
2.	Pengadaan Jembatan	1.608.744.000,00	1.432.801.554,00	89,06
3.	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	31.992.478.000,00	28.389.888.291,00	88,74
4.	Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	4.597.000.000,00	3.946.743.000,00	85,85
5.	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.230.713.000,00	2.927.944.500,00	69,21
6.	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	36.321.071.780,00	35.538.973.086,20	97,85
7.	Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.908.490.000,00	3.196.728.000,00	81,79
8.	Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00
9.	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	7.482.310.000,00	7.110.440.816,00	95,03
10.	Pengadaan Instalasi Pengaman	16.000.000,00	15.900.000,00	99,38
11.	Pengadaan Jaringan Listrik	16.795.116.169,00	16.338.878.172,00	97,28
12.	Pengadaan Jaringan Telepon	307.271.600,00	287.996.200,00	93,73
	Jumlah	**336.624.415.881,33**	**324.810.707.765,20**	**96,49**

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.57
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	159.442.000,00	154.152.850,00	(5.289.150,00)	96,68
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	176.974.098.299,33	168.391.824.854,00	(8.582.273.445,33)	95,15
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	134.818.414.455,00	134.487.550.212,20	(330.864.242,80)	99,75
4	Dinas Sosial	1.314.834.600,00	55.581.000,00	(1.259.253.600,00)	4,23
5	Badan Lingkungan Hidup	6.852.325.000,00	6.299.475.000,00	(552.850.000,00)	91,93
6	Dinas Perhubungan	10.843.228.000,00	10.537.834.890,00	(305.393.110,00)	97,18
7	Dinas Kebudayaan	20.000.000,00	19.927.000,00	(73.000,00)	99,64
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.802.350.000,00	4.150.387.000,00	(651.963.000,00)	86,42
9	Dinas Pertanian	554.573.527,00	440.917.359,00	(113.656.168,00)	79,51
10	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	5.500.000,00	4.000.000,00	(1.500.000,00)	72,73
11	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	279.650.000,00	269.057.600,00	(10.592.400,00)	96,21
	Jumlah	**336.624.415.881,33**	**324.810.707.765,20**	**(11.813.708.116,13)**	**96,49**

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **Rp18.633.561.515,00** **Rp2.701.276.405,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp19.842.828.347,00 dan realisasi sebesar Rp18.633.561.515,00 atau 93,91%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp15.932.285.110,00 atau 589,81% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2016 yaitu sebesar Rp2.701.276.405,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.58
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Pengadaan Buku	1.272.361.178,00	1.180.803.090,00	(91.558.088,00)	92,80
2	Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	11.975.000,00	11.975.000,00	-	100,00
3	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	964.974.400,00	925.319.000,00	(39.655.400,00)	95,89
4	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	196.345.700,00	193.307.900,00	(3.037.800,00)	98,45
5	Pengadaan Hewan	186.100.000,00	179.174.600,00	(6.925.400,00)	96,28
6	Pengadaan Tanaman	107.413.900,00	107.413.900,00	-	100,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.103.658.169,00	16.035.568.025,00	(1.068.090.144,00)	93,76
	Jumlah	**19.842.828.347,00**	**18.633.561.515,00**	**(1.209.266.832,00)**	**93,91**

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.59
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	18.138.130.869,00	17.005.823.985,00	(1.132.306.884,00)	93,76
2	Dinas Kesehatan	3.316.000,00	2.172.000,00	(1.144.000,00)	65,50
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	4.640.100,00	4.616.900,00	(23.200,00)	99,50
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	102.913.900,00	102.913.900,00	-	100,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.520.000,00	7.520.000,00	-	100,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00
7	Dinas Sosial	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
8	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	8.925.200,00	8.829.180,00	(96.020,00)	98,92
9	Badan Lingkungan Hidup	11.500.000,00	11.489.000,00	(11.000,00)	99,90
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
11	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	810.000,00	650.000,00	(160.000,00)	80,25
12	Dinas Kebudayaan	556.570.000,00	513.783.000,00	(42.787.000,00)	92,31
13	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	679.842.000,00	668.654.000,00	(11.188.000,00)	98,35
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.000.000,00	5.990.000,00	(10.000,00)	99,83
15	Dinas Pertanian	181.100.000,00	179.174.600,00	(1.925.400,00)	98,94
16	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12.500.000,00	7.448.500,00	(5.051.500,00)	59,59
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
18	Sekretariat Daerah	16.867.000,00	16.736.700,00	(130.300,00)	99,23
19	Sekretariat Paramparapraja	3.781.900,00	3.781.000,00	(900,00)	99,98
20	Sekretariat DPRD	45.000.000,00	44.771.660,00	(228.340,00)	99,49
21	Inspektorat	1.082.128,00	1.020.480,00	(61.648,00)	94,30
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.079.250,00	4.732.510,00	(10.346.740,00)	31,38
23	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10.100.000,00	6.346.300,00	(3.753.700,00)	62,83
24	Badan Pendidikan dan Pelatihan	26.250.000,00	26.207.800,00	(42.200,00)	99,84
	Jumlah	**19.842.828.347,00**	**18.633.561.515,00**	**(1.209.266.832,00)**	**93,91**

f. Belanja Modal Aset Lainnya **Rp6.205.025.000,00** **Rp1.511.251.000,00**

Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp6.288.883.723,00 dan realisasi sebesar Rp6.205.025.000,00 atau 98,67%. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp4.693.774.000,00 atau 310,59% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.511.251.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2017 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.60
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.872.013.723,00	1.840.200.000,00	(31.813.723,00)	98,30
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
3	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	39.500.000,00	39.100.000,00	(400.000,00)	98,99
4	Badan Lingkungan Hidup	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00
5	Dinas Perhubungan	1.100.000,00	995.000,00	(105.000,00)	94,53
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.458.750.000,00	3.453.850.000,00	(4.900.000,00)	99,86
7	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	0,00
8	Sekretariat Daerah	146.100.000,00	143.350.000,00	(2.750.000,00)	98,12
9	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	740.920.000,00	712.030.000,00	(28.890.000,00)	96,10
	Jumlah	**6.288.883.723,00**	**6.205.025.000,00**	**(83.858.723,00)**	**98,67**

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga Rp7.655.049.640,00 Rp61.018.000,00

Anggaran Belanja Tak Terduga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp53.314.826.296,35 dan realisasi sebesar Rp7.655.049.640,00 atau 14,36%. Rincian penggunaan Belanja Tak Terduga Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.61
Rincian Penggunaan Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Dasar Pengeluaran	SP2D (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1.	Penanganan Siaga Darurat Kekeringan di Wilayah DIY	▪ Keputusan Gubernur No. 169/KEP/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan ▪ Persetujuan Gubernur DIY No. 900/17625 tanggal 10 Oktober 2017	398.937.500,00	1.352.000,00	397.585.500,00
2.	Pengembalian Dana Keistimewaan TA 2016	Persetujuan Gubernur DIY No. 900/18536 tanggal 23 Oktober 2017	49.143.875,00	-	49.143.875,00
3.	Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah DIY	▪ Keputusan Gubernur No. 261/KEP/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang ▪ Persetujuan Gubernur DIY No. 900/22326 tanggal 13 Desember 2017	6.581.506.000,00		6.581.506.000,00
4.	Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah DIY (Penanganan Darurat Jalan Ruas Jerukwudel-Sadeng Gunungkidul)	▪ Keputusan Gubernur No. 269/KEP/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang ▪ Persetujuan Gubernur DIY No. 900/22742 tanggal 20 Desember 2017	2.420.000.000,00	1.793.185.735,00	626.814.265,00
	Jumlah		**9.449.587.375,00**	**1.794.537.735,00**	**7.655.049.640,00**

Dari Total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp5.257.141.873.025,92 dan realisasi sebesar 4.920.626.776.618,68 tersebut, di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp800.000.000.000,00. Dalam APBD Tahun Anggaran 2017 Penerimaan Dana Keistimewaan dianggarkan sebesar Rp784.223.253.877,00 berasal dari Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2017 sebesar Rp800.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2016 sebesar Rp15.776.746.123,00. Dari anggaran tersebut telah diterima oleh Pemda DIY sebesar Rp784.272.397.752,00 atau 100,01% sehingga terdapat kelebihan penyaluran sebesar Rp49.143.875,00. Kelebihan penyaluran tersebut telah dikembalikan ke Kementerian Keuangan pada bulan Oktober 2017.

Anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp800.000.000.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran telah terserap sebesar Rp773.393.403.529,00 atau 96,67% sehingga terdapat Sisa Dana Keistimewaan Tahun 2017 sebesar Rp26.606.596.471,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.62
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2017

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur			
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	122.607.000,00	117.804.100,00	96,08
2	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	557.487.500,00	346.803.148,00	62,21
3	Sekretariat DPRD DIY	1.042.312.000,00	946.198.750,00	90,78
4	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	339.930.000,00	331.511.483,00	97,52
5	Dinas Pariwisata DIY	770.400.500,00	769.940.500,00	99,94
	Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah			
1	Biro Hukum Setda DIY	217.724.000,00	177.859.889,00	81,69
2	Biro Organisasi Setda DIY	6.748.204.500,00	6.115.888.238,00	90,63
3	Sekretariat DPRD DIY	4.037.264.000,00	1.696.653.996,00	42,02
4	Sekretariat Parampara Praja DIY	1.859.747.500,00	1.697.721.975,00	91,29
5	Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Setda DIY	1.393.100.000,00	1.344.069.710,00	96,48
	Urusan Kebudayaan			
1	Dinas Kebudayaan	182.986.949.760,00	172.549.956.050,00	94,30
2	Museum Negeri Sonobudoyo DIY	14.495.258.324,00	13.792.094.502,00	95,15
3	Taman Budaya Yogyakarta	70.926.825.707,00	70.755.332.887,00	99,76
4	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	15.043.305.100,00	14.657.500.130,00	97,44
5	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	15.907.126.391,00	14.902.508.284,00	93,68
6	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	24.883.005.925,00	23.147.739.100,00	93,03
7	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	14.377.039.175,00	13.706.535.832,00	95,34
8	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	6.098.543.900,00	5.757.777.075,00	94,41
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14.610.679.280,00	13.976.245.623,00	95,66
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.000.000.000,00	5.760.266.440,00	96,00
11	Badan Lingkungan Hidup	1.723.991.350,00	1.717.371.412,00	99,62
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.518.827.500,00	6.910.650.300,00	91,91
13	Kantor Perwakilan Daerah	994.830.000,00	988.571.173,00	99,37
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.936.987.000,00	4.811.265.700,00	97,45
15	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.218.511.100,00	1.151.527.360,00	94,50
16	Dinas Pariwisata	12.700.474.200,00	11.988.587.300,00	94,39

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.624.811.500,00	2.901.998.332,00	80,06
18	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	200.000.000,00	195.625.000,00	97,81
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY	10.183.537.718,00	10.182.919.025,00	99,99
20	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY	4.211.196.000,00	3.827.903.558,00	90,90
21	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY	247.000.000,00	239.606.450,00	97,01
22	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo	27.012.848.070,00	27.004.972.000,00	99,97
	Urusan Pertanahan			
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	9.854.816.000,00	9.044.748.687,00	91,78
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	263.090.000,00	175.165.998,00	66,58
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	1.947.342.000,00	1.739.736.560,00	89,34
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	1.169.750.000,00	852.758.080,00	72,90
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	1.746.145.000,00	1.513.459.025,00	86,67
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	1.716.157.000,00	1.561.817.750,00	91,01
7	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	500.000.000,00	474.560.000,00	94,91
	Urusan Tata Ruang			
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	3.746.468.465,00	3.296.713.593,00	88,00
2	Dinas Perhubungan DIY	11.026.751.369,00	10.870.453.282,00	98,58
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY	268.031.245.566,00	266.763.763.304,00	99,53
4	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	34.368.034.000,00	34.300.218.611,00	99,80
5	Dinas Pariwisata DIY	4.118.443.600,00	4.056.874.200,00	98,51
6	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	723.290.000,00	706.650.000,00	97,70
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	800.000.000,00	764.436.552,00	95,55
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	377.669.000,00	321.214.000,00	85,05
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	521.923.000,00	521.615.300,00	99,94
10	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	998.608.000,00	967.241.265,00	96,86
11	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	799.742.000,00	797.742.000,00	99,75
12	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	300.000.000,00	192.830.000,00	64,28
	Jumlah	**800.000.000.000,00**	**773.393.403.529,00**	**96,67**

5.1.3 Transfer **Rp725.577.512.054,70** **Rp698.576.664.858,67**

Transfer Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp725.775.220.743,70 dan realisasi sebesar Rp725.577.512.054,70 atau 99,97%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan **Rp647.149.357.812,70** **Rp611.852.157.038,67**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan dianggarkan sebesar Rp647.149.357.812,70 dan realisasi 100%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp35.297.200.774,03 atau 5,77% dibandingkan realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp611.852.157.038,67. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2017 merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63
Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta	118.950.538.649,44	118.950.538.649,44	100,00	108.491.618.806,57
2	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul	145.068.714.991,48	145.068.714.991,48	100,00	137.137.204.944,77
3	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo	79.733.816.868,53	79.733.816.868,53	100,00	76.355.539.797,63
4	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul	89.029.917.919,39	89.029.917.919,39	100,00	84.826.454.023,47
5	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman	214.366.369.383,86	214.366.369.383,86	100,00	205.041.339.466,23
	Jumlah	**647.149.357.812,70**	**647.149.357.812,70**	**100,00**	**611.852.157.038,67**

Berkaitan dengan pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota, pada Tahun 2017 Pemda DIY memiliki kekurangan pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota sebagai dampak adanya penerimaan Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 17/KEP/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Rp)
1.	Kota Yogyakarta	2.104.896.921,53
2.	Kabupaten Bantul	2.699.133.340,86
3.	Kabupaten Kulon Progo	1.535.843.254,93
4.	Kabupaten Gunungkidul	2.019.923.212,47
5.	Kabupaten Sleman	3.553.213.398,03
	Jumlah	**11.913.010.127,82**

Kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak tersebut telah dicatat sebagai Utang Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp11.913.010.127,82.

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan Rp78.428.154.242,00 Rp86.724.507.820,00

Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp78.625.862.931,00 dan realisasi sebesar Rp78.428.154.242,00 atau 99,75%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp8.296.353.578,00 atau 9,57% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp86.724.507.820,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan meliputi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp74.634.180.000,00, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp2.433.846.311,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp1.360.127.931,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya **Rp74.634.180.000,00** **Rp85.058.283.000,00**

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp74.654.180.000,00 dan realisasi sebesar Rp74.634.180.000,00 atau 99,97%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp10.424.103.000,00 atau 12,26% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp85.058.283.000,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.64
Rincian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta	1.228.000.000,00	1.228.000.000,00	100,00	9.735.600.000,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul	18.105.091.821,00	18.085.091.821,00	99,89	21.327.800.000,00
3	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo	19.425.064.373,00	19.425.064.373,00	100,00	27.378.283.000,00
4	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunung Kidul	18.240.217.899,00	18.240.217.899,00	100,00	14.755.200.000,00
5	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman	17.655.805.907,00	17.655.805.907,00	100,00	8.282.200.000,00
6	Keuangan Kepada Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara	-	-	-	3.579.200.000,00
	Jumlah	**74.654.180.000,00**	**74.634.180.000,00**	**99,97**	**85.058.283.000,00**

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya tersebut merupakan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat khusus dengan peruntukkan masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 5.65
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	1.208.000.000,00	1.208.000.000,00	-	100,00
2	Bantuan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	**1.228.000.000,00**	**1.228.000.000,00**	**-**	**100,00**

Tabel 5.66
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	6.020.000.000,00	6.020.000.000,00	-	100,00
2	Infrastruktur Pedesaan	9.396.737.000,00	9.396.737.000,00	-	100,00
3	Prasarana, Sarana dan Utilitas	2.668.354.821,00	2.668.354.821,00	-	100,00
4	Peralatan Kesiapsiagaan Bencana	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-
	Jumlah	**18.105.091.821,00**	**18.085.091.821,00**	**(20.000.000,00)**	**99,89**

Tabel 5.67
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	5.675.000.000,00	5.675.000.000,00	-	100,00
2	Infrastruktur Pedesaan	4.956.969.093,00	4.956.969.093,00	-	100,00
3	Prasarana, Sarana dan Utilitas	990.415.280,00	990.415.280,00		
4	Pembangunan Embung Krapyak Kalibawang	7.712.680.000,00	7.712.680.000,00	-	100,00
5	EWS Tanah Longsor	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00
6	Peralatan Kesiapsiagaan Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	**19.425.064.373,00**	**19.425.064.373,00**	**-**	**100,00**

Tabel 5.68
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	5.422.000.000,00	5.422.000.000,00	-	100,00
2	Infrastruktur Pedesaan	3.807.988.000,00	3.807.988.000,00	-	100,00
3	Prasarana, Sarana dan Utilitas	6.341.229.899,00	6.341.229.899,00	-	100,00
4	Pembangunan Pasar Ngawen Gunungkidul	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00
5	Pengawasan Rekonstruksi Jembatan dan Talud Pengaman Desa Putat Pathuk Gunungkidul	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00
6	EWS Tanah Longsor	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00
7	Peralatan Kesiapsiagaan Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	**18.240.217.899,00**	**18.240.217.899,00**	**-**	**100,00**

Tabel 5.69
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	5.675.000.000,00	5.675.000.000,00	-	100,00
2	Infrastruktur Pedesaan	11.838.305.907,00	11.838.305.907,00	-	100,00
3	Penyelesaian Permasalahan TKD Gading dan Banjarsari	122.500.000,00	122.500.000,00	-	100,00
4	Peralatan Kesiapsiagaan Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	**17.655.805.907,00**	**17.655.805.907,00**	**-**	**100,00**

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa **Rp2.433.846.311,00** **Rp253.000.000,00**

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp2.611.555.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.433.846.311,00 atau 93,20%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp2.180.846.311,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp253.000.000,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.70
Rincian Bantuan Keuangan ke Desa

No	Uraian	Tahun 2017		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pembangunan Jalan Evakuasi Pengungsi Randusongo, Donokerto, Turi, Sleman	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
2	Pembangunan Bangket Tebing Jalan Dusun Bojong, Wonolelo, Pleret, Bantul	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
3	Pembangunan Drainage dan Gorong-gorong Desa Pilangrejo, Pleret, Bantul	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
4	Pembangunan Talud Jalan di Desa Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
5	Rekonstruksi Jembatan dan Talud Pengaman Desa Putat Patuk Gunungkidul	1.251.555.000,00	1.251.555.000,00	100,00
6	Barak Pengungsi Desa Wonokerto, Turi, Sleman	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
7	Barak Pengungsi Desa Candi Binangun, Pakem, Sleman	500.000.000,00	322.291.311,00	64,46
	Jumlah	**2.611.555.000,00**	**2.433.846.311,00**	**93,20**

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya **Rp1.360.127.931,00** **Rp1.413.224.820,00**

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp1.360.127.931,00 dan realisasi 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	elisih Lebih (Kurang	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	144.160.890,00	144.160.890,00	-	100,00
2	Partai Nasional Demokrat	78.447.795,00	78.447.795,00	-	100,00
3	Partai Keadilan Sejahtera	118.186.869,00	118.186.869,00	-	100,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	348.455.442,00	348.455.442,00	-	100,00
5	Partai Golongan Karya	131.981.886,00	131.981.886,00	-	100,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	174.614.529,00	174.614.529,00	-	100,00
7	Partai Demokrat	93.212.556,00	93.212.556,00	-	100,00
8	Partai Amanat Nasional	192.182.967,00	192.182.967,00	-	100,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	78.884.997,00	78.884.997,00	-	100,00
	Jumlah	**1.360.127.931,00**	**1.360.127.931,00**	**-**	**100,00**

5.1.3.2.3 Transfer Dana Otonomi Khusus **Rp0,00** **Rp0,00**

Tidak terdapat Transfer Dana Otonomi Khusus Tahun 2017

5.1.4. Surplus (Defisit) **Rp164.614.442.669,59** **Rp51.230.019.466,79**

Surplus sebesar Rp164.614.442.669,59 merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja Tahun Anggaran 2017. Surplus Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp113.384.423.202,80 atau 221,32% dibandingkan dengan Surplus Tahun 2016 yaitu sebesar Rp51.230.019.466,79. Surplus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.72
Surplus/Defisit

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	5.080.252.165.566,33	5.085.241.219.288,27	100,10	3.899.192.985.313,51
2	Belanja dan Transfer	5.257.141.873.025,59	4.920.626.776.618,68	93,60	3.847.962.965.846,72
3	Surplus/Defisit	(176.889.707.459,26)	164.614.442.669,59	93,06	51.230.019.466,79

5.1.5 Pembiayaan Netto Rp179.451.993.468,59 Rp140.879.687.992,80

Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp179.451.993.468,59 yang terdiri atas:

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan Rp194.371.993.468,59 Rp370.879.687.992,80

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp194.371.993.468,59. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp176.507.694.524,21 atau 47,59% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp370.879.687.992,80. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp194.371.993.468,59 berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	192.109.707.459,59	192.109.707.459,59	100,00	364.682.428.017,80
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
3	Penerimaan Kembali Investasi Dana Non Permanen Lainnya	-	2.262.286.009,00	-	6.197.259.975,00
	Jumlah	**192.109.707.459,59**	**194.371.993.468,59**	101,18	**370.879.687.992,80**

a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp192.109.707.459,59 merupakan SiLPA Tahun 2016 yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penerimaan Tahun Anggaran 2017.

b. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp2.262.286.009,00 terdiri dari penerimaan pembayaran dana bergulir pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.000.000,00, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp184.440.000,00 dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp2.076.846.009,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Daerah

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Selisih Lebih (Kurang Rp	%
1	**Dinas Pertanian**				
	DPM PHP Tahun Anggaran 2012	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
2	**Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan**			-	-
	DPM LUEP (Pelimpahan dari Dinas Pertanian Serah terima per Oktober 2011)	-	184.440.000,00	184.440.000,00	-
3	**Dinas Perindagkop dan UKM**				
	Prospek Mandiri Campus Enterpreneur 2009	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010	-	77.313.601,00	77.313.601,00	-
	Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) 2006	-	365.474.403,00	365.474.403,00	-
	Ketahanan Pangan Tahun 2007	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-
	Prospek Mandiri 2007	-	2.800.000,00	2.800.000,00	-
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008	-	13.265.773,00	13.265.773,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2011	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) 2011	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2012	-	2.625.000,00	2.625.000,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2013	-	134.067.000,00	134.067.000,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2016	-	1.187.509.232,00	1.187.509.232,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017	-	277.091.000,00	277.091.000,00	-
	Jumlah	-	**2.262.286.009,00**	**2.262.286.009,00**	-

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan Rp14.920.000.000,00 Rp230.000.000.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp14.920.000.000,00 atau 98,03% dari anggaran yaitu Rp15.220.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp215.080.000.000,00 atau 93,51% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp230.000.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp14.920.000.000,00 terdiri dari:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda DIY dianggarkan sebesar Rp10.220.000.000,00 dan realisasi 100% dengan rincian sebesar Rp220.000.000,00 kepada PT. Askrida dan sebesar Rp10.000.000.000,00 kepada PT. Anindya Mitra Internasional. Penyertaan Modal tersebut telah direalisasikan 100%.
b. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.700.000.000,00 atau 94% untuk Program Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 46 Koperasi.

5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp344.066.436.138,18 Rp192.109.707.459,59

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp344.066.436.138,18, mengalami kenaikan sebesar Rp151.956.728.678,59 atau 79,10% dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2016 yaitu sebesar Rp192.109.707.459,59. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2017, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.75
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No	Uraian	Tahun 2017			Tahun 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Jumlah Pendapatan	5.080.252.165.566,33	5.085.241.219.288,27	100,10	3.899.192.985.313,51
2	Jumlah Belanja dan Transfer	5.257.141.873.025,92	4.920.626.776.618,68	93,60	3.847.962.965.846,72
3	Surplus/Defisit	(176.889.707.459,59)	164.614.442.669,59	93,06	51.230.019.466,79
4	Pembiayaan Netto	176.889.707.459,59	179.451.993.468,59	101,45	140.879.687.992,80
5	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**	**-**	**344.066.436.138,18**		**192.109.707.459,59**

SILPA sebesar Rp344.066.436.138,18 tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	SILPA di Bendahara Umum Daerah (BUD)	313.315.495.722,53
2.	Pendapatan belum disetor di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2017	369.973.815,00
3.	Sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2017	481.926.910,00
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan (BOS) pada rekening sekolah SMA/SMK/SLB Negeri	6.665.569.155,00
5.	SILPA di BLUD RS. Ghrasia	10.886.939.352,71
6.	SILPA di BLUD BLPT	1.985.925.606,00
7.	SILPA di BLUD Bapel Jamkesos	1.949.148.747,94
8.	SILPA di BLUD Balai Pelatihan Kesehatan	2.284.876.521,00
9.	SILPA di BLUD RS Paru Respira	6.126.580.308,00
	Jumlah	**344.066.436.138,18**

Penjelasan:

1. SILPA di BUD sebesar Rp313.315.495.722,53 terdiri dari saldo kas pada Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 sebesar Rp203.315.495.722,53, deposito pada Bank BRI sebesar Rp20.000.000.000,00, deposito pada Bank BTN sebesar Rp40.000.000.000,00 dan deposito pada Bank BNI sebesar Rp50.000.000.000,0.
2. Pendapatan belum disetor di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp369.973.815,00 meliputi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp189.350.722,00, Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.295.718,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp114.718.000,00 dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp64.609.375.000,00.
3. Sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran belum disetorkan ke Rekening Kasda sampai dengan per 31 Desember 2017 sebesar Rp481.926.910,00 meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp33.910.615,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp388.679.457,00, Dinas Kebudayaan sebesar Rp51.960.859,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp7.223.750,00 dan Sekretariat Parampara Praja sebesar Rp152.229,00.
4. Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan (BOS) sebesar Rp6.665.569.155,00 merupakan sisa penggunaan Dana BOS yang sampai dengan akhir tahun belum digunakan dan berada pada rekening sekolah 127 SMA/SMK/SLB Negeri.

5. Rincian SILPA masing-masing BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.76
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD

No	Uraian	Jumlah
1.	**RS Ghrasia**	
	SILPA 31 Desember 2016	**8.584.797.595,15**
	Pendapatan BLUD Tahun 2017	20.803.911.902,56
	Belanja BLUD Tahun 2017	(18.501.770.145,00)
	SILPA 31 Desember 2017	**10.886.939.352,71**
2.	**Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT)**	
	SILPA 31 Desember 2016	**1.958.514.494,00**
	Pendapatan BLUD Tahun 2017	1.753.875.862,00
	Belanja BLUD Tahun 2017	(1.726.464.750,00)
	SILPA 31 Desember 2017	**1.985.925.606,00**
3.	**Bapel Jamkessos**	
	SILPA 31 Desember 2016	**2.312.627.606,94**
	Pendapatan BLUD Tahun 2017	40.317.341,00
	Belanja BLUD Tahun 2017	(403.796.200,00)
	SILPA 31 Desember 2017	**1.949.148.747,94**
4.	**Balai Pelatihan Kesehatan**	
	SILPA 31 Desember 2016	**1.482.692.318,00**
	Pendapatan BLUD Tahun 2017	4.585.582.774,00
	Belanja BLUD Tahun 2017	(3.783.398.571,00)
	SILPA 31 Desember 2017	**2.284.876.521,00**
5.	**RS. Paru Respira**	
	SILPA 31 Desember 2016	**4.583.709.978,00**
	Pendapatan BLUD Tahun 2017	7.535.731.692,00
	Belanja BLUD Tahun 2017	(5.992.861.362,00)
	SILPA 31 Desember 2017	**6.126.580.308,00**
	Total SILPA BLUD	**23.233.470.535,65**

SiLPA Pemda DIY Tahun 2017 sebesar Rp344.070.343.059,18 tersebut di dalamnya termasuk sisa Dana Keistimewaan sebesar Rp26.606.596.471,00 dan sisa Dana Erupsi Merapi sebesar Rp7.510.000.000,00.

5. 2. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan rincian Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal **Rp192.109.707.459,59** **Rp364.682.428.017,80**

Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2017 sebesar Rp192.109.707.459,59 mengalami penurunan sebesar Rp172.572.720.558,21 atau 47,32% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2016 yaitu sebesar Rp364.682.428.017,80. Saldo Anggaran Lebih awal merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBD Tahun 2017.

5.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran **Rp344.066.436.138,18** **Rp192.109.707.459,59**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp344.066.436.138,18 berasal dari:

Tabel 5.77
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017

1.	Pendapatan	5.085.241.219.288,27
2.	Belanja dan Transfer	(4.920.626.776.618,68)
	Surplus (Defisit)	**164.614.442.669,59**
3.	Penerimaan Pembiayaan	194.371.993.468,59
4.	Pengeluaran Pembiayaan	(14.920.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	**179.451.993.468,59**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**344.066.436.138,18**

5.2.3 Sisa Anggaran Lebih Akhir **Rp344.066.436.138,18** **Rp192.109.707.459,59**

Sisa Anggaran Lebih akhir Tahun 2017 sebesar Rp344.066.436.138,18 mengalami peningkatan sebesar Rp151.956.728.678,59 atau 79,10% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2016 yaitu sebesar Rp192.109.707.459,59. Kenaikan Sisa Anggaran Lebih Akhir disebabkan realisasi penerimaan pendapatan Tahun 2017 lebih dari target yang ditetapkan.

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca

5.3.1	**Aset**	**Rp7.757.033.390.130,23**	**Rp6.050.819.887.074,37**
5.3.1.1.	**Aset Lancar**	**Rp457.462.422.808,81**	**Rp365.398.004.294,29**
5.3.1.1.1	**Kas dan Setara Kas**	**Rp346.433.140.959,52**	**Rp194.378.352.721,59**

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp346.433.140.959,52 merupakan Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.1.1	**Kas di Kas Daerah**	**Rp313.315.495.722,53**	**Rp172.991.324.108,50**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp313.315.495.722,53 merupakan kas yang berada dalam penguasaan BUD terdiri dari saldo rekening giro di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp203.315.495.722,53 dan sertifikat deposito sebesar Rp110.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.78
Rincian Rekening Giro

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Rekening Giro BPD DIY	203.315.495.722,53	172.984.344.408,50
2	Deposito pada Bank BRI	20.000.000.000,00	0,00
3	Deposito pada Bank BTN	40.000.000.000,00	0,00
4	Deposito pada Bank BNI	50.000.000.000,00	0,00
5	Setoran Dalam Perjalanan	0,00	6.979.700,00
	Jumlah	**313.315.495.722,53**	**172.991.324.108,50**

5.3.1.1.1.2	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**Rp369.973.815,00**	**Rp27.490.664,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp369.973.815,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah yaitu pada :

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp189.350.722,00
b. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp1.295.718,00
c. Dinas Perhubungan sebesar Rp114.718.000,00.
d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp64.609.375,00.

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah diakui sebagai penerimaan pendapatan Tahun 2017.

5.3.1.1.1.2	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**Rp7.178.141.559,00**	**Rp171.398.099,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.178.141.559,00 merupakan Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran yang sampai pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah sebesar Rp481.926.910,00, Sisa Dana BOS yang berada di rekening sekolah SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp6.665.569.155,00 dan Pajak yang sudah dipungut oleh

Bendahara Pengeluaran Biro Umum dan Protokol (KPA Danais Urusan Tata Ruang) tetapi belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp30.645.494,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.79
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Nama SKPD	Sisa Uang Persediaan (Rp)	Pajak Belum Disetor
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6.699.479.770,00	0,00
	a. Setor Kas Daerah	33.910.615,00	0,00
	b. Rekening SMA/SMK/SLB Negeri	6.665.569.155,00	0,00
2.	Dinas Perhubungan	388.679.457,00	0,00
3.	Dinas Kebudayaan	51.960.859,00	0,00
4.	Sekretariat Daerah	7.223.750,00	0,00
5.	Sekretariat Parampara Praja	152.229,00	0,00
6.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (KPA Biro Umum dan Protokol)	0,00	30.645.494,00
	Jumlah	**7.147.496.065,00**	**30.645.494,00**

Rincian sisa Dana BOS yang berada di rekening SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp6.665.569.155,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.80
Rincian Sisa Kas di Sekolah

No	Nama Sekolah	Pencairan	SPJ	Sisa Kas
1	SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.166.200.000,00	698.880.000,00	467.320.000,00
2	SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.200.080.000,00	1.154.906.744,00	45.173.256,00
3	SMA Negeri 3 Yogyakarta	922.600.000,00	853.305.437,00	69.294.563,00
4	SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.083.600.000,00	1.014.080.022,00	69.519.978,00
5	SMA Negeri 5 Yogyakarta	1.033.200.000,00	920.238.724,00	112.961.276,00
6	SMA Negeri 6 Yogyakarta	1.070.720.000,00	1.070.720.000,00	-
7	SMA Negeri 7 Yogyakarta	1.052.520.000,00	1.027.608.100,00	24.911.900,00
8	SMA Negeri 8 Yogyakarta	1.018.920.000,00	1.003.945.076,00	14.974.924,00
9	SMA Negeri 9 Yogyakarta	807.800.000,00	761.115.333,00	46.684.667,00
10	SMA Negeri 10 Yogyakarta	698.040.000,00	628.062.882,00	69.977.118,00
11	SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.185.520.000,00	1.185.520.000,00	-
12	SMA Negeri 1 Bambanglipuro	704.200.000,00	678.113.650,00	26.086.350,00
13	SMA Negeri 1 Banguntapan	914.200.000,00	912.560.460,00	1.639.540,00
14	SMA Negeri 1 Bantul	1.274.000.000,00	1.256.821.296,00	17.178.704,00
15	SMA Negeri 1 Dlingo	413.000.000,00	409.287.600,00	3.712.400,00
16	SMA Negeri 1 Imogiri	791.280.000,00	732.788.517,00	58.491.483,00
17	SMA Negeri 1 Jetis	1.031.800.000,00	1.031.800.000,00	-
18	SMA Negeri 1 Kasihan	992.600.000,00	991.500.000,00	1.100.000,00
19	SMA Negeri 1 Kretek	491.680.000,00	491.680.000,00	-
20	SMA Negeri 1 Pajangan	581.000.000,00	580.999.533,00	467,00
21	SMA Negeri 1 Piyungan	623.000.000,00	592.809.000,00	30.191.000,00

No	Nama Sekolah	Pencairan	SPJ	Sisa Kas
22	SMA Negeri 1 Pleret	651.000.000,00	650.999.530,00	470,00
23	SMA Negeri 1 Pundong	792.400.000,00	791.876.447,00	523.553,00
24	SMA Negeri 1 Sanden	806.400.000,00	806.400.000,00	-
25	SMA Negeri 1 Sedayu	1.262.800.000,00	1.182.865.046,00	79.934.954,00
26	SMA Negeri 1 Sewon	1.191.400.000,00	1.189.619.529,00	1.780.471,00
27	SMA Negeri 1 Srandakan	437.640.000,00	437.074.851,00	565.149,00
28	SMA Negeri 2 Banguntapan	873.600.000,00	869.895.509,00	3.704.491,00
29	SMA Negeri 2 Bantul	1.033.200.000,00	1.033.200.000,00	-
30	SMA Negeri 3 Bantul	743.400.000,00	743.400.000,00	-
31	SMA Negeri 1 Galur	385.560.000,00	373.292.696,00	12.267.304,00
32	SMA Negeri 1 Girimulyo	392.840.000,00	392.840.000,00	-
33	SMA Negeri 1 Kalibawang	394.800.000,00	359.184.260,00	35.615.740,00
34	SMA Negeri 1 Kokap	291.200.000,00	288.164.370,00	3.035.630,00
35	SMA Negeri 1 Lendah	754.600.000,00	749.178.600,00	5.421.400,00
36	SMA Negeri 1 Pengasih	809.480.000,00	780.257.875,00	29.222.125,00
37	SMA Negeri 1 Samigaluh	250.880.000,00	250.880.000,00	-
38	SMA Negeri 1 Sentolo	658.840.000,00	576.103.000,00	82.737.000,00
39	SMA Negeri 1 Temon	536.760.000,00	469.223.310,00	67.536.690,00
40	SMA Negeri 1 Wates	940.520.000,00	940.520.000,00	-
41	SMA Negeri 2 Wates	666.400.000,00	628.755.524,00	37.644.476,00
42	SMA Negeri 1 Karangmojo	792.400.000,00	738.500.000,00	53.900.000,00
43	SMA Negeri 1 Panggang	494.760.000,00	430.999.925,00	63.760.075,00
44	SMA Negeri 1 Patuk	476.000.000,00	443.448.545,00	32.551.455,00
45	SMA Negeri 1 Playen	494.200.000,00	484.505.100,00	9.694.900,00
46	SMA Negeri 1 Rongkop	392.000.000,00	381.807.179,00	10.192.821,00
47	SMA Negeri 1 Semanu	467.600.000,00	457.164.461,00	10.435.539,00
48	SMA Negeri 1 Semin	795.200.000,00	785.785.300,00	9.414.700,00
49	SMA Negeri 1 Tanjungsari	605.080.000,00	605.080.000,00	-
50	SMA Negeri 1 Wonosari	898.800.000,00	898.800.000,00	-
51	SMA Negeri 2 Playen	790.720.000,00	777.706.031,00	13.013.969,00
52	SMA Negeri 2 Wonosari	799.400.000,00	799.400.000,00	-
53	SMA Negeri 1 Cangkringan	443.800.000,00	441.452.600,00	2.347.400,00
54	SMA Negeri 1 Depok	803.600.000,00	803.340.674,00	259.326,00
55	SMA Negeri 1 Gamping	533.400.000,00	533.400.000,00	-
56	SMA Negeri 1 Godean	798.000.000,00	797.886.232,00	113.768,00
57	SMA Negeri 1 Kalasan	935.200.000,00	935.040.200,00	159.800,00
58	SMA Negeri 1 Minggir	520.800.000,00	511.105.700,00	9.694.300,00
59	SMA Negeri 1 Mlati	526.400.000,00	525.125.769,00	1.274.231,00
60	SMA Negeri 1 Ngaglik	758.800.000,00	758.761.075,00	38.925,00
61	SMA Negeri 1 Ngemplak	521.080.000,00	520.516.000,00	564.000,00
62	SMA Negeri 1 Pakem	668.920.000,00	658.465.100,00	10.454.900,00

No	Nama Sekolah	Pencairan	SPJ	Sisa Kas
63	SMA Negeri 1 Prambanan	799.400.000,00	795.350.630,00	4.049.370,00
64	SMA Negeri 1 Seyegan	943.600.000,00	943.600.000,00	-
65	SMA Negeri 1 Sleman	790.440.000,00	790.439.891,00	109,00
66	SMA Negeri 1 Tempel	450.800.000,00	429.918.200,00	20.881.800,00
67	SMA Negeri 1 Turi	497.840.000,00	459.210.762,00	38.629.238,00
68	SMA Negeri 2 Ngaglik	884.800.000,00	878.000.000,00	6.800.000,00
69	SMA Negeri 2 Sleman	521.080.000,00	518.134.100,00	2.945.900,00
70	SMK Negeri 1 Yogyakarta	791.840.000,00	791.601.666,00	238.334,00
71	SMK Negeri 2 Yogyakarta	2.872.800.000,00	1.859.769.900,00	1.013.030.100,00
72	SMK Negeri 3 Yogyakarta	2.424.520.000,00	2.167.238.170,00	257.281.830,00
73	SMK Negeri 4 Yogyakarta	2.248.400.000,00	1.882.244.300,00	366.155.700,00
74	SMK Negeri 5 Yogyakarta	1.681.400.000,00	1.566.994.864,00	114.405.136,00
75	SMK Negeri 6 Yogyakarta	1.660.960.000,00	1.534.407.135,00	126.552.865,00
76	SMK Negeri 7 Yogyakarta	1.150.800.000,00	1.150.701.954,00	98.046,00
77	SMK Negeri 1 Bantul	2.083.200.000,00	1.693.913.186,00	389.286.814,00
78	SMK Negeri 1 Dlingo	598.920.000,00	598.080.000,00	840.000,00
79	SMK Negeri 1 Kasihan	768.600.000,00	768.600.000,00	-
80	SMK Negeri 1 Pajangan	629.160.000,00	597.222.250,00	31.937.750,00
81	SMK Negeri 1 Pandak	911.400.000,00	910.996.397,00	403.603,00
82	SMK Negeri 1 Pleret	1.076.040.000,00	870.197.829,00	205.842.171,00
83	SMK Negeri 1 Pundong	1.061.200.000,00	738.024.355,00	323.175.645,00
84	SMK Negeri 1 Sanden	676.200.000,00	555.340.062,00	120.859.938,00
85	SMK Negeri 1 Sedayu	1.562.400.000,00	1.299.155.323,00	263.244.677,00
86	SMK Negeri 1 Sewon	2.172.800.000,00	2.108.783.945,00	64.016.055,00
87	SMK Negeri 2 Kasihan	597.800.000,00	566.930.281,00	30.869.719,00
88	SMK Negeri 2 Sewon	789.600.000,00	789.600.000,00	-
89	SMK Negeri 3 Kasihan	1.010.800.000,00	976.789.920,00	34.010.080,00
90	SMK Negeri 1 Girimulyo	249.200.000,00	249.200.000,00	-
91	SMK Negeri 1 Kokap	266.000.000,00	265.940.650,00	59.350,00
92	SMK Negeri 1 Nanggulan	1.064.000.000,00	999.514.550,00	64.485.450,00
93	SMK Negeri 1 Panjatan	931.000.000,00	931.000.000,00	-
94	SMK Negeri 1 Pengasih	1.332.800.000,00	1.330.080.166,00	2.719.834,00
95	SMK Negeri 1 Samigaluh	540.960.000,00	540.960.000,00	-
96	SMK Negeri 1 Temon	631.400.000,00	409.115.124,00	222.284.876,00
97	SMK Negeri 2 Pengasih	2.135.000.000,00	2.059.509.836,00	75.490.164,00
98	SMK Negeri 1 Gedangsari	648.200.000,00	599.167.782,00	49.032.218,00
99	SMK Negeri 1 Girisubo	630.000.000,00	583.594.901,00	46.405.099,00
100	SMK Negeri 1 Ngawen	1.425.200.000,00	1.424.100.000,00	1.100.000,00
101	SMK Negeri 1 Nglipar	1.002.400.000,00	964.198.643,00	38.201.357,00
102	SMK Negeri 1 Ponjong	749.000.000,00	652.344.535,00	96.655.465,00
103	SMK Negeri 1 Purwosari	560.000.000,00	547.358.930,00	12.641.070,00

No	Nama Sekolah	Pencairan	SPJ	Sisa Kas
104	SMK Negeri 1 Saptosari	1.246.000.000,00	1.245.995.450,00	4.550,00
105	SMK Negeri 1 Tanjungsari	340.200.000,00	321.507.525,00	18.692.475,00
106	SMK Negeri 1 Tepus	516.600.000,00	514.976.200,00	1.623.800,00
107	SMK Negeri 1 Wonosari	1.725.920.000,00	1.704.516.656,00	21.403.344,00
108	SMK Negeri 2 Gedangsari	910.000.000,00	905.600.000,00	4.400.000,00
109	SMK Negeri 2 Wonosari	1.940.400.000,00	1.890.556.418,00	49.843.582,00
110	SMK Negeri 3 Wonosari	1.393.000.000,00	1.362.414.076,00	30.585.924,00
111	SMK Negeri 1 Cangkringan	1.206.800.000,00	973.020.014,00	233.779.986,00
112	SMK Negeri 1 Depok	1.187.200.000,00	1.137.315.996,00	49.884.004,00
113	SMK Negeri 1 Godean	1.326.080.000,00	1.305.235.493,00	20.844.507,00
114	SMK Negeri 1 Kalasan	1.510.600.000,00	1.506.355.000,00	4.245.000,00
115	SMK Negeri 1 Seyegan	1.706.600.000,00	1.675.208.722,00	31.391.278,00
116	SMK Negeri 1 Tempel	1.192.240.000,00	1.180.023.898,00	12.216.102,00
117	SMK Negeri 2 Depok	2.902.200.000,00	2.650.138.688,00	252.061.312,00
118	SMK Negeri 2 Godean	877.800.000,00	837.880.700,00	39.919.300,00
119	SLB/C N 1 Yogyakarta	98.000.000,00	79.155.680,00	18.844.320,00
120	SLB/C N 2 Yogyakarta	96.800.000,00	86.785.050,00	10.014.950,00
121	SLB/C N Pembina	227.400.000,00	202.125.855,00	25.274.145,00
122	SLB N 1 Bantul	307.000.000,00	211.790.875,00	95.209.125,00
123	SLB N 2 Bantul	94.800.000,00	81.264.000,00	13.536.000,00
124	SLB N 1 Sleman	104.200.000,00	94.474.000,00	9.726.000,00
125	SLB N 1 Gunungkidul	118.200.000,00	86.317.000,00	31.883.000,00
126	SLB N 2 Gunungkidul	51.600.000,00	51.120.500,00	479.500,00
127	SLB N 1 Kulon Progo	162.600.000,00	144.600.000,00	18.000.000,00
	JUMLAH	**111.510.040.000,00**	**104.844.470.845,00**	**6.665.569.155,00**

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD **Rp23.233.470.535,65** **Rp18.922.341.992,09**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2017 sebesar Rp23.233.470.535,65 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Bapel Jamkessos, Balai Pelatihan Kesehatan dan Balai Latihan Pendidikan dan Teknik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81
Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	2017 (Rp)
1	RS Grhasia	10.886.939.352,71
2	RS Paru Respira	6.126.580.308,00
3	Balai Pelayanan Jamkesos	1.949.148.747,94
4.	Balai Pelatihan Kesehatan	2.284.876.521,00
5.	BLPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.985.925.606,00
	Jumlah	**23.233.470.535,65**

Penjelasan:

Saldo Kas BLUD pada RS Grhasia sebesar Rp10.886.939.352,71 terdiri dari :

a. Saldo Rekening Giro BPD DIY No. 041.111.000043 sebesar Rp4.383.070.968,71
b. Deposito sebesar Rp6.500.000.000,00.
c. Tunai di Bendahara Penerimaan sebesar Rp3.868.384,00.

Kas di BLUD pada RS Paru Respira sebesar Rp6.126.580.308,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001427.

Kas di BLUD pada Balai Pelayanan Jamkesos sebesar Rp1.949.148.747,94 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.000055 sebesar Rp1.947.919.363,00 dan rekening giro Bank Mandiri sebesar Rp1.229.384,94.

Kas di BLUD pada Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp2.284.876.521,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 040.111.000050.

Kas di BLUD pada BLPT sebesar Rp1.985.925.606,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001065.

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya **Rp2.336.059.327,34** **Rp2.265.797.858,00**

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.336.059.327,34 terdiri Kas di Rekening SMA/SMK yang berasal dari serah terima P3D sebesar Rp2.336.059.327,34. Kas Lainnya tersebut merupakan sisa Dana P3D, Bosnas dan Bos Propinsi per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82
Rincian Kas Lainnya di SMA/SMK

No	Nama Sekolah	Sisa Kas per 31-12-2016	SPJ Tahun 2017	Sisa Kas per 31-12-2017
1	SMA Negeri 1 Yogyakarta	363.879.253,00	182.216.895,00	181.662.358,00
2	SMA Negeri 2 Yogyakarta	402.314.925,00	402.314.847,00	78,00
3	SMA Negeri 3 Yogyakarta	250.729.482,00	250.729.448,00	34,00
4	SMA Negeri 4 Yogyakarta	96.639.000,00	96.191.000,00	448.000,00
5	SMA Negeri 5 Yogyakarta	130.573.192,00	130.573.192,00	-
6	SMA Negeri 6 Yogyakarta	17.150.000,00	17.150.000,00	-
7	SMA Negeri 7 Yogyakarta	361.717.022,00	256.109.718,00	105.607.304,00
8	SMA Negeri 8 Yogyakarta	630.552.625,00	567.850.947,00	62.701.678,00
9	SMA Negeri 9 Yogyakarta	174.487.815,00	174.487.813,00	2,00
10	SMA Negeri 10 Yogyakarta	71.710.441,00	54.118.404,00	17.592.037,00
11	SMA Negeri 1 Banguntapan	1.900.000,00	1.900.000,00	-
12	SMA Negeri 1 Bantul	49.719.104,00	49.719.104,00	-
13	SMA Negeri 1 Dlingo	830.091,00	-	830.091,00
14	SMA Negeri 1 Imogiri	90.000,00	-	90.000,00
15	SMA Negeri 1 Jetis	17.995.163,00	17.981.826,00	13.337,00
16	SMA Negeri 1 Kasihan	82.938.472,00	82.938.472,00	-
17	SMA Negeri 1 Kretek	18.682.957,00	18.682.957,00	-
18	SMA Negeri 1 Sedayu	143.082.120,00	62.053.100,00	81.029.020,00
19	SMA Negeri 1 Sewon	2.920.267,00	-	2.920.267,00
20	SMA Negeri 1 Srandakan	9,00	-	9,00

No	Nama Sekolah	Sisa Kas per 31-12-2016	SPJ Tahun 2017	Sisa Kas per 31-12-2017
21	SMA Negeri 2 Banguntapan	959.091,00	959.091,00	-
22	SMA Negeri 2 Bantul	49.357,00	-	49.357,00
23	SMA Negeri 1 Galur	308.715,00	-	308.715,00
24	SMA Negeri 1 Girimulyo	40.281.000,00	9.450.000,00	30.831.000,00
25	SMA Negeri 1 Kalibawang	142.372.558,00	136.966.158,00	5.406.400,00
26	SMA Negeri 1 Kokap	15.485.322,00	15.485.322,00	-
27	SMA Negeri 1 Pengasih	224.984.077,00	164.456.725,00	60.527.352,00
28	SMA Negeri 1 Samigaluh	32.301.046,00	-	32.301.046,00
29	SMA Negeri 1 Sentolo	10.839.200,00	-	10.839.200,00
30	SMA Negeri 1 Temon	72.143.741,00	72.143.741,00	-
31	SMA Negeri 1 Karangmojo	146.157,00	-	146.157,00
32	SMA Negeri 1 Patuk	5.811.123,00	4.550.000,00	1.261.123,00
33	SMA Negeri 1 Playen	8.400.000,00	8.400.000,00	-
34	SMA Negeri 1 Semanu	1.092.990,00	-	1.092.990,00
35	SMA Negeri 1 Semin	700.000,00	-	700.000,00
36	SMA Negeri 1 Tanjungsari	9.100.000,00	9.100.000,00	-
37	SMA Negeri 1 Wonosari	679.334.345,00	679.334.345,00	-
38	SMA Negeri 2 Playen	3.146.125,00	2.731.700,00	414.425,00
39	SMA Negeri 2 Wonosari	4.900.000,00	4.900.000,00	-
40	SMA Negeri 1 Cangkringan	96,00	-	96,00
41	SMA Negeri 1 Depok	495.183,00	-	495.183,00
42	SMA Negeri 1 Godean	5.190.689,00	-	5.190.689,00
43	SMA Negeri 1 Kalasan	2.532.722,00	-	2.532.722,00
44	SMA Negeri 1 Minggir	36.637.002,00	36.632.800,00	4.202,00
45	SMA Negeri 1 Mlati	94.876,00	-	-
46	SMA Negeri 1 Ngaglik	4.457.951,00	816.825,00	3.641.126,00
47	SMA Negeri 1 Ngemplak	3.502.633,00	-	3.502.633,00
48	SMA Negeri 1 Pakem	7,18	-	7,18
49	SMA Negeri 1 Prambanan	4.795.169,00	4.207.117,00	588.052,00
50	SMA Negeri 1 Seyegan	1.660.959,00	-	1.660.959,00
51	SMA Negeri 1 Sleman	54.636.973,00	54.636.973,00	-
52	SMA Negeri 1 Tempel	590.755,00	590.755,00	-
53	SMA Negeri 1 Turi	13.417.168,00	-	13.417.168,00
54	SMA Negeri 2 Ngaglik	3.024.000,00	-	3.024.000,00
55	SMA Negeri 2 Sleman	532.401,00	-	532.401,00
56	SMK Negeri 1 Yogyakarta	223.878,00	-	223.878,00
57	SMK Negeri 2 Yogyakarta	163.753.975,00	66.460.900,00	97.293.075,00
58	SMK Negeri 4 Yogyakarta	778.301.356,00	97.556.800,00	680.744.556,00
59	SMK Negeri 5 Yogyakarta	556.801.817,00	556.801.817,00	-
60	SMK Negeri 6 Yogyakarta	759.897.079,00	97.556.800,00	662.340.279,00
61	SMK Negeri 7 Yogyakarta	438.324.509,00	438.324.509,00	-

No	Nama Sekolah	Sisa Kas per 31-12-2016	SPJ Tahun 2017	Sisa Kas per 31-12-2017
62	SMK Negeri 1 Bantul	835.726.433,00	816.343.933,00	19.382.500,00
63	SMK Negeri 1 Dlingo	840.000,00	-	840.000,00
64	SMK Negeri 1 Pleret	18.550.000,00	-	18.550.000,00
65	SMK Negeri 1 Sanden	26.950.000,00	26.840.000,00	110.000,00
66	SMK Negeri 1 Sedayu	203.778.000,00	203.778.000,00	-
67	SMK Negeri 1 Kokap	303.457,00	-	303.457,00
68	SMK Negeri 1 Nanggulan	53.564.782,00	-	53.564.782,00
69	SMK Negeri 1 Panjatan	3.531.995,00	3.466.400,00	65.595,00
70	SMK Negeri 1 Pengasih	42.579.962,00	-	42.579.962,00
71	SMK Negeri 1 Temon	154.487.995,00	154.487.995,00	0,00
72	SMK Negeri 1 Girisubo	1.878.438,00	-	1.878.438,00
73	SMK Negeri 1 Ngawen	17.181.500,00	17.181.500,00	-
74	SMK Negeri 1 Tanjungsari	90.561.820,00	89.335.000,00	1.226.820,16
75	SMK Negeri 1 Wonosari	9,00	-	9,00
76	SMK Negeri 2 Gedangsari	627.885,00	-	627.885,00
77	SMK Negeri 1 Cangkringan	58.930.918,00	58.920.950,00	9.968,00
78	SMK Negeri 1 Depok	8.106.244,00	8.106.244,00	-
79	SMK Negeri 1 Kalasan	1.416.048,00	1.416.000,00	48,00
80	SMK Negeri 1 Seyegan	16.800.000,00	16.800.000,00	-
81	SMK Negeri 1 Tempel	275.882.229,00	275.882.229,00	-
82	SMK Negeri 2 Depok	10.576.176,00	-	10.576.176,00
83	SMK Negeri 2 Godean	276.081.406,00	161.700.725,00	114.380.681,00
	JUMLAH	**8.997.493.280,18**	**6.661.339.077,00**	**2.336.059.327,34**

5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan Rp3.188.369.849,55 Rp2.894.124.774,55

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.188.369.849,55 terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah dan Piutang Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah Rp195.471.700,00 Rp239.523.400,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp195.471.700,00 merupakan Piutang Pajak Daerah pada DPPKA terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp145.967.700,00 dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp49.504.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83
Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah

No	UPTD	Saldo Awal 31-12-2016	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31-12-2017
1.	**Piutang PKB**				
	KPPD di Kota Yogyakarta	43.414.500,00	0,00	8.739.000,00	34.675.500,00
	KPPD di Kab. Bantul	46.807.500,00	945.000,00	10.877.800,00	36.874.700,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	9.319.200,00	5.441.100,00	7.252.200,00	7.508.100,00
	KPPD di Kab. Kulon Progo	6.929.700,00	0,00	1.370.700,00	5.559.000,00

	KPPD di Kab. Sleman	73.966.950,00	18.981.000,00	31.597.550,00	61.350.400,00
	Jumlah	**180.437.850,00**	**25.367.100,00**	**59.837.250,00**	**145.967.700,00**
2.	**Piutang BBNKB**				
	KPPD di Kota Yogyakarta	2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
	KPPD di Kab. Bantul	11.286.000,00	0,00	1.491.000,00	9.795.000,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	2.233.000,00	2.300.000,00	2.233.000,00	2.300.000,00
	KPPD di Kab. Kulon Progo	0,00	0,00	0,00	0,00
	KPPD di Kab. Sleman	43.511.550,00	0,00	8.157.550,00	35.354.000,00
	Jumlah	**59.085.550,00**	**2.300.000,00**	**11.881.550,00**	**49.504.000,00**
	Jumlah Total	**239.523.400,00**	**27.667.100,00**	**71.718.800,00**	**195.471.700,00**

Kualitas Piutang Pajak Daerah tersebut ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5.84
Kelompok Umur dan Kualitas Piutang

Umur Piutang	Kualitas Piutang	PKB (Rp)	(BBNKB)	Jumlah
0 – 1 Tahun	Lancar	25.367.100,00	2.300.000,00	27.667.100,00
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	60.992.600,00	36.091.000,00	97.083.600,00
2 – 5 Tahun	Diragukan	50.905.000,00	10.779.000,00	61.684.000,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	8.703.000,00	334.000,00	9.037.000,00
	Jumlah	**145.967.700,00**	**49.504.000,00**	**195.471.700,00**

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi **Rp5.250.600,00** **Rp36.110.000,00**

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.250.600,00 merupakan:

a. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata dengan kondisi macet.
b. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Balai PIPBPJK) sebesar Rp600,00 dengan kondisi lancar.

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah **Rp2.979.686.849,55** **Rp2.618.491.374,55**

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.979.686.849,55 meliputi Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp246.578.281,55, Piutang Denda Pajak sebesar Rp56.181.450,00 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00, Piutang BLUD sebesar Rp2.358.768.993,00 dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah-Lainnya sebesar Rp316.108.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85
Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	SKPD	Saldo Awal 31-12-2016	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31-12-2017
1.	**PPKD**				
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	355.565.897,55	0,00	(108.987.615,00)	246.578.281,55
	Jumlah	**355.565.897,55**	**0,00**	**(108.987.615,00)**	**246.578.281,55**
2.	**DPPKA**				
	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
	Piutang Denda Pajak	66.760.750,00	10.013.600,00	(20.592.900,00)	56.181.450,00

	Jumlah	**68.810.750,00**	**10.013.600,00**	**(20.592.900,00)**	**58.231.450,00**
3.	**RS Ghrasia**				
	Piutang BLUD	2.024.490.549,00	16.684.281.535,00	(16.486.918.570,00)	2.221.853.514,00
	Jumlah	**2.024.490.549,00**	**16.684.281.535,00**	**(16.486.918.570,00)**	**2.221.853.514,00**
4.	**BLPT**				
	Piutang BLUD	169.624.179,00	0,00	(32.708.700,00)	136.915.479,00
	Jumlah	**169.624.179,00**	**0,00**	**(32.708.700,00)**	**136.915.479,00**
5.	**Balai PISAM**				
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	316.108.125,00	0,00	316.108.125,00
	Jumlah	**0,00**	**316.108.125,00**	**0,00**	**316.108.125,00**
	Jumlah Total	**2.618.491.374,55**	**17.010.403.260,00**	**(16.649.207.785,00)**	**2.979.686.849,55**

a. **Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp246.578.281,55**
Saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp246.578.281,55 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada PPKD yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2017 dengan kondisi macet.

b. **Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00.**
Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00 merupakan piutang pada DPPKA berupa Piutang Pendapatan Sewa Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014 dan dalam kondisi macet.

c. **Piutang Denda Pajak sebesar Rp56.181.450,00**
Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp56.181.450,00 merupakan Denda Pajak Daerah pada DPPKA yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Wajib Pajak.

d. **Piutang BLUD sebesar Rp2.358.768.993,00**
Piutang BLUD sebesar Rp2.358.768.993,00 terdiri dari Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp136.915.479,00, dan Piutang BLUD RS Ghrasia sebesar Rp2.221.853.514,00.
Rincian klasifikasi Piutang BLUD RS Ghrasia adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Jumlah (Rp)
Lancar	1.609.269.114,00
Diragukan	24.569.087,00
Macet	588.015.313,00
Jumlah	**2.221.853.514,00**

e. **Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp316.108.125,00**
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp316.108.125,00 merupakan piutang tagihan penjualan air curah bulan November dan Desember 2017 pada Balai PISAM kepada PDAM Bantul dan PDAM Sleman. Piutang Penjualan Air Curah tersebut jatuh tempo pembayarannya adalah bulan Januari dan Februari 2018.

5.3.1.1.2.4 Piutang Pendapatan Lainnya **Rp7.960.700,00** **Rp0,00**

Saldo Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.960.700,00 merupakan Piutang Pemda DIY kepada Pemda Kabupaten Sleman karena adanya kekurangan pembayaran cost sharing pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah domestik sistem terpusat Tahun 2017. Cost sharing tersebut diatur dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 5/PERJ/GUB/IV/2015 atau 16.1/PK/Bt/2015 atau 17.1/PK.KDH/A/2015 atau 39/Perj.YK/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat beserta addendumnya. Sesuai dengan Berita Acara cost sharing untuk Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp87.960.700,00 namun sampai dengan 31 Desember 2017 baru dibayar sebesar Rp80.000.000,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp7.960.700,00. Kekurangan pembayaran tersebut telah dibayar pada bulan Januari 2018.

5.3.1.1.3 Piutang Lainnya **Rp892.538.707,50** **Rp1.264.024.890,00**

Saldo Piutang Lainnya Pemda DIY per 31 Desember 2017 sebesar Rp892.538.707,50 merupakan cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga tetapi pada tanggal 31 Desember 2017, pihak ketiga tersebut tidak dapat menyediakan persediaan beras secara fisik. Pemda DIY dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan bekerja sama dengan PUSKUD dan BULOG dalam menyimpan cadangan beras dengan tujuan untuk tujuan strategis. Nilai beras yang dititipkan kepada PUSKUD dan BULOG sampai dengan 31 Desember 2017 masing-masing sebanyak 151.746,70 kg dan 31.875 kg. Tanggal 31 Desember 2017 dilakukan stock opname dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 5.86
Rincian Perhitungan Piutang Lainnya

No	Pihak Ketiga	Total Cadangan Beras	Total Opname Persediaan	Selisih Kurang
1.	PUSKUD	151.746,70 kg	49.450 kg	102.296,70 kg
2.	BULOG	31.875 kg	31.875 kg	0,00 kg
	Jumlah	**183.621,70 kg**	**81.325 kg**	**102.296,70 kg**

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2016, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2016 dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain. Penilaian Piutang Lain-Lain menggunakan harga pembelian terakhir dikalikan dengan volume kekurangan persediaan.
Nilai Piutang Lain-lain per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp892.538.707,50 (102.296,70 kg x Rp8.725,00).

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang **Rp(1.029.252.385,12)** **Rp(1.087.538.108,29)**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.029.252.385,12 merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp49.725.695,00, Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp5.250.000,00 dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp974.276.689,62 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah **Rp(49.725.695,00)** **Rp(45.468.168,50)**

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp49.725.695,00 terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp40.381.595,50 dan Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.344.100,00 pada DPPKA.

Tabel 5.87
Kelompok Umur dan Kualitas Piutang

Umur Piutang	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang	
		PKB (Rp)	BBNKB (Rp)
0 – 1 Tahun	Lancar	126.835,50	11.500,00
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	6.099.260,00	3.609.100,00
2 – 5 Tahun	Diragukan	25.452.500,00	5.389.500,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	8.703.000,00	334.000,00
	Jumlah	**40.381.595,50**	**9.344.100,00**

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Retribusi **Rp(5.250.000,00)** **Rp(15.463.600,00)**

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.250.000,00 merupakan Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata dengan kondisi macet.

5.3.1.1.4.3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah **Rp(974.276.689,62)** **Rp(1.026.606.339,79)**

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2017 sebesar Rp974.276.689,62 terdiri dari:

Tabel 5.88
Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	Satuan Kerja	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
a.	PPKD	246.578.281,55	Macet	246.578.281,55
b.	RS Ghrasia	1.609.269.114,00	Lancar	8.046.345,57
		24.569.087,00	Diragukan	12.284.543,50
		588.015.313,00	Macet	588.015.313,00
	Jumlah	**2.221.853.514,00**		**608.346.202,07**
c.	BLPT	54.835.120,00	Lancar	274.175,60
		82.080.359,00	Macet	82.080.359,00
	Jumlah	**136.915.479,00**		**82.354.534,60**
d.	DPPKA			
	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.050.000,00	Macet	2.050.000,00
	Piutang Denda Pajak	56.181.450,00		35.037.671,00
	Jumlah	**58.231.450,00**		**37.087.671,00**
	Total	**2.979.686.849,55**		**1.029.252.385,12**

5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka **Rp515.620.196,48** **Rp436.422.158,93**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp515.620.196,48 terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp509.454.889,83 dan Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp6.165.306,65 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.5.1 Beban Jasa Dibayar Dimuka **Rp509.454.889,83** **Rp421.008.892,28**

Saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp509.454.889,83 merupakan saldo awal Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp421.008.892,28 ditambah dengan pembayaran Premi Asuransi Tahun 2017 sebesar Rp1.100.301.981,00 dikurangi dengan Beban Asuransi dan Jasa sebesar Rp1.011.855.983,45.

Premi Asuransi Tahun 2017 sebesar Rp1.100.301.981,00 merupakan Premi Asuransi kebakaran dan gempa bumi dibayarkan kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung sebesar Rp517.163.703,00 dengan masa pertanggungan mulai 18 Juni 2017 sampai dengan 18 Juni 2018 dan Premi Asuransi Pertanggungan Comprehensive Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 6 kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia sebesar Rp583.138.278,00 dengan masa pertanggungan 18 Juni 2017 – 18 Juni 2018.

Beban Asuransi dan Jasa sebesar Rp1.011.855.983,45 merupakan manfaat yang telah dinikmati selama Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89
Rincian Beban Asuransi dan Jasa

No	Uraian	Periode	Nilai (Rp)
1.	Asuransi Gedung kepada PT. Asuransi Himalaya	1 Januari – 18 Juni 2017	214.345.866,09
2.	Asuransi Kendaraan kepada Asuransi Jasindo Oto Plus	1 Januari – 18 Juni 2017	205.874.026,19
3.	Asuransi kebakaran dan gempa bumi dibayarkan kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung	18 Juni – 31 Desember 2017	277.709.824,08
4.	Asuransi Pertanggungan Comprehensive Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 6 kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia	18 Juni – 31 Desember 2017	313.137.267,09
5.	Pembelian Pulsa Listrik DPPKA	Tahun 2017	789.000,00
	Jumlah		**1.011.855.983,45**

Saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp509.454.889,83 terdiri dari Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi sebesar Rp239.453.878,92 dan Premi Asuransi Kendaraan sebesar Rp270.001.010,91 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Premi Asuransi kebakaran dan gempa bumi dibayarkan kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung sebesar Rp517.163.703,00 dengan masa pertanggungan mulai 18 Juni 2017 sampai dengan 18 Juni 2018. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa bumi tersebut sampai dengan 31 Desember 2017 telah diakui menjadi Beban Asuransi sebesar Rp277.709.824,08 dan sisanya diakui sebagai Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp239.453.878,92.
b. Premi Asuransi Pertanggungan Comprehensive Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 6 kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia sebesar Rp583.138.278,00 dengan masa pertanggungan 18 Juni 2017 – 18

Juni 2018. Premi Asuransi Kendaraan tersebut sampai dengan 31 Desember 2017 telah diakui sebagai Beban Asuransi sebesar Rp313.137.267,09 dan sisanya diakui sebagai Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp270.001.010,91.

5.3.1.1.5.1 Beban Sewa Dibayar Dimuka **Rp6.165.306,65** **Rp15.413.266,65**

Saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp6.165.306,65 berasal dari Saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp15.413.266,65 dikurangi dengan Beban Sewa sebesar Rp9.247.960,00.
Beban Sewa Dibayar Dimuka merupakan pembayaran sewa tanah magersari milik Sultan Ground sebesar Rp92.479.600,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 28 Agustus 2008 sampai dengan 28 Agustus 2018. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6.165.306,65.

5.3.1.1.6 Persediaan **Rp107.462.005.480,88** **Rp167.512.617.857,51**

Saldo Persediaan sebesar Rp107.462.005.480,88 terdiri dari persediaan barang pakai habis yang berada di 35 OPD dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.90
Rincian Persediaan per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	15.466.871.992,88	668.107.236,00
2	Dinas Kesehatan	4.403.896.331,00	5.088.413.275,00
3	RS Grhasia	1.209.759.538,00	1.035.903.538,51
4	RS Paru Respira	3.730.636.563,00	2.739.200.288,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	34.048.247.318,00	60.569.236.290,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.087.325.500,00	10.450.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.478.600,00	19.135.600,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	29.166.900,00	23.283.350,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	159.935.500,00	224.325.800,00
10	Dinas Sosial	194.767.825,00	352.039.485,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	232.198.600,00	341.991.908,00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	16.881.110,00	8.219.200,00
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	727.781.675,00	645.385.075,00
14	Badan Lingkungan Hidup	139.851.800,00	229.488.700,00
15	Dinas Perhubungan	564.019.930,00	685.433.700,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	93.000.950,00	31.058.150,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	78.060.100,00	17.233.100,00
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	21.243.475,00	9.524.400,00
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.317.420,00	1.263.400,00
20	Dinas Kebudayaan	30.799.408.486,00	49.300.019.196,00
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	290.081.765,00	223.491.122,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.162.920.905,00	940.444.692,00
23	Dinas Pariwisata	2.210.050.000,00	2.191.720.900,00
24	Dinas Pertanian	4.376.093.358,00	2.890.253.425,00

25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	147.196.200,00	148.199.830,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	737.627.875,00	636.150.375,00
27	Sekretariat Daerah	345.145.750,00	425.906.100,00
28	Sekretariat Paramparapraja	86.000,00	53.000,00
29	Kantor Perwakilan Daerah	262.239.167,00	173.043.448,00
30	Sekretariat DPRD	279.935.773,00	214.829.188,00
31	Inspektorat	214.497.575,00	153.826.948,00
32	Badan Perencanaan Daerah	533.748.825,00	309.244.445,00
33	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	2.791.288.274,00	37.136.712.333,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	76.707.250,00	50.825.110,00
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	19.537.150,00	18.205.250,00
	Jumlah	**107.462.005.480,88**	**167.512.617.857,51**

Sesuai dengan klasifikasi persediaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan, telah dilakukan mapping klasifikasi persediaan menjadi:

Tabel 5.91
Rincian Obyek Persediaan

No	Uraian	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)
1	Barang Konsumsi	13.252.239.241,01	4.794.490.290,00
2	Barang Pakai Habis Sebagai Pendukung Kegiatan	13.908.973.615,72	9.600.438.114,51
3	Amunisi		
4	Bahan Untuk Pemeliharaan	1.730.067.971,61	295.524.697,00
5	Suku Cadang	325.187.487,00	257.680.725,00
6	Pita Cukai dan Leges	59.005.500,00	23.618.500,00
7	Bahan Baku	5.536.671.179,62	3.128.870.067,00
8	Barang Dalam Proses/Seengah Jadi	521.676.000,00	401.524.500,00
9	Tanah/Bangunan Untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	66.854.861.155,92	145.523.520.256,00
10	Hewan dan Tanaman Untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.563.762.705,00	2.854.654.583,00
11	Persediaan Untuk Strategis	709.560.625,00	632.296.125,00
	Jumlah Persediaan	**107.462.005.480,88**	**167.512.617.857,51**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp107.462.005.480,88 termasuk Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan persediaan beras yang dititipkan kepada pihak ketiga sebanyak 183.621,70 kg dengan rincian dititipkan pada PUSKUD sebanyak 151.746,70 kg dan BULOG sebanyak 31.875 kg. Pada saat dilakukan opname persediaan pada tanggal 31 Desember 2017 persediaan fisik yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 5.92
Rincian Persediaan Cadangan Pangan

No	Pihak Ketiga	Total Cadangan Beras	Total Opname Persediaan	Selisih Kurang
1.	PUSKUD	151.746,70 kg	49.450 kg	102.296,70 kg
2.	BULOG	31.875 kg	31.875 kg	0,00 kg
	Jumlah	**183.621,70 kg**	**81.325 kg**	**102.296,70 kg**

Sesuai dengan perjanjian antara Kepala BKPP dengan PUSKUD, atas penitipan cadangan beras pada PUSKUD, PUSKUD mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang minimal sebanyak 25% dari total cadangan beras yang dititipkan, sedangkan untuk BULOG mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang sebanyak 100%.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname Persediaan dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain. Dengan demikian nilai persediaan cadangan beras per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp709.560.625,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.93
Rincian Nilai Persediaan Cadangan Pangan

No	Pihak Ketiga	Total Opname Persediaan (kg)	Harga Pembelian Terakhir (Rp)	Nilai Persediaan Beras (Rp)
1.	PUSKUD	49.450	8.725,00	431.451.250,00
2.	BULOG	31.875	8.725,00	278.109.375,00
	Jumlah	**81.325**		**709.560.625,00**

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang Rp956.276.708.789,64 Rp838.352.343.727,85

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp956.276.708.789,64 terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Dana Bergulir Rp11.655.647.912,00 Rp9.217.933.921,00

Investasi Non Permanen sebesar Rp11.655.647.912,00 merupakan saldo dana bergulir yang disalurkan Pemerintah DIY sampai dengan 31 Desember 2017 dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.94
Mutasi Dana Bergulir

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2016 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo 31-12-2017 (Rp)	Keterangan
					Penambahan	Pengurangan		
1	**Dinas Pertanian**							
	DPM PHP Tahun 2010	2010	2.630.000.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	DPM PHP Tahun 2011	2011	2.390.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	DPM PHP Tahun 2012	2012	3.400.000.000,00	253.500.000,00	0,00	1.000.000,00	252.500.000,00	
	Jumlah		**8.420.000.000,00**	**550.250.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**549.250.000,00**	
2	**Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan**							
	LDPM	2013	10.870.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2016 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo 31-12-2017 (Rp)	Keterangan
					Penambahan	Pengurangan		
	DPM LUEP	2011	3.589.417.900,00	1.932.436.750,00	0,00	184.440.000,00	1.747.996.750,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	Jumlah		**14.459.417.900,00**	**2.082.436.750,00**	**0,00**	**184.440.000,00**	**1.897.996.750,00**	
3	**Dinas Perindagkop dan UKM**							
	Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	99.022.098,00	0,00	1.200.000,00	97.822.098,00	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2006	2.492.500.000,00	1.004.167.645,00	0,00	365.474.403,00	638.693.242,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 10 tahun
	Program Ketahanan Pangan	2007	1.100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	7.000.000,00	113.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Program Prospek Mandiri	2007	110.000.000,00	57.800.000,00	0,00	2.800.000,00	55.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2007	609.600.000,00	50.800.000,00	0,00	0,00	50.800.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Program Prospek Mandiri	2008	160.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Koperasi Karyawan	2008	225.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa)	2008	630.000.000,00	186.000.000,00	0,00	13.265.773,00	172.734.227,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Prospek Mandiri Campus Enterpreneur	2009	200.000.000,00	61.615.598,00	0,00	3.000.000,00	58.615.598,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Program Perkuatan Permodalan bagi KJK/UJKS Koperasi	2010	750.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi	2010	3.000.000.000,00	249.634.183,00	0,00	77.313.601,00	172.320.582,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2011	2.500.000.000,00	244.812.400,00	0,00	1.000.000,00	243.812.400,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi)	2011	2.500.000.000,00	407.236.502,00	0,00	4.500.000,00	402.736.502,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2012	4.600.000.000,00	187.534.300,00	0,00	2.625.000,00	184.908.900,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2013	4.200.000.000,00	311.459.578,00	0,00	134.067.000,00	177.392.978,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2016	3.500.000.000,00	3.216.664.867,00	0,00	1.187.509.232,00	2.029.155.635,00	
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017	2017	3.175.000.000,00	0,00	3.175.000.000,00	277.091.000,00	2.897.909.000,00	
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	0,00	1.525.000.000,00	0,00	1.525.000.000,00	
	Jumlah		**31.732.100.000,00**	**6.451.747.171,00**	**4.700.000.000,00**	**2.076.846.009,00**	9.074.901.162,00	
5	**Dinas Kelautan dan Perikanan**							
	Fasilitasi Dana Bergulir	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00	0,00	0,00	133.500.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	Jumlah		**2.915.000.000,00**	**133.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**133.500.000,00**	
	JUMLAH TOTAL		**57.526.517.900,00**	**9.217.933.921,00**	**4.700.000.000,00**	**2.262.286.009,00**	**11.655.647.912,00**	

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2017 sebesar Rp11.655.647.912,00 dikelompokkan umurnya berdasarkan jatuh temponya dikelompokkan menjadi:

Tabel 5.95
Kelompok Umur Dana Bergulir

No	Kelompok	Nilai (Rp)
1	Belum Jatuh Tempo	6.452.064.635,00
2	Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	0,00
3	Umur 1 – 3 Tahun dari tanggal jatuh tempo	1.647.544.022,00
4	Umur 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	605.820.582,00
5	Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	2.950.218.673,00
	Jumlah	**11.655.647.912,00**

Sesuai perhitungan berdasarkan kelompok umur, saldo Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.262.325.567,20 sehingga saldo NRV Dana Bergulir per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp8.237.764.545,80 (Rp11.655.647.912,00 – Rp3.417.883.366,20).

Pengelolaan Dana Bergulir yang disajikan pada Investasi Non Permanen Provinsi DIY mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir antara lain diatur sebagai berikut:

a. Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
b. SKPD Teknis menyusun usulan anggaran dana bergulir, berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Teknis yang diajukan kepada PPKD.
c. Dana Bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
d. Dana Bergulir yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP harus dipergunakan sesuai dengan proposal.
e. Dana Bergulir dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala SKPD Teknis dengan Ketua atau Kepala Kelompok/Koperasi/BUKP.
f. Pengembalian dikenakan bunga untuk kelompok/koperasi/BUKP sebesar 3% per tahun dan disalurkan kepada anggota maksimum sebesar 6% per tahun.
g. Kelompok/koperasi/BUKP wajib mengembalikan pokok dan bunga dana bergulir ke rekening penerimaan melalui Bank Pembangunan Daerah (rekening Kas Daerah) Provinsi DIY dan menyerahkan bukti setor ke Kelompok Kerja Teknis.
h. Jangka waktu pengembalian dana bergulir sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian.
i. Kelompok/koperasi/BUKP yang belum dapat mengembalikan lunas dana yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian kelompok/koperasi/BUKP yang bersangkutan, dikenakan denda 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo.

5.3.1.2.2	**Dana Bergulir Diragukan Tertagih**	**Rp(3.417.883.366,2)**	**Rp(2.927.128.345,50)**

Perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dikelompokkan berdasarkan umurnya dan ditentukan prosentasenya sebagai berikut :

Tabel 5.96
Klasifikasi Kualitas Dana Bergulir dan Diragukan Tertagih

No	Kelompok	Nilai Perolehan (Rp)	% Penyisihan	Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Rp)
1	Belum Jatuh Tempo	6.452.064.635,00	-	0,00
2	Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	0,00	0,5%	0,00
3	Umur 1 – 3 Tahun dari tanggal jatuh tempo	1.647.544.022,00	10%	164.754.402,20
4	Umur 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	605.820.582,00	50%	302.910.291,00
5	Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	2.950.218.673,00	100%	2.950.218.673,00
	Jumlah	**11.655.647.912,00**		**3.417.883.366,20**

Perhitungan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan mendasarkan saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.97
Rincian Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2017 (Rp)	Keterangan	Jatuh Tempo	Usia Investasi	Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih	
								%	Rp.
1	**Dinas Pertanian**								
	DPM PHP Tahun 2010	2010	2.630.000.000,00	6.750.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2010	7 tahun 11 hari	100%	6.750.000,00
	DPM PHP Tahun 2011	2011	2.390.000.000,00	290.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2011	6 tahun 11 hari	100%	290.000.000,00
	DPM PHP Tahun 2012	2012	3.400.000.000,00	252.500.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2012	5 tahun 11 hari	50%	252.500.000,00
	Jumlah								**549.250.000,00**
2	**BKPP**								
	LDPM	2013	10.870.000.000,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20-Dec-13	4 Tahun 11 hari	50%	75.000.000,00
	DPM LUEP	2011	3.589.417.900,00	1.747.996.750,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2008 dan 20 Des 2009	8-9 tahun	100%	1.747.996.750,00
	Jumlah		**14.459.417.900,00**	**1.897.996.750,00**					**1.822.996.750,00**
3	**Dinas Perindagkop dan UKM**								
	Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	97.822.098,00	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 tahun		>8 Tahun	100%	97.822.098,00
	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2006	2.492.500.000,00	638.693.242,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 10 tahun	2016	1	10%	63.869.324,20
	Program Ketahanan Pangan	2007	1.100.000.000,00	113.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	7 Tahun	100%	113.000.000,00

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2017 (Rp)	Keterangan	Jatuh Tempo	Usia Investasi	Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih	
								%	Rp.
	Program Prospek Mandiri	2007	110.000.000,00	55.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	7 Tahun	100%	55.000.000,00
	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2007	609.600.000,00	50.800.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	7 Tahun	100%	50.800.000,00
	Program Prospek Mandiri	2008	160.000.000,00	80.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	6 Tahun	100%	80.000.000,00
	Koperasi Karyawan	2008	225.000.000,00	25.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	6 Tahun	100%	25.000.000,00
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa)	2008	630.000.000,00	172.734.227,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	6 Tahun	100%	172.734.227,00
	Prospek Mandiri Campus Enterpreneur	2009	200.000.000,00	58.615.598,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2012	5 tahun	100%	58.615.598,00
	Program Perkuatan Permodalan bagi KJK/UJKS Koperasi	2010	750.000.000,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2013	4 Tahun	50%	75.000.000,00
	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi	2010	3.000.000.000,00	172.320.582,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2013	4 Tahun	50%	86.160.291,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2011	2.500.000.000,00	243.812.400,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2014	3 Tahun	10%	24.381.240,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi)	2011	2.500.000.000,00	402.736.502,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun	2014	3 Tahun	10%	40.273.650,20
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2012	4.600.000.000,00	184.908.900,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun	2015	< 2 Tahun	10%	18.490.890,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2013	4.200.000.000,00	177.392.978,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2016	1	10	17.739.297,80
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2016	3.500.000.000,00	2.029.155.635,00		2019	-	-	
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017	2017	3.175.000.000,00	2.897.909.000,00		2020			
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00		2020			
	Jumlah			**9.074.901.162,00**					**978.886.616,20**
4	**Dinas Kelautan dan Perikanan**								
	Fasilitasi Dana Bergulir	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	Des 2013	4 Tahun	50%	66.750.000,00
	Jumlah			**133.500.000,00**					**66.750.000,00**
	JUMLAH TOTAL			**11.655.647.912,00**					**3.417.883.366,20**

5.3.1.2.3 Investasi Jangka Panjang Permanen **Rp948.038.944.243,84** **Rp832.061.538.152,36**

Penyertaan Modal per 31 Desember 2017 sebesar Rp948.038.944.243,84 diperoleh dari saldo awal 31 Desember 2016 sebesar Rp832.061.538.152,36 ditambah penyesuaian perhitungan Ekuitas BUMD 2016 sebesar Rp46.430.488.107,99 sehingga Ekuitas BUMD Tahun 2016 Bagian Pemda DIY menjadi Rp878.492.026.260,35, ditambah penyertaan modal Tahun 2017 sebesar Rp10.220.000.000,00 dikurangi Deviden Tahun 2016 yang disetor ke BUD Tahun 2017 sebesar Rp71.179.991.762,57 ditambah Laba/Rugi BUMD Tahun 2017 Bagian Pemda DIY sebesar Rp130.506.909.746,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.98
Perhitungan Penyertaan Modal

No	Perusahaan Daerah	Perhitungan Penyertaan Modal 2016			Mutasi Tahun Anggaran 2017					Penyertaan Modal 2017 (Unaudited)
		% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Thn 2016 (LK BUMD)	Ekuitas BUMD Bagian Pemda DIY	Tambahan Modal Disetor Tahun 2017	Deviden Tahun 2016 yang Disetor ke BUD Tahun 2017	Laba/Rugi BUMD Tahun 2017 (LK BUMD Unaudited)	Laba/Rugi BUMD Tahun 2017 Bagian Pemda DIY	% Saham Pemda	
		2	3	4 = 2 x 3	6	8	9	10 = 7 x 9		11 = 1+5+6-8+10
	METODE EKUITAS									
1	PT. Bank BPD DIY	51,00	1.568.869.303.522,00	800.123.344.796,22	-	66.132.661.551,70	224.835.000.000,00	114.665.850.000,00	51,00	848.656.533.244,52
2	PT. Anindya Mitra Internasional	99,951	23.108.888.641,76	23.097.565.286,33	10.000.000.000,00	685.864.895,00	7.007.932.023,93	7.004.498.137,24	99,951	39.416.198.528,56
3	PT. Tarumartani	99,996	18.512.507.729,00	1.393.251.471,93	-	1.015.510.000,00	1.777.980.218,00	1.777.909.098,79	99,996	19.274.167.327,44
4	BUKP	83,131	43.689.295.147,60	36.319.347.949,15	-	3.345.955.315,87	8.490.999.158,00	7.058.652.510,04	83,131	40.032.045.143,32
	METODE HARGA PEROLEHAN									
5	PT. Asuransi Bangun Askrida	0,130		440.000.000,00	220.000.000,00	- 231.768.123,00				660.000.000,00
	TOTAL SELURUHNYA			878.492.026.260,35	10.220.000.000,00	71.411.759.885,57	242.111.911.399,93	130.506.909.746,07		948.038.944.243,85

Perhitungan nilai penyertaan modal pada BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani dan BUKP menggunakan metode ekuitas sedangkan perhitungan penyertaan modal pada PT. Askrida menggunakan harga perolehan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp848.656.533.244,52. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Bank BPD DIY per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2016 Audited		Rp	**754.309.576.472,45**
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2016 Audited		Rp	45.813.768.323,77
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2016		Rp	800.123.344.796,22
Tambahan Modal		Rp	0.00
Deviden Tahun 2016 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2017		Rp	(66.132.661.551,70)
Laba Tahun 2017	Rp224.835.000.000,00		
Laba Tahun 2017 Bagian Pemda DIY	51,00%	Rp	114.665.850.000,00
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2017		**Rp**	**848.656.533.244,52**

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada PT. “ANINDYA” MITRA INTERNASIONAL” Yogyakarta per 31 Desember 2017 sebesar Rp39.416.198.528,56. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. AMI per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2016 Audited		Rp	**23.085.119.302,53**
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2016 Audited		Rp	12.445.983,80
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2016		Rp	23.097.565.286,33
Tambahan Modal		Rp	10.000.000.000,00
Deviden Tahun 2016 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2017		Rp	(685.864.895,00)
Laba Tahun 2017	Rp7.007.932.023,93		
Laba Tahun 2017 Bagian Pemda DIY	99,951%	Rp	7.004.498.137,24
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2017		**Rp**	**39.416.198.528,56**

c. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah "TARU MARTANI" Yogyakarta sebesar Rp19.274.167.327,44. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Tarumartani per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2016 Audited		Rp	**17.118.516.756,72**
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2016 Audited		Rp	1.393.251.471,93
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2016	99,996%	Rp	18.511.768.228,65
Tambahan Modal		Rp	00,00
Deviden Tahun 2016 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2017		Rp	(1.015.510.000,00)
Laba Tahun 2017	Rp1.777.980.218,00		
Laba Tahun 2017 Bagian Pemda DIY	99,996%	Rp	1.777.909.098,79
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2017		**Rp**	**19.274.167.327,44**

d. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp40.032.045.143,32. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada BUKP per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2016 Audited		Rp	**37.108.325.620,66**
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2016 Audited		Rp	(788.977.671,50)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2016	83,131%	Rp	36.319.347.949,15
Tambahan Modal		Rp	00,00
Deviden Tahun 2016 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2017		Rp	(3.345.955.315,87)
Laba Tahun 2017	Rp8.490.999.158,00		
Laba Tahun 2017 Bagian Pemda DIY	83,131%	Rp	7.058.652.510,04
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2017		**Rp**	**40.032.045.143,32**

e. Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp660.000.000,00 berasal dari saldo Penyertaam Modal per 31 Desember 2016 ditambah dengan setoran penyertaan modal di Tahun 2017 sebesar Rp220.000.000,00 sehingga saldo penyertaan modal per 31 Desember 2017 menjadi Rp660.000.000,00. adalah modal disetor sebesar 0,13% dari seluruh Modal PT Asuransi Bangun Askrida. Perhitungan nilai investasi permanen pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan metode harga perolehan (*cost method*) karena nilainya relatif kecil.

5.3.1.3. Aset Tetap Rp5.841.395.688.975,67 Rp4.478.669.646.379,90

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.841.395.688.975,67 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp8.557.926.803.890,36 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.716.531.114.914,69 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.3.1. Tanah Rp2.520.611.213.664,00 Rp2.126.499.974.997,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.520.611.213.664,00 berasal dari saldo awal sebesar Rp2.126.499.974.997,00 ditambah dengan pengadaan tanah melalui Belanja Modal Tahun 2017 sebesar Rp245.498.589.274,00, kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.605.952.800,00, penerimaan hibah sebesar Rp162.727.077.153,00 pemberian hibah sebesar Rp14.088.690.800,00, reklasifikasi ke Aset Renovasi dan Gedung sebesar Rp110.087.760,00, koreksi pencatatan yang

menambah asset tanah sebesar Rp493.398.000,00 dan koreksi pencatatan yang mengurangi asset tanah sebesar Rp2.015.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.99
Rincian Mutasi Tanah

Saldo Awal	**2.126.499.974.997,00**
Penambahan:	
Belanja Modal	245.498.589.274,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa (Biaya Apraisal Tanah)	1.605.952.800,00
Koreksi pencatatan	453.398.000,00
Pencatatan kembali tanah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BPKB)	40.000.000,00
Hibah dari Kabupaten/Kota (P3D Sekolah)	161.075.732.153,00
Hibah dari Kabupaten Kulon Progo dan Sleman	1.651.345.000,00
Jumlah	**410.325.017.227,00**
Pengurangan:	
Pemberian Hibah Ke Kementerian	(14.088.690.800,00)
Reklas ke Aset Tetap Renovasi (DPPKA)	(8.714.760,00)
Koreksi dobel pencatatan pada Dikpora	(2.015.000.000,00)
Reklas bangunan parkir yang dicatat sebagai tanah di Dokpora	(101.373.000,00)
Jumlah	**(16.213.778.560,00)**
Saldo Akhir	**2.520.611.213.664,00**

Penjelasan:

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2017 sebesar Rp247.052.455.730,00, dicatat menambah aset tanah sebesar Rp245.498.589.274,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.553.866.456,00 tidak dapat dicatat menambah aset tanah tetapi dicatat menambah Beban Pemeliharaan Tanah sebesar Rp1.436.662.539,00 (BLH), direklas menjadi Bangunan Gedung sebesar Rp47.260.931,00 (BLH), direklas menjadi aset tanaman sebesar Rp55.334.986,00 (BLH) dan direklas menjadi Beban Pegawai sebesar Rp14.608.000,00 (Dinas Kebudayaan).

Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.605.952.800,00 merupakan kapitalisasi biaya appraisal tanah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp780.952.800,00 dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp825.000.000,00.

Koreksi pencatatan sebesar Rp453.398.000,00 merupakan koreksi atas pencatatan tanah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yaitu reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp101.373.000,00 dan koreksi kesalahan pencatatan sebesar Rp352.025.000,00.

Penambahan aset tanah P3D sebesar Rp161.075.732.153,00 berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan penyerahan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan kewenangan daerah.

Hibah Kabupaten Kulon Progo dan Sleman sebesar Rp1.651.345.000,00 merupakan penyerahan Terminal Jombor dan Wates dari pemerintah kabupaten kepada Pemda DIY.

Pemberian Hibah sebesar Rp14.088.690.800,00 terdiri dari pemberian hibah aset ex RSBI kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.149.937.100,00, kepada Kementerian Perhubungan sebesar Rp11.768.253.700,00, kepada Pemkab Gunungkidul sebesar Rp125.500.000,00 dan kepada Pemkab. Kulon Progo sebesar Rp5.000.000,00.

Pencatatan kembali tanah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar) yang tidak jadi diserahkan ke Pemerintah Pusat tetapi sudah terlanjur dikeluarkan sebesar Rp40.000.000,00.

Tabel 5.100
Rincian Obyek Tanah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tanah Perkampungan	101.313.860.502,00
2.	Tanah Pertanian	47.637.590.000,00
3.	Tanah Perkebunan	3.322.000.000,00
4.	Kolam Ikan	5.298.402.000,00
5.	Tanah Untuk Bangunan Gedung	901.486.857.146,00
6.	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	1.461.552.504.016,00
	Jumlah	**2.520.611.213.664,00**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2017 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.101
Rincian Tanah per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	350.164.077.220,00	151.863.137.167,00
2	Dinas Kesehatan	9.755.699.262,00	9.755.699.262,00
3	RS Grhasia	150.000,00	150.000,00
4	RS Paru Respira	192.400.000,00	192.400.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	1.129.891.047.406,00	1.123.553.250.506,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	444.286.565.205,00	296.217.371.591,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.285.000.000,00	3.285.000.000,00
8	Dinas Sosial	18.367.393.566,00	18.367.393.566,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	923.281.000,00	923.281.000,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	254.810.000,00	254.810.000,00
11	Badan Lingkungan Hidup	1.392.000.000,00	1.392.000.000,00
12	Dinas Perhubungan	55.427.682.226,00	65.639.190.926,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.750.000.000,00	8.750.000.000,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	84.735.000,00	84.735.000,00
15	Dinas Kebudayaan	192.900.808.955,00	100.212.972.155,00
16	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.096.500.000,00	2.096.500.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.891.866.000,00	13.891.866.000,00
18	Dinas Pariwisata	3.458.590.500,00	3.458.590.500,00
19	Dinas Pertanian	103.962.567.899,00	103.962.567.899,00
20	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	33.716.575.000,00	33.716.575.000,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.352.563.000,00	5.352.563.000,00
22	Sekretariat Daerah	744.400.000,00	744.400.000,00
23	Kantor Perwakilan Daerah	12.984.000.000,00	12.984.000.000,00
24	Inspektorat	1.217.500.000,00	1.217.500.000,00
25	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	122.441.801.425,00	163.514.821.425,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.669.200.000,00	4.669.200.000,00
	Jumlah	**2.520.611.213.664,00**	**2.126.499.974.997,00**

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin Rp915.669.540.069,30 Rp690.971.065.355,80

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp915.669.540.069,30 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.102
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Awal	**690.971.065.355,80**
Penambahan:	
Belanja Modal	142.207.808.761,60
Reklas dari Persediaan	478.971.820,00
Reklas dari Persediaan Dinas Kebudayaan	1.556.280.000,00
Reklas dari Gedung dan Bangunan	26.334.807.000,00
Reklas dari Gedung dan Bangunan BKPP	10.196.850,00
Reklas dari JIJ	1.150.273.400,00
Reklas dari KDP	2.767.033.001,00
Reklas dari Aset Tetap Lainnya	275.242.600,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	413.052.700,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (BPBD)	22.500.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Dinas Pertanian)	5.250.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Dinas Pertanian)	5.273.600,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (BLH)	8.800.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Dinas Sosial)	24.340.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Dinas Sosial)	9.360.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Dinas Sosial)	4.080.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Dinas Sosial)	8.436.500,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Dinas Kebudayaan)	15.550.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Dinas Kebudayaan)	26.400.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Setwan)	6.690.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (BPAD)	3.113.970,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Dinas Pertanian)	1.137.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Dinas Pertanian)	50.460.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Dinas Pertanian)	9.000.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Diskanla)	4.519.500,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Diskanla)	1.218.000,00
Penerimaan Hibah	27.239.004.497,11
Penerimaan Hibah SMA/SMK	278.256.480.729,08
Penerimaan Hibah Block Grant Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7.137.125.112,00
Koreksi Pencatatan	58.650.000,00
Penambahan pada Dinas Pendidikan (UPT BOS)	493.389.370,00
Mencatat kembali aset yang dicatat ekstrakomtabel pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	107.100.053,00
Mencatat kembali aset yang dicatat ekstrakomtabel pada Dinas Perhub	2.585.000,00
Jumlah	**488.694.129.463,79**
Pengurangan:	
Reklas ke Persediaan	162.526.400,00
Reklas ke Tanah	86.915.000,00
Reklas ke Gedung dan Bangunan	9.309.421.393,00
Reklas ke JIJ	107.874.500,00
Reklas ke JIJ (BPBD)	137.860.000,00

Reklas ke JIJ (Dinas Kesehatan)	68.432.500,00
Reklas ke Aset Tetap Lainnya	156.106.100,00
Reklas ke ATB	9.556.250,00
Reklas ke Aset Lainnya	10.092.500,00
Reklas ke Beban	27.340.500,00
Hibah	12.043.375.496,00
Dicatat secara ekstrakomtabel	882.653.714,62
Koreksi aset ekstrakomtabel BKPP	750.000,00
Koreksi aset ekstrakomtabel Dikpora	209.988.950,00
Penghapusan	15.966.803.734,00
Koreksi Pencatatan	853.182.600,00
Koreksi pencatatan nilai buku (DPPKA)	4.421.444.924,00
Koreksi pencatatan nilai buku (Dikpora)	217.611.530.608,67
Koreksi pencatatan nilai buku (Dinas PU)	253.997.500,00
Pelimpahan antar SKPD yang belum dicatat SKPD Penerima	1.675.802.080,00
Jumlah	**263.995.654.750,29**
Saldo Akhir	**915.669.540.069,30**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp915.669.540.069,30 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5.103
Rincian Obyek Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Rp
1.	Alat-alat Besar Darat	28.098.318.093,08
2.	Alat-alat Besar Apung	8.551.257,00
3.	Alat-alat Bantu	38.667.107.304,85
4.	Alat Angkutan Darat Bermotor	138.444.394.777,45
5.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.472.586.777,16
6.	Alat Angkut Apung Bermotor	582.875.000,00
7.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	504.534.999,00
8.	Alat Angkut Bermotor Udara	148.400.000,00
9.	Alat Bengkel Bermesin	37.668.203.998,54
10.	Alat Bengkel Tak Bermesin	9.111.732.346,30
11.	Alat Ukur	11.683.344.807,06
12.	Alat Pengolahan	7.044.445.804,86
13.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.908.769.046,58
14.	Alat Kantor	66.650.945.041,53
15.	Alat Rumah Tangga	106.278.158.444,09
16.	Komputer	225.559.400.403,89
17.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.062.379.968,40
18.	Alat Studio	48.143.019.812,46
19.	Alat Komunikasi	26.612.432.909,76
20.	Peralatan Pemancar	3.485.708.453,00
21.	Alat Kedokteran	41.349.339.505,77
22.	Alat Kesehatan	2.657.562.848,00
23.	Unit-Unit Laboratorium	65.705.341.262,87
24.	Alat Peraga/Praktek Sekolah	17.430.230.864,75
25.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	7.451.366.113,00
26.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.153.823.829,00
27.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	385.807.147,00
28.	Radioation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	1.483.887.219,00
29.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5.763.010.643,01
30.	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	1.351.355.945,90
31.	Senjata Api	99.636.000,00
32.	Persenjataan Non Senjata Api	2.684.169.446,00

No	Uraian	Rp
33.	Amunisi	100.000,00
34.	Senjata Sinar	5.400.000,00
35.	Alat Keamanan dan Perlindungan	13.200.000,00
	Jumlah	**915.669.540.069,30**

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.104
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	205.279.936.981,41	79.691.094.541,00
2	Dinas Kesehatan	41.429.118.096,00	36.959.757.926,00
3	RS Grhasia	25.863.966.819,00	22.570.717.319,00
4	RS Paru Respira	39.038.638.162,80	35.792.178.272,80
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	57.715.383.702,00	45.381.690.695,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	12.799.825.116,00	11.119.794.955,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.990.380.333,00	2.876.451.127,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7.951.544.388,00	7.450.679.473,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.581.120.793,00	23.295.352.868,00
10	Dinas Sosial	25.657.470.083,28	23.850.245.170,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.644.002.254,00	18.606.402.164,00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	5.861.689.450,00	4.657.732.450,00
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	4.974.805.741,00	4.906.531.191,00
14	Badan Lingkungan Hidup	6.651.165.850,00	6.631.835.000,00
15	Dinas Perhubungan	30.791.123.269,00	30.220.475.324,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.485.515.831,00	26.858.862.691,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.759.878.500,00	1.526.667.500,00
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	1.875.436.330,00	1.843.619.130,00
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2.129.356.607,00	1.488.164.607,00
20	Dinas Kebudayaan	53.343.232.385,00	39.965.075.482,00
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	33.914.624.274,00	32.874.313.544,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.378.424.950,20	12.399.952.290,00
23	Dinas Pariwisata	3.764.561.732,00	3.473.837.372,00
24	Dinas Pertanian	26.174.843.318,00	18.504.844.210,00
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	20.596.574.272,98	18.815.007.153,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.753.255.108,00	18.639.093.408,00
27	Sekretariat Daerah	47.236.128.875,00	44.759.549.439,00
28	Sekretariat Paramparapraja	2.088.651.958,00	2.044.744.758,00
29	Kantor Perwakilan Daerah	5.694.555.507,00	5.491.547.677,00
30	Sekretariat DPRD	27.200.671.783,60	23.632.492.593,00
31	Inspektorat	3.780.346.793,00	3.704.055.728,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.221.904.548,00	11.831.094.098,00
33	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	82.926.114.472,03	49.402.642.414,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	13.052.795.701,00	12.254.871.501,00
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	8.062.496.085,00	7.449.691.285,00
	Jumlah	**915.669.540.069,30**	**690.971.065.355,80**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan Rp2.201.763.532.001,90 Rp1.586.592.964.602,07

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar sebesar Rp2.201.763.532.001,90 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.105
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Awal	**1.586.592.964.602,07**
Penambahan:	
Belanja Modal	307.820.582.766,80

Reklas dari Tanah	47.260.931,00
Reklas dari Tanah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	101.373.000,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin	9.924.145.213,00
Reklas dari JIJ	18.730.688.382,00
Reklas dari JIJ Dinas Perhubungan	1.659.609.490,00
Reklas dari KDP	18.953.281.000,00
Reklas dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	194.138.000,00
Reklas dari Aset Tak Berwujud	546.705.000,00
Reklas dari DED	350.900.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa/Pegawai	4.488.013.498,27
Penerimaan Hibah	12.708.762.484,00
Penerimaan Hibah Block Grant Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	19.377.849.272,00
Koreksi Pencatatan	313.003.000,00
Mencatat kembali aset ekstrakomtabel pada Dinas Perhubungan	15.966.532,00
Penambahan pada Dinas Pendidikan	519.070.386.198,25
Jumlah	**914.302.664.767,32**
Pengurangan:	
Belanja Modal dicatat sebagai KDP	89.620.155.047,00
Reklas ke Persediaan	27.011.620.000,00
Reklas ke Peralatan dan Mesin	27.237.906.000,00
Reklas ke Peralatan dan Mesin BKPP	10.196.850,00
Reklas ke JIJ	9.155.786.271,27
Reklas ke JIJ BKPP	14.071.654,00
Reklas ke JIJ Tarung	697.284.000,00
Reklas ke Aset Tetap Lainnya	171.678.300,00
Reklas ke Aset Tetap Lainnya Dinas Kebudayaan	327.999.020,00
Reklas ke ATB-DED	10.000.000,00
Reklas ke Beban	590.352.408,53
Hibah	7.824.183.257,00
Dicatat secara ekstrakomtabel	1.878.531.001,70
Penghapusan	747.095.801,00
Koreksi Pencatatan	1.602.765.500,00
Koreksi pencatatan sesuai dengan nilai buku (DPPKA)	1.268.042.690,00
Koreksi pencatatan sesuai dengan nilai buku (Dikpora)	129.689.587.066,99
Pelimpahan antar SKPD yang belum dicatat SKPD Penerima	1.274.842.500,00
Jumlah	**299.132.097.367,49**
Saldo Akhir	**2.201.763.532.001,90**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.201.763.532.001,90 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5.106
Rincian Obyek Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Rp
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.038.564.522.704,32
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	56.313.594.223,33
3.	Bangunan Menara	708.328.000,00
4.	Bangunan Bersejarah	14.317.680.799,95
5.	Tugu Peringatan	1.840.647.990,00
6.	Monumen/Bangunan Bersejarah	3.183.494.808,00
7.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.496.974.667,00
8.	Rambu-Rambu	78.822.645.959,30
9.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	3.515.642.850,00
	Jumlah	**2.201.763.532.001,90**

Saldo rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.107
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	639.475.019.876,26	183.976.413.650,00
2	Dinas Kesehatan	19.430.571.763,00	17.525.283.263,00
3	RS Grhasia	48.268.539.338,00	42.774.719.300,00
4	RS Paru Respira	25.399.451.085,00	24.426.128.692,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	47.387.427.045,00	47.104.974.881,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	44.382.194.457,00	14.274.881.629,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	279.052.000,00	279.052.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.482.819.158,00	3.033.941.158,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.339.974.350,00	9.339.974.350,00
10	Dinas Sosial	92.264.925.681,27	86.850.487.267,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.847.609.390,00	16.246.052.390,00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	20.769.094.720,00	2.074.355.720,00
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	7.422.851.033,00	7.395.319.537,00
14	Badan Lingkungan Hidup	2.727.493.824,00	2.505.742.893,00
15	Dinas Perhubungan	102.329.399.345,30	96.131.716.914,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.885.874.536,00	3.885.874.536,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.554.687.100,00	4.554.687.100,00
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	1.994.553.000,00	1.335.600.000,00
19	Dinas Kebudayaan	86.737.043.763,00	67.871.194.463,00
20	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	69.566.220.231,00	69.566.220.231,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	32.893.176.082,00	24.455.869.917,00
22	Dinas Pariwisata	11.161.814.500,00	3.955.380.290,00
23	Dinas Pertanian	52.431.178.976,00	48.907.533.413,00
24	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	31.132.463.963,00	29.783.212.065,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.075.191.703,00	20.645.403.904,00
26	Sekretariat Daerah	24.505.442.126,00	23.977.633.326,00
27	Kantor Perwakilan Daerah	6.174.052.262,07	6.174.052.262,07
28	Sekretariat DPRD	573.710.284.502,00	573.358.563.502,00
29	Inspektorat	3.567.630.210,00	3.567.630.210,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.956.145.200,00	4.956.145.200,00
31	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	159.508.195.462,00	111.955.073.969,00
32	Badan Kepegawaian Daerah	11.843.198.299,00	11.643.198.299,00
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	22.259.957.021,00	22.060.648.271,00
	Jumlah	**2.201.763.532.001,90**	**1.586.592.964.602,07**

5.3.1.3.4	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	**Rp2.410.091.147.311,65**	**Rp2.249.781.894.580,00**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.410.091.147.311,65 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.108
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Awal	**2.249.781.894.580,00**
Penambahan:	
Belanja Modal	324.810.707.765,20
Reklas dari Peralatan dan Mesin	351.728.550,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin (BPBD)	137.860.000,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin (Dinas Kesehatan)	68.432.500,00
Reklas dari Gedung dan Bangunan	3.734.745.290,47
Reklas dari Gedung dan Bangunan BKPP	14.071.654,00
Reklas dari Gedung dan Bangunan Dinas Tarung	697.284.000,00
Reklas dari KDP	4.459.822.119,80
Reklas dari ATB-DED	1.477.154.500,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	969.594.590,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa BPBD	60.520.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan	27.985.602,00
Penerimaan Hibah	7.316.416.950,00
Reklas dari Bangunan Bersejarah	2.494.451.025,00
Jumlah	**346.620.774.546,47**
Pengurangan:	
Reklas ke Peralatan dan Mesin	1.454.202.400,00
Reklas ke Gedung dan Bangunan	18.950.714.382,00
Reklas ke Gedung dan Bangunan Dishub	1.659.609.490,00
Reklas ke Aset Lain-lain	71.365.000,00
Reklas ke Aset Lain-lain Dinas PU	118.006.343.058,00
Reklas ke Aset Lain-lain Dinas Hutbun	364.088.750,00
Reklas ke ATB	275.955.000,00
Reklas ke ATR	95.118.743,00
Reklas ke ATR	188.294.000,00
Reklas ke Aset Tetap Lainnya Dinas Tarung	102.913.900,00
Reklas ke ATR (Dinas Kebudayaan)	2.494.451.025,00
Reklas ke Beban	5.156.538.757,00
Hibah	888.172.700,00
Reklas ke Aset Tetap Lainnya	31.250.000,00
Penghapusan	34.558.251.600,00
Koreksi Pencatatan	1.067.007.000,00
Koreksi Pencatatan sesuai dengan nilai buku (DPPKA)	8.100.516,33
Koreksi Pencatatan sesuai dengan nilai buku (Dikpora)	939.145.493,49
Jumlah	**186.311.521.814,82**
Saldo Akhir	**2.410.091.147.311,65**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.410.091.147.311,65 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5.109
Rincian Obyek Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Rp
1.	Jalan	1.604.813.502.201,80
2.	Jembatan	303.576.945.451,00
3.	Bangunan Air Irigasi	252.277.861.704,47
4.	Bangunan Air Pasang Surut	340.584.800,00
5.	Bangunan Air Rawa	608.482.460,00
6.	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.395.918.570,00
7.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	25.183.565.154,00
8.	Bangunan Air Bersih/Baku	11.548.203.045,00
9.	Bangunan Air Kotor	6.971.863.588,00
10.	Bangunan Air	641.079.800,00
11.	Instalasi Air Minum Bersih	7.179.624.226,20
12.	Instalasi Air Kotor	20.302.651.454,00
13.	Instalasi Pembangkit Listrik	11.466.186.944,00
14.	Instalasi Gardu Listrik	1.526.757.428,00
15.	Instalasi Pertahanan	135.895.000,00
16.	Instalasi Gas	7.604.211.530,00
17.	Instalasi Pengaman	683.922.520,00
18.	Jaringan Air Minum	76.280.580.846,67
19.	Jaringan Listrik	47.342.493.438,51
20.	Jaringan Telepon	18.189.517.150,00
21.	Jaringan Gas	21.300.000,00
	Jumlah	2.410.091.147.311,65

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.110
Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.016.314.068,51	1.309.503.745,00
2	Dinas Kesehatan	1.616.291.410,00	1.514.018.308,00
3	RS Grhasia	2.251.059.941,00	2.427.878.529,00
4	RS Paru Respira	116.411.300,00	116.411.300,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.198.287.435.493,00	2.143.850.016.629,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	115.503.953.097,47	21.618.681.523,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	218.887.000,00	218.887.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	668.905.800,00	470.525.800,00
9	Dinas Sosial	1.136.866.184,67	1.023.458.956,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	941.032.400,00	941.032.400,00
11	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	-	2.000.000,00
12	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	93.803.654,00	79.732.000,00
13	Badan Lingkungan Hidup	7.709.246.000,00	1.524.619.000,00

14	Dinas Perhubungan	7.413.367.106,00	7.266.221.656,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.176.245.032,00	19.176.245.032,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	70.235.000,00	70.235.000,00
17	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	168.068.000,00	168.068.000,00
18	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	26.589.900,00	26.589.900,00
19	Dinas Kebudayaan	254.351.600,00	234.424.600,00
20	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	72.729.500,00	72.729.500,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.064.533.035,00	16.438.705.381,00
22	Dinas Pariwisata	83.989.000,00	83.989.000,00
23	Dinas Pertanian	7.074.533.520,00	6.633.616.161,00
24	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12.086.185.768,00	11.789.163.258,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.452.968.800,00	6.452.968.800,00
26	Sekretariat Daerah	153.180.000,00	153.180.000,00
27	Kantor Perwakilan Daerah	80.600.000,00	80.600.000,00
28	Sekretariat DPRD	522.131.759,00	522.131.759,00
29	Inspektorat	38.702.500,00	38.702.500,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.567.500,00	36.567.500,00
31	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	4.912.832.850,00	3.597.861.250,00
32	Badan Kepegawaian Daerah	690.370.114,00	690.370.114,00
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.152.759.979,00	1.152.759.979,00
	Jumlah	**2.410.091.147.311,65**	**2.249.781.894.580,00**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya **Rp181.065.042.944,12** **Rp68.982.953.055,00**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp181.065.042.944,12 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.111
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal	**68.982.953.055,00**
Penambahan:	
Belanja Modal	18.633.561.515,00
Reklas dari Persediaan	1.864.823.500,00
Reklas dari Tanah	64.049.746,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin	138.133.100,00
Reklas dari Gedung dan Bangunan	171.678.300,00
Reklas dari Gedung dan Bangunan Dinas Kebudayaan	327.999.020,00
Reklas dari JIJ	34.680.673.600,00
Reklas dari JIJ Dinas PU	188.294.000,00
Reklas dari JIJ Dinas Tarung	102.913.900,00
Reklas dari JIJ Dinas Kebudayaan	2.494.451.025,00
Reklas dari Aset Lainnya	197.448.500,00
Reklas dari Aset Tetap Renovasi	4.094.570.500,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	5.913.940.441,08
Penerimaan Hibah	51.032.817.605,70
Penerimaan Hibah Blockgrant Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	158.410.220,00
Pencatatan kembali buku yang dicatat secara ekstrakomtabel	82.110.000,00
Pencatatan kembali replika wayang Dinas Kebudayaan	53.800.000,00
Jumlah	**120.199.674.972,78**
Pengurangan:	
Reklas ke Persediaan	4.500.000,00

Reklas ke Peralatan dan Mesin	904.354.950,00
Reklas ke JIJ	102.913.900,00
Reklas ke ATB	389.000.000,00
Reklas ke Aset Lain-lain	36.000.000,00
Reklas ke Beban	129.296.225,00
Hibah	1.699.765.317,00
Dicatat secara ekstrakomtabel	82.110.000,00
Penghapusan	3.325.000,00
Koreksi pencatatan sebesar nilai buku atas aset P3D Dikpora	4.766.140.103,98
Koreksi kesalahan pencatatan pada Dinas Sosial	179.587,68
Jumlah	**8.117.585.083,66**
Saldo Akhir	**181.065.042.944,12**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp181.065.042.944,12 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5.112
Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Rp
1.	Buku	66.854.113.852,28
2.	Terbitan	152.269.729,94
3.	Barang-Barang Perpustakaan	664.546.239,59
4.	Barang Bercorak Kebudayaan	23.788.609.015,91
5.	Alat Olah Raga Lainnya	961.621.425,00
6.	Hewan	2.279.354.275,00
7.	Tanaman	1.397.243.951,00
8.	Aset Tetap Renovasi	84.967.284.455,40
	Jumlah	**181.065.042.944,12**

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.113
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	65.614.231.276,72	4.579.990.599,00
2	Dinas Kesehatan	192.879.304,00	182.979.004,00
3	RS Grhasia	316.997.560,00	316.997.560,00
4	RS Paru Respira	62.771.600,00	62.771.600,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	23.379.500.340,00	22.099.557.190,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	40.886.574.060,00	6.223.753.360,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	245.340.880,00	237.820.880,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	15.059.900,00	13.659.900,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.128.000,00	27.128.000,00
10	Dinas Sosial	592.602.769,40	565.224.287,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41.144.050,00	41.144.050,00

12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	41.418.900,00	41.418.900,00
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	20.525.980,00	11.696.800,00
14	Badan Lingkungan Hidup	969.020.536,00	156.198.050,00
15	Dinas Perhubungan	4.260.000,00	4.260.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.260.001,00	49.260.001,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.200.000,00	1.200.000,00
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	5.224.900,00	5.224.900,00
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	7.796.000,00	7.146.000,00
20	Dinas Kebudayaan	15.214.691.231,00	5.987.534.828,00
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	9.391.882.256,00	9.112.228.256,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.164.843.500,00	64.283.000,00
23	Dinas Pariwisata	1.240.906.711,00	1.045.826.311,00
24	Dinas Pertanian	2.273.010.075,00	2.129.835.475,00
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	116.441.651,00	93.993.151,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.301.870,00	27.301.870,00
27	Sekretariat Daerah:	10.761.750.168,00	10.745.013.468,00
28	Sekretariat Parampara Praja	3.781.000,00	-
29	Kantor Perwakilan Daerah	3.161.440.650,00	3.161.440.650,00
30	Sekretariat DPRD	756.751.752,00	711.980.092,00
31	Inspektorat	48.448.763,00	47.428.283,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	282.568.140,00	126.486.330,00
33	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	265.761.070,00	255.200.010,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	126.786.300,00	126.786.300,00
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	747.741.750,00	720.183.950,00
	Jumlah	**181.065.042.944,12**	**68.982.953.055,00**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp181.065.042.944,12 termasuk Aset Tetap Renovasi sebesar Rp84.967.284.455,40. Aset Tetap Renovasi sebesar Rp84.967.284.455,40 terdiri dari aset tetap yang digunakan SKPD tetapi milik SKPD lain di lingkungan Pemda DIY sebesar Rp4.689.900.140,40 dan aset tetap yang digunakan oleh SKPD tetapi milik instansi di luar Pemda DIY sebesar Rp80.277.384.315,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114
Rincian Data Aset Tetap Renovasi

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	22.700.313.400,00	Bangunan Gedung milik Kementerian PU sebesar Rp1.079.876.650,00 Bangunan Gedung milik Kraton sebesar Rp6.663.672.000,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Kraton Yogyakarta sebesar Rp14.768.470.750,00
2.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	34.875.590.710,00	Bangunan Gedung milik instansi di luar Pemda DIY sebesar Rp315.683.910,00. Jalan, Irigasi, Jaringan milik instansi di luar Pemda DIY sebesar Rp34.559.906.800,00.
3.	Dinas Sosial	16.253.482,40	Bangunan Gedung tercatat pada DPPKA DIY
4.	Dinas Kebudayaan	9.269.113.403,00	Bangunan Gedung milik Pemkab. Kulon Progo sebesar Rp2.382.585.000,00 Bangunan Gedung tercatat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY sebesar Rp411.900.000,00 Bangunan Gedung tercatat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY sebesar Rp3.652.178.358,00. Jalan, Irigasi, Jaringan milik Kraton Yogyakarta sebesar Rp2.494.451.025,00 Bangunan Gedung tercatat di Biro Umum dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp327.999.020,00
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.094.570.500,00	Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Kementerian Pertanian.

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
6.	Dinas Pariwisata	1.206.132.711,00	Bangunan Gedung milik Kementerian PU.
7.	Sekretariat Daerah		
	• Biro Administrasi Pembangunan	28.920.500,00	Bangunan Gedung tercatat pada Biro Umum dan Protokol DIY
	• Biro Umum dan Protokol	10.380.487.069,00	Bangunan Gedung milik Kraton Yogyakarta
8.	Kantor Perwakilan Daerah	2.143.253.900,00	Bangunan Gedung milik Yayasan Guntur Madu
9.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	47.359.680,00	Sertifikasi tanah yang tercatat pada SKPD lain
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	205.289.100,00	Bangunan Gedung tercatat pada Dinas Pariwisata DIY
	Jumlah	**84.967.284.455,40**	

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan **Rp328.726.327.899,40** **Rp211.716.080.245,00**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp328.726.327.899,40 berasal dari saldo awal sebesar Rp211.716.080.245,00 ditambah dengan realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp92.082.677.087,93, penambahan aset KDP yang belum dicatat sebesar Rp44.327.741.566,47 dan dikurangi dengan reklas ke Bangunan Gedung sebesar Rp18.953.281.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal	**211.716.080.245,00**
Penambahan:	
Belanja Modal:	
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	48.186.701.487,93
Dinas Kebudayaan	7.240.705.500,00
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	36.208.380.100,00
Reklas KDP pada Dikpora	221.389.066,47
Reklas dari Persediaan Dinas Kebudayaan	44.106.352.500,00
Jumlah	**135.963.528.654,40**
Pengurangan:	
Reklas ke Bangunan Gedung (DPPKA)	18.953.281.000,00
Jumlah	**18.953.281.000,00**
Saldo Akhir	**328.726.327.899,40**

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 berada pada beberapa OPD berikut:

Tabel 5.116
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	141.178.499.894,40	92.770.409.340,00
2	Dinas Kebudayaan	51.347.058.000,00	-
3	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	18.953.281.000,00
4	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	40.965.932.100,00	4.757.552.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	95.234.837.905,00	95.234.837.905,00
	Jumlah	**328.726.327.899,40**	**211.716.080.245,00**

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp141.178.499.894,40 terdiri dari KDP Pembangunan Stadion Mandala Krida sebesar Rp140.957.110.827,93 dan KDP Pembangunan Gedung Sekolah sebesar Rp221.389.066,47.

b. Dinas Kebudayaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp51.347.058.000,00 terdiri dari pembangunan gedung sekolah komunitas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku KPA Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan sebesar Rp7.240.705.500,00 dan KDP Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo yang semula dicatat sebagai persediaan sebesar Rp44.106.352.500,00.

c. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp40.965.932.100 merupakan pembangunan gedung depo arsip.

d. Dinas Kelautan dan Perikanan

Konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Pembangunan Pelabuhan Perikanan Glagah (Tanjung Adikarto) yang belum selesai. Nilai keseluruhan konstruksi sebesar Rp413.381.108.420,00. Dengan jangka waktu penyelesaian selama 14 tahun yaitu Tahun 2000-2013. Porsi yang dibiayai dari APBD Provinsi DIY sebesar Rp67.962.376.290,00, Kementrian Kelautan (Dekonsentrasi) sebesar Rp53.534.286.000,00, Kementrian Pekerjaan Umum (BBWS-SO) sebesar Rp274.009.144.030,00 dan APBD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp17.875.302.100,00. Biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DIY Tahun 2009-2015 sebesar Rp95.234.837.905,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembangunan Reservoir Jaringan Air di Pantai Glagah pada TA 2009 sebesar Rp3.262.062.705,00 dan Pembangunan Konstruksi Kanal Pelabuhan pada TA 2010 sebesar Rp9.968.178.500,00 dan TA 2011 sebesar Rp20.246.612.000,00 yang dilaksanakan diatas Tanah Paku Alaman Ground dimana pada lokasi yang sama dilaksanakan pembangunan pelabuhan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Besar Wilayah Sungai-Serayu Opak) dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta pelaksanaan Proyek Penambangan Pasir Besi oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum membuat perjanjian kerjasama dengan Kementrian Pekerjaan Umum (Balai Besar Wilayah Sungai-Serayu Opak), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal pembagian lokasi pelaksanaan pembangunan pelabuhan dan penambangan pasir besi maupun operasionalisasi pelabuhan perikanan di masa mendatang.
2) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2012 sebesar Rp13.090.010.300,00 merupakan Pekerjaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Glagah TA 2012 dilaksanakan dengan Kontrak Nomor 602.1/4476 tanggal 7 Juli 2012 oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak sebesar Rp12.694.432.000,00 dan Biaya Pendukung sebesar Rp395.578.300,00.
3) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2013 sebesar Rp15.228.692.500,00 merupakan Pekerjaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Glagah TA 2013 dilaksanakan dengan Kontrak Nomor 602/5405 tanggal 23 Agustus 2013 oleh PT. Kusuma Karya dengan Nilai Kontrak sebesar Rp14.755.225.375,00 dan Biaya Pendukung

sebesar Rp473.467.125,00 Realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp15.228.692.500,00 dengan tingkat penyelesaian 100%.

4) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 sebesar Rp7.222.130.900,00 merupakan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang meliputi Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014

1	**Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran:**	
	Biaya Konstruksi	**6.735.319.000,00**
	Dilaksanakan oleh PT. Handaru Adhiputra dengan SPK No.602/6239 tanggal 8 Oktober 2014	
	Biaya Perencanaan	**160.633.000,00**
	Dilaksanakan oleh CV. Sakalike dengan SPK No. 602/0800 tanggal 7 April 2014	
	Biaya Pengawasan	**123.145.000,00**
	Dilaksanakan oleh PT. Arsigraphi dengan SPK No.602/1703 tanggal 14 Agustus 2014	
	Biaya Penunjang	**114.298.900,00**
2	**Kajian Penyusunan SOP Pengelolaan Pelabuhan Perikanan**	**49.335.000,00**
	Dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Sejahtera Consulting dengan SPK No.602/2228.a tanggal 3 November 2014	
3	**DED Jalan Masuk Pelabuhan Tanjung Adikarta**	39.400.000,00
	Dilaksanakan oleh PT. Arsigraphi dengan SPK No.602.2/2245 tanggal 10 November 2014	
	Jumlah	**7.222.130.900,00**

5) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2015 sebesar Rp26.217.151.000,00 terdiri dari:
   a. Pembangunan sarana prasarana perkantoran sebesar Rp4.083.045.000,00 dilaksanakan dengan Kontrak Nomor 602/2282 tanggal 30 Oktober 2015 dengan pelaksana PT. Dipo Mulya Mas.
   b. Pengerukan alur masuk dan pemasangan fender sebesar Rp22.134.106.000,00 dilaksanakan dengan Kontrak Nomor 602/2178 tanggal 19 Oktober 2015 dengan pelaksana PT. Bangun Makmur Utama.

6) Tahun 2016 dan 2017 tidak ada penambahan pekerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Rp(2.716.531.114.914,69) Rp(2.455.875.286.454,97)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.716.531.114.914,69 merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118
Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Jumlah
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(518.304.079.826,18)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(689.428.185.659,45)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.505.889.834.169,61)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2.909.015.259,46)
	Jumlah	**(2.716.531.114.914,69)**

5.3.1.4. Dana Cadangan **Rp0,00** **Rp0,00**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

5.3.1.5. Aset Lainnya **Rp501.898.569.556,11** **Rp368.399.892.672,33**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp501.898.569.556,11 meliputi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.5.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga **Rp231.184.287.701,77** **Rp232.759.345.234,63**

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp231.184.287.701,77 merupakan nilai tercatat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan total harga perolehan sebesar Rp259.122.799.018,93 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sampai dengan per 31 Desember 2017 sebesar Rp(27.938.511.317,16) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

No	Nama SKPD	Sewa	Kerjasama Pemanfaatan	BGS	Pinjam Pakai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan	565.819.308,00	608.885.649,00	-	-	(355.978.331,19)	818.726.625,81
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.248.483.752,00	-	-	-	(600.769.926,24)	1.647.713.825,76
3	Dinas Perhubungan	39.065.214.545,00	-	-	-	(22.103.020,00)	39.043.111.525,00
	Dinas Sosial	2.950.084,00	-	-	-	-	2.950.084,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.645.744.209,00	-	-	-	(1.788.568.777,94)	6.857.175.431,06
5	Badan Kerjasama dan Penanaman	-	-	-	-	-	-
6	Satpol PP	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Pendapatan Pengelolaan	120.267.753.543,00		3.518.000.000,00	79.188.373.391,00	(24.304.425.792,82)	178.669.701.141,18
8	Kantor Perwakilan Daerah	2.911.574.537,93	-	-	-	(866.665.468,97)	2.044.909.068,96
9	Dinas Pertanian	2.100.000.000,00	-	-	-	-	2.100.000.000,00
	Jumlah	**175.807.539.978,93**	**608.885.649,00**	**3.518.000.000,00**	**79.188.373.391,00**	**(27.938.511.317,16)**	**231.184.287.701,77**

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan pinjam pakai dengan data sebagai berikut:

a. Sewa sebesar Rp175.807.539.978,93

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk sewa per 31 Desember 2017 sebesar Rp175.807.539.978,93 merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan yang pemanfaatannya dalam bentuk sewa pada beberapa SKPD berikut:

Tabel 5.120
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Aset (Rp)	Keterangan Aset	Penyewa
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	565.819.308,00	Hotel Edotel	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
			Tanah di Miliran, Umbulharjo	
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.248.483.752,00	Bangunan Mess Kaliurang Gedung Wisma Kaliurang	Masyarakat umum

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Aset (Rp)	Keterangan Aset	Penyewa
3.	Dinas Perhubungan	39.065.214.545,00	Tanah lahan parkir Bandara Adi Sucipto	PT. Angkasa Pura
4.	Dinas Sosial	2.950.084,00	Tanah dan bangunan, Eks Rumah Dinas di Jl. Munggur 32, Yogyakarta	BUKP Gondokusuman
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.645.744.209,00	Bangunan Rusunawa Ledok Code	Masyarakat umum
			Bangunan Pesanggrahan Balai Istirahat Karyawan (BIK) dan Balai Istirahat Pegawai (BIP)	Pegawai dan masyarakat umum
			Rumah Dinas Randubelang	
6.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	120.267.753.543,00	Tanah dan bangunan eks pabrik sabut di Pengasih Kulon Progo	PT. Formula Land
			Tanah dan Bangunan Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan, Jl. Malioboro 14 Yogyakarta	PT. Bank BPD DIY
			Tanah, Dlaban, Sentolo, Kulonprogo	PT. Amarta Karya
			Tanah dan bangunan Eks Diklat Perindustrian, Malangan	Yayasan Yogyakarta Angga Binangun
			Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji 45 Yk	Yayasan Wira Husada Stikes
			Tanah dan bangunan Eks Gudang pangan, Jl. Abubakar Ali No 2 Yogyakarta	Sunarti
			Tanah dan bangunan, Bekas OG No 16, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Pemerintah Desa Sumbermulyo
			Tanah, Jl. Wisata, Babarsari, Sleman	Yayasan Perguruan Dana Pala Sleman
			Tanah, Srimulya, Piyungan, Bantul	Pemkab. Bantul
			Tanah dan bangunan, D.I. Panjaitan No. 66, Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	dr. Soedarman
			Tanah dan bangunan, Jl. Perwakilan Wates, Kulon Progo	KPRI Sumber Rejeki Kulon Progo
			Tanah dan bangunan, Jl.Keldongkiron A.41, Dongkelan, Gedongkiwo, Mantrijeron, YK.	Sri Andayani
			Tanah, JEC	PT. Buanaland Agung
			Tanah dan bangunan, Lahan Parkir Basement Malioboro Mall	PT. Yogya Indah Sejahtera
			Tanah, Jl. Beskalan, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta	CV. Cipta Anugerah Pratama
			Tanah dan bangunan, Jalan Kenari Yogyakarta.	Talenta Body Repair
			Tanah, Patehan Tengah No 25 Kraton, YK	Tien Setiantoro, dkk.
			Tanah dan bangunan, Karangjati, Mlati, Sleman	Badan Anti Korupsi Sri Wahyu
			Tanah dan bangunan, Mrican Baru,Caturtunggal, Depok, Yogyakarta	Ir. Bambang Priambodo
			Tanah dan bangunan, Komplek Colombo Nomor 56 Yogyakarta	Aswin Kumala Darma Saputra
			Tanah dan bangunan, Wanujoyo Lor, Srimartani, Piyungan, Bantul	Marmuji
			Tanah, Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo
			Tanah dan bangunan, Jalan D.I. Panjaitan No. 70, Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta.	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Aset (Rp)	Keterangan Aset	Penyewa
			Tanah dan bangunan Komplek Griya Permata Hijau, No. D.1 Purwomartani, Kalasan, Sleman.	John Neil Mcsweyn
			Eks Tanah Kas Desa Wates, (71 Bidang Tanah)	Pemkab. Kulon Progo
			Tanah dan bangunan, Jalan Sriti Nomor 20 G Caturtunggal, Depok, Sleman.	Lembaga Konsumen Yogyakarta
			Tanah dan bangunan, Glugo, Panggungharjo, Sewon	BADKO TKA TPA
			Tanah, Eks SD Kedungdowo, Wates, Kulon Progo	Yayasan Amal Insan Mulia
			Tanah dan bangunan, Jl. Kusumanegara Nomor 168E, Yk.	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku (LP2Desaku).
			Rumah Dinas, Jl. Kusuma Negara 168 H	Sugiyanta. SIP
			Rumah Dinas, Jl. Sriti No 20 C Demangan	Bambang Hermanto
			Rumah Dinas, Jl. DI Panjaitan No 74 MantriJeron	Ny. Muchosin/ Ny Jaenab
			Rumah Dinas, Jl. Gedongan Baru A2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Aida Kusuma Wahyuni
			Rumah Dinas, Jl. Gedongan Baru B4 Pelemwulung	Hasan Khoiri Amd
			Sebagian bangunan, KPPD Kulon Progo	
7.	Kantor Perwakilan Daerah	2.911.574.537,93	Griya Jogja, Jl. Diponegoro No.52 Menteng, Jakarta	Masyarakat umum
			Wisma Jogja, Jl. Pedati No.116 Jakarta Timur	Masyarakat umum
8.	Dinas Pertanian	2.100.000.000,00	Tanah, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Tirto Manunggal
	Jumlah	**175.807.539.978,93**		

b. Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp608.885.649,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2017 sebesar Rp608.885.649,00 merupakan Kerjasama Pemanfaatan aset pada BLPT-Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

c. Bangun Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Banguna Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00 merupakan aset tanah yang dikelola secara BGS oleh PT. Yogya Indah Sejahtera dengan Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemda DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam Pembangunan dan Pengelolaan Malioboro Hotel di Jalan Malioboro Yogyakarta Nomor 53 tanggal 12 September 1992. Masa perjanjian selama 30 tahun dan akan berakhir Tahun 2022. Setelah perjanjian berakhir maka tanah dan bangunan Malioboro Hotel beserta fasilitasnya menjadi milik Pemda DIY. Perjanjian tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1990.

d. Pinjam Pakai sebesar Rp79.254.373.391,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Pinjam Pakai sebesar Rp79.254.373.391,00 merupakan aset milik Pemda DIY yang dipinjam oleh pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Pinjam Pakai

No	Keterangan Aset	Lokasi	Peminjam
1.	12 bidang tanah SHP 34, SHP 35, SHP 37, SHP 38, SHP 77, SHP 90, SHP 91, SHP 92, SHP 93, SHP 94 dan SHP 107	Kabupaten Kulon Progo	Pemkab. Kulon Progo
2.	Tanah dengan luas + 30.000 m2 dari total luas keseluruhan 128.000 m2 sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 1 seri B.2624929 tanggal 9 Juli 2009.	Desa Hargobinangun, Pakem, Sleman	Pemkab. Sleman
3.	Sebagian bangunan gedung seluas 32,91 m2 di Dinas Pariwisata DIY	Jalan Malioboro Nomor 56 Yogyakarta.	Polda DIY
4.	Kendaraan jenis Minibus, Merk dan Type Toyota Innova 2.0 G M/T Luxury, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MHFXW4G4D2276646, Nomor Mesin ITR-7696020, warna Black Mica.		Kanwil BPN DIY
5.	Tanah seluas 1.663 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 Seri AB.538626 Tanggal 08/07/1991	Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul	Pemkab. Gunungkidul
6.	Tanah seluas 593 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AB.538627 Tanggal 08/07/1991	Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul	Pemkab. Gunungkidul
7.	Tanah seluas 102 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00004 Seri AB.740783 Tanggal 17/04/1993	Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul	Pemkab. Gunungkidul
8.	Tanah seluas 65 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AD.740785 Tanggal 17/04/1993	Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul	Pemkab. Gunungkidul
9.	Tanah seluas 637 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AD.728434 Tanggal 18/01/1993	Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul	Pemkab. Gunungkidul
10.	Tanah seluas 146 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AD.7284354 Tanggal 18/01/1993	Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul	Pemkab. Gunungkidul
11.	Tanah seluas 468 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 Seri AD.728433 Tanggal 18/01/1993	Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul	Pemkab. Gunungkidul
12.	Tanah seluas 22.502 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00005 Seri AH.457048 Tanggal 01/08/1996	Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	Pemkab. Gunungkidul
13.	Tanah seluas 21.151m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AH.457559 Tanggal 03/09/1996	Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul	Pemkab. Gunungkidul
14.	Tanah seluas 9.696 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AH.457049 Tanggal 31/08/1996	Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul	Pemkab. Gunungkidul
15.	Tanah dan bangunan seluas 278 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.8 Seri AH 441017 Tanggal 10 Juni 1996.	Semin, Semin, Gunung Kidul	Pemkab. Gunungkidul
16.	Sebagian tanah seluas 1.825 m2	Kedung Keris, Nglipar, Gunung Kidul	Pemkab. Gunungkidul
17.	Tanah seluas 2.755 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.1. Seri AD.746346, tanggal 29 Maret 1994, digunakan untuk Kantor Kecamatan Sedayu	Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul	Pemkab. Bantul
18.	Tanah seluas 4.204 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0003. Seri AN.372362, tanggal 4 Desember 1999, digunakan untuk Kantor Kecamatan Sanden	Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul	Pemkab. Bantul
19.	Tanah seluas 4.824 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0006. Seri AN.370599, tanggal 4 Desember 1999, digunakan untuk Puskesmas Sanden	Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul	Pemkab. Bantul

20.	Tanah seluas 2.159 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0005. Seri AN.372361, tanggal 4 Desember 1999, digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Sanden	Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul	Pemkab. Bantul
21.	Tanah dan Bangunan eks UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY (Or. 6) sesuai sertifikat Nomor P.00032, Seri AX. 210739, tanggal 31 Desember 2005, luas tanah 1.512 m2, luas bangunan 432,65 m2	Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	Pemkab. Bantul
22.	Tanah dan bangunan seluas + 16.348 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.2 Seri B.8302400 tanggal 01 Januari 1998	Gesikan Bantul	Pemkab. Bantul
23.	Tanah seluas + 646,35 m2 (41,7 m x 15,5 m) dari luas keseluruhan 6.064 m2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.76/Smk tanggal 19 April 1995.	Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta	Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa Yogyakarta
24.	Serat Fiber Optic sebanyak 12 core dari 96 core yang telah terbangun		Pemkot Yogyakarta
25.	Sebagian tanah dan bangunan, seluas + 235 m2	Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56 Yogyakarta	Pemkot Yogyakarta
26.	Tanah seluas 20.785 m2 sesuai dengan sertifikat Hak Pakai No. 5 Seri AH 443787 tanggal 21 Maret 1997 dan bangunan seluas 2.485,16 m2.	Kalitirto, Berbah, Sleman	Kementerian PUP dan ESDM RI
27.	Sebagian bangunan/gedung seluas 123 m2	Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta	Sekretariat Bersama Kartamantul) Provinsi DIY
28.	Kendaraan jenis Sedan, Merk/Type Toyota New Camry 3.OV/A/T, Tahun 2004, 2995 CC, Nomor Polisi AB 92, Nomor Rangka MR 053-XK 3044000004, Nomor Mesin IMZ-1694200, Nomor BPKB D1693414, Warna Abu-abu Metalite.		Polda DIY
29.	Tanah luas tanah 2.555 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri AH 472382 tanggal 09-06-1997	Hargorejo, Kokap, Kulon Progo	Pemkab. Kulon Progo
30.	Tanah luas tanah 5.520 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri AB 157572 tanggal 21 Januari 1991	Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo	Pemkab. Kulon Progo
31.	Tanah luas tanah 1.555 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.01 Seri AJ 096480 tanggal 01 Juni 1998	Karangsewu, Galur, Kulon Progo	Pemkab. Kulon Progo
32.	Tanah luas tanah 2.590 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B 2363424 tanggal 07 November 1989	Karangsewu, Galur, Kulon Progo	Pemkab. Kulon Progo
33.	Tanah luas tanah 9.935 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.05 Seri AJ 096483 tanggal 01 Juni 1998	Kulwaru, Wates, Kulon Progo	Pemkab. Kulon Progo
34.	Tanah luas 1.425 m2 dengan Sertifikat No P.8 Seri AH.196049 tanggal 31 Juli 1996 dan luas tanah 1.255 m2 dengan Sertifikat No P.10 Seri AI.951715 tanggal 11 November 1997.	Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo	Pemkab. Kulon Progo
35.	Tanah luas tanah 641 m2 dengan Sertifikat No. P.7 seri B.1859289 tanggal 24 Maret 1978	Jalan Khudori Nomor 49, Wates, Kulon Progo	Pemkab. Kulon Progo
36.	Tanah luas tanah 450 m2 dengan Sertifikat No P.26 seri AH.196047 tanggal 19 April 1996	Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kulon Progo	Pemkab. Kulon Progo
37.	Tanah dengan luas 8.049 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.13/Syd, Seri AD.734426, Tanggal 5 April 1994	Jalan Suryodiningratan Nomor 8 Yogyakarta,	Institut Seni Indonesia Yogyakarta
38.	6 kendaraan roda empat dan 6 kendaraan roda 2.		KPU Provinsi DIY
39.	Tanah seluas 9.510 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873598 Tanggal 22 September 1987	Sumberagung, Moyudan, Sleman	Pemkab. Sleman

40.	Tanah seluas 6.770 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873600 Tanggal 22 September 1987	Margodadi, Seyegan, Sleman	Pemkab. Sleman
41.	Tanah seluas 5.705 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3 Seri B.1873599 Tanggal 08 September 1987 dan seluas 2.510 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.4 Seri B.1858625 Tanggal 18 Juli 1987	Pendowoharjo, Sleman	Pemkab. Sleman
42.	Tanah seluas 9.910 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 B.8979481 Tanggal 17 Juni 1988	Bimomartani, Ngemplak, Sleman	Pemkab. Sleman
43.	Tanah seluas 10.040 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1858618 Tanggal 18 Juli 1987	Kalitirto, Berbah, Sleman	Pemkab. Sleman
44.	Tanah seluas 9.685 m2 dengan Sertifikat Nomor P.44 Seri BL.048886 Tanggal 06 Mei 2013	Hargobinangun, Pakem, Sleman	Pemkab. Sleman
45.	Tanah seluas 2.885 m2 dengan Sertifikat No P.16 Seri B.1858650 Tanggal 02 Juli 1987	Jl. Pangukan, Beran Kidul, Tridadi, Sleman	Pemkab. Sleman
46.	Tanah seluas + 1.000 m2 dari seluruh luas tanah + 6.775 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988	yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta	BPS Kota Yogyakarta
47.	Bangunan seluas 90 m2.	Jalan Jlagran Nomor 52 Yogyakarta	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
48.	Tanah seluas 770 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.47/Mju Seri AF.477470 Tanggal 11 Maret 1997	Jl Veteran, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta	Pemkot. Yogyakarta
49.	Tanah seluas 749 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.8/Bnr Seri B.8834959 Tanggal 12 Januari 1988	Jl Kyai Mojo, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta	Pemkot. Yogyakarta
50.	Tanah dan bangunan, tanah seluas 104 m2 dan luas bangunan 90 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Gnk Seri B.8190750 tanggal 2 September 1988	Jl Notowinatan PA II/437, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta	Pemkot. Yogyakarta
51.	Sebagian tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas + 64 m2	Wisma PU Kaliurang, Kabupaten Sleman	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum
52.	sebagian tanah dengan luas 8.877 m2 dari luas keseluruhan 29.841 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.5/Bnr Seri B 8972861 Tanggal 26 September 1987	Jalan Kyai Mojo, Pingit, Yogyakarta	Kementerian Kesehatan RI
53.	Tanah seluas + 694 m2 dari seluruh luas tanah + 5.800 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor 166 Seri AX 216169 Tanggal 17 April 2006	Maguwoharjo, Depok, Sleman	Kementerian Perhubungan RI
54.	Tanah seluas + 1.298 m2 dari luas keseluruhan + 2.244 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.19 Seri AR. 721913 Tanggal 01 Juni 2001	Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman	Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman
55.	Tanah seluas + 1.380 m2 dari luas keseluruhan + 6.775 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988	Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY
56.	Minibus/MP, Suzuki/GC 415 V-APVSTD 2008/1493CC/AB 1660 UA /MHYGDN41V8J-300414/ G15AID-165659 /F730905/ Warna Merah berlogo BNN		Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY
57.	Tanah seluas 2.542 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00011, Seri AX 620551 Tanggal 18 Desember 2006 dan bangunan seluas 1.740 m2	Jalan Wiyoro Lor Nomor 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta
58.	Barang Inventaris dan tanah dengan rincian sebagai berikut: a) Papan Nama Instansi KPU 1 unit (kondisi rusak)		Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

	b) Meja Rapat 20 unit (19 unit baik, 1 unit rusak) c) Kursi Rapat 50 unit (kondisi baik) d) Kursi Pimpinan Rapat 6 unit (kondisi baik) e) Sofa Kursi Tamu 1 unit (kondisi baik) f) Taplak Meja 20 buah (18 buah baik, 2 buah rusak) g) Note Book 5 unit (kondisi baik) h) Kursi Kerja Lipat 20 unit (11 kondisi baik, 9 kondisi rusak) i) Kursi Kerja Putar 3 unit (kondisi baik) j) Kursi Kerja Sekretaris 1 unit (kondisi baik)		
59.	Tanah seluas 1.720 m2 sesuai Sertipikat Nomor P.00068 Seri AZ043111 Tanggal 07 Desember 2006	Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
60.	Tanah seluas 517 m2 sesuai Sertipikat Nomor P.00066 Seri AZ043037 Tanggal 07 Desember 2006,	Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
61.	Tanah seluas 937 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.00067 Seri AZ043110 Tanggal 07 Desember 2006	Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
62.	Tanah seluas + 850 m2 dari seluruh luas tanah + 47.597 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.8578015 Tanggal 1 Juni 1988	Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul	Detasemen Zeni Bangunan 2/IV Yogyakarta
63.	Tanah seluas + 264 m2 dari seluruh luas tanah + 2.244 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.19 Seri AR.721913 Tanggal 1 Juni 2001	Desa Gatak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman	Detasemen Zeni Bangunan 2/IV Yogyakarta
64.	Sebagian tanah dan bangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas + 100 m2	Resort KSDA Kota Yogyakarta di Baciro	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
65.	Tanah seluas + 429 m2 dari luas keseluruhan 2.244 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.19 Seri AR 721913 Tanggal 1 Juni 2001	Dusun Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman	Pemkab Sleman
66.	Tanah seluas + 10.000 m2 dari luas keseluruhan 46.200 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.14 Seri AB.548997 Tanggal 10 Februari 1993	Pengasih, Pengasih, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo
67.	Tanah seluas + 12.000 m2 dari luas keseluruhan 47.597 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.1 Seri B.8578015 Tanggal 1 Juni 1988	Gesikan IV, Wijirejo, Pandak, Bantul	Pemkab Bantul
68.	Tanah dan bangunan dengan luas tanah 2.142 m2 dan luas bangunan 845 m2 sesuai dengan sertifikat Nomor 81 Seri BB 172946 tanggal 20 Mei 2009	Jalan Faridan Muridan Noto Nomor 21 Kota Baru Yogyakarta	Lembaga Sandi Negara
69.	Tanah seluas + 2.250 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 tanggal 17 Juni 1988	Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta	Kanwil BPN DIY
70.	Tanah seluas + 36.200 m2 dari luas keseluruhan 46.200 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.14 Seri AB.548997 Tanggal 10 Februari 1993	Pengasih, Pengasih, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo
71.	Tanah seluas 10.317 m2 sesuai sertifikat Nomor P.03 Seri B 4782795 tanggal 30/08/1989	Semanu, Semanu, Gunungkidul	Pemkab Gunungkidul
72.	Tanah seluas 10.219 m2 sesuai sertifikat Nomor P.00004 Seri AL.145166 tanggal 29/04/1998	Putat, Patuk, Gunungkidul	Pemkab Gunungkidul
73.	Tanah seluas 19.562 m2 sesuai sertifikat Nomor P.04 Seri AL.170786 tanggal 18/08/1998	Bandung, Playen, Gunungkidul	Pemkab Gunungkidul
74.	Tanah seluas 10.001 m2 sesuai sertifikat Nomor P.1 Seri B.8190527 tanggal 18/10/1988	Sumberejo, Semin, Gunungkidul	Pemkab Gunungkidul
75.	Tanah seluas 558 m2 sesuai sertifikat Nomor P.9 Seri B.1856411 tanggal 08/07/1987	Kepek, Wonosari, Gunungkidul	Pemkab Gunungkidul

76.	Sebagian seluas 560 m2 dari luas tanah 2.411 m2 sesuai dengan sertifikat Nomor 00027 Seri AX 705701 tanggal 31 Mei 2007 dan bangunan seluas 120 m2	Jalan Retno Dumilah Nomor 23 C Kotagede Yogyakarta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
77.	Tanah seluas 4.433 m2 sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 00105 seri BL 185857 tanggal 20 Mei 2015	Jl. Parangtritis Km 7 Dusun Bangi Desa Timbulharjo Kecamatan Sewan Kabupaten Bantul	Pemkab Bantul
78.	Tanah seluas 306 m2	Komplek Colombo No 57 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman	Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
79.	Bangunan parkir dengan tipe knockdown yang bisa menampung 40 unit bus dan 2.600 unit kendaraan roda dua dan bangunan kios pedagang kaki lima sebanyak 144 unit		Pemkot Yogyakarta
80	Tanah seluas 5.552 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.2 Seri B.8977617 tanggal 19 Agustus 1087 dan bangunan Gedung kantor seluas 66 m2 dan 106 m2	Jalan Parangtritis Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	Pemkab Bantul

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud Rp105.230.374.076,00 Rp89.677.202.241,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tak Berwujud adalah software komputer, website, lisensi dan franchise, hak cipta, paten dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan DED.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.230.374.076,00 merupakan Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp104.986.411.076,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.122
Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Software	26.316.189.086,00
2.	Kajian	34.944.032.240,00
3.	DED	39.238.986.845,00
4.	Website	581.175.000,00
5.	Aset Tidak Berwujud Lainnya.	4.149.990.905,00
	Jumlah	**10.230.374.076,00**

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.123
Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)	Software (Rp)	Kajian (Rp)	DED (Rp)	Website (Rp)	Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.837.177.850,00	2.199.695.750,00	637.482.100,00	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	225.585.000,00	128.085.000,00	-	-	-	97.500.000,00
3	RS Grhasia	851.205.670,00	627.511.620,00	214.694.050,00	-	9.000.000,00	-
4	RS Paru Respira	185.427.940,00	185.427.940,00	-	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDI	29.783.610.560,00	47.549.800,00	10.862.852.875,00	18.033.413.385,00	-	839.794.500,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruar	15.954.699.100,00	-	-	15.954.699.100,00	-	-
7	Badan Perencanaan Pembangun	8.532.016.225,00	2.904.680.525,00	5.577.615.700,00	-	49.720.000,00	-
8	Dinas Perhubungan	2.220.958.258,00	567.129.808,00	771.333.500,00	67.515.950,00	-	814.979.000,00
9	Badan Lingkungan Hidup	4.832.227.100,00	602.008.000,00	2.328.676.000,00	1.829.543.100,00	23.000.000,00	49.000.000,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	672.762.750,00	91.219.000,00	463.043.750,00	10.000.000,00	108.500.000,00	-
11	Dinas Sosial	54.495.000,00	7.988.000,00	-	46.507.000,00	-	-
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi	280.244.600,00	150.230.000,00	-	130.014.600,00	-	-
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Ke	444.494.000,00	444.494.000,00	-	-	-	-
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	2.062.728.540,00	308.549.540,00	1.754.179.000,00	-	-	-
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	147.075.000,00	147.075.000,00	-	-	-	-
16	Dinas Kebudayaan	13.675.842.535,00	5.073.002.875,00	6.014.932.700,00	1.865.894.210,00	47.200.000,00	674.812.750,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Pol	157.127.000,00	3.760.000,00	-	153.367.000,00	-	-
18	Sekretariat Daerah	1.956.181.750,00	1.038.424.750,00	917.757.000,00	-	-	-
19	Sekretariat DPRD	1.315.592.300,00	571.533.600,00	548.899.645,00	-	-	195.159.055,00
20	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.367.504.816,00	4.590.574.816,00	381.105.000,00	186.775.000,00	-	209.050.000,00
21	Badan Pendidikan dan Pelatihan	444.601.800,00	210.909.000,00	-	233.692.800,00	-	-
22	Inspektorat	411.586.200,00	361.921.200,00	-	49.665.000,00	-	-
23	Badan Kepegawaian Daerah	1.204.613.200,00	675.354.500,00	-	500.008.700,00	-	29.250.000,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64.850.000,00	34.975.000,00	-		29.875.000,00	
25	Kantor Perwakilan Daerah	45.000.000,00	-	-	-	-	45.000.000,00
26	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	1.038.553.780,00	39.765.000,00	918.788.780,00	-	40.900.000,00	39.100.000,00
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.575.231.500,00	3.575.231.500,00	-	-	-	-
28	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.125.302.062,00	958.900.022,00	117.239.440,00	-	-	1.049.162.600,00
29	Dinas Pertanian	98.000.000,00			-	98.000.000,00	-
30	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.739.626.650,00	7.000.000,00	1.541.437.650,00	177.891.000,00	13.298.000,00	-
31	Dinas Pariwisata	2.017.301.050,00	204.605.000,00	1.812.696.050,00	-	-	-
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	471.686.500,00	179.422.500,00	81.299.000,00	-	132.432.000,00	78.533.000,00
33	Dinas Perindustrian dan Perdaga	437.065.340,00	379.165.340,00	-	-	-	57.900.000,00
	Jumlah	**105.230.374.076,00**	**26.316.189.086,00**	**34.944.032.240,00**	**39.238.986.845,00**	**551.925.000,00**	**4.179.240.905,00**

5.3.1.4.4 Aset Lain-lain **Rp158.412.944.814,40** **Rp45.963.345.196,70**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/yang akan dihapus dan aset tetap dalam kondisi rusak berat.

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp158.412.944.814,40 berasal dari nilai perolehan Aset Lain-lain sebesar Rp161.518.281.189,00 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp(3.105.336.374,60) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.124
Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per SKPD

No	Nama SKPD	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	59.600.000,00	(51.100.000,00)	8.500.000,00
2	Dinas Kesehatan	143.480.000,00	(143.480.000,00)	-
3	RS Grhasia	647.168.000,00	(210.329.600,00)	436.838.400,00
4	RS Paru Respira	133.000.000,00	(133.000.000,00)	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	139.834.670.435,00	(311.582.655,00)	139.523.087.780,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.538.400,00	(2.538.400,00)	-
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.000.000,00	(8.000.000,00)	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	362.850.210,00	(213.398.133,00)	149.452.077,00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyaraka	32.800.000,00	(31.700.000,00)	1.100.000,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.110.929.700,00	-	6.110.929.700,00
11	Dinas Perhubungan	2.726.910.475,00	(787.242.410,00)	1.939.668.065,00
12	Badan Lingkungan Hidup	779.584.500,00		779.584.500,00
13	Dinas Sosial	392.218.000,00	(45.718.000,00)	346.500.000,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	107.780.000,00	(107.780.000,00)	-
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	168.807.000,00	(45.700.000,00)	123.107.000,00
16	Dinas Kebudayaan	3.532.919.050,00	-	3.532.919.050,00
17	Sekretariat Daerah	302.292.375,00	(52.292.375,00)	250.000.000,00
18	Sekretariat DPRD	-	-	-
19	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.195.404.689,00	-	1.195.404.689,00
20	Kantor Perwakilan Daerah	317.381.002,00	(253.904.801,60)	63.476.200,40
21	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	150.000.000,00	(150.000.000,00)	-
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	83.600.000,00	(83.600.000,00)	-
23	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.739.428.603,00	(209.500.000,00)	3.529.928.603,00
24	Dinas Pertanian	267.470.000,00	(231.470.000,00)	36.000.000,00
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	386.448.750,00	-	386.448.750,00
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.000.000,00	(33.000.000,00)	-
	Jumlah	**161.518.281.189,00**	**(3.105.336.374,60)**	**158.412.944.814,40**

5.3.1.4.5 Aset Non Lancar Lainnya **Rp7.070.962.963,94** **Rp0,00**

Saldo Aset Non Lancar Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.070.962.963,94 merupakan Uang Jaminan terkait dengan ijin pertambangan. Aset Non Lancar Lainnya-Uang Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian. Uang Jaminan sebesar Rp7.070.962.963,94 meliputi Jaminan Kesungguhan sebesar Rp448.860.358,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp4.684.737.655,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp1.937.364.950,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125
Rincian Jaminan Kesungguhan per 31 Desember 2017

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	TGL BUKA	Tabungan	Deposito
Bank BPD DIY					
1	001221031745	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CENTRAL STONE P	27/08/2015	371.414,00	3.500.000,00
2	001221031747	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT JOGJA PARAHITA H	28/08/2015	41.903,00	
3	001221031792	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT HARGO WILLIS IND	15/09/2015	271.148,00	2.850.000,00
4	001221031833	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ ANANG TRI HARDIYANTO	29/09/2015	-	500.000,00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	TGL BUKA	Tabungan	Deposito
5	001221031849	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	08/10/2015	297.441,00	3.132.000,00
6	001221031859	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P	12/10/2015	28.148,00	500.000,00
7	001221031861	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GUNUNG SEJAHTERA	13/10/2015	35.754,00	750.000,00
8	001221031884	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RIMBA SARANA	21/10/2015	-	500.000,00
9	001221031885	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	21/10/2015	140.255,00	700.000,00
10	001221031886	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	21/10/2015	-	500.000,00
11	001221031889	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K	22/10/2015	230.199,00	2.550.000,00
12	001221031890	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S	22/10/2015	135.023,00	500.000,00
13	001221031891	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K	22/10/2015	330.114,00	3.370.000,00
14	001221031895	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO	23/10/2015	4.627,00	700.000,00
15	001221031896	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO	23/10/2015	4.627,00	700.000,00
16	001221031904	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT HELIZA MANDIRI S	28/10/2015	-	500.000,00
17	001221031906	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PASIR ALAM S	29/10/2015	97.264,00	650.000,00
18	001221031907	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ DJIDUL	29/10/2015	-	500.000,00
19	001221031918	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HERI SUWARNO	02/11/2015	-	500.000,00
20	001221031923	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARDI	03/11/2015	-	550.000,00
21	001221031924	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WIDAYAT	03/11/2015	-	500.000,00
22	001221031928	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MITRA GRAHA D	03/11/2015	-	500.000,00
23	001221031929	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMARYANTA	03/11/2015	-	500.000,00
24	001221031931	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIARTO	03/11/2015	-	500.000,00
25	001221031932	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TIRTA REJA	03/11/2015	-	594.300,00
26	001221031933	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEJAHTERA INDRA P	03/11/2015	-	630.000,00
27	001221031936	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UMAR SYAMSUDIN H	04/11/2015	-	550.000,00
28	001221031945	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BANGUN ADHI P	05/11/2015	-	600.000,00
29	001221031946	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MULIA P	06/11/2015	-	500.000,00
30	001221031963	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DEWATA SARI PRIMA	09/11/2015	-	500.000,00
31	001221031964	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUKIT BATU INDAH	09/11/2015	-	500.000,00
32	001221031968	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT FIRST LIME I	09/11/2015	-	500.000,00
33	001221031970	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CALLDOMIL I	09/11/2015	-	500.000,00
34	001221031973	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TINUS BUDIMAN	10/11/2015	-	500.000,00
35	001221031974	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	10/11/2015	-	500.000,00
36	001221031975	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	10/11/2015	-	500.000,00
37	001221031976	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUGIH ALAM N	11/11/2015	-	500.000,00
38	001221031977	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MERPATI JAYA M	11/11/2015	-	500.000,00
39	001221031978	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUGIH ALAM N	11/11/2015	-	500.000,00
40	001221031979	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA	11/11/2015	-	500.000,00
41	001221031982	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UD GUNUNG GEDE	11/11/2015	-	500.000,00
42	001221031992	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA	12/11/2015	-	500.000,00
43	001221031993	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA	12/11/2015	-	500.000,00
44	001221031998	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INTI CALCIUM I	13/11/2015	-	500.000,00
45	001221032191	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI KALIMASADA	05/01/2016	305.761,00	3.500.000,00
46	001221032355	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT HARMAK INDONESIA	22/01/2016	326.413,00	3.675.000,00
47	001221032357	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA	22/01/2016	326.413,00	3.675.000,00
48	001221032358	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SIWI ARYANI	22/01/2016	174.474,00	2.250.000,00
49	001221032367	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV AJI PRATAMA	25/01/2016	-	500.000,00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	TGL BUKA	Tabungan	Deposito
50	001221032467	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANI	18/02/2016	-	500.000,00
51	001221032468	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	18/02/2016	-	500.000,00
52	001221032473	DINAS PUP ESDM DIY QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI	22/02/2016	545,00	600.000,00
53	001311006358	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. PASIR ALAM S	28/03/2016	-	500.000,00
54	001221032650	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	12/04/2016	4.326,00	650.000,00
55	001221032651	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUGIARTO	12/04/2016	-	500.000,00
56	001221032658	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUWUH RUSDI WURYANTO	14/04/2016	-	600.000,00
57	001221032666	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PANCA MANUNGGAL M	19/04/2016	-	500.000,00
58	001221032669	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AGUNG BARA C	20/04/2016	96.646,00	1.600.000,00
59	001221032783	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ NURI	31/05/2016	8.652,00	650.000,00
60	001221032788	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P	01/06/2016	220.394,00	3.200.000,00
61	001221032792	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CITRA MATARAM K	02/06/2016	37.540,00	500.000,00
62		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CITRA MATARAM K	02/06/2016	-	500.000,00
63	001221032823	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUSENO	17/06/2016	157.957,00	2.400.000,00
64	001221032837	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M	22/06/2016	458.746,00	3.500.000,00
65	001221032854	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L	01/07/2016	-	500.000,00
66	001221032855	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L	01/07/2016	-	500.000,00
67	001221032877	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARMAN	18/07/2016	42.666,00	1.000.000,00
68	001221032886	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	21/07/2016	226.647,00	1.400.000,00
69	001221032926	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	05/08/2016	206.589,00	1.750.000,00
70	001221032932	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SEMESTA I A R	08/08/2016	195.724,00	3.150.000,00
71	001221032999	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MITRA C	11/08/2016	1.483,00	500.000,00
72	001221033010	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	16/08/2016	119.436,00	650.000,00
73		DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	16/08/2016	-	700.000,00
74	001221033020	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SELO ARTO WIGUNO	18/08/2016	130.377,00	650.000,00
75		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SELO ARTO WIGUNO	18/08/2016	-	850.000,00
76	001221033179	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSA RANGGA K	11/10/2016	89.265,00	500.000,00
77	001221033236	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JUMARI	25/10/2016	62.378,00	500.000,00
78	001221033239	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GUNUNG MULIA	25/10/2016	75.128,00	700.000,00
79	001311006859	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSA RANGGA K	25/10/2016	-	500.000,00
80	001221033242	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMANTO	26/10/2016	62.376,00	500.000,00
81	001221033243	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WALIDI	26/10/2016	62.376,00	500.000,00
82	001221033271	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUPRAPTO	08/11/2016	60.051,00	500.000,00
83	001221033274	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	10/11/2016	218.694,00	500.000,00
84	001221033280	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SISWO HADI SUTRISNO	17/11/2016	65.071,00	500.000,00
85	001221033303	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURWANTO	29/11/2016	94.817,00	500.000,00
86		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURWANTO	29/11/2016	-	500.000,00
87	001221033322	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKAMTO	07/12/2016	68.186,00	600.000,00
88	001221033323	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHYONO	07/12/2016	70.913,00	650.000,00
89	001221033324	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA	07/12/2016	129.440,00	500.000,00
90	001221033325	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ MUHAMMAD AFFAN	08/12/2016	62.729,00	500.000,00
91	001221033328	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	08/12/2016	112.171,00	700.000,00
92		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	08/12/2016	-	700.000,00
93	001221033329	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KOPERASI PETRUK	08/12/2016	73.639,00	700.000,00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	TGL BUKA	Tabungan	Deposito
94	001221033330	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. KALIGENDOL P	08/12/2016	83.148,00	500.000,00
95	001221033342	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	15/12/2016	405.202,00	3.250.000,00
96		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	15/12/2016	-	3.500.000,00
97	001221033345	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	16/12/2016	314.371,00	1.500.000,00
98		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	16/12/2016	-	3.500.000,00
99	001221033350	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ CV PUSANG KEMBAR	20/12/2016	67.741,00	500.000,00
100	001221033354	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERNAWAN FAUZY	21/12/2016	78.667,00	700.000,00
101	001221033355	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SENO WATU AJI	21/12/2016	185.573,00	2.650.000,00
102	001221033357	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCONO BUWONO	22/12/2016	177.344,00	2.500.000,00
103	001221033371	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ NGADIMIN	29/12/2016	95.202,00	500.000,00
104		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ NGADIMIN	29/12/2016	-	500.000,00
105	001221033382	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SURYA DARMA	04/01/2017	65.623,00	500.000,00
106	001221033383	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO	04/01/2017	65.623,00	500.000,00
107	001221033384	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JULIUS ADI SAPUTRA	04/01/2017	128.949,00	1.750.000,00
108	001221033400	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KELOMPOK SIDO KOPEN	06/01/2017	73.176,00	650.000,00
109	001221033414	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ MIFTAH FARID	10/01/2017	65.398,00	500.000,00
110	001221033415	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TIRTA MULYA S	10/01/2017	65.398,00	500.000,00
111	001221033416	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MITRA BANGKIT S	10/01/2017	65.398,00	500.000,00
112	001221033417	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG RATMAKA Y	10/01/2017	65.398,00	500.000,00
113	001221033500	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAKRAWALA G S	16/01/2017	70.426,00	500.000,00
114	001221033536	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BAROKAH SUMBER R	17/01/2017	70.424,00	500.000,00
115	001221033537	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI OPAK S	17/01/2017	70.424,00	500.000,00
116	001221033559	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA	19/01/2017	192.380,00	2.930.000,00
117	001221033574	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUSILA HARI	24/01/2017	70.410,00	500.000,00
118	001221033590	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PUTRA DIAFAN JAYA	31/01/2017	141.950,00	2.100.000,00
119	001311007131	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. GUNUNG SEJAHTERA	31/01/2017	-	650.000,00
120	001221033608	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ANDES LEO PURNAMA	06/02/2017	72.876,00	600.000,00
121	001311007156	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JAYA REJEKI	09/02/2017	-	3.350.000,00
122	001221033694	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	10/03/2017	103.640,00	650.000,00
123		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	10/03/2017	-	650.000,00
124	001221033804	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARTOYO	17/03/2017	75.781,00	500.000,00
125	001221033810	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARTIJO	20/03/2017	75.775,00	500.000,00
126	001221033812	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	20/03/2017	75.775,00	500.000,00
127	001221033813	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARANA JAYA M	20/03/2017	211.479,00	500.000,00
128	001221033814	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA	20/03/2017	148.781,00	500.000,00
129	001221033835	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MAJU MANUNGGAL A	22/03/2017	75.771,00	500.000,00
130	001221033836	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RUDHI HARSONO	22/03/2017	75.771,00	500.000,00
131	001221033839	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUMPU HARAPAN	23/03/2017	75.769,00	500.000,00
132	001221033840	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	23/03/2017	165.517,00	500.000,00
133	001311007246	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. KALIGEDOL P	24/03/2017	-	500.000,00
134	001221033857	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARIYADI	04/04/2017	150.926,00	2.600.000,00
135	001221033947	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K	04/05/2017	230.417,00	2.350.000,00
136	001221033971	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	12/05/2017	181.464,00	924.000,00
137	001221033974	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TEMON SARANA P	12/05/2017	200.178,00	500.000,00
138	001221033982	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	15/05/2017	218.923,00	500.000,00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	TGL BUKA	Tabungan	Deposito
139	001221033987	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	16/05/2017	182.587,00	500.000,00
140	001311007564	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	25/07/2017	-	4.500.000,00
141		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	28/07/2017	-	4.076.000,00
142	001311007397	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	23/05/207	-	500.000,00
143	001311007405	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	26/05/207	-	4.500.000,00
144	001311007412	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	30/05/2017	-	4.500.000,00
145	001311007417	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. TEMON SARANA P	30/05/2017	-	4.500.000,00
146	001221034091	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA	12/06/2017	200.943,00	5.000.000,00
147	001221034092	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI	12/06/2017	200.943,00	5.000.000,00
148	001221034104	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TRI AGUS ANTORO	13/06/2017	200.938,00	5.000.000,00
149	001221034140	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOHAN SCORPHY ASMARA	14/06/2017	200.933,00	5.000.000,00
150	001221034141	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO	14/06/2017	200.933,00	5.000.000,00
151	001221034142	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ICHSAN HADI YULIATNO	14/06/2017	200.933,00	5.000.000,00
152	001221034205	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR	20/06/2017	287.215,00	5.000.000,00
153		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR	20/06/2017	-	5.000.000,00
154	001311007479	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. SARANA JAYA M	21/06/2017	-	5.000.000,00
155	001221034212	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARMIAT YELI FIRNADI	21/06/2017	205.927,00	5.000.000,00
156		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	22/06/207	-	5.000.000,00
157		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ANUGERAH SDA	10/07/2017	-	5.000.000,00
158	001221034259	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	10/07/2017	250.421,00	5.000.000,00
159	001311007553	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	19/07/2017	-	5.000.000,00
160	001221034260	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	10/07/2017	182.924,00	5.000.000,00
161	001221034261	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO	10/07/2017	250.440,00	5.000.000,00
162	001311007525	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO	10/07/2017	-	5.000.000,00
163	001221034262	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LESTARI KARYA	10/07/2017	182.924,00	5.000.000,00
164	001221034282	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO	13/07/2017	182.911,00	5.000.000,00
165	001221034284	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO	13/07/2017	182.911,00	5.000.000,00
166	001221034288	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA	14/07/2017	182.906,00	5.000.000,00
167	001221034339	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO	01/08/2017	167.031,00	5.000.000,00
168	001221034341	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ R KHOIRUDIN	02/08/2017	167.028,00	5.000.000,00
169	001221034359	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L	09/08/2017	164.916,00	5.000.000,00
170	001311007609	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUMI MATARAM	10/08/2017	-	5.000.000,00
171	001221034365	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WISNU SUBIANTO	11/08/2017	164.908,00	5.000.000,00
172	001221034380	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA	16/08/2017	169.906,00	5.000.000,00
173	001221034392	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	24/08/2017	169.882,00	5.000.000,00
174	001221034397	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UD JATI PERKASA	29/08/2017	169.867,00	5.000.000,00
175	001221034400	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO	30/08/2017	169.861,00	5.000.000,00
176	001221034448	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SUPROBO	05/09/2017	149.008,00	5.000.000,00
177	001221034469	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AMERTA GIRI L	06/09/2017	149.004,00	5.000.000,00
178	001221034470	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GHOZIN ASRORI	06/09/2017	149.004,00	5.000.000,00
179	001311007719	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA	20/09/2017	-	5.000.000,00
180		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SELO MANDIRI S	02/10/2017	-	5.000.000,00
181	001221034625	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M	03/10/2017	131.011,00	5.000.000,00
182	001311007756	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. BATU MULYO BERJA	04/10/2017	-	5.000.000,00
183	001221034632	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA	04/10/2017	131.006,00	5.000.000,00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	TGL BUKA	Tabungan	Deposito
184	001221034633	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU MULYO BERJA	04/10/2017	131.006,00	-
185	001221034640	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI	06/10/2017	131.002,00	5.000.000,00
186	001221034677	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONNY ARDANA	17/10/2017	160.133,00	5.000.000,00
187	001311007800	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONNY ARDANA	17/10/2017	-	5.000.000,00
188		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULYA	01/11/2017	-	5.000.000,00
189	001221034740	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	02/11/2017	113.033,00	5.000.000,00
190	001221034751	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU	07/11/2017	110.936,00	5.000.000,00
191	001221034753	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ROSLAN	07/11/2017	110.936,00	5.000.000,00
192	001221034758	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I	08/11/2017	110.933,00	5.000.000,00
193	001221034759	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO	08/11/2017	110.933,00	5.000.000,00
194	001221034789	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S	16/11/2017	115.925,00	5.000.000,00
195	001221034804	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	22/11/2017	115.913,00	5.000.000,00
196	001221034807	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SYACHIRUL AFIF	23/11/2017	115.911,00	5.000.000,00
197	001221034838	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA	04/12/2017	95.054,00	5.000.000,00
198	001221034847	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TRI ASIH DESTARI	05/12/2017	95.052,00	5.000.000,00
199	001221034848	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DAVID OKTA NUGRAHA	05/12/2017	95.052,00	5.000.000,00
200	001221034927	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI	27/12/2017	100.010,00	5.000.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2017				**18.154.058,00**	**430.706.300,00**
TOTAL JAMINAN KESUNGGUHAN PER 31 DESEMBER 2017					**448.860.358,00**

Tabel 5.126
Rincian Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2017

BPD Cabang Wates

No.	No. Rekening	Nama Rekening	Tabungan	Giro	Deposito
1	003.211.009298	Dinas PUP ESDM QQ UD. Hassan Karya	2.147.741,00	0,00	10.000.000,00
2	003.211.013076	Dinas PUP ESDM QQ UD. Putra Diafan	5.619.671,00	0,00	40.100.000,00
3	'003.111.000438	Dinas PUP ESDM QQ Jamrek	0,00	38.616.266,00	0,00
		Jumlah	**7.767.412,00**	**38.616.266,00**	**50.100.000,00**

Bank Pasar Kulon Progo

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Tanggal Buka Rekening	Tabungan	Deposito
1	650.601.026.360	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. BERKAT SAHALA JAYA	13/10/2010	35.612.932,00	0,00
2	650.601.028.268	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ UD. MUNCUL KARYA-TANGGULANGIN	31/10/2011	13.256.510,00	29.000.000,00
3	650.601.030.359	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. DIPTA AGUNG SANTOSA-GEMBONGAN	12/10/2012	4.319.611,00	11.410.000,00
4	650.601.028.838	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. DIPTA AGUNG SANTOSA-CUMETUK	21/02/2012	5.093.398,00	11.700.000,00
5	650.601.028.970	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.TUNAS MULYA-GRIGAK	13/03/2012	4.720.037,00	11.000.000,00
6	650.601.029.720	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. DANA KENCANA-SERANG	25/06/2012	5.561.834,00	13.800.000,00
7	650.601.029.944	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.PAMUNGKAS PERSADA	25/07/2012	7.865.967,00	19.650.000,00
8	650.601.030.367	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA	15/10/2012	16.838.783,00	44.670.000,00
9	650.601.030.491	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ UD.WATU IRENG	09/11/2012	11.060.300,00	30.070.000,00
10	650.601.030.562	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.KANIGARA SWASTA PRAJA	27/11/2012	10.965.109,00	29.800.000,00
11	650.601.030.579	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI	29/11/2012	16.008.762,00	43.700.000,00
12	650.601.030.602	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA	05/12/2012	18.019.936,00	50.040.000,00

13	650.601.031.380	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK	24/05/2013	6.246.995,00	18.690.000,00
14	650.601.032.247	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.TUNAS MULYA-DERWOLO	12/12/2013	2.932.911,00	10.000.000,00
15	650.601.032.864	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA	13/03/2014	41.245.563,00	150.700.000,00
16	650.601.033.172	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT.SURYA WATU KENCANA	07/05/2014	18.042.871,00	70.000.000,00
17	650.601.035.097	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI	08/08/2014	12.583.241,00	51.200.000,00
18	650.601.035.425	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA	29/09/2014	12.146.344,00	51.500.000,00
19	650.601.029.861	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	16/07/2012	2.747.854,00	92.000.000,00
		Jumlah		**245.268.958,00**	**738.930.000,00**

Bank BRI Cabang Cik Ditiro

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Tanggal Buka Rekening	Tabungan	Deposito
1	0029.01.014219.40.3	Dinas PUP ESDM Jamrek q.q Anang Tri Hardiyanto	14/03/2016	0,00	17.028.349,00
2	0029.01.014222.40.6	Dinas PUP ESDM Jamrek q.q PT. Gunung Sejahtera Temon	14/03/2016	0,00	38.122.116,00
3	0029.01.014232.40.1	Dinas PUP ESDM Jamrek q.q PT. Pasir Alam Sejahtera	21/03/2016	0,00	36.914.840,00
4	0029.01.014234.40.3	Dinas PUP ESDM Jamrek q.q PT. Hargo Willis Indonesia	22/03/2016	0,00	108.653.947,00
5	0029.01.014242.40.6	Dinas PUP ESDM Jamrek q.q PT. Jogja Parahita Hutama	23/03/2016	0,00	127.154.913,00
6	0029.01.014357.40.5	Dinas PUP ESDM Jamrek q.q CV. Cahaya	30/05/2016	0,00	10.400.040,00
7	0029.01.014411.40.3	Dinas PUP ESDM Jamrek q.q CV. Trikarya	30/06/2016	0,00	186.596.774,00
8	0029.01.014607-40.2	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Giarto	06/08/2016	0,00	21.435.613,00
9	0029.01.014649-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Agung Bara	21/09/2016	0,00	266.801.467,00
10	0029.01.014824-40-2	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Bumi Kallimasada	16/11/2016	0,00	132.027.880,00
11	0029.01.014944-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Bedjoe Oetomo	20/12/2016	0,00	69.630.869,00
12	0029.01.014949-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Sumaryanta	22/12/2016	0,00	29.863.727,00
13	0029.01.014958-40-5	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Suwandi	28/12/2016	0,00	25.526.707,00
14	0029.01.014982-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Jago Jaya Cemerlang	10/01/2017	0,00	147.525.000,00
15	0029.01.015043-40-7	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Nurdiyanto	07/02/2017	0,00	47.300.000,00
16	0029.01.015202-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq H Umar Syamsudin	13/03/2017	0,00	30.850.000,00
17	0029.01.015047-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Dedek Handoko	13/03/2017	0,00	35.400.000,00
18	0029.01.015305-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Heri Suwarno (KUBE Sido Maju)	04/04/2017	0,00	22.900.000,00
19	0029.01.015333-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Petrus Joko Legowo	13/04/2017	0,00	50.900.000,00
20	0029.01-015445-40-5	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Anindya Mitra	30/05/2017	0,00	56.100.000,00
21	0029.01-015443-40-3	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Parno	30/05/2017	0,00	57.050.000,00
22	0029.01.015537-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Kali Gendol Perkasa	14/07/2017	0,00	45.204.800,00
23	0029.01.015556-40-0	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Harmak Indonesia	24/07/2017	0,00	250.878.940,00
24	0029.01.015617-40-0	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Maju Manunggal Abadi	10/08/2017	0,00	113.212.000,00
25	0029.01.015635-40-8	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Batu Prima Mandiri	16/08/2017	0,00	210.000.000,00
26	0029.01.015653-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Tuwuh Rusdi Wuryanto	21/08/2017	0,00	20.050.000,00
27	0029.01.015708-40-5	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Aris Yulianto	04/09/2017	0,00	47.600.000,00
28	0029.01.015707-40-7	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Purwanto	07/09/2017	0,00	76.000.000,00
29	0029.01.015742-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Selo Mandiri Sejahtera	19/09/2017	0,00	41.650.000,00
30	0029.01.015747-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Dewata Bumi Nusantara	25/09/2017	0,00	110.000.000,00
31	0029.01.015757-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Muncul Karya	02/10/2017	0,00	55.677.037,76
32	0029.01.015774-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Koperasi Petruk	06/10/2017	0,00	145.450.000,00
33	0029.01.015792-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Muhammad Affan	12/10/2017	0,00	54.800.000,00
34	0029.01.015802-40-3	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Kelompok Penambang Sedyo Rukun	17/10/2017	0,00	39.450.000,00
35	0029.01.015804-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Tirta Mulya Sarana	20/10/2017	0,00	84.100.000,00
36	0029.01.015813-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sahabat Sejahtera Group	25/10/2017	0,00	99.650.000,00

37	0029.01.015815-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sari Mulia	25/10/2017	0,00	106.550.000,00
38	0029.01.015816-40-2	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sarana Jaya Makmur	25/10/2017	0,00	103.100.000,00
39	0029.01.015833-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Sari Bhumi Khatulistiwa	08/11/2017	0,00	154.000.000,00
40	0029.01.015837-40-8	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Widya Segara Karya	10/11/2017	0,00	139.250.000,00
41	0029.01.015843-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Caldomill Indonesia	15/11/2017	0,00	75.750.000,00
42	0029.01.015861-40-7	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Central Stone Perkasa	29/11/2017	0,00	113.500.000,00
		Jumlah			**3.604.055.019,76**
		Total Jumlah Jaminan Reklamasi			**4.684.737.655,76**

Tabel 5.127
Rincian Jaminan Pasca Tambang per 31 Desember 2017

BRI Cabang Cik Di Tiro

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Tanggal Buka Rekening	Penempatan
1	0029.01.014220.40.4	Dinas PUP ESDM Jampascatambang q.q Anang Tri Hardiyanto	14/03/2016	60.139.794,00
2	0029.01.014221.40.0	Dinas PUP ESDM Jampascatambang q.q. PT. Gunung Sejahtera Temon	14/03/2016	55.599.566,00
3	0029.01.014243.40.2	Dinas PUP ESDM Jampascatambang q.q PT. Jogja Parahita Hutama	23/03/2016	18.217.533,00
4	0029.01.014393.40.1	Dinas PUP ESDM Jampascatambang q.q CV. Cahaya	30/05/2016	5.200.020,00
5	0029.01.014413.40.5	Dinas PUP ESDM Jampascatambang q.q CV. Trikarya	30/06/2016	12.479.147,00
6	0029.01.014443-40.0	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq PT. Hargo Willis Indonesia	20/06/2016	37.783.287,00
7	0029.01.014471-40-3	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq PT. Pasir Alam Sejahtera	28/07/2016	8.106.853,00
8	0029.01.014607-40-2	Dinas PUP ESDM Jampascatambang qq Giarto	06/08/2016	99.428.927,00
9	0029.01.014823-40-6	Dinas PUP ESDM Jampascatambang qq PT. Agung Bara	21/09/2016	23.149.137,00
10	0029.01.014823-40-6	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq PT. Bumi Kalimasada	16/11/2016	6.344.113,00
11	0029.01.014945-40-2	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq CV. Bedjoe Oetomo	20/12/2016	68.572.347,00
12	0029.01.014950-40-7	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq Sumaryanta	22/12/2016	47.684.053,00
13	0029.01.014959-40-1	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq Suwandi	28/12/2016	23.987.720,00
14	0029.01.014981-40-8	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq PT. Jago Jaya Cemerlang	10/01/2017	7.405.000,00
15	0029.01.015044-40-3	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq Nurdiyanto	07/02/2017	51.700.000,00
16	0029.01.015201-40-3	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq H Umar Syamsudin	13/03/2017	87.500.000,00
17	0029.01.015046-40-5	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq Dedek Handoko	13/03/2017	63.300.000,00
18	0029.01.015306-40-7	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq Heri Suwarno (KUBE Sido Maju)	04/04/2017	130.700.000,00
19	0029.01-015332-40-8	Dinas PUP ESDM Jampascatambang qq Petrus Joko Legowo	13/04/2017	33.800.000,00
20	0029.01-015444-40-9	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq PT. Anindya Mitra	30/05/2017	7.500.000,00
21	0029.01-015442-40-7	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq Parno	30/05/2017	4.650.000,00
22	0029.01.015536-40-0	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq PT. Kali Gendol Perkasa	14/07/2017	91.772.860,00
23	0029.01.015557-40-6	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq PT. Harmak Indonesia	24/07/2017	99.553.449,00
24	0029.01.015600-40-3	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq PT. Pasir Alam Sejahtera	24/08/2017	23.384.000,00
25	0029.01.015618-40-6	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq PT. Maju Manunggal Abadi	10/08/2017	102.648.000,00
26	0029.01.015636-40-4	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq PT. Batu Prima Mandiri	16/08/2017	18.900.000,00
27	0029.01.015654-40-2	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq Tuwuh Rusdi Wuryanto	21/08/2017	20.850.000,00
28	0029.01.015705-40-7	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq CV. Trikarya	31/08/2017	35.997.300,00
29	0029.01.015707-40-9	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq Aris Yulianto	04/09/2017	40.700.000,00
30	0029.01.015721-40-3	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq Purwanto	07/09/2017	39.200.000,00
31	0029.01.015741-40-3	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq CV. Selo Mandiri Sejahtera	19/09/2017	36.100.000,00
32	0029.01.015748-40-5	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq PT. Dewata Bumi Nusantara	25/09/2017	75.000.000,00
33	0029.01.015758-40-0	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq CV. Muncul Karya	02/10/2017	13.519.844,18
34	0029.01.015775-40-2	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq Koperasi Petruk	06/10/2017	130.000.000,00

35	0029.01.015793-40-0	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq Muhammad Affan	12/10/2017	19.850.000,00
36	0029.01.015801-40-7	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq Kelompok Penambang Sedyo Rukun	17/10/2017	55.110.000,00
37	0029.01.015804-40-5	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq PT. Tirta Mulya Sarana	20/10/2017	45.000.000,00
38	0029.01.015812-40-8	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq CV. Sahabat Sejahtera Group	25/10/2017	63.850.000,00
39	0029.01.015814-40-0	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq CV. Sari Mulia	25/10/2017	66.250.000,00
40	0029.01.015817-40-8	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq CV. Sarana Jaya Makmur	25/10/2017	65.050.000,00
41	0029.01.015832-40-8	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq PT. Sari Bhumi Khatulistiwa	08/11/2017	12.025.000,00
42	0029.01.015838-40-4	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq CV. Widya Segara Karya	10/11/2017	6.250.000,00
43	0029.01.015844-40-5	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq PT. Caldomill Indonesia	15/11/2017	6.281.000,00
44	0029.01.015862-40-3	Dinas PUP ESDM JamPascatambang qq CV. Central Stone Perkasa	29/11/2017	9.500.000,00
		Jumlah		**1.930.038.950,18**

Bank Pasar Kulon Progo

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Tanggal Buka Rekening	Penempatan
1	9834/VII/D/17/135	DINAS PUP ESDM JAMPASCATAMBANG QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	11 Juli 2017	7.326.000,00
		Total Jumlah Jaminan Pasca Tambang		**1.937.364.950,18**

5.3.2 Kewajiban Rp25.309.823.444,39 Rp12.934.928.325,24

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp25.309.823.444,39 merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp25.309.823.444,39 Rp12.934.928.325,24

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar Rp25.309.823.444,39 merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp7.101.608.457,94, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp4.013.687.296,63, Utang Belanja sebesar Rp1.848.787.496,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp12.345.740.193,82 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp7.101.608.457,94 Rp2.268.645.262,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.092.623.030,94 terdiri dari Utang Jaminan sebesar Rp7.070.962.963,94 dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Biro Umum dan Protokol (KPA Danais Urusan Tata Ruang) tetapi belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp30.645.494,00.

Utang Jaminan sebesar Rp7.070.962.963,94 terdiri dari Jaminan Kesungguhan sebesar Rp448.860.358,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp4.684.737.655,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp1.937.364.950,18.

Jaminan tersebut dalam bentuk dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.

5.3.2.1.2	**Utang Bunga**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.3	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.4	**Pendapatan Diterima Dimuka**	**Rp4.013.687.296,63.**	**Rp3.644.234.323,04**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.013.687.296,63 merupakan penerimaan pembayaran dari pihak lain kepada Pemda DIY terkait dengan pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2017 belum dikonsumsi/dimanfaatkan. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.128
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	92.706.666,67	85.566.666,67
2	Dinas Perhubungan	717.752.790,00	723.043.075,00
3	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	3.187.519.506,63	2.791.791.247,70
4	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	41.666.667,00
5	Dinas Pariwisata	15.708.333,33	2.166.666,67
	Jumlah	**4.013.687.296,63**	**3.644.234.323,04**

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp92.706.666,67 merupakan penerimaan pendapatan atas pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan oleh pihak lain pada BLUD Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) yang sampai dengan per 31 Desember 2017 belum menjadi hak BLUD BLPT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.129
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada BLUD BLPT

No	Pihak Pengguna	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Pengurangan) (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	PT. Naragita Dinamika Komunika	29.166.666,67	(25.000.000,00)	4.166.666,67
2.	Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Teknik Konstruksi Indonesia	30.150.000,00	(20.100.000,00)	10.050.000,00
3.	Ikatan Arsitek Indonesia	26.250.000,00	(15.000.000,00)	11.250.000,00
4.	SMKN 1 Wonorejo	0,00	67.240.000,00	67.240.000,00
	Jumlah	**85.566.666,67**	**7.140.000,00**	**92.706.666,67**

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perhubungan merupakan penerimaan pembayaran sewa lahan parkir Bandara Adi Sucipto dari PT. Angkasa Pura namun sampai dengan per 31 Desember 2017 belum menjadi hak Dinas Perhubungan sebesar Rp717.752.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Periode Sewa	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Pengurangan) (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	01-08-2016 s.d. 31-07-2017	723.043.075,00	(723.043.075,00)	0,00
2.	01-08-2017 s.d. 31-07-2018	1.211.147.640,00	(493.394.850,00)	717.752.790,00

Pendapatan Diterima Dimuka pada DPPKA sebesar Rp3.187.519.506,63 merupakan penerimaan sewa barang milik daerah pada DPPKA dari pihak ketiga namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.130
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka DPPKA

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai
1.	Tanah dan bangunan	PT. Formula Land Jl. Dr. Sutomo No 66 Yogyakarta	01/09/2015 s/d 31/08/2016 01/09/2016 s/d 31/08/2017 01/09/2017 s/d 31/08/2018	52.900.000,00 58.200.000,00 64.000.000,00	1-1-2018 s/d 31-8-2018	42.608.219,18
2.	Tanah dan bangunan	BPD DIY	01/07/2017 s/d 30/06/2022	602.500.000,00	1-1-2018 s/d 30-06-2022	541.754.794,52
3.	Tanah	PT. Amarta Karya Jl. Raya Wates km 15 Sentolo, Kulonprogo T/F 0274-6472044	22/02/2013 s/d 21/02/2014 22/02/2014 s/d 21/02/2015 22/02/2015 s/d 21/02/2016 22/02/2016 s/d 21/02/2017 22/02/2017 s/d 21/02/2018	18.250.000,00 19.618.750,00 21.091.000,00 22.672.000,00 24.373.000,00	1-1-2018 s/d 21-2-2018	3.472.317,81
4.	Tanah dan bangunan	Yayasan Yogyakarta Angga Binangun	23/10/2017 s/d 22/10/2018	50.000.000,00	1-1-2018 s/d 22-10-2018	40.410.958,90
5.	Tanah dan bangunan	Yayasan Wira Husada STIKES	17/09/2017 s/d 16/09/2018	127.000.000,00	1-1-2018 s/d 16-9-2018	90.117.808,22
6.	Tanah dan bangunan	Sdr. Sunarti	06/01/2013 s/d 05/01/2018	70.000.000,00	1-1-2018 s/d 5-1-2018	191.780,82
7.	Tanah dan bangunan	Pemdes Sumbermulyo	01/07/2014 s/d 31/06/2019	6.500.000,00	1-1-2018 s/d 31-6-2019	1.944.657,53
8	Tanah dan bangunan	BUKP Gondokusuman	01/09/2016 s/d 31/08/2019	51.975.000,00	1-1-2018 s/d 31-8-2019	28.859.178,08
9	Tanah	Yayasan Perguruan Dharma Pala Sleman	20/11/2017 s/d 19/11/2021 baru dibayar Rp7.000.000,00	14.000.000,00	1-1-2018 s/d 19-11-2021	6.597.260,27
10	Tanah	Pemkab Bantul	28/03/2017 s/d 27/03/2018	13.000.000,00	1-1-2018 s/d 27-3-2018	3.063.013,70
11	Tanah dan bangunan	dr. Soedarman Jalan Janti 01/03 Gedongkuning, Banguntapan, Bantul	03/09/2013 s/d 02/09/2014 03/09/2014 s/d 02/09/2015 03/09/2015 s/d 02/09/2016 03/09/2016 s/d 02/09/2017 03/09/2017 s/d 02/09/2018	9.000.000,00 9.450.000,00 9.922.500,00 10.418.500,00 10.939.500,00	1-1-2018 s/d 2-9-2018	7.342.952,05

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai
12	Tanah dan bangunan	Drs. Djuwardi KPRI Sumber Rejeki, KP	21/02/2017 s/d 20/02/2019	11.000.000,00	1-1-2018 s/d 20-2-2019	6.268.493,15
13	Tanah dan bangunan	Sri Andayani	01/06/2016 s/d 31/05/2018	24.050.000,00	1-1-2018 s/d 31-5-2018	4.974.726,03
14	Tanah	Tirto Manunggal	01/08/2019 s/d 31/07/2015	Rp8.250.000,00	1-1-2018 s/d 31-7-2019	2.608.356,16
15	Tanah	PT. BUANALAND AGUNG	01/05/2017 s/d 30/04/2018	3.076.075.000,00	1-1-2018 s/d 30-4-2018	1.011.312.328,77
16	Tanah dan bangunan	PT. YIS (PT. Yogya Indah Sejahtera)	01/10/2017 s/d 30/09/2018	1.342.500.000,00	1-1-2018 s/d 30-9-2018	1.004.116.438,36
17	Tanah	CV. Cipta Anugerah Pratama	01/02/2016 s/d 31/01/2018	300.000.000,00	1-1-2018 s/d 31-1-2018	12.739.726,03
18	Tanah dan bangunan	Talenta Body Repair	25/03/2013 s/d 24/03/2014 25/03/2014 s/d 24/03/2015 25/03/2015 s/d 24/03/2016 25/03/2016 s/d 24/03/2017 25/03/2017 s/d 24/03/2018	14.000.000,00 15.050.000,00 16.179.000,00 17.392.000,00 18.697.000,00	1-1-2018 s/d 24-3-2018	4.251.646,58
19	Tanah	Tien Setiantoro Aris Purnomo Sumartiningsih Roos Ani Suka Astuti	01/09/2016 s/d 31/08/2018 01/09/2016 s/d 31/08/2019 01/09/2016 s/d 31/08/2021 01/09/2016 s/d 31/08/2021 01/09/2016 s/d 31/08/2021	8.400.000,00 3.641.000,00 12.210.200,00 9.157.650,00 3.310.000,00	1-1-2018 s/d 31-8-2018 1-1-2018 s/d 31-8-2019 1-1-2018 s/d 31-8-2021 1-1-2018 s/d 31-8-2021 1-1-2018 s/d 31-8-2021	2.796.164,38 2.021.669,41 8.951.916,49 6.713.937,37 1.837.881,28
20	Sebagian Tanah dan Bangunan	Badan Anti Korupsi Sri Wahyu	01/12/2016 s/d 30/11/2018 01/09/2017 s/d 31/08/2018	15.000.000,00 5.000.000,00	1-1-2018 s/d 31-11-2018 1-1-2018 s/d 31-8-2018	6.863.013,70 3.328.767,12
21	Sebagian Tanah dan Bangunan	Ir. Bambang Priambodo	01/01/2017 s/d 31/12/2018	29.000.000,00	1-1-2018 s/d 31-12-2018	14.500.000,00
22	Tanah	YB Pratomo	01/02/2017 s/d 31/01/2022	109.891.800,00	1-1-2018 s/d 31-1-2022	89.780.095,23
23	Tanah dan bangunan	Aswin Kumala Darma Saputra	01/08/2017 s/d 31/07/2019	30.250.000,00	1-1-2018 s/d 31-7-2019	23.909.931,51
24	Tanah dan bangunan	Marmuji	17/06/2013 s/d 16/06/2014 17/06/2014 s/d 16/06/2015 17/06/2015 s/d 16/06/2016 17/06/2016 s/d 16/06/2017 17/06/2017 s/d 16/06/2018	1.500.000,00 1.612.500,00 1.693.000,00 1.778.000,00 1.867.000,00	1-1-2018 s/d 16-6-2018	854.216,44
25	Tanah	Muhyudi Prabowo	01/01/2018 s/d 31/12/2020	3.150.000,00	1-1-2018 s/d 31-12-2020	3.150.000,00
26	Tanah dan bangunan	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)	01/04/2016 s/d 31/03/2021	72.500.000,00	1-1-2018 s/d 31-3-2021	47.075.342,47

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai
27	Tanah dan bangunan	John Neil Mcsweyn	01/02/2016 s/d 31/01/2018	30.000.000,00	1-1-2018 s/d 31-1-2018	1.273.972,60
28	Tanah	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	01/07/2017 s/d 30/06/2018	130.630.000,00	1-1-2018 s/d 30-6-2018	62.794.602,74
			Dibayar s/d Desember 2017	126.630.000,00		
			kekurangan dibayar Tw I	4.000.000,00		
29	Tanah dan bangunan	Lembaga Konsumen Yogyakarta	01/06/2016 s/d 31/05/2018	5.500.000,00	1-1-2018 s/d 31-5-2018	1.137.671,23
30	Tanah dan bangunan	BADKO TKA TPA	10/03/2016 s/d 09/03/2018	10.600.000,00	1-1-2018 s/d 9-3-2018	987.397,26
31	Tanah	Yayasan Amal Insan Mulia	20/04/2017 s/d 19/04/2019	14.000.000,00	1-1-2018 s/d 19-4-2019	9.090.410,96
32	Tanah dan bangunan	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku (LP2Desaku)	01/02/2017 s/d 31/01/2019	15.000.000,00	1-1-2018 s/d 31-1-2019	8.136.986,30
33	Rumah Dinas	Sugiyanta. SIP	01/08/2017 s/d 31/07/2018	2.030.400,00	1-1-2018 s/d 31-7-2018	1.184.400,00
		Bambang Hermanto	01/02/2017 s/d 31/01/2018	4.920.000,00	1-1-2018 s/d 31-1-2018	410.000,00
		Ny. Muchosin/ Ny Jaenab	01/01/2018 s/d 31/05/2018	9.426.000,00	1-1-2018 s/d 31-5-2018	3.142.000,00
		Aida Kusuma Wahyuni	01/01/2017 s/d 30/06/2018	3.429.000,00	1-1-2018 s/d 30-6-2018	1.143.000,00
		Hasan Khoiri Amd	01/03/2017 s/d 28/02/2018	3.103.200,00	1-1-2018 s/d 28-2-2018	517.200,00
34	Bangunan KPPD Kulon Progo					73.284.273,97
					Jumlah	**3.187.519.506,63**

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pariwisata sebesar Rp15.708.333,33 merupakan penerimaan sewa sebagian bangunan pada TIC Jl. Malioboro dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat namun sampai dengan per 31 Desember 2017 belum menjadi hak Dinas Pariwisata DIY dengan rincian sebagai berikut:

Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
01-06-2017 s.d. 31-05-2020	19.500.000,00	01-01-2018 s.d. 31-05-2010	15.708.333,33

5.3.2.1.5 Utang Belanja **Rp1.848.787.496,00** **Rp1.813.805.440,20**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.848.787.496,00 merupakan Beban Pemda DIY atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2017 tetapi belum dibayar oleh Pemda DIY terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp63.915.548,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.709.050.149,00 dan Utang Belanja Lain-lain sebesar Rp75.821.799,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.131
Rincian Utang Belanja per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	95.453.308,00	150.464.402,00
2	Dinas Kesehatan	115.213.453,00	60.278.731,20
3	RS Grhasia	133.429.172,00	76.091.808,00
4	RS Paru Respira	35.748.547,00	29.544.866,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	256.305.938,00	169.173.258,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	8.574.058,00	8.807.799,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.755.002,00	24.330.790,00
8	Dinas Perhubungan	38.851.986,00	39.518.624,00
9	Badan Lingkungan Hidup		2.014.181,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	12.769.729,00	15.907.575,00
11	Dinas Sosial	76.185.998,00	78.514.641,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	53.001.791,00	59.232.869,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9.105.734,00	3.573.092,00
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	3.351.187,00	2.949.149,00
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	19.029.838,00	9.128.185,00
16	Dinas Kebudayaan	78.907.254,00	90.392.211,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.221.548,00	9.300.606,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	3.503.252,00	5.188.938,00
19	Sekretariat Daerah	125.901.009,00	148.959.796,00
20	Sekretariat DPRD	49.629.894,00	61.340.506,00
21	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	202.497.617,00	186.023.228,00
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	41.593.292,00	43.569.943,00
23	Inspektorat	14.003.174,00	14.064.509,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	31.987.623,00	30.583.857,00
25	Badan Penanggungalan Bencana Daerah	41.800.683,00	109.469.835,00
26	Kantor Perwakilan Daerah	18.694.157,00	24.598.013,00
27	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	14.197.849,00	13.408.925,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.784.072,00	11.427.228,00
29	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	87.470.758,00	148.982.597,00
30	Dinas Pertanian	113.410.079,00	67.391.900,00
31	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	24.314.154,00	25.620.668,00
32	Dinas Pariwisata	13.182.344,00	18.103.212,00
33	Dinas Kelautan dan Perikanan	44.730.998,00	49.273.820,00
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.181.998,00	26.575.678,00
	Jumlah	**1.848.787.496,00**	**1.813.805.440,20**

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya **Rp12.345.740.193,82** **Rp5.208.243.300,00**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.345.740.193,82... merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp11.913.010.127,82 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp432.730.066,00. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp11.913.010.127,82 merupakan kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 17/KEP/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Rp)
1.	Kota Yogyakarta	2.104.896.921,53
2.	Kabupaten Bantul	2.699.133.340,86
3.	Kabupaten Kulon Progo	1.535.843.254,93
4.	Kabupaten Gunungkidul	2.019.923.212,47
5.	Kabupaten Sleman	3.553.213.398,03
	Jumlah	**11.913.010.127,82**

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp432.730.066,00 merupakan Utang Pembayaran Klaim Program Jaminan Kesehatan pada Bapel Jamkesos-Dinas Kesehatan kepada RSUP Dr. Sardjito atas pelayanan pasien miskin yang ditanggung oleh Jamkesos.

5.3.2.2	**Kewajiban Jangka Panjang**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.3.2.2.1	**Utang Jangka Panjang**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.3.3.	**Ekuitas**	**Rp7.731.723.566.685,84**	**Rp6.037.884.958.749,13**

Saldo Ekuitas Pemda DIY sebesar Rp7.731.723.566.685,84 merupakan kekayaan bersih Pemda DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemda DIY pada tanggal 31 Desember 2017. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

5.4. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

		2017	2016
5.4.1	**Pendapatan-LO**	**Rp5.948.742.734.314,85**	**Rp3.992.353.232.782,41**

Pendapatan LO Tahun 2017 sebesar sebesar Rp5.948.742.734.314,85 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1.	**Pendapatan Asli Daerah-LO**	**Rp1.906.715.609.784,08**	**Rp1.721.575.285.569,41**

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2017 sebesar Rp1.906.715.609.784,08 meliputi Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1.1.	**Pendapatan Pajak Daerah-LO**	**Rp1.583.831.012.183,00**	**Rp1.432.730.467.313,00**

Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp1.583.831.012.183,00 terdiri dari Pendapatan Pajak yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.132
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	676.147.073.350,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	460.304.603.950,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	239.782.907.643,00
4.	Pajak Air Permukaan - LO	405.193.888,00
5.	Pajak Rokok – LO	207.191.233.352,00
	Jumlah	**1.583.831.012.183,00**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp28.861.540.331,17 Rp30.293.653.109,82

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp28.861.540.331,17 terdiri dari Pendapatan Retribusi yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Retribusi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	3.749.312.800,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	4.044.326.191,53
3.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	0,00
4.	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	6.803.288.400,00
5.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	9.947.754.230,04
6.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	70.817.972,60
7.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	667.255.000,00
8.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	34.913.500,00
9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	242.551.000,00
10.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	2.633.523.837,00
11.	Retribusi Izin Trayek - LO	63.484.600,00
12.	Retribusi Izin Perikanan - LO	0,00
13.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	604.312.800,00
	Jumlah	**28.861.540.331,17**

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -LO Rp130.738.677.869,07 Rp117.289.771.516,93

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO sebesar Rp130.738.677.869,07 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak Pemda DIY sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp130.506.909.746,07 (Metode Ekuitas) yang menambah Investasi Permanen dan yang diterima secara kas sebesar Rp231.768.123,00 (Metode Perolehan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.134
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	PT. Taru Martani (Metode Ekuitas)	1.777.909.098,79
2.	PT. BPD DIY (Metode Ekuitas)	114.665.850.000,00
3.	PT. Anindya Mitra Internasional (Metode Ekuitas)	7.004.498.137,24
4.	PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) (Metode Perolehan)	231.768.123,00
5.	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) (Metode Ekuitas)	7.058.652.510,04
	Jumlah	**130.738.677.869,07**

Penjelasan rincian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. **PT. Taru Martani**

   Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Taru Martani sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar 99,996%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Taru Martani menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2017 PT. Taru Martani mencatat laba sebesar Rp1.777.980.218,00 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,996% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp1.777.909.098,79 (99,996% X Rp1.777.980.218,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp1.777.909.098,79.

2. **PT. BPD DIY**

   Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. BPD DIY sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar 51%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. BPD DIY menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2017 PT. BPD DIY mencatat laba sebesar Rp224.835.000.000,00 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 51% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp114.665.850.000,00 (51% X Rp Rp224.835.000.000,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp114.665.850.000,00.

3. **PT. Anindya Mitra Internasional**

   Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Anindya Mitra Internasional sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar 99,951%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Anindya Mitra Internasional menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2017 PT. Anindya Mitra Internasional mencatat laba sebesar Rp7.007.932.023,93 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,951% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp7.004.498.137,24 (99,951% X Rp7.007.932.023,93). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp7.004.498.137,24 .

4. PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA)

Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp660.000.000,00 dengan prosentase kepemilikan sebesar 0,13%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, nilai kepemilikan kurang dari 20% maka penilaian investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal menggunakan metode harga perolehan, sehingga pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO adalah pada saat direalisasikan atau saat diterima pembayarannya. Pada Tahun 2017, Pemda DIY telah menerima Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sebesar Rp231.768.123,00 atas hak laba PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) Tahun 2016.

5. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

Kepemilikan saham Pemda DIY pada BUKP sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar 83,131%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada BUKP menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2017 BUKP mencatat laba sebesar Rp8.490.999.158,00 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 83,131% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp7.058.652.510,04 (83,131% X Rp8.490.999.158,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp7.058.652.510,04 .

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO — Rp163.284.379.400,84 — Rp141.261.393.629,66

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp163.284.379.400,84 terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO yang telah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.135
Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	768.028.750,00
2.	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	1.200.000,00
3.	Penerimaan Jasa Giro - LO	10.655.890.362,00
4.	Pendapatan Bunga - LO	28.187.386.914,27
5.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO	76.250.000,00
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	279.294.322,10
7.	Pendapatan Denda Pajak-LO	53.160.126.850,00
8.	Pendapatan Denda Retribusi - LO	123.410.800,00
9.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	43.000.000,00
11.	Pendapatan dari Pengembalian -LO	427.488.788,00
12.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO	791.500.000,00
13.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	733.554.808,67
14.	Pendapatan BLUD - LO	43.175.045.585,56
15.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	24.862.202.220,24
	Jumlah	**163.284.379.400,84**

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO **Rp3.218.790.547.392,00** **Rp2.215.906.007.176,00**

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2017 sebesar Rp3.218.790.547.392,00 meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO. Rincian Pendapatan Transfer-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO **Rp2.379.856.461.840,00** **Rp1.697.108.535.480,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2017 sebesar Rp2.379.856.461.840,00 meliputi Dana Bagi Hasil Pajak-LO, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO, Dana Alokasi Umum-LO dan Dana Alokasi Khusus-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	98.447.376.907,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	36.078.889,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.314.372.147.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	967.000.859.044,00
	Jumlah	**2.379.856.461.840,00**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO **Rp 838.270.746.752,00** **Rp518.205.064.166,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2017 sebesar Rp838.270.746.752,00 meliputi:

a. Dana Keistimewaan-LO sebesar Rp784.272.397.752,00
b. Dana Penyesuaian-LO sebesar Rp53.998.349.000,00 berupa Dana Insentif Daerah.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO **Rp663.338.800,00** **Rp592.407.530,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp663.338.800,00 merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta untuk sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 5/PERJ/GUB/IV/2015 atau 16.1/PK/Bt/2015 atau 17.1/PK.KDH/A/2015 atau 39/Perj.YK/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat beserta addendumnya. Rincian Berita Acara Hasil Perhitungan Kontribusi (sharing) Biaya Pengelolaan IPAL Terpusat TA 2017 tanggal 12 September 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.137
Rincian Kontribusi (sharing) Biaya Pengelolaan IPAL Terpusat TA 2017

No	Pemerintah Daerah	Cost Sharing (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Kota Yogyakarta	505.691.000,00	505.691.000,00	100,00
2.	Kabupaten Sleman	87.960.700,00	80.000.000,00	90,95
3.	Kabupaten Bantul	69.687.100,00	69.687.100,00	100,00
	Jumlah	**663.338.700,00**	**655.378.100,00**	**98,80**

Berdasarkan data di atas, Pemerintah Kabupaten Sleman baru merealisasikan sebesar Rp80.000.000,00 atau 90,95% sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp7.960.700,00 dan kekurangan tersebut akan dibayarkan pada Tahun 2018. Dengan demikian, Pemda DIY memiliki Piutang Bantuan Keuangan per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.960.700,00 kepada Pemda Kabupaten Sleman.

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO **Rp823.236.577.138,77** **Rp54.871.940.037,00**

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2017 sebesar sebesar Rp823.236.577.138,77 terdiri dari Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp814.913.561.518,52 dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp8.323.015.620,25.
Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp814.913.561.518,52 terdiri Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp6.341.238.531,00 dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp808.572.322.987,52.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO sebesar Rp Rp6.341.238.531,00 merupakan penerimaan hibah dari multilateral.
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri LO sebesar Rp808.572.322.987,52 terdiri dari:

Tabel 5.138
Rincian Pendapatan Hibah-LO dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hibah dari Dealer Otomotif	4.574.898.000,00
2	Hibah dari Main Dealer	32.100.000,00
3	Hibah dari PT. Jasa Raharja	3.537.000.000,00
4	Hibah dari Komite Sekolah (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)	56.616.573.730,00
5	Hibah dari CSR (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)	255.052.000,00
6	Hibah Block Grant (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)	25.910.823.058,00
7	Hibah Barang Persediaan P3D pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	10.919.198.670,01
8	Hibah Barang pada DPUP dan ESDM	6.019.115.253,00
9	Hibah Barang pada Dinas Perhubungan	6.136.696.030,00
10	Hibah Barang pada Dinas Kesehatan	136.075.904,00
11	Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	672.363.433.129,78
12	Hibah Barang pada Dinas Sosial	4.209.514.816,77

13	Hibah Barang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	37.842.000,00
14	Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.746.605.200,00
15	Hibah Barang pada Dinas Pertanian	5.743.210.900,00
16	Hibah Barang pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	7.985.000,00
17	Hibah Barang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan	888.484.670,98
18	Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan	990.398.320,00
19	Hibah Barang pada DPPKA	8.436.966.305,00
20	Hibah Barang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan	10.350.000,00
	Jumlah	**808.572.322.987,54**

Pendapatan Lainnya sebesar Rp8.323.015.620,25 merupakan penerimaan pelimpahan sisa Dana BOS SMA/SMK pada saat serah terima P3D karena adanya perubahan kewenangan pengelolaan sekolah menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139
Rincian Pendapatan Lainnya dari P3D

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kas (Rp)
1.	Kota Yogyakarta	3.745.941.169,00
2.	Kabupaten Bantul	1.501.556.046,00
3.	Kabupaten Gunungkidul	2.058.775.722,00
4.	Kabupaten Kulon Progo	462.317.817,07
5.	Kabupaten Sleman	554.424.866,18
	Jumlah Penyerahan per 1 Januari 2017	**8.323.015.620,25**
6.	Digunakan oleh sekolah selama Tahun 2017	(5.986.956.292,91)
7.	**Saldo per 31 Desember 2017**	**2.336.059.327,34**

Pendapatan Lainnya tersebut berada pada rekening-rekening sekolah dan pada Tahun 2017 telah digunakan sebesar Rp5.986.956.292,91 sehingga sisa Dana BOS tersebut per 31 Desember 2017 masih sebesar Rp2.336.059.327,34.

5.4.2. Beban Rp4.143.998.795.106,62 Rp3.253.208.651.405,02

Realisasi Beban Pemda DIY Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp44.143.998.795.106,62 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2017, terdiri dari dari Beban Operasi dan Beban Transfer sebesar dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1. Beban Operasi Rp3.411.616.452.374,10 Rp2.549.523.807.096,35

Realisasi Beban Operasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.411.616.452.374,10 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai Rp1.425.905.799.183,00 Rp702.859.635.696,50

Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2017 sebesar Rp1.425.905.799.183,00 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Tahun 2017 sebesar Rp1.425.905.799.183,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.140
Rincian Beban Pegawai per Obyek Beban

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Beban Gaji dan Tunjangan-LO	819.074.663.301,00	440.359.353.525,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	388.304.173.581,00	82.415.244.868,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	9.678.728.750,00	8.307.089.763,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	40.174.399.758,00	36.840.696.642,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	930.546.483,00	634.823.648,50
Uang Lembur	1.141.515.500,00	983.417.750,00
Beban Honorarium PNS	43.234.349.786,00	38.532.784.195,00
Beban Honorarium Non PNS	110.871.088.625,00	84.395.406.096,00
Honorarium Pengelolaan Dana BOS.	8.045.000,00	
Beban Pegawai BLUD	12.079.361.099,00	10.390.819.209,00
Beban Pegawai BOS.	408.927.300,00	
Jumlah	**1.425.905.799.183,00**	**702.859.635.696,50**

Realisasi Beban Pegawai Pemda DIY Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.425.905.799.183,00 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.141
Rincian Beban Pegawai per SKPD

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	795.476.169.650,00	129.799.275.241,00
2	Dinas Kesehatan	19.957.846.772,00	21.638.121.311,00
3	RS Ghrasia	25.157.020.863,00	24.097.524.343,00
4	RS Paru Respira	11.032.275.149,00	10.285.430.017,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	40.068.347.192,00	37.211.677.521,50
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	8.360.739.725,00	6.623.018.033,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.940.340.279,00	10.466.915.267,00
8	Dinas Perhubungan	11.846.368.105,00	14.197.026.258,00
9	Badan Lingkungan Hidup	5.079.948.972,00	5.057.349.181,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	5.787.303.106,00	6.739.238.947,00
11	Dinas Sosial	23.937.769.576,00	25.532.420.636,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.898.529.390,00	20.741.514.536,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.214.598.446,00	3.190.077.415,00
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	2.799.373.552,00	3.139.796.763,00

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.348.617.821,00	1.039.604.341,00
16	Dinas Kebudayaan	19.345.590.279,00	20.667.320.885,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.811.978.039,00	5.518.571.176,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	10.818.555.223,00	12.019.471.106,00
19	DPRD	26.406.022.097,00	22.127.254.027,00
20	Gubernur dan Wakil Gubernur	2.681.403.984,00	2.559.248.806,00
21	Sekretariat Daerah	34.323.945.753,00	34.535.773.105,00
22	Sekretariat DPRD	6.981.858.675,00	6.314.273.474,00
23	DPPKA	84.324.276.930,00	71.381.025.609,00
24	Badan Pendidikan dan Pelatihan	6.244.957.111,00	5.747.017.657,00
25	Inspektorat	8.383.954.012,00	7.134.754.683,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	131.834.833.187,00	89.832.897.906,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.836.585.346,00	5.665.508.353,00
28	Kantor Perwakilan Daerah	1.996.897.122,00	2.105.172.200,00
29	Sekretariat Paramparapraja	856.091.039,00	864.828.259,00
30	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	5.758.098.152,00	5.918.873.742,00
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.313.562.432,00	5.458.875.165,00
32	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	8.226.727.518,00	8.894.920.998,00
33	Dinas Pertanian	24.314.471.573,00	25.452.091.587,00
34	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	26.679.392.160,00	21.926.630.026,00
35	Dinas Pariwisata	4.605.618.939,00	5.871.403.654,00
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.045.826.788,00	10.802.957.108,00
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.209.904.226,00	12.301.776.360,00
	Jumlah	**1.425.905.799.183,00**	**702.859.635.696,50**

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp1.139.284.778.917,35 Rp952.097.607.500,21

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.139.284.778.917,35 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2017 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa .

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 per obyek beban adalah sebagai berikut:

Tabel 5.142
Rincian Beban Barang dan Jasa per Obyek Beban

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Beban Persediaan Bahan Pakai Habis	151.914.208.055,69	216.914.814.749,00
2	Beban Persediaan Bahan/Material	100.930.621.392,35	70.098.453.404,56
3	Beban Jasa Kantor	245.395.595.678,80	179.988.722.364,40
4	Beban Premi Asuransi	1.207.098.128,97	990.811.589,76
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	10.996.152.208,38	9.686.996.782,00
6	Beban Persediaan Cetak dan Penggandaan	30.791.546.047,21	25.063.257.592,00
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/parkir	16.378.131.805,00	14.260.263.367,00
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	8.624.728.170,00	4.378.367.439,00
9	Beban Sewa Alat Berat	418.581.900,00	290.648.380,00
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.664.958.773,00	15.880.864.771,00
11	Beban Makanan dan Minuman	85.316.224.433,00	61.634.944.953,00
12	Beban Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya	1.961.213.650,00	518.021.500,00

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
13	Beban Persediaan Pakaian Kerja	3.484.340.100,00	2.780.269.150,00
14	Beban Persediaan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	3.252.277.596,90	3.186.949.075,00
15	Beban Perjalanan Dinas	98.766.316.817,00	85.193.289.786,00
16	Beban Perjalanan Pindah Tugas	-	3.000.000,00
17	Beban Pemeliharaan	72.928.133.953,04	40.857.112.591,49
18	Beban Jasa Konsultasi	43.856.354.906,00	39.182.453.091,00
19	Beban Persediaan Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	33.997.959.715,00	33.452.042.580,00
20	Beban Persediaan Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	18.500.000,00
21	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	39.290.222.330,00	35.944.075.940,00
22	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	5.470.380.031,00	4.755.247.884,00
23	Beban Honorarium Non Pegawai	710.997.451,00	616.696.500,00
24	Honorarium PNS	125.298.021.000,00	85.724.863.311,00
25	Honorarium Non PNS	4.731.699.775,00	7.355.700,00
26	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23.899.015.000,00	20.669.585.000,00
	Jumlah	**1.139.284.778.917,34**	**952.097.607.500,21**

Realisasi Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.139.284.778.917,34 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.143
Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	260.743.311.891,04	134.145.632.664,00
2	Dinas Kesehatan	76.748.566.189,80	79.332.588.992,40
3	RS Ghrasia	9.905.874.945,00	9.348.919.991,55
4	RS Paru Respira	7.922.894.628,00	6.500.789.092,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	108.083.891.999,86	176.693.629.954,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	21.458.582.566,53	17.011.617.272,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.488.052.804,00	9.885.547.601,00
8	Dinas Perhubungan	87.545.115.872,00	66.472.839.150,00
9	Badan Lingkungan Hidup	10.312.066.454,00	9.084.798.930,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	6.398.390.814,00	11.282.236.472,00
11	Dinas Sosial	30.294.928.509,65	29.660.270.960,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.355.354.552,00	25.027.371.944,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.987.647.156,00	3.112.433.232,00
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	4.176.673.100,00	3.899.310.627,00
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2.182.439.365,00	1.734.210.093,00
16	Dinas Kebudayaan	193.700.453.637,00	133.402.241.152,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.578.850.567,00	3.591.251.493,00
18	Kantor Satpol PP	4.976.730.775,00	3.536.943.887,00
19	Sekretariat Daerah	44.883.101.057,00	33.424.087.564,00
20	Sekretariat DPRD	58.315.437.211,00	49.906.281.088,50
21	DPPKA	22.038.819.292,97	21.104.000.247,76

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	11.593.309.938,00	10.027.041.144,00
23	Inspektorat	3.669.161.994,00	4.015.627.709,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	11.704.694.192,00	9.266.435.762,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.121.363.753,00	10.785.407.582,00
26	Kantor Perwakilan Daerah	2.689.870.133,00	2.741.290.700,00
27	Sekretariat Paramparapraja	254.004.569,00	1.198.961.173,00
28	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	6.285.671.126,50	4.829.795.654,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.489.878.723,00	10.063.101.151,00
30	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	14.619.264.587,00	12.249.808.459,00
31	Dinas Pertanian	13.700.000.423,00	9.255.773.943,00
32	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	9.756.128.434,00	9.598.445.062,00
33	Dinas Pariwisata	19.227.096.911,00	14.326.945.083,00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.446.171.279,00	14.451.160.272,00
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.630.979.468,00	11.130.811.399,00
	Jumlah	**1.139.284.778.917,35**	**952.097.607.500,21**

5.4.2.1.3 Beban Bunga **Rp0,00** **Rp0,00**

Realisasi Beban Bunga Pemda DIY Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.4 Beban Subsidi **Rp0,00** **Rp0,00**

Realisasi Beban Subsidi Pemda DIY Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.5 Beban Hibah **Rp574.360.049.000,00** **Rp720.342.781.296,00**

Realisasi Beban Hibah Pemda DIY Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp574.360.049.000,00 merupakan Beban Hibah berupa uang di PPKD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.144
Rincian Beban Hibah

No	Uraian	Realisasi
		Rp
a.	Hibah Urusan Pendidikan	502.149.825.000,00
b.	Hibah Urusan Kesehatan	1.007.974.000,00
d.	Hibah Urusan Sosial	164.000.000,00
e.	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	1.145.000.000,00
f.	Hibah Urusan Pangan	245.000.000,00
g.	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	5.990.000.000,00
h.	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	10.418.250.000,00
i.	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	240.000.000,00
j.	Hibah Urusan Keistimewaan	53.000.000.000,00
	Jumlah	**574.360.049.000,00**

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial **Rp1.091.000.000,00** **Rp1.919.000.000,00**

Realisasi Beban Bantuan Sosial Pemda DIY Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.091.000.000,00 merupakan Beban Bantuan Sosial untuk Bantuan Kegiatan Kelembagaan dengan rincian sebagai berikut:

a. Bantuan Sosial untuk Pemberian Jaminan Hidup pada Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) dianggarkan sebesar Rp54.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada Victory Plus.

b. Bantuan Sosial untuk Perlindungan Bagi Anak Cacat Berbasis Keluarga dianggarkan sebesar Rp137.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada LPA DIY.

c. Bantuan Sosial untuk Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania.

5.4.2.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi **Rp262.197.581.069,97** **Rp171.406.479.709,90**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp262.197.581.069,97 dengan rincian Beban Penyusutan sebesar Rp262.197.581.069,97 dan Amortisasi Rp0,00. Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.145
Rincian Beban Penyusutan per Obyek Beban

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	121.986.187.345,65	87.902.409.696,09
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	64.006.611.092,32	33.866.527.640,88
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	73.032.450.841,86	45.298.707.652,62
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.309.819.930,14	591.197.730,34
Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	1.547.534.022,86	2.929.275.326,07
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	314.977.837,14	818.361.663,90
Jumlah	**262.197.581.069,97**	**171.406.479.709,90**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp262.197.581.069,97 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.146
Rincian Beban Penyusutan per SKPD

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	58.374.176.279,93	10.391.268.385,14
2	Dinas Kesehatan	4.546.281.585,44	3.095.528.707,74
3	RS Ghrasia	7.240.085.612,42	3.154.647.268,28
4	RS Paru Respira	6.348.226.764,62	4.897.611.858,24
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	76.701.988.560,53	44.449.722.660,08
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	8.048.738.274,64	3.135.748.171,93
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.373.552.408,10	1.927.799.351,02
8	Dinas Perhubungan	14.650.000.495,44	6.717.354.014,03

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
9	Badan Lingkungan Hidup	880.276.373,03	723.959.736,57
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	643.961.889,40	521.539.824,73
11	Dinas Sosial	4.615.101.197,08	3.826.573.443,44
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.435.672.785,75	2.820.366.430,37
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	308.658.317,00	223.575.914,96
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	187.058.651,70	185.148.150,00
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	183.400.622,50	176.422.752,14
16	Dinas Kebudayaan	8.677.122.712,46	8.632.856.105,63
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	355.718.919,38	481.094.670,20
18	Satuan Polisi Pamong Praja	761.554.876,02	515.201.103,37
19	Sekretariat Daerah	5.251.326.390,49	5.083.943.880,58
20	Sekretariat DPRD	10.055.776.712,85	10.576.386.434,00
21	DPPKA	16.932.266.382,04	15.086.264.136,11
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.618.049.192,81	1.498.548.274,05
23	Inspektorat	368.653.472,61	339.309.969,04
24	Badan Kepegawaian Daerah	1.562.397.493,02	1.507.666.750,26
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.067.096.811,32	2.956.779.617,10
26	Kantor Perwakilan Daerah	553.783.867,79	516.522.840,95
27	Sekretariat Paramparapraja	302.635.008,57	248.980.674,76
28	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	735.443.573,53	965.104.594,79
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.230.028.188,64	22.584.230.659,00
30	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	6.937.442.858,05	5.462.639.353,12
31	Dinas Pertanian	3.757.012.759,95	2.743.902.877,60
32	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3.000.974.778,44	1.858.211.307,26
33	Dinas Pariwisata	472.228.056,78	503.207.070,80
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.955.013.017,38	2.372.276.514,50
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.065.876.180,26	1.226.086.208,11
	Jumlah	**262.197.581.069,97**	**171.406.479.709,90**

5.4.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang **Rp629.939.543,08** **Rp837.284.893,74**

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp629.939.543,08 terdiri dari dari Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp8.026.900,50, Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp13.566.440,50 dan Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp608.346.202,08. Beban Penyisihan Piutang berada pada OPD berikut:

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp8.026.900,50 (DPPKA)
2. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp13.566.440,5 pada DPPKA.
3. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp608.346.202,08 pada RS Ghrasia.

5.4.2.1.9 Beban Lain-lain **Rp8.147.304.660,70** **Rp61.018.000,00**

Realisasi Beban Lain-lain Pemda DIY Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.147.304.660,70 terdiri dari Beban Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp490.755.020,70 dan Beban Lain-lain sebesar Rp7.656.549.640,00.

Beban Lain-lain sebesar Rp7.656.549.640,00 terdiri dari Belanja Lain-lain (Tak Terduga) pada PPKD sebesar Rp7.655.049.640,00 dan Belanja Lain-lain pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.500.000,00.

5.4.2.2 Beban Transfer Rp732.382.342.732,52 Rp703.684.844.308,67

Realisasi Beban Transfer Pemda DIY Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp723.382.342.732,52. terdiri dari Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.147
Rincian Beban Transfer

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	653.954.188.490,52	616.960.336.488,67
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	74.634.180.000,00	85.058.283.000,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.433.846.311,00	253.000.000,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.360.127.931,00	1.413.224.820,00
	Jumlah	**732.382.342.732,52**	**703.684.844.308,67**

5.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional -LO Rp1.804.743.939.208,23 Rp739.144.581.377,39

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO sebesar Rp1.804.743.939.208,23 berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp5.948.742.734.314,85 dikurangi dengan Beban sebesar Rp4.143.998.795.106,62.

5.4.4. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional -LO Rp3.466.128.608,14 Rp547.501.279,00

Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp3.466.128.608,14 merupakan Surplus Non Operasional – LO sebesar Rp5.207.546.815,00 dikurangi dengan Defisit Non Operasional sebesar Rp1.741.418.206,86 Surplus Non Operasional berasal dari Surplus penjualan aset non lancar sedangkan Defisit Non Operasional berasal dari kerugian penjualan aset non lancar-LO.

Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp5.207.546.815,00 merupakan Surplus Non Operasional-LO yang berasal dari:

1. Hasil lelang aset pada DPPKA sebesar Rp113.768.000,00,
2. Penjualan minyak kayu putih pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan sebesar Rp5.089.278.815,00,
3. Penjualan alat tepat guna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp4.500.000,00.

Defisit Non Operasional sebesar Rp1.741.418.206,86 berasal dari kerugian:

1. Penjualan Alat Teknologi Tepat Guna (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) sebesar Rp132.264.000,00,
2. Penjualan benih tanaman pangan dan hortikultura sebesar Rp509.403.807,00
3. Penjualan semen beku pada Dinas Pertanian Rp578.292.407,00
4. Penurunan nilai persediaan cadangan beras pada BKPP sebesar Rp25.707.038,00
5. Hasil lelang aset di DPPKA sebesar Rp495.750.954,86.

5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa -LO **Rp1.808.210.067.816,37** **Rp739.692.082.656,39**

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa-LO sebesar Rp1.808.210.067.816,37 berasal dari Surplus/Defisit Kegiatan Operasional –LO sebesar Rp1.804.743.939.208,23 ditambah dengan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional –LO sebesar Rp3.466.128.608,14.

5.4.5.1. Pos Luar Biasa **0,00** **Rp0,00**

Pos Luar Biasa berasal dari Pendapatan Luar Biasa dikurangi dengan Beban Luar Biasa. Pada Tahun 2017 tidak ada transaksi dari Pos Luar Biasa.

5.4.6. Surplus/Defisit - LO **Rp1.808.210.067.816,37** **Rp739.692.082.656,39**

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp1.808.210.067.816,37 merupakan selisih antara seluruh Pendapatan-LO baik Operasional dan Non Operasional sebesar Rp5.953.950.281.129,85 dan Beban baik Operasional maupun Non Operasional sebesar Rp4.145.740.213.313,48.

5.5. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017 dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 Ekuitas Awal **Rp6.037.884.958.749,13** **Rp5.305.749.381.728,12**

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2017 sebesar Rp6.037.884.958.749,13 mengalami kenaikan sebesar Rp732.135.577.021,01 dibandingkan dengan Ekuitas Awal periode sebelumnya yaitu sebesar Rp5.305.749.381.728,12. Rincian Ekuitas Awal sebesar Rp6.037.884.958.749,13 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.148
Rincian Ekuitas Awal

No	Uraian	Ekuitas Awal
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	(184.432.022.514,57)
2	Dinas Kesehatan	(174.680.587.256,86)
3	RS. Ghrasia	10.525.206.324,73
4	RS Paru Respira	18.524.351.071,70
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	1.272.471.754.563,73
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	(9.300.400.857,93)
7	Bappeda	(20.006.522.986,42)
8	Dinas Perhubungan	24.983.478.168,36
9	Badan Lingkungan Hidup	(20.466.337.486,75)
10	BPPM	(38.796.754.073,24)
11	Dinas Sosial	(19.286.994.038,12)
12	Dinas Tenaga Kerja	(75.321.419.777,55)
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	(1.060.214.816,96)
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	(18.569.654.698,00)

No	Uraian	Ekuitas Awal
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	(1.851.699.814,91)
16	Dinas Kebudayaan	(256.311.580.522,97)
17	Badan Kesbanglinmas	(17.786.464.918,74)
18	Satuan Polisi Pamong Praja	(21.806.068.909,27)
19	DPRD	(37.470.791.716,00)
20	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	(5.004.393.792,00)
21	Sekretariat Daerah	(123.895.381.834,36)
22	Sekretariat DPRD	66.087.496.354,93
23	DPPKA	3.319.772.717.569,13
24	Badan Pendidikan dan Pelatihan	3.831.448.955,24
25	Inspektorat	(16.665.895.688,82)
26	Badan Kepegawaian Daerah	(187.715.245.456,79)
27	PPKD	2.434.999.994.146,53
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(11.436.543.504,71)
29	Kantor Perwakilan Daerah	21.040.928.863,42
30	Sekretariat Paramparapraja	(1.892.446.629,76)
31	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	(11.968.315.291,23)
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.009.213.036,00
33	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	23.148.326.897,03
34	Dinas Pertanian	64.689.927.147,14
35	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	10.642.430.371,92
36	Dinas Pariwisata	(31.196.503.660,75)
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	58.569.597.233,97
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(24.489.671.707,99)
	Jumlah	**6.037.884.958.749,13**

5.5.2 Surplus/Defisit Rp1.808.210.067.816,37 Rp739.692.082.656,39

Surplus/Defisit LO Tahun 2017 sebesar Rp1.808.210.067.816,37 merupakan Surplus/Defisit LO Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.149
Rincian Surplus (Defisit) – LO per SKPD

No	Uraian	Pendapatan-LO	Beban	Surplus (Defisit) LO
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3.905.649.584,00	1.114.595.157.820,97	(1.110.689.508.236,97)
2	Dinas Kesehatan	8.469.289.915,00	101.252.694.547,24	(92.783.404.632,24)
3	RS Ghrasia	28.489.977.916,56	42.911.327.622,50	(14.421.349.705,94)
4	RS Paru Respira	7.535.731.692,00	25.303.396.541,62	(17.767.664.849,62)
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	5.662.820.366,53	224.854.227.752,39	(219.191.407.385,86)
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	37.868.060.566,17	(37.868.060.566,17)
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	21.801.945.491,10	(21.801.945.491,10)
8	Dinas Perhubungan	20.669.188.363,81	114.041.484.472,44	(93.372.296.108,63)
9	Badan Lingkungan Hidup	38.725.000,00	16.272.291.799,03	(16.233.566.799,03)
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	-	12.829.655.809,40	(12.829.655.809,40)
11	Dinas Sosial	420.000.000,00	58.847.799.282,73	(58.427.799.282,73)
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.093.290.000,00	42.689.556.727,75	(41.596.266.727,75)
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	10.510.903.919,00	(10.510.903.919,00)
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	-	7.163.105.303,70	(7.163.105.303,70)
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	667.797.400,00	3.714.457.808,50	(3.046.660.408,50)
16	Dinas Kebudayaan	430.051.000,00	221.723.166.628,46	(221.293.115.628,46)
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	8.746.547.525,38	(8.746.547.525,38)
18	Satuan Polisi Pamong Praja	-	16.556.840.874,02	(16.556.840.874,02)
19	DPRD	-	26.406.022.097,00	(26.406.022.097,00)
20	Gubernur dan Wakil Gubernur	-	2.681.403.984,00	(2.681.403.984,00)
21	Sekretariat Daerah	41.500.000,00	84.458.373.200,49	(84.416.873.200,49)
22	Sekretariat DPRD	-	75.353.072.598,85	(75.353.072.598,85)
23	DPPKA	1.815.075.126.323,51	123.812.706.900,87	1.691.262.419.422,64
24	Badan Pendidikan dan Pelatihan	7.147.953.400,00	19.402.566.592,91	(12.254.613.192,91)
25	Inspektorat	-	12.421.769.478,61	(12.421.769.478,61)
26	Badan Kepegawaian Daerah	1.317.885.000,00	145.155.674.520,92	(143.837.789.520,92)
27	PPKD	4.042.027.124.530,77	1.315.979.196.393,22	2.726.047.928.137,55
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	21.025.045.910,32	(21.025.045.910,32)
29	Kantor Perwakilan Daerah	516.155.000,00	5.240.551.122,79	(4.724.396.122,79)
30	Sekretariat Paramparapraja	-	1.412.730.616,57	(1.412.730.616,57)
31	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	12.804.919.890,03	(12.804.919.890,03)
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	21.033.469.343,64	(21.033.469.343,64)
33	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	313.417.167,00	29.783.434.963,05	(29.470.017.796,05)
34	Dinas Pertanian	603.746.977,00	42.859.180.969,95	(42.255.433.992,95)
35	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	7.825.209.316,00	39.436.495.372,44	(31.611.286.056,44)
36	Dinas Pariwisata	116.614.886,67	24.304.943.906,78	(24.188.329.020,11)
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.469.194.500,00	33.447.011.084,38	(31.977.816.584,38)
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	113.832.791,00	27.039.023.874,26	(26.925.191.083,26)
	Jumlah	**5.953.950.281.129,85**	**4.145.740.213.313,48**	**1.808.210.067.816,37**

5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar **Rp(114.473.169.811,11)** **Rp(7.556.505.635,38)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2017 sebesar Rp(114.473.169.811,11) merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.150
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pelimpahan Aset antar SKPD (netto)	(2.492.175.032,76)
3.	Penghapusan Aset	(6.382.980.367,86)
4.	Pengeluaran aset ekstrakomtabel	(2.791.549.331,32)
5.	Koreksi Kesalahan Pencatatan	(19.832.078.770,76)
6.	Koreksi penilaian persediaan (nilai wajar)	63.767.321,49

No	Uraian	Jumlah (Rp)
7.	Pencatatan persediaan dari hasil produksi	3.884.587.194,00
8.	Penyesuaian Aset	2.685.738.852,56
9.	Penyesuaian Penyisihan Piutang	(76.599.766,50)
10.	Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka	(55.485.547.926,85)
11.	Penerimaan Hibah PPKD	(65.941.665.212,54)
12.	Koreksi Penyertaan Modal secara metode ekuitas	105.757.406.091,49
13.	Pendapatan Lainnya-LO	(114.973.235,00)
14.	Penyesuaian penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran	(2.847.404,00)
15.	Pengurangan Piutang TGR karena penyetoran	(108.990.000,00)
16.	Lain-lain	(73.533.552.291,61)
	Jumlah	**(114.371.459.879,66)**

Tabel 5.151
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar per SKPD

No	Uraian	Dampak Perubahan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	738.336.454.940,18
2	Dinas Kesehatan	(2.386.789.353,27)
3	RS. Ghrasia	(3.389.285.312,64)
4	RS Paru Respira	22.798.150,03
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	(11.163.703.673,38)
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	(599.732.199,39)
7	Bappeda	(26.676.562,50)
8	Dinas Perhubungan	(13.770.742.012,05)
9	Badan Lingkungan Hidup	(56.413.360,50)
10	BPPM	15.609.089,29
11	Dinas Sosial	4.135.559.226,27
12	Dinas Tenaga Kerja	(990.366.197,33)
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	(32.003.752,04)
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	(16.426.765,00)
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	62.793.904,44
16	Dinas Kebudayaan	(407.028.038,31)
17	Badan Kesbanglinmas	4.452.488,43
18	Satuan Polisi Pamong Praja	332.522.464,84
19	Sekretariat Daerah	(334.504.741,11)
20	Sekretariat DPRD	(49.670.231,04)
21	DPPKA	(127.513.775.624,95)
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	(2.276.887,48)
23	Inspektorat	-
24	Badan Kepegawaian Daerah	31.988.962,26
25	PPKD	(703.684.261.907,28)
26	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	(292.032.071,14)
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	205.467.551,01
28	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	(427.184.186,17)
29	Dinas Pertanian	6.706.378.278,85
30	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	(941.043.328,60)
31	Dinas Pariwisata	(357.229.310,89)

No	Uraian	Dampak Perubahan
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.948.782.615,48
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	218.845.626,01
34	BPBD	(850.084.466,32)
35	Kantor Perwakilan Daerah	(63.758.099,99)
36	Sekretariat Parampara Praja	(38.125.095,37)
	Jumlah	(114.371.459.879,66)

5.5.4 Ekuitas Akhir Rp7.731.621.856.754,39 Rp6.037.884.958.749,13

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2017 adalah sebesar Rp7.731.621.856.754,39 merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Pemda DIY dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.152
Rincian Ekuitas Akhir per SKPD

No	Uraian	Ekuitas Akhir
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	(556.785.075.811,36)
2	Dinas Kesehatan	(269.850.781.242,37)
3	RS Ghrasia	(7.285.428.693,85)
4	RS Paru Respira	779.484.372,11
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	1.042.116.643.504,49
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	(47.768.193.623,49)
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(41.835.145.040,02)
8	Dinas Perhubungan	(82.159.559.952,32)
9	Badan Lingkungan Hidup	(36.756.317.646,28)
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	(51.610.800.793,35)
11	Dinas Sosial	(73.579.234.094,58)
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(117.908.052.702,63)
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	(11.603.122.488,00)
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	(25.749.186.766,70)
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	(4.835.566.318,97)
16	Dinas Kebudayaan	(478.011.724.189,74)
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(26.528.559.955,69)
18	Satuan Polisi Pamong Praja	(38.030.387.318,45)
19	DPRD	(63.876.813.813,00)
20	Gubernur dan Wakil Gubernur	(7.685.797.776,00)
21	Sekretariat Daerah	(208.646.759.775,96)
22	Sekretariat DPRD	(9.315.246.474,96)
23	DPPKA	4.883.521.361.366,82
24	Badan Pendidikan dan Pelatihan	(8.425.441.125,15)
25	Inspektorat	(29.087.665.167,43)
26	Badan Kepegawaian Daerah	(331.521.046.015,45)
27	PPKD	4.457.363.660.376,80
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(33.311.673.881,35)
29	Kantor Perwakilan Daerah	16.252.774.640,64
30	Sekretariat Paramparapraja	(3.343.302.341,70)
31	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	(25.065.267.252,40)

No	Uraian	Ekuitas Akhir
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	(818.788.756,63)
33	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	(6.748.875.085,19)
34	Dinas Pertanian	29.140.871.433,04
35	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	(21.909.899.013,12)
36	Dinas Pariwisata	(55.742.061.991,75)
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	29.540.563.265,07
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(51.196.017.165,24)
	Jumlah	**7.731.723.566.685,84**

5.6. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah peneriman kas dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Lainnya, Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya dan Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa dikurangi dengan pembayaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Kejadian Luar Biasa dalam Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.1.1 Arus Masuk Kas Rp5.083.722.844.862,27 Rp3.897.417.761.513,51

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.083.722.844.862,27 berasal dari:

Tabel 5.153
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	1.583.875.063.883,00	1.440.571.518.513,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	41.432.293.725,53	36.603.883.321,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	71.411.759.885,57	57.333.770.984,56
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	153.735.904.145,17	137.464.799.902,95
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	98.447.376.907,00	113.024.692.993,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	36.078.889,00	40.735.531,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000,00	940.835.434.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	967.000.859.044,00	643.207.672.956,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	784.272.397.752,00	477.494.515.166,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	53.998.349.000,00	40.710.549.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	655.378.100,00	592.407.530,00
13	Penerimaan Hibah	14.485.236.531,00	9.537.781.616,00
14	Penerimaan Dana Darurat		
15	Penerimaan Lainnya		
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
	Jumlah	**5.083.722.844.862,27**	**3.897.417.761.513,51**

5.6.1.2. Arus Keluar Kas (Rp3.873.896.635.080,08) (Rp3.011.089.253.667,37)

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.873.896.635.080,08 dipergunakan untuk:

Tabel 5.154
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.428.694.957.043,00	707.929.899.606,50
2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.079.167.300.856,38	813.889.811.542,20
3	Pembayaran Bunga	-	-
4	Pembayaran Subsidi	-	-
5	Pembayaran Hibah	624.821.733.116,00	788.071.661.160,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	7.980.082.370,00	2.560.198.500,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	78.428.154.242,00	86.724.507.820,00
8	Pembayaran Tidak Terduga	7.655.049.640,00	61.018.000,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	647.149.357.812,70	611.852.157.038,67
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
11	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
12	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	**3.873.896.635.080,08**	**3.011.089.253.667,37**

5.6.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp1.209.826.209.782,19 Rp886.328.507.846,14

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.209.826.209.782,19 berasal dari:

Tabel 5.155
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	**5.083.722.844.862,27**	**3.897.417.761.513,51**
2	Arus Keluar Kas	(3.873.896.635.080,08)	(3.011.089.253.667,37)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	**1.209.826.209.782,19**	**886.328.507.846,14**

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah penerimaan kas dari Pencairan Dana Cadangan, Penjualan atas Tanah, Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Penjualan atas Gedung dan Bangunan, Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan, Penjualan atas Aset Tetap Lainnya, Penjualan Aset Lainnya, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk Pembentukan Dana Cadangan, perolehan atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen dalam tahun anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.2.1. Arus Masuk Kas Rp3.780.660.435,00 Rp7.972.483.775,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.780.660.435,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.156
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Penjualan Atas Tanah	-	-
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	586.877.676,00	932.020.000,00
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	664.210.000,00	599.650.000,00
4	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	103.818.750,00	33.933.800,00
6	Penjualan atas Aset Lainnya	163.468.000,00	209.620.000,00
7	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
8	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	2.262.286.009,00	6.197.259.975,00
	Jumlah	**3.780.660.435,00**	**7.972.483.775,00**

Penjelasan:

Arus kas masuk dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp586.877.676,00 merupakan penjualan peralatan/perlengkapan kantor yang tidak terpakai sebesar Rp138.000.000,00, penjualan kendaraan dinas roda dua sebesar Rp61.354.690,00 dan penjualan kendaraan dinas roda empat sebesar Rp664.210.000,00. Aset yang dijual tersebut merupakan aset yang akan dihapuskan karena telah usang dan rusak berat.

Arus kas masuk dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp664.210.000,00 merupakan penjualan bahan-bahan bekas bangunan (bongkaran) yang akan dihapuskan.

Arus kas masuk dari Penjualan atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp103.818.750,00 merupakan penjualan hasil pertanian.

Arus kas masuk dari Penjualan atas Aset Lainnya sebesar Rp163.468.000,00 merupakan penjualan hasil perkebunan sebesar Rp1.200.000,00, hasil peternakan sebesar Rp143.768.000,00 dan alat tepat guna sebesar Rp18.500.000,00.

Arus kas masuk dari penerimaan investasi non permanen sebesar Rp2.262.286.009,00 merupakan penerimaan pembayaran dana bergulir dari masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.157
Rincian Penerimaan Kembali Dana Bergulir Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pertanian	
	Dana Bergulir DPM PHP Tahun 2012	1.000.000,00
2	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	
	Dana Bergulir DPM LUEP	184.440.000,00
3.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
	Dana Bergulir Prospek Mandiri Campus Enterpreneur Tahun 2009	3.000.000,00
	Dana Bergulir Program Fasilitas Pengembangan Koperasi 2010	77.313.601,00
	Dana Bergulir Ketahahan Pangan di 14 Kecamatan Tahun 2003	1.200.000,00
	Dana Bergulir Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa 2006)	365.474.403,00
	Dana Bergulir Ketahanan Pangan Tahun 2007	7.000.000,00
	Dana Bergulir Prospek Mandiri Tahun 2007	2.800.000,00
	Dana Bergulir Koperasi Pasca Gempa Tahun 2008	13.265.773,00
	Dana Bergulir Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi Tahun 2011	1.000.000,00
	Dana Bergulir Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) Tahun 2011	4.500.000,00
	Dana Bergulir Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi Tahun 2012	2.625.000,00
	Dana Bergulir Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi Tahun 2013	134.067.000,00
	Dana Bergulir Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi Tahun 2016	1.187.509.232,00
	Dana Bergulir Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi Tahun 2017	277.091.000,00
	Jumlah	**2.262.286.009,00**

5.6.2.2. Arus Keluar Kas (Rp1.061.650.141.538,60) (Rp1.066.873.712.179,35)

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.061.650.141.538,60 dipergunakan untuk:

Tabel 5.158
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2	Perolehan atas Tanah	247.052.455.730,00	313.554.263.231,00
3	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	142.207.808.761,60	109.315.739.432,35
4	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	307.820.582.766,80	163.731.434.542,00
5	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	324.810.707.765,20	246.059.747.569,00
6	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	18.633.561.515,00	2.701.276.405,00
7	Perolehan atas Aset Lainnya	6.205.025.000,00	1.511.251.000,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.220.000.000,00	226.500.000.000,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	4.700.000.000,00	3.500.000.000,00
	Jumlah	**1.061.650.141.538,60**	**1.066.873.712.179,35**

Penjelasan:

Arus kas keluar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp10.220.000.000,00 merupakan penyertaan modal kepada PT. Anindya Mitra Internasional sebesar Rp10.000.000.000,00 dan PT. Askrida sebesar Rp220.000.000,00.

Arus kas keluar Pengeluaran Investasi Non Permanen sebesar Rp4.700.000.000,00 merupakan dana bergulir Program Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 46 Koperasi.

5.6.2.3. Arus Keluar Kas Bersih – Aktivitas Investasi (Rp1.057.869.481.103,60) (Rp1.058.901.228.404,35)

Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.057.869.481.103,60 berasal dari:

Tabel 5.159
Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	3.780.660.435,00	7.972.483.775,00
2	Arus Keluar Kas	(1.061.650.141.538,60)	(1.066.873.712.179,35)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	**(1.057.869.481.103,60)**	**(1.058.901.228.404,35)**

5.6.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas dari Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.3.1. Arus Masuk Masuk Rp0,00 Rp0,00

Arus masuk kas dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp0,00.

5.6.3.2. Arus Keluar Kas (Rp0,00) (Rp0,00)

Arus keluar Kas untuk aktivitas pendanaan/pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0,00.

5.6.3.3. Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan (Rp0,00) (Rp0,00)

Arus Keluar Kas Bersih untuk aktivitas pendanaan/pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0,00 berasal dari:

5.6.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.4.1. Arus Masuk Kas Rp1.302.883.523.975,12 Rp1.003.329.183.691,80

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.302.883.523.975,12. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.160
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	62.039.730.207,00	36.531.984.990,00
2	Pengembalian UP/GU/TU	36.662.101.154,12	28.355.707.234,80
3	Pengesahan SPJ UP/GU/TU	1.203.699.765.704,00	938.272.940.772,00
4	Sisa Uang Persediaan	481.926.910,00	168.550.695,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**1.302.883.523.975,12**	**1.003.329.183.691,80**

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris merupakan arus masuk kas dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga oleh BUD sebesar Rp62.039.730.207,00 dengan rincian Iuran Wajib Pensiun sebesar Rp59.508.362.815,00, PPh 21 sebesar Rp1.367.399.392,00 dan Taperum sebesar Rp1.163.968.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 semua penerimaan tersebut telah disetorkan kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, Arus Masuk Kas juga berasal dari Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp36.662.101.651,12, Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp1.203.699.765.704,00 dan Sisa Uang Persediaan sebesar Rp481.926.410,00.

5.6.4.2. Arus Keluar Kas Rp1.302.883.523.975,12 Rp1.003.329.183.692,00

Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.302.883.523.975,12. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.161
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	62.039.730.207,00	36.531.984.990,00
2	Penerbitan SP2D UP/GU/TU	1.240.843.793.768,12	966.797.198.702,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**1.302.883.523.975,12**	**1.003.329.183.692,00**

5.6.4.3. Arus Kas Bersih Rp0,00 Rp0,00

Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp0,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.162
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Arus Kas Masuk	1.302.883.523.975,12	1.003.329.183.692,00
2	Arus Kas Keluar	(1.302.883.523.975,12)	(1.003.329.183.692,00)
	Jumlah Arus Kas Bersih	-	-

5.6.5 Kenaikan (Penurunan) Kas Rp151.956.728.678,59 (Rp172.572.720.558,21)

Penurunan Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp151.956.728.678,59 berasal dari:

Tabel 5.163
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	1.209.826.209.782,19	886.328.507.846,14
2	Aktivitas Investasi	(1.057.869.481.103,60)	(1.058.901.228.404,35)
3	Aktivitas Pendanaan	-	-
4	Aktivitas Transitoris	-	-
	Jumlah	**151.956.728.678,59**	**(172.572.720.558,21)**

5.6.6 Saldo Akhir Kas Rp346.433.140.959,52 Rp194.378.352.721,59

Sisa Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2017 sebesar Rp346.433.140.959,52 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp194.378.352.721,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.164
Rincian Kas Per 31 Desember 2017

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Rekening Giro BPD DIY	203.315.495.722,53	172.991.324.108,50
6	Deposito Berjangka	110.000.000.000,00	-
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.147.496.065,00	168.550.695,00
8	Kas di Bendahara Penerimaan	369.973.815,00	27.490.664,00
9	Kas di BLUD	23.233.470.535,65	18.922.341.992,09
	Jumlah Sisa Kas (SiLPA)	**344.066.436.138,18**	**192.109.707.459,59**
1	Kas di Bendahara Pengeluaran (Hutang Pajak)	30.645.494,00	2.847.404,00
2	Kas Lainnya	2.336.059.327,34	2.265.797.858,00
	Jumlah Kas (Neraca)	**346.433.140.959,52**	**194.378.352.721,59**

Penjelasan:

Rekening Giro BPD DIY sebesar Rp203.315.495.722,53 merupakan saldo rekening Kas Daerah per 31 Desember 2017.

Deposito Berjangka sebesar Rp110.000.000.000,00 merupakan Kas di Kas Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito on call pada Bank BRI sebesar Rp20.000.000.000,00, Bank BTN sebesar Rp40.000.000.000,00 dan Bank BNI sebesar Rp50.000.000.000,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.147.496.065,00 merupakan sisa uang persediaan pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp481.926.910,00 dan sisa Dana BOS Tahun 2017 pada rekening sekolah SMA/SMK/SLN Negeri sebesar Rp Rp6.665.569.155,00.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah yaitu pada :

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp189.350.722,00
b. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp1.295.718,00
c. Dinas Perhubungan sebesar Rp114.718.000,00.
d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp64.609.375,00.

Kas di BLUD sebesar Rp23.233.470.535,65 merupakan merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Bapel Jamkessos, Balai Pelatihan Kesehatan dan Balai Latihan Pendidikan dan Teknik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.165
Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	2017 (Rp)
1	RS Grhasia	10.886.939.352,71
2	RS Paru Respira	6.126.580.308,00
3	Balai Pelayanan Jamkesos	1.949.148.747,94
4.	Balai Pelatihan Kesehatan	2.284.876.521,00
5.	BLPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.985.925.606,00
	Jumlah	**23.233.470.535,65**

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp30.645.494,00 merupakan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Biro Umum dan Protokol (KPA Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang) namun belum disetorkan ke rekening kas negara karena adanya kendala teknis pemungutan dengan pihak ketiga yaitu PT. PLN.

Kas Lainnya sebesar Rp2.336.059.327,34 merupakan Kas di Rekening SMA yang berasal dari serah terima P3D.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1.1. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan mendasarkan latar belakang sejarah tersebut maka telah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yoyakarta.
Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi.
Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY meliputi:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan; dan
5. Tata ruang.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

6.1.1. Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur

Persyaratan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang antara lain memenuhi syarat:

a. Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
b. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
c. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
d. Bukan sebagai anggota partai politik.

6.1.2. Kelembagaan

Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan.

6.1.3. Kebudayaan

Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

6.1.4. Pertanahan

Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum. Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten meliputi

tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten didaftarkan pada lembaga pertanahan. Pendaftaran hak atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang dilakukan oleh pihak lain wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan tertulis dari Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten.

6.1.5. Tata Ruang

Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY.

Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY.

6.1.6. Pendanaan

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Pemerintahan Daerah DIY. Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.

Dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.

6.1.7. Ketentuan Lain-Lain

Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan/atau Wakil Gubernur selaku Adipati Paku Alam yang bertakhta berdasarkan Undang-Undang ini bertugas:

a. Melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten;
b. Mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan penyesuaian peraturan terkait.
c. Melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
d. Mendaftarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten kepada lembaga pertanahan;
e. Melakukan inventarisasi dan identifikasi seluruh kekayaan Kasultanan dan Kadipaten selain yang merupakan warisan budaya bangsa; dan
f. Merumuskan dan menetapkan tata hubungan antara Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan.

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY.

Selanjutnya ketentuan lebih lanjut atas kewenangan keistimewaan tersebut diatur dalam Perda Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan Dana Keistimewaan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 yang didanai dengan Dana Keistimewaan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

6.2. Informasi Non Keuangan Lainnya

Terdapat aset tetap Tanah dalam proses penyelesaian sengketa sebagai berikut.

No	Luas Tanah	Lokasi	Penjelasan
1	20.317 m^2	Jl. Argolubang 19, Baciro, Yogyakarta	Berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Perkara Nomor: 108/Pdt.G/2016/PN.Yyk.Jo.No.77/ PDT/2017/PT.YYK tanggal 19 Februari 2018 diketahui penyelesaian sengketa dalam proses penyerahan kontra memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2018. Pemda D.I. Yogyakarta sebagai pihak termohon kasasi/terbanding/tergugat.
2	1.004 m^2 296 m^2 279 m^2 2.900 m^2 421 m^2 268 m^2	Tanah eks Bioskop Indra, Jl. Jenderal Achmad Yani No. 13, Yogyakarta	Berdasarkan Surat Nomor W3.TUN.5/32/HK.06/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 perihal Pengiriman Surat Panggilan Perkara Nomor 01/G/2018/PTUN.YK, diketahui penyelesaian sengketa dalam proses sidang perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Penggugat atas nama SK dkk melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional RI sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai Tergugat II. Pemda D.I. Yogyakarta dalam kasus ini sebagai pihak intervensi/saksi.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 merupakan laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan 38 Entitas Akuntansi pada Pengguna Anggaran dan 117 Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran. Laporan Keuangan tersebut disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan dalam hal ini oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2017 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X